**DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**DI TIMUR TENGAH**

**Penulis : Harmiyati**

Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta

Cetakan ke- : 1

Tahun : 2021

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan alasan apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit

**DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR** ii](#_Toc85054075)

[**BAGIAN PERTAMA: TEORI** 4](#_Toc85054076)

[**PENGERTIAN DAN PENTINGNYA TIMUR TENGAH DALAM STUDI HI** 5](#_Toc85054077)

[**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK DI WILAYAH TIMUR TENGAH** 9](#_Toc85054078)

[**RENDAHNYA TINGKAT LEGITIMASI POLITIK DI TIMUR TENGAH** 13](#_Toc85054079)

[**PERANAN ISLAM DALAM POLITIK DOMESTIK DI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH** 21](#_Toc85054080)

[**DINAMIKA KERJASAMA DI TIMUR TENGAH** 25](#_Toc85054081)

[**BAGIAN KEDUA: STUDI KASUS** 34](#_Toc85054082)

[**ALASAN HISTORIS DAN KEAGAMAAN DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL\*** 35](#_Toc85054083)

[**LATAR BELAKANG INVASI ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014** 60](#_Toc85054084)

[**REKONSILIASI INTERNAL PALESTINA: LANDASAN UTAMA NEGOSIASI DAMAI PALESTINA-ISRAEL\*** 70](#_Toc85054085)

[**DIMENSI EKONOMI, TEKNOLOGI, DAN KEAMANAN DALAM INVASI AS KE IRAK\*** 83](#_Toc85054086)

[**KONFLIK INTERNAL SURIAH DAN UPAYA PENYELESAIAN DAMAI** 99](#_Toc85054087)

[**KONFLIK YAMAN DAN KEPENTINGAN GEOPOLITIK ARAB SAUDI\*** 113](#_Toc85054088)

[**LEDAKAN AMONIUM NITRAT: FAKTOR PEMICU URGENSI PERUBAHAN SISTEM POLITIK DI LEBANON\*** 128](#_Toc85054089)

[**DOMINASI IRAN DALAM PERCATURAN POLITIK REGIONAL TIMUR TENGAH ERA PEMERINTAHAN MAHMOUD AHMADINEJAD (2005-2013)** 141](#_Toc85054090)

[**FAKTOR - FAKTOR PENDORONG KEMENANGAN HASSAN ROUHANI DALAM PEMILU IRAN JUNI 2013** 151](#_Toc85054091)

[**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA DOMINASI PARTAI AKP DALAM PEMILU LEGISLATIF TURKI TAHUN 2015** 163](#_Toc85054092)

[**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN DI ERA PRESIDEN HASSAN ROUHANI** 186](#_Toc85054093)

[**DIPLOMASI MESIR MERESPON PEMBANGUNAN *GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM* (GERD) OLEH ETHIOPIA DI SUNGAI NIL TAHUN 2011-2017** 209](#_Toc85054094)

# **KATA PENGANTAR**

Wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang sangat menarik dan menjadi bahasan para ilmuwan, politisi, pebisnis, dan mereka yang tertarik dengan persoalan keagaman. Berbicara tentang Timur Tengah tidak bisa lepas dari isu-isu konflik yang menyertai kehidupan ekonomi-politik-keamanan di wilayah tersebut. Persoalan konflik yang muncul di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan politik, bentuk pemerintahan, orientasi politik luar negeri, perbedaan etnis dan keagamaan, persoalan perbatasan, perbedaan geografis terkait dengan sumber daya alam, sumber air, luas wilayah, kedekatan secara geografis dengan Israel, rendahnya tingkat legitimasi politik, persoalan integrasi nasional, dan tingginya campurtangan asing terutama superpower di wilayah tersebut. Persoalan- persoalan yang sangat kompleks dan *complicated* di wilayah tersebut telah mengakibatkan semakin rumitnya solusi yang diupayakan untuk penyelesaian suatu konflik. Meskipun demikian, daya Tarik Timur Tengah tidak habis-habisnya untuk dibahas.

Selain isu konflik, isu kerjasama juga sama menariknya ketika seseorang membahas Timur Tengah. Ada banyak bentuk-bentuk kerjasama di Timur Tengah, Kerjasama yang menonjol diantaranya adalah kerjasama dalam organisasi Liga Arab, OPEC, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan organisasi Dewan Kerjasama Teluk (GCC, Gulf Cooperation Council). Kerjasama-kerjasama tersebut besar pengaruhnya terhadap persoalan kestabilan ekonomi politik Kawasan, bahkan terhadap kestabilan ekonomi poltik dunia, seperti OPEC dan OKI. Buku ini disusun untuk menjelaskan tentang isu-isu yang mewarnai persoalan politik di Timur Tengah terkait dengan isu konflik dan kerjasama. Penulis sadar bahwa penyusunan buku ini masih belum sempurna sepenuhnya , akan tetapi setidaknya mampu memberi wawasan bagi mereka yang tertarik dengan persoalan Timur Tengah. Untuk itu, ke depan penulis akan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar pengamatan dan anlisa tentang Timur Tengah semakin komprehensif.

Selamat Membaca

Yogyakarta, 11 Oktober 2021 Harmiyati

Pengampu Mata Kuliah

Hubungan Internasional di Timur Tengah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN “Veteran” Yogyakarta

# **BAGIAN PERTAMA: TEORI**

## **PENGERTIAN DAN PENTINGNYA TIMUR TENGAH DALAM STUDI HI**



Wilayah Timur Tengah atau *Middle East* adalahsuatu wilayah yang mula-mula disebut sebagai *Near East*, istilah ini pertama kali muncul di Barat pada abad XV, yang merujuk pada kawasan yang ada diantara benua Eropa dan Timur Jauh (*Far East*). *Middle East* ini jika dilihat dari Inggris untuk membedakan negara-negara jajahan Inggris yang terletak di Timur Jauh (Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura) dengan Timur Dekat (India, Sri Lanka, dan Asia Barat). Istilah *Near East* dipakai untuk kawasan yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman (Turki) pasca tahun 1453. Selama terjadiPerang Dunia II, Inggris secara resmi menggunakan istilah *Middle East* disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Untuk menyebut salah satu organisasi terbesar sekutu yang dikelola Bersama Inggris dan AS yang diberi nama *Middle East Supply Center*, yang berfungsi melayani kebutuhan sekutu di kawasan Arab, Turki, Iran, dan negara-negara sekitarnya.
2. Semua aktivitas militer sekutu di Kawasan itu ada di bawah Lembaga Bernama *The British Middle East Command*.

Setelah Perang Dunia II sejumlah akademisi, peneliti, dan pengamat Barat menggunakan istilah *Middle East* untuk merujuk pada negara-negara di kawasan Arab, Turki, Iran, dan sekitarnya. Meskipun demikian, Batasan definitive tentang Timur Tengah tetap menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Di AS, misalnya, ada Lembaga Bernama *Middle East Institute* yang mengkaji kawasan Arab, Turki, Iran, dan sekitarnya. Tetapi, untuk kawasan yang sama oleh *The National Geographic Society* tetap disebut sebagai *Near East*, sehingga ditempuh semacam jalan kompromi oleh Deplu AS yang menggunakan istilah *Near and Middle East*.

Meskipun hingga kini belum ada kesepakatan di kalangan para ahli politik internasional, diplomat, maupun media massa soal definisi Timur Tengah, namun ada beberapa definisi menurut para ahli Timur Tengah:

1. George Lenczowski, dalam bukunya Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia, mengatakan bahwa “Timur Tengah merupakan wilayah yang terletak pada pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika. Dipandang sebagai bagian Asia, Timur Tengah terletak di dalam zona tengah di sepanjang Eurasia. Di sebelah utara zona tengah terletak Rusia, sedang di sebelah selatan zona tengah terdapat ujung-ujung Semenanjung Asia. Secara tradisional, zona tengah merupakan tanah yang diperebutkan antara kekuatan darat Rusia dan kekuatan laut Inggris.”
2. David E.Long dan Bernard Reich dalam *The Government and Politics of The Middle East and North Africa*, mengatakan bahwa “Wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang terdiri dari Negara-Negara Arab non-Afrika ditambah dengan Iran dan Israel.”

Dengan demikian, Negara-negara Arab di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Marokko, Aljazair, dan Tunisia tidak masuk dalam kategori ini.

1. Roy R. Anderson, Robert F. Seibert, John G. Wagner, dan Robert O. Freddman mengatakan bahwa “Wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara yang tergabung ke dalam Liga Arab ditambah dengan Iran, Israel, dan Turki.”
2. Menurut majalah*The Middle East* (Inggris) dan *The Middle East Journal* (AS) bahwa “Timur Tengah merupakan wilayah yang terdiri dari negara-negara yang tergabung ke dalam Liga Arab, ditambah dengan Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah bekas jajahan Uni Soviet.” Negara-negara Asia Tengah bekas jajahan USSR tsb adalah: Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan.

**Mengapa Timur Tengah penting dipelajari dalam ilmu hubungan internasional?**

Karena wilayah Timur Tengah memiliki sejumlah keistimewaaan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain di dunia:

1. Dari segi letak geografis, wilayah Timur Tengah terletak di zona tengah dari pertemuan Eurasia, yang secara tradisional diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia (terutama oleh kekuatan laut Inggris dan kekuatan darat Rusia).
2. Dari segi kekayaan alam,Timur Tengah merupakan wilayah penghasil cadangan energi primer (minyak) terbesar di dunia (66%).
3. Ciri-ciri utama Timur Tengah:

* Timur Tengah merupakan tempat lahirnya tiga agama dunia, yaitu : Islam, Kristen, dan Yahudi.
* Mayoritas penduduknya berbangsa dan berbahasa Arab, kecuali Turki (berbangsa dan berbahasa Turki), Iran (berbangsa dan berbahasa Persia), dan Israel (berbangsa Yahudi dan berbahasa Ibrani atau Hebrew).
* Mayoritas penduduknya beragama Islam.
* Timur Tengah merupakan pusat kebudayaan dan peradaban kuno, seperti peradaban Mesir, Sumeria dan Mesopotamia (Irak sekarang) yang telah berkembang sejak 3000 tahun SebelumMasehi.
* Ilmu pengetahuan pertama kali ditemukan di Timur Tengah, yakni ilmu matematika (aljabar) dan filsafat, yang berpengaruh bagi terjadinya renaissance di Eropa.

1. **Ciri khas Timur Tengah**: sikap penduduknya yang mengutamakan nasionalisme Ashabiyah, yakni kesetiaan terhadap kerabat, klan, atau keluarga yang lebih besar dibandingkan kesetiaan terhadap negara.

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK DI WILAYAH TIMUR TENGAH**

**Mengapa wilayah Timur Tengah rentan bagi terjadinya konflik ?**

Hal ini karena adanya beberapa alasan mendasar yang memungkinkan terjadinya konflik, yaitu:

1. Faktor iklim dan nutrisi.

Iklim di wilayah Timur Tengah yang panas dan lembab (sub tropis) dapat mengakibatkan tingginya temperamen seseorang, ditambah dengan kegemaran masyarakat Timur Tengah mengkonsumsi daging yang panas, membuat perilaku mereka mudah tersinggung dan akhirnya sering berujung konflik.

1. Adanya batas-batas wilayah yang tidak jelas.

Batas wilayah negara-negara di Timur Tengah pada umumnya ditentukan oleh penguasa colonial di masa lalu, sehingga pasca-kolonialisme sering menimbulkan permasalahan. Juga batas-batas wilayah negara ada yang ditentukan berdasarkan perang, contoh: negara Israel.

1. Adanya perbedaan secara geografis:
2. Adanya perbedaan yang menyolok tentang luas wilayah: ada negara yang wilayahnya luas, tetapi ada pula negara yang wilayahnya sempit, sehingga ada kecenderungan negara yang luas ingin menganeksasi atau menghukum negara kecil, contoh:konflik antara Irak dan Kuwait pada tahun 1990 yang dipicu oleh perselisihan kuota minyak OPEC, konflik antara Arab Saudi dan Qatar yang dipicu oleh ketidaktertundukan Qatar terhadap Saudi.
3. Ada negara yang mempunyai banyak laut, tetapi ada pula negara yang aksesnya menuju ke laut terbatas, contoh: Mesir mempunyai 2 laut (Laut Tengah dan Laut Merah), Arab Saudi memiliki 2 laut (Laut Arab dan Laut Merah), Yordania karena kebaikan Arab Saudi maka mempunyai akses ke laut (Teluk Aqobah), sementara Irak adalah negara yang akses lautnya terbatas.
4. Adanya perbedaan kekayaan alam: ada negara yang memiliki sumberdaya alam berupa mineral (minyak, gas,deposit uranium, besi, fosfat,dll) dan ada yang tidak memiliki sumber tsb. Perbedaan sumberdaya alam ini apabila terdapat di wilayah perbatasan, akan mengakibatkan potensi konflik yang sangat tinggi, contoh : konflik antara Marokko dan Mauritania serta Aljazair atas wilayah Sahara Barat, konflik antara Libya dan Chad atas wilayah Jalur Auzou
5. Ada negara yang memiliki cukup air, dan ada yang tidak, Perbedaan sumberdaya alam berupa airini apalagi terdapat di wilayah perbatasan juga akan mengakibatkan potensi konflik yang sangat tinggi, contoh: konflik antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan dalam memperebutkan debit air sungai Nil, konflik antara warga Palestina di wilayah Tepi Barat dengan warga Israel yang bermukim di wilayah tsb dalam memperebutkan pasokan air sungai Yordan, sengketa antara Turki, Suriah, dan Irak atas alokasi air Sungai Eufrat, sengketa antara Arab Saudi, Oman, dan Abu Dhabi atas oase Buraimi, dst.
6. Ada negara yang berbatasan dengan Israel dan ada negara yang letaknya jauh dari Israel. Intensitas konflik antara negara yg dekat atau berbatasan langsung dengan Israel ini sangat tinggi, mssal: konflik Lebanon (Hizbullah) melawan Israel tahun 2006, konflik Hamas dan Jihad Islam melawan Israel sepanjang masa sejak berdirinya Hamas tahun 1987, konfllik Suriah-Israel,dll. Meskipun demikian, bukan berarti negara yang jauh dari Israel tidak memiliki intensitas konflik yang tinggi, misal perseteruan antara Iran dan Israel sejak pasca-revolusi Khomeini di Iran tahun 1979.
7. Secara demografis, adanya perbedaan jumlah penduduk yang sangat tajam sehingga menimbulkan arus perpindahan penduduk illegal dari negara padat ke negara yang kurang padat, apalagi arus perpindahan itu dipicu oleh adanya konflik internal, misal: konflik Suriah, konflik Afghanistan, konflik Irak, dst.
8. Secara etnis, adanya perbedaan etnis dan keberadaan minoritas etnis di negara-negara Timur Tengah. Mayoritas negara di Timur Tengah beretnis Arab, tetapi ada juga etnis minoritas Kurdi di Turki (terbanyak), di Irak, di Iran, di Suriah, dan di Armenia. Ada juga minoritas etnis Armenia di Cyprus dan Lebanon. Etnis Berber di Afrika Utara (Marokko), Persia di Iran, Yahudi di Israel, etnis Turki di Turki.
9. Adanya perbedaan agama: Islam, Kristen, Yahudi. Perbedaan pemahaman agama/ mahzab sering menjadi pemicu konflik di Kawasan TimurTengah.
10. Adanya perbedaan bentuk pemerintahan: ada negara yang berbentuk monarkhi, Sebagian besar di wilayah Teluk: Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab, Yordania, Marokko. Ada pula negara -negara yang berbentuk republic. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan orientasi politik luar negeri, juga ada kecenderungan negara yang berbentuk republic ini ingin menghancurkan negara yang berbentuk monarkhi karena dianggap tidak sesuai dengan Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme.
11. Adanya legitimasi politik yang rendah di antara negara-negara Timur Tengah, yang berujung pada labilnya politik di negara-negara tersebut, contoh merebaknya revolusi Arab Spring yang dimulai dari Tunisia akhir tahun 2010 dan secara domino berefek ke seluruh Kawasan: ke Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan juga Arab Saudi.
12. Susahnya mewujudkan integritasi nasional dan regional di Kawasan ini. Integrasi nasional di beberapa negara Arab sering susah terwujud karena adanya factor intervensi dari sesame negara Arab atau bahkan intervensi dari luar Kawasan, sebagai contoh: terjadinya kendala2 dalam integrasi nasional di Irak, Lebanon, Palestina, Libya, Suriah, Yaman, dll. Sedang integrasi regional yang berusaha diwujudkan dalam bentuk organisasi Liga Arab telah lama melemah karena factor intervensi dari luar juga.
13. Adanya campurtangan atau intervensi asing yang sangat kuat di Kawasan ini, terutama oleh negara-negara superpower yang memiliki kepentingan geopolitik sangat besar terhadap wilayah tsb.

## **RENDAHNYA TINGKAT LEGITIMASI POLITIK DI TIMUR TENGAH**

**Apa yang dimaksud dengan legitimasi politik ?**

* Legitimasi adalah pengakuan akan hak seseorang untuk berkuasa agar ditaati oleh rakyatnya.
* Untuk memperoleh legitimasi seseorang harus punya otoritas, jalannya bermacam-macam, secara tradisional dengan mengandalkan factor keturunan (raja/emir), atau dengan membangun ikatan primordial, missal: Saddam Hussein (Irak) untuk dapat terus melanggengkan kekuasaannya dia membangun system demokrasi nepotisme, yakni merekrut keluarganya yang berasal dariTakrit (kota di sebelah utara Baghdad dan di tepian Sungai Tigris) untuk menduduki posisi-posisi kunci dalam birokrasi pemerintahaannya, sehingga dia tetap eksis berkuasa beberapa decade. Contoh lain, pemerintah dinasti Al Saud di Arab Saudi secara tradisional meminta dukungan para ulama Wahabbi untuk tetap berkuasa dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, dst. Secara modern, untuk memperoleh legitimasi politik adalah dengan cara membangun system politik dan system hukum yang dapat mendatangkan kepercayaan dari rakyatnya.

**Bagaimana membangun legitimasi politik ?**

Menurut Max Weber dalam bukunya Michael Hudson, *Arab Politics, The Search for Legitimacy*, dikatakan bahwa untuk membangun legitimasi politik dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui tindakan yang positif, seperti pembangunan ekonomi dan social.
2. Melalui tindakan emosional, yakni membangkitkan emosi rakyat, missal: Saddam Hussein dalam situasi krisis mampu membangkitkan emosi rakyatnya dengan cara menciptakan musuh bersama (AS dan Israel, atau Iran), sehingga mayoritas rakyat Irak berdiri di belakang Saddam untuk mendukung keputusan-keputusan politik luar negerinya.
3. Menciptakan tindakan yang rasional, yakni melalui penciptaan system hukum yang dapat mensahkan tindakannya itu.
4. Tradisional, yakni melalui ikatan-ikatan primordial, mengandalkan factor keturunan. Tetapi hanya dengan mengandalkan factor keturunan saja tidak cukup, contoh: Raja Talal dariYordania tidak mampu berkuasa karena dia tidak memiliki kapabilitas, demikian juga Raja Saud dari Arab Saudi.

**Apa fungsi legitimasi ?**

Legitimasi politik berfungsi:

1. Sebagai sarana manajemen konflik
2. Sebagai sarana menciptakan stabilitas politik.
3. Sebagai sarana menjalankan kekuasaan.

**Sumber-sumber legitimasi politik** menurut Michael Hudson adalah:

1. *Personal*, yakni menekankan pada individu pemimpin berupa reputasi dan kepribadiannya. Cara ini dalam masyarakat tradisional dapat menciptakan pemimpin yang kharismatik atau dapat membentuk ikatan-ikatan personal, contoh: Mahmoud Ahmadinejad, mantan presiden Iran, Hassan Nasralah, pemimpin Hizbullah Lebanon, dst.
2. *Ideological*, yakni seperangkat cita-cita dan tujuan yang membantu masyarakat untuk menginterpretasikan hal-hal yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di dunia Arab ideologi Islam sering dieksploitasi untuk melegitimasikan kekuasaan pemimpin atau suatu kelompok, contoh: di Irak Saddam Hussein ditaati oleh rakyatnya karena dia mampu mengeksploitasi ideologiPartai Baath yang mengutamakan sosialisme, pemerataan, dan persamaan (yang identic dengan nilai-nilai keislaman) untuk melegitimasikan kekuasaannya, demikian juga di Libya dan Suriah. Di Aljazair kelompok *Front Islamic du Salut* (Front Penyelamat Islam) berhasil menggunakan ideologi Islam untuk memenangkan pemilu tahun 1990, meskipun hasilnya kemudian dibatalkan oleh pihak militer yang tidak ingin kelompok Islam berkuasa di negara tsb. Demikian juga dengan yang terjadi di Palestina, kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006 yang kemudian pemerintahannya digoyang dan dilemahkan oleh AS dan Israel dengan menggunakan kekuatan kelompok PLO sebagai rival Hamas. Di Mesir, kemenangan kelompok Ikhwanul Muslimin berhasil mengantarkan Muhammad Mursi sebagai presiden, meskipun kemudian pemerintahanannya menemui nasib yang sama seperti Hamas di Palestina, karena dirongrong oleh kelompok oposisi yang didukung oleh AS dan Israel.
3. *Struktural*, yakni legitimasi politik yang diperoleh dari pembangunan system politik yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Sumber ini paling aman dan paling mapan, tetapi sulit untuk dikembangkan di dunia Arab mengingat system politik yang dibangun di kebanyakan negara Timur Tengah bukanlah system yang mengacu pada system murni yang berasal dari Barat.
4. *Tradisional*, yakni mengandalkan pemimpin berdasarkan system dinasti dan primordialisme, masalah akan muncul jika rakyat sudah modern sementara pemimpinnya masih tradisional, sehingga sering menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, dan berujung pada revolusi, misal: Revolusi Arab Spring yang dimulai dari Tunisia dan menjalar secara domino ke seluruh dunia Timur Tengah.

**Tabel 1**

**Perbedaan Cara Memperoleh Legitimasi Politik**

**Di negara-Negara Timur Tengah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Republik | Monarkhi |
| 1. | Cara memperoleh kekuasaan biasanya illegal dengan cara-cara kudeta, pembunuhan. | Cara memperoleh kekuasaan secara patrimonial (keturunan). |
| 2. | Memperkenalkan nilai-nilai baru tentang bentuk pemerintahan dan struktur masyarakat, missal: Nasser mengembangkan ide Pan Arabisme, parlemen, Lembaga pemilu, dst. | Tidak memperkenalkan nilai-nilai baru dan bersifat patriarchal, mengaanggap negara sebagai keluarga dan menempatkan dirinya sebagai ayah, contoh kepemimpinan Raja Hussein dari Yordania. |
| 3. | Mencari legitimasi politik dengan mengembangkan norma-norma sekuler, rasional, dan universal, misal: pengenalan nilai-nilai sekulerisme di Irak, Turki, Mesir. | Dalam mempertahankan legitimasinya mereka membangun ikatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tuan tanah, ulama, dan para pedagang, contoh: di Iran (jaman monarkhi) Shah Reza Pahlevi dalam mempertahankan kekuasaannya membangun ikatan dengan para tuan tanah dan pedagang, Raja Saudi untuk mempertahankan legitimasinya membaangun ikatan dengan para ulama Wahabi. |
| 4. | Menerima partisipasi rakyat | Tidak menerima partisipasi rakyat, apalagi oposisi. Meskipun demikian,dewasa ini sudah ada perubahan di negara-negara monarkhi, seperti adanya Majelis Asyuro (parlemen) di Arab Saudi maupun parlemen di Yordania. Sekalipun demikian, kekuasan mutlak tetap di tangan raja. |

Isu sentral negara-negara Timur Tengah dewasa ini adalah masalah legitimasi politik, stabilitas dan kelestarian pemerintahannya ditentukan oleh legitimasi politiknya. Tingkat legitimasi politik di dunia Timur Tengah masih rapuh atau rendah, sehingga pergantian pemerintahan sering melalui cara-cara kekerasan dan kurang diindahkannya permainan parlementer dan konstitusional. Dengan tingkat legitimasi yang rendah, pembunuhan para pemimpin, kudeta, represi pemerintah terhadap rakyatnya merupakan gejala yang mudah dimengerti dalam konteks Timur Tengah. Beberapa masalah legitimasi politk di Timur Tengah yang membedakan dengan negara-negara di luar kawasan adalah:

1. Legitimasi politik harus diperoleh di luar batas wilayah negaranya, terutama oleh sesama negara Timur Tengah dan negara adikuasa, misal: kasus pelemahaan pemerintahan Hamas di Palestina pasca pemilu tahun 2006, pelemahan pemerintahan Ikhwanul Muslimin di Mesir di bawah Muhammad Mursi pada tahun 2012, kasus dilengserkannya Saddam Hussein di Irak dan Muammar khadafi di Libya, upaya penjatuhan pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah, dst.
2. Islam merupakan sumber legitimasi politik yang utama. Seorang penguasa Arab atau Timur Tengah kalau dia meninggalkan islam sebagai norma negaranya, maka dia akan mudah terguling, misal: Shah Iran mengeluarkan peraturan Wanita diberi kebebasan untuk tidak memaakai kerudung, dalam masalah hak waris bagian Wanita sama dengan laki-laki, sehingga mempercepat kemerosotan pengaruhnya, dan akhirnya terguling oleh Gerakan para kaum Mullah di bawah Imam Khomeini.
3. Setiap negara Arab menjadikan isu Palestina sebagai masalah Bersama bangsa Arab, sehingga jika seorang pemimpin Timur Tengah mencoba meninggalkan masalah Palestina, maka keselamatannya akan terancam, missal: kasus terbunuhnya Anwar Saddat (Presiden Mesir) tahun 1983 karena menandatangani perjanjian damai sepihak dengan Israel (Perjanjian Camp David tahun 1979), dan Raja Abdullah I (Yordania) setelah perang Arab-Israel I tahun 1948 berusaha menganeksasi West Bank, sehingga dia dibunuh oleh gerilyawan Palestina di Jerusalem tahun 1950.

**Mengapa tingkat legitimasi politik di Timur Tengah rendah ?**

Karena kesulitan mewujudkan authority (otoritas), national identity (identitas nasional), dan equality (persamaan). Legitimasi politik merupakan isu sentral di negara-negara Timur Tengah yang ditandai dengan ketidakstabilan politik; kecenderungan politiknya yang tidak mudah diduga, baik oleh para pengamat maupun partisipan; seringnya terjadi tindakan politik yang irasional seperti pembunuhan, kudeta, represi oleh pemerintah terhadap rakyatnya; munculnya kelompok-kelompok revolusioner yang disatukan oleh nilai-nilai yang sama seperti cita-cita mendapatkan kembali wilayah Palestina, menolak pengaruh asing, dan integrasi dunia Arab.

**Mengapa sulit mewujudkan otoritas ?**

Karena biasanya otoritas diperoleh secara illegal ataupun secara tradisional berdasarkan factor keturunan, yang memungkinkan kurang adanya ikatan antara para pemimpin dengan rakyatnya. Dengan kelangkaan otoritas atau wibawa pemerintah, maka sering timbul kekerasaan politik.

**Mengapa sulit mewujudkan identitas nasional di negara-negara Timur Tengah ?**

Karena ikatan antara rakyat dengan komunitas politik nasional masih sering berbenturan dengan kesetiaan subnasional maupun supranasional. Bangsa Arab adalah satu bangsa yang tersebar di 22 negara di Timur Tengah, nasionalisme ashabiyah yang berkembang di negara-negara Arab memungkinkan rakyat di suatu negara Arab untuk lebih mengutamakan kepentingan saudara Arabnya di negara Arab yang lain daripada harus taat terhadap rezim yang berkuasa, contoh: kasus kematian Prseiden Anwar Saddat tahun 1981 di tangan rakyatnya sendiri disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat Mesir terhadap isi Perjanjian Camp David 1979 yang dianggap telah meninggalkan nasib Bangsa Arab Palestina.

Supaya pemimpin mendapat legitimasi, maka seorang pemimpin harus juga mampu menciptakan identitas nasional, seperti bendera, Bahasa, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya.

**Mengapa sulit mewujudkan ekualitas di negara-negara Timur Tengah ?**

Karena ekualitas atau persamaan yang tercermin dalam semboyan“hurriyya, dimuqratiyya, isytirakiyya” atau kemerdekaan, demokrasi, dan sosialisme masih merupakan sekedar impian dan harapan daripada kenyataan. Meskipun demikian, tidak semua negara di Timur Tengah memiliki tingkat legitimasi politik yang rendah, contoh: Iran, tingkat legitimasi politik di Iran relative tinggi karena pemerintahannya mampu mengembangkan system politik modern, sehingga memiliki otoritas politik yang legal, juga mampu menciptakan identitas nasional (Republik Islam Iran), dan ekualitas atau persamaan hak dan kewajiban antara pemimpin dengan rakyatnya.

Dengan adanya legitimasi politik yang rendah, maka akan berakibat sulitnya mewujudkan integrasi nasional. Integrasi adalah proses bersatunya komponen-komponen yang kecil-kecil menjadi komponen yang besar. Menurut Howard Wriggins dalam Yahya A. Muhaimin dan Collins Mac Andrews, (*Masalah-MasalahPembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, 1991), mengintegrasikan berarti membuat utuh atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bagian-bagian yang semula terpisah-pisah. Dengan demikian, integrasi berarti suatu penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari masyarakat yang bersifat majemuk dan menjadi elemen penting dalam proses pembentukan bangsa (*nation building*).

Integrasi meliputi dua hal, yakni integrasi sentripetal dan integrasi sentrifugal. Integrasi sentripetal adalah kesatuan rakyat atau sesama warga masyarakat dalam sebuah negara. Pada negara yang komposisi penduduknya berfragmentasi, integrasi sentripetal sulit terwujud karena rakyat terpisah dalam perbedaan etnis, bahasa, agama, dan ideologi, serta dalam beberapa hal juga geografi, contoh: Irak, Lebanon, Turki, dst. Integrasi sentrifugal adalaah penyatuan antara penguasa dengan rakyatnya, integrasi jenis ini akan sulit diwujudkan jika legitimasi politik penguasa rendah, sehingga tidak ada ketaatan atau pengakuan rakyat terhadap pemimpinnya. Kegagalan mewujudkan integrasi sentrifugal ditaandai dengan ketidakstabilan politik dan seringnya terjadi tindakan politik yang irasional.

## **PERANAN ISLAM DALAM POLITIK DOMESTIK DI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH**

Fungsi Islam dalam politik domestic negara-negara Timur Tengah terdapat dalam bukunya Michael Hudson, *Arab Politics: The Search for Legitimacy*, hal. 52 alinea I yang berbunyi:

“Islam di dunia Arab berbeda dengan agama dalam masyarakat Barat, ia (Islam) mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dengan kewajiban-kewajiban ritualistiknya. Ia adalah bagian penting dari sosialisasi; ia mempengaruhi status personal; ia memainkan suatu peranan politik. Islam juga membantu untuk mengintegrasikan masyarakat Arab melalui penanaman suatu rasa hubungan khusus para muslim dengan Tuhannya (iman) dan dalam persaudaraan serta kewajiban timbal-balik dari para pemeluknya. Karena ia telah menguasai atau membatasi struktur historis-politis di wilayah itu, dan karena doktrin inti dan ajarannya sangat jelas, ia mengadaptasikan dirinya dengan kondisi-kondisi perubahan social; selama kurun satu abad modernisasi dan resolusi, ia tetap memegang kendali atas masyarakat Arab. Maka, ia merupakan kekuatan yang sangat kokoh bagi stabilitas social dan kultural. Semangat jihad adalah komitmen dalam perjuangan untuk menyempurnakan dan mempertahankan wilayah islam. Palestina adalah isu nasional Bersama Bangsa Arab, tetapi karena menyangkut kesucian Jerusalem, maka permasalahannya menjadi meluas menyangkut arti penting keagamaaan pula.”

Dengan demikian, maka fungsi Islam dalam politik domestic negara-negara Timur Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai ideologi negara=cita-cita negara

Setiap negara di Timur Tengah menggunakan Islam sebagai ideologi negara. Dengan demikian, ideologi Islam merupakan salah satu sumber legitimasi politik di negara-negara Timur Tengah. Ideologi ini oleh Prof. Amin Rais dalam bukunya *Timur Tengah*, digambarkan sebagai “pola-pola keyakinan dan konsep-konsep (baik factual maupun normatif) yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena social yang kompleks dengan suatu gambaran untuk mengerahkan dan memudahkan pilihan-pilihan socio-politik yang dijumpai para individu atau kelompok”. Baik di kalangan negara-negara Arab konservatif maupun progresif, ideologi digunakan sebagai semacam “political religion”. Di negara-negara Timur Tengah, menentang ideologi Islam secara terang-terangan akan berarti menentang *undercurrents* (arus yang terpendam) yang ada dalam masyarakat, karena antara Islam dan tradisi, dan juga antara islam dan berbagai pelembagaan social lainnya telah merupakan *linkage* atau pertautan tak terpisahkan sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.

1. Sebagai hukum negara (syari’ah)

Islam merupakan hukum negara menyangkut tentang hak dan kewajiban. Contoh negara-negar Timur Tengah yang menerapkanSyari’ah Islam adalah Arab Saudi dan kerajaan-kerajaan kecil di kawasanTeluk Parsi (Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain), Sudan, Afghanistan di era Taliban, Iran, Pakistan, dll.

1. Sebagai identitas negara

Karena semua negara Arab menggunakan Islam sebagai identitas negara, maka sering timbul krisis identitas.

1. Sebagai pemersatu diantara negara-negara Timur Tengah, terutama dalam menghadapi Israel, sehingga tercetus ide Pan-Arabisme (persatuan dunia Arab) dan Bersatu karena perang Arab-Israel pada tahun 1947-1948, 1963, 1973. Juga ide Pan-Islamisme karena factor pembakaran Masjidil Aqsha oleh kaum Yahudi tahun1969 yang menjadi latarbelakang terbentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI).
2. Islam mampu merubah bentuk negara melalui revolusi, contoh: revolusi Imam Khomeini di Iran pada tahun 1979 mampu merubah bentuk negara kerajan menjadi Republik Islam Iran.
3. Islam sebagai sumber legitimasi politik penguasa.

Islam merupakan sumber bagi para penguasa di TimurTengah untuk memperoleh dukungan rakyat. Sebagai contoh: Saddam Hussein meskipun telah berhasil digulingkan dengan paksa oleh militer AS, tetapi dia dalam setiap kali kessempatan pidatonya di tempat persembunyiannya selalu menekankan kepada ummat Islam, baik Sunni maupun Syiah di seluruh dunia Arab untuk melawan kaum penjajah AS.

1. Sebagai orientasi politik luar negeri.

Negara di Timur Tengah yang konsisten menggunakan Islam sebagai sumber orientasi politik luar negerinya adalah Iran, tetapi dengan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, mulai terlihat bagaimana kelompok ini juga dalam beberapa hal menggunakan Islam sebagai sumber orientasimpolitik luar negerinya, sebagai contoh bagaimana pemimpin Taliban membela muslim India dari penindasan oleh pemerintah pusat India.

1. Islam sebagai salah satu ciri negara-negara Timur Tengah yang tidak dimiliki region lain, missal: mayoritas penduduknya beragama Islam, berbangsa dan berbahasa Arab, dst.
2. Islam sebagai kekuatan politik (terutama pada masa imperialisme) untuk melawan penjajah atau hegemoni asing. Contoh: masuknya berbagai organisasi perlawanan Islam di Afghanistan untuk mengusir tentara Uni Soviet pasca invasi ke Afghanistan tahun 1979 (Afghan al Arab, Afghan al Indonesia, dst). Juga masuknya berbagai organisasi Gerakan perlawanan Islam di Irak pasca invasi AS ke Irak tahun 2003. Negara-negara di Timur Tengah tsb menggunakan hukum jihad dalam mengusir penjajah, sehingga negara Barat selalu mengalami masalah jika menjajah negara yang mayoritas penduduknya Islam.
3. Islam sebagai inspirasi munculnya Gerakan-gerakan Islam politik d Timur Tengah, contoh:

* Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair
* Ichwanul Muslimin di Mesir
* Hizbullah di Lebanon Selatan
* Partai Refah (1994) dan Partai AKP (2000) di Turki
* Hamas dan Jihad Islam di West Bank dan Gaza Strip
* Islamic Tendency Movement (Al Nahda) di Tunisia
* Islamic Action Front (IAF) dan Hizbuth Tahrir di Yordania (1989)
* The Movement of Reform and Renewal in Morocco (Harakat al-Islahwa al-tajdid bel-Maghreb=HATM tahun1992 di Marokko
* Al Qaeda di seluruh wilayah Timur Tengah tahun 2001
* Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Irak dan Suriah tahun 2011
* Taliban di Afghanistan tahun1994
* Al Shabab di Somalia tahun 1991, dst.

## **DINAMIKA KERJASAMA DI TIMUR TENGAH**

1. **LIGA ARAB**

Didirikan di Kairo, Mesir, pada 22 Maret 1945 oleh 6 negara: Mesir, Arab Saudi, Irak, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Organisasi ini didirikan berdasarkan Protokol Alexandria yang bertujuan mengkonsolidasikan ikatan antar Negara Arab, mengkoordinasikan rencana-rencana politik, melindungi kedaulatan negara-negara anggota dari segala ancaman agresi dari luar.Liga Arab dibentuk sebagai media institusional bagi kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, dan cultural. Anggota-anggotanya terdiri dari:

1. Mesir, bergabung pada 22 Maret 1945.
2. Arab Saudi, bergabung pada 22 Maret 1945.
3. Irak, bergabung pada 22 Maret 1945.
4. Yordania, bergabung 22 Maret 1945.
5. Suriah, bergabung 22 Maret 1945.
6. Lebanon, bergabung 22 Maret 1945.
7. Yaman Utara, bergabung 5 Mei 1945.
8. Sudan, bergabung 19 Januari 1956.
9. Libya, bergabung 28 Maret 1956.
10. Marokko, bergabung pada 1 Oktober 1958.
11. Tunisia, bergabung pada 1 Oktober 1958.
12. Kuwait, bergabung pada 20 Juli 1961.
13. Aljazair, bergabung pada 16 Agustuus 1962.
14. Yaman Selatan, bergabung pada 12 Desember 1967.
15. Bahrain, bergabung pada 11 September 1971.
16. Qatar, bergabung pada 11 September 1971.
17. Oman, bergabung pada 29 September 1971.
18. Uni Emirat Arab, bergabung pada 6 Desember 1971.
19. Mauritania, bergabung pada 26 November 1973.
20. Somalia, bergabung pada 14 Februari 1974.
21. PLO, bergabung pada 9 September 1976.
22. Jibouti, bergabung pada 4 September 1977.
23. Commorro, bergabung pada 1993.

Yaman Utara dan Yaman Selatan melebur menjadi Republik Yaman Bersatu pada tahun 1993, sehingga keanggotaan total Liga Arab terdiri dari 22 negara, ditambah dengan 3 negara pemantau:

1. Eritrea, sebagai Negara pemantau sejak Januari 2003.
2. Venezuela, tahun 2006.
3. India, tahun 2007.

Permasalahan yang dihadapi Liga Arab saat ini adalah:

* Pemecahan persoalan konflik Palestina-Israel.
* Pemecahan persoalan krisis internal Lebanon.
* Solusi persoalan perpecahan Liga Arab karena dominannya intervensi AS.

1. **DEWAN KERJASAMA TELUK (GCC=GULF COOPERATION COUNCIL)**

Yakni sebuah organisasi kerjasama yang beranggotakan Negara-negara di sekitar Teluk Persia: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Persetujuan kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November 1981. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah: merumuskan peraturan yang sama di berbagai bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, turisme, legislasi, dan administrasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi GCC adalah konflik antara Qatar vs Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir berupa pemutusan hubungan diplomatic pada tanggal 5 Juni 2017, diikuti oleh Yaman, Libya, dan Maladewa yang melakukan langkah serupa. Dampak yg segera terlihat adalah terjadinya pemulangan warga Qatar dari Negara-negara tsb; pemutusan dan pengalihan jalur transportasi darat, laut, dan udara, terganggunya hubungan dalam kerjasama GCC.

Persoalan GCC bermula dari keinginan Qatar untuk meningkatkan pengaruhnya di luar kawasan regional dan percaturan internasional. Sampai dengan tahun 1973 Qatar sebenarnya merupakan salah satu Negara termiskin di Timur Tengah, Negara ini hanya mengandalkan sector perikanan dan budidaya mutiara. Setelah produksi minyak meningkat pada akhir tahun 1973, Qatar secara dramatis menjadi Negara dengan GDP terkaya di dunia. Dengan jumlah populasi hanya 2,6 juta jiwa (313 ribu penduduknya asli Qatar, sedang 2,3 juta jiwa adalah ekspatriat), GNP perkapita Qatar mencapai 129.000 US$. Jumlah warga Negara asing yang hampir mencapai 8 kali lipat daripada penduduk Qatar disebabkan oleh pembangunan dan ekspansi besar-besaran Qatar di segala bidang: jaminan kesehatan, sistem pendidikan, pembenahan infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi yang merupakan no.1 di Jazirah Arab.

Emir Hadad bin Khalifa At Thani yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1995, dengan cara mengkudeta ayahnya, melakukan liberalisasi di segala bidang. Hal ini ditandai dengan peluncuran satelit Al Jazeera pada tahun 1996, mendorong hak-hak politik perempuan untuk memilih di pemilukada pada tahun 1999, pembentukan konstitusi tertulis I pada tahun 2005 yang memberikan jaminan hak-hak bagi masyarakatnya, jaminan non-diskriminasi atas perbedaan apapun baik jenis kelamin, ras, bahasa, agama, juga pendirian gereja katolik Roma di Qatar tahun 2008, sesuatu yang tidak bisa ditemui di Arab Saudi.

Untuk memperluas pengaruhnya di tingkat regional, Qatar melibatkan diri dalam upaya penggulingan Khadafi di Libya, juga mengirim logistic dan peralatan militer untuk kelompok ISIS di Suriah. Qatar juga membuka pintu lebar-lebar bagi kehadiran pangkalan militer/udara AS di Al Udeid, 32 km dari ibukota Doha. Pangkalan militer ini melayani US Central Command, termasuk semua operasi militer AS di Afghanistan. Dari pangkalan ini pula AS menyimpan kekuatan militer udara yang menjadi komitmennya terhadap keselamatan Arab Saudi.

Paradoks dengan kenyataan di atas, Qatar juga secara ironis mendukung gerakan-gerakan pro-demokrasi dan mengijinkan Taliban Afghanistan mendirikan kantor politik di Doha, juga perwakilan Hamas dan Ikhwanul Muslimin serta Imam Besar Al Azhar, Jusuf Al Qadarawi yang memberontak melawan otoritarianisme para pemimpin Arab. Selain itu, meskipun memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi, Qatar tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Iran, dan belakangan keduanya terlibat dalam kerjasama ladang gas raksasa bersama (di lokasi Saarpras). Kenyataan-kenyataan inilah yang kemudian mendorong kemarahan Arab Saudi dan berhasil memprovokasi Negara-negara anggota GCC lainnya, bahkan Negara-negara di luar organisasi tsb. untuk memusuhi Qatar.

Persoalan organisasi GCC berikutnya adalah mengembalikan perdamaian dalam konflik Yaman yang sudah berlangsung lebih dari 6 tahun sejak invasi Arab Saudi dan sekutunya negara-negara Teluk pada 25 Maret 2015. Invasi koalisi GCC di Yaman dengan dalih atas permintaan resmi Prseiden Yaman, Abdou Rabbo Mansur Hadi, telah mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan di kalangan rakyat sipil Yaman, terutama perempuan dan anak-anak yang telah menjadi korban perang. Sejak invasi GCC ini sedikitnya 60.000 orang tewas dan 85.000 anak-anak meninggal karena kelaparan. Resolusi konflik di Yaman adalah kebutuhan yang harus segera direalisasikan guna memulihkan satbilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan Yaman. Wilayah Yaman yang aman dan stabil akan berpengaruh terhadap kestabilan bukan hanya di Kawasan Teluk, tetapi juga kestabilan Kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

1. **ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)=OIC (*ORGANIZATIONS OF ISLAMIC CONFERENCE*)**

Adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang menghimpun 57 negara di dunia.OKI didirikan di Rabbat, Marokko, pada 25 September 1969. Organisasi ini didirikan saat pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatic Yahudi di Jerusalem.

Permasalahan yang dihadapi OKI adalah:

* Pembangunan terowongan/penggalian oleh Israel di bawah Masjidil Aqsha yang dilakukan sejak tahun 1967, sebagai rangkaian langkah Israel untuk menghancurkan Masjid Al Aqsha.
* Persoalan eskalasi konflik internal Irak.
* Persoalan konflik Palestina-Israel.
* Persoalan kinerja DK PBB terkait persoalan Palestina.
* Aneksasi Masjidil Aqsha oleh tentara Israel

Dalam KTT OKI ke-11 di Dakkar, Senegal, pada 14 Mei 2008 Presiden SBY mengajak seluruh peserta untuk bertindak konkrit dan melakukan langkah terbaik bagi bangsa Palestina. Sedang Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad mempertanyakan kinerja DK PBB dalam memecahkan persoalan konflik Palestina-Israel, invasi AS di Irak dan Afghanistan, blokade Israel di Gaza, serta isu program nuklir Iran. Persoalan yang dihadapi OKI adalah kekurangmampuan dlm ikut mengatasi konflik Palestina-Israel dan konflik Yaman, Suriah, dan Irak. KTT terakhir OKI di Jakarta pd Maret 2016.

1. **OPEC*=ORGANIZATIONS OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES***

Adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak, dan anggotanya saat itu 5 negara, sejak 1965 markasnya pindah ke Wina, Austria.

Anggotanya saat ini terdiri dari 11 negara:

1. Aljazair
2. Arab Saudi
3. Indonesia
4. Iran (pendiri)
5. Irak (pendiri)
6. Kuwait (pendiri)
7. Uni Emirat Arab (pendiri)
8. Venezuela (pendiri)
9. Libya
10. Nigeria
11. Qatar.

Gabon dan Equador pernah menjadi anggota OPEC, tetapi telah keluar, demikian juga dengan Indonesia yang kini telah menjadi *net importer country* serta tidak mampu memenuhi kuota produksinya.

Sejak berdirinya , OPEC telah menyelenggarakan 3 kali KTT, yaitu: KTT I di Aljiers, Aljazair, tahun 1975; KTT II di Caracas, Venezuela, tahun 2000; KTT III di Riyadh, Arab Saudi pada 17-18 November 2007. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi OPEC saat ini adalah melambungnya harga minyak dunia sehingga membuat banyak negara konsumen meminta peningkatan produksi.Tuntutan negara-negara konsumen dinilai oleh para tokoh perminyakan OPEC tidak berimbang karena kenaikan harga minyak bukan karena factor produksi yang sedikit (negara-negara OPEC memproduksi 40% kebutuhan minyak dunia).

Menurut Dr.Abbas Al Majran, Direktur Unit Energi dan Lingkungan Kuwait, ada 4 faktor utama berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia:

1. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang membutuhkan pasokan minyak lebih besar.
2. Adanya inflasi tinggi yang dihadapi perekonomian dunia.
3. Spekulasi di pasaran minyak dunia.
4. Anjloknya harga tukar dolar terhadap mata uang penting dunia, yang mengakibatkan Iran dan Venezuela mengusulkan agar harga minyak OPEC tidak lagi berdasarkan nilai tukar dolar.

Menghadapi tuntutan negara-negara konsumen, negara-negara OPEC terpecah antara mereka yang pro dan kontra. Belakangan, permasalahan yang dihadapi OPEC adalah penurunan produksi minyak, ketidakkompakan anggota OPEC, dan perkiraan permintaan minyak OPEC 96,31 juta barel per hari.

**BUKU ANJURAN**

Beaumont, Peter. 1988. *The Middle East: A Geographical Study*. London: David Fulton Publisher Ltd.

Blake, Gerald H., and John Dewney, et all. 1987. *The Cambridge Atlas of The Middle East and North Africa*. New York: Cambridge Univ. Press

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake. 1985. *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. New York: Oxford Univ. Press

Fraser, T.G.1995. *The Arab-Israeli Conflict*. London: Macmillan Press Ltd.

Harmiyati. 2013. *Konflik Palestina-Israel*. (Buku Teks). Yogyakarta: FISIP UPNVYK.

Heller, Mark A., and Sari Nusseibeh. 1991. *No Trumpets, No Drums*. London: I.B.Taurist and Co.

Hudson, Michael C. 1977. *Arab Politics: The Search for Legitimacy*. USA: Yale University Press

Lenzcowsky, George. 1993. *The Middle East in The World Affairs*. Terjemahan Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Orr, Akiva. 1994. *Israel: Politics, Myths, and Identity Crises*. London: Macmillan Press

Rais, Amien. 1989. *Timur Tengah*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial-UGM

Sihbudi, Riza. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: Eresco

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1995. *Profil Negara-Negara di Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka Jaya

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Mizan

# **BAGIAN KEDUA: STUDI KASUS**

## **ALASAN HISTORIS DAN KEAGAMAAN DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL\*[[1]](#footnote-1)**

**Oleh: Harmiyati**

**Pendahuluan**

Konflik Palestina-Israel, yang direpresentasikan melalui konflik Hamas-Israel yang telah berlangsung selama 11 hari sejak menjelang berakhirnya bulan Ramadhan hingga Jum’at dini hari tanggal 20 Mei 2021 lalu, telah mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat di pihak masyarakat sipil Gaza. Krisis kali ini berawal ketika sejumlah keluarga Palestina diancam akan digusur oleh Pemerintah Israel dari rumah mereka di pemukiman Sheikh Jarrah dan Silwan di Jerusalem Timur, karena pemukiman mereka diklaim sebagai milik Israel. Situasi ketegangan semakin meningkat setelah pasukan keamanan Israel membubarkan jamaah di masjid suci Al Aqsha. Represi yang dilakukan polisi Israel mendapat respon dari kelompok perlawanan Hamas di Jalur Gaza , yang meminta Pemerintah Israel untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina di Jerusalem, roket-roket Hamas pun dilontarkan ke sejumlah kota Israel di Ashkelon. Lod, Haifa, dan Tel Aviv. Aksi saling serang diantara dua kekuatan militer yang tidak seimbang, Hamas dan Israel, tidak terhindarkan dan mengakibatkan terjadinya kerusakan sangat parah di sejumlah fasilitas pemukiman, masjid, fasilitas2 perkantoran, dan fasilitas2 umum Palestina lainnya di Gaza. Sementara sejumlah 243 orang warga Gaza meninggal sebagai korban pertempuran, termasuk 66 anak-anak, 39 perempuan, dan 17 orang lanjut usia, sedang jumlah korban luka dalam agresi Israel di berbagai wilayah Gaza mencapai 1.910 orang, sebanyak 107.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat agresi Israel (<https://parstoday.com/id/news/middle_east-i97606-lebih_dari_60_anak_palestina_gugur_dalam_agresi_israel>, diakses 21-5-2021).

Menarik dalam kasus konflik kali ini, senjata canggih anti-rudal *iron dome* (kubah besi) Israel gagal dalam menangkis roket-roket Hamas, sehingga mengakibatkan banyak rumah dan gedung-gedung di Israel mengalami kerusakan, sebanyak 12 orang meninggal, dan sedikitnya 600 orang Israel terluka akibat serangan rudal-rudal Hamas (<https://republika.co.id/berita/qtfn23440/usai-gencatan-senjata-as-iron-dome-israel-diperkuat-lagi>, diakses 21-5-2021). Kenyataan itulah yang menjadi salah satu factor mengapa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta gencatan senjata dengan dimediasi oleh Mesir. Meskipun telah tercapai peredaan ketegangan, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa Israel tidak akan melakukan provokasi yang memicu konflik, sebagaimana biasa dilakukannya dalam konflik-konflik sebelumnya. Meskipun sudah dilakukan upaya damai sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993, tetapi perdamaian antara Israel dan Palestina ini sulit terwujud disebabkan oleh berbagai faktor yang *complicated* seperti kesejarahan, perebutan wilayah, dan kepentingan geopolitik baik oleh Israel maupun negara-negara besar pendukungnya, terutama Inggris dan Amerika Serikat.

**Klaim Wilayah Berdasarkan Pertimbangan Historis**

Perselisihan antara bangsa Arab Palestina dengan bangsa Yahudi Israel sebenarnya dipicu oleh adanya perebutan tanah atau wilayah yang sama, yakni wilayah Palestina, oleh dua bangsa yang merasa saling memiliki wilayah tersebut. Pihak Yahudi berargumen bahwa wilayah Palestina memiliki keterkaitan sejarah dan keagamaan mereka, sedang pihak Arab Palestina mendasarkan pada fakta bahwa mereka telah bermukim di wilayah itu sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun sebenarnya tuntutan atas suatu wilayah oleh suatu bangsa yang telah berabad-abad meninggalkan wilayah yang pernah dihuni tidak dibenarkan oleh hukum internasional, tetapi alasan bangsa Yahudi tersebut justru terbukti efektif dan mampu memperkuat klaimnya atas wilayah Palestina hingga sekarang.

Klaim Bangsa Yahudi atas wilayah Palestina didasarkan oleh kenyataan sejarah bahwa bangsa tersebut pernah menjadi penduduk Kanaan (Palestina sekarang) antara tahun 1900-1700 Sebelum Masehi. Disebut Kanaan karena pada waktu itu suku Kanaan merupakan suku yang paling dominan, mereka berasal dari Pulau Kreta di Kawasan Laut Tengah. Dominasi mereka secara berangsur-angsur semakin berkurang dengan kedatangan imigran Semit dari wilayah Mesopotamia (Irak sekarang). Suku bangsa Semit ini merupakan keturunan Sam bin Nuh As.yang merupakan “bapak” bangsa Arab. Di Kanaan, para imigran Semit ini dikenal sebagai kelompok Ibri, yang artinya “dari seberang”, karena mereka datang dengan menyeberangi Sungai Eufrat dan Sungai Tigris (Burhan Daya, 1982:12). Istilah Palestina sendiri merujuk pada nama suku Filistin, yakni salah satu suku yang menginvasi Kanaan setelah kedatangan imigran Semit. Suku-suku lain yang turut menginvasi Kanaan adalah suku Edom, Moab, dan Amon. Suku Filistin menduduki wilayah pantai barat daya Kanaan, yang kini dikenal sebagai Jalur Gaza, sedang suku Edom menguasai wilayah paling selatan Kanaan, berbatasan dengan wilayah Yordania dan Gurun Negev. Wilayah timur Laut Mati, yang kini menjadi wilayah Yordania dikuasai oleh suku Moab, sementara suku Ammon menguasai wilayah sekitar Amman, Yordania.

Suku Filistin, karena menguasai wilayah pantai, maka para penguasa Yunani (penjajah asing pada waktu itu) menyebut seluruh wilayah suku tersebut sebagai Palaistina, sebuah lafal Yunani dari Bahasa Ibrani “Pleshet”, yang artinya “Tanah suku Filistin”. Sebutan ini dipakai juga oleh penguasa Romawi (penguasa berikutnya), dan bahkan dihidupkan kembali sesudah Perang Dunia I guna menyebut wilayah bekas Kanaan, tetapi yang dimaksud dengan Palestina sekarang adalah seluruh wilayah Tepi Barat Sungai Yordan (West Bank) termasuk Jerusalem Timur dan Jalur Gaza yang dianeksasi oleh Israel pasca-Perang Arab-Israel tahun 1967.

Keterikatan historis bangsa Yahudi dengan wilayah Palestina adalah sesuai dengan cerita yang dikisahkan dalam kitab mereka, bahwa Tuhan memerintahkan Ibrahim dan para pengikutnya meninggalkan Mesopotamia (kota Haran, tempat persinggahan Ibrahim) menuju Kanaan sebagai tanah terjanji (*The Promised Land*) dalam usaha menghindari kejaran Raja Namrud yang menolak seruan Ibrahim agar menyembahTuhan. Ibrahim sendiri sebenarnya berasal dari kota Ur di wilayah Babylonia, sebuah negeri yang terletak di selatan Mesopotamia. Kepergian Ibrahim menuju tanah terjanji tersebut terjadi pada tahun 1943 Sebelum Masehi, dan sejak saat itulah dimulai sejarah Palestina dalam kaitannya dengan bangsa Yahudi.

Istilah yang sering dipakai untuk menamai ummat Yahudi itu sendiri ada bermacam-macam. Istilah “Yahudi” berasal dari kata “hada” dalam Bahasa Ibrani, yang artinya “tobat” atau “kembali”. Istilah “Ibrani” berasal dari kata “abar”, yang artinya “menyeberang”, karena mereka datang dengan menyeberangi dua sungai. Ibrahim, oleh orang-orang Kanaan disebut sebagai “Ibri” atau “Hebrew”, orang yang datang dari seberang, sedang famili atau keluarganya dinamakan “Ibris” atau “Hebrews”. Sedang panggilan “Israel” adalah untuk menyebut Ya’qub, nenek moyang mereka yang juga memiliki nama Israel, sehingga kaum Yahudi ini juga sering disebut “bani Israel”, yang artinya anak-cucu Israel atau Ya’qub.(*Ibid*, hal.2) Riwayat pengembaraan Ibrahim dapat dilihat pada peta berikut:

**Peta 1**

**Risalah Pengembaraan Ibrahim di Palestina**

*Sumber*: https://www.republika.co.id/berita/of11hn313/risalah-nabi-ibrahim-di-tanah-palestina, diunduh 21-5-2021

Kisah panjang pengembaraan bangsa Yahudi di Palestina mencapai puncaknya di bawah pimpinan Daud yang berhasil membuat kerajaan Israel menjadi besar dan kuat, serta mencapai kejayaannya selama 200 tahun. Sulaiman, putra Daud, juga berhasil membuat kuil I Yahudi di Jerusalem pada abad X Sebelum Masehi. Kerajaan Israel yang didirikan oleh Saul, putra Kish, dari suku keturunan Benyamin (saudara Yusuf) ini hanya berjaya di masa Daud, sepeninggal Daud dan Sulaiman kerajaan ini terpecah menjadi dua, yakni kerajaan Israel (Samaria) dan kerajaan Yehuda (Judea). Kerajaan Israel terletak di sebelah utara kota Jerusalem, sedang kerajaan Yehuda di wilayah selatan Jerusalem. Antara kedua kerajaan tersebut terjadi perselisihan terus-menerus yang berlangsung sangat lama, sehingga memaksa kekuatan asing untuk campurtangan dalam persoalan tersebut. Sejak saat itu, dimulailah era penjajahan oleh negara-negara asing terhadap kerajaan Israel.

Pada tahun 721 SM, Assyria yang terletak di sebelah utara Mesopotamia menaklukkan dan merusak Kerajaan Israel. Nasib yang sama juga dialami oleh Yudea pada tahun 586 SM, ketika Babylonia menghancurkan kuil pertama Yahudi dan mendeportasi penduduknya ke Babylonia. Beberapa dekade kemudian, Kerajaan Persia berhasil mengalahkan Babylonia dan memperbolehkan sekitar 40.000 orang Yudea kembali ke kampung halamannya, sehingga mereka berhasil membangun kembali kuil kedua. Dalam beberapa abad berikutnya, Palestina secara berturut-turut diperintah oleh Persia, Macedonia, Ptolemia, Seleucid, dan akhirnya oleh kerajaan Romawi pada tahun 63 SM. Dalam masa pemerintahan Romawi ini sempat terjadi tiga kali pemberontakan Yahudi, yakni tahun 64-135 Masehi, sehingga memaksa pemerintah Romawi menghancurkan kuil mereka serta membunuh, memperbudak, serta mengusir kaum Yahudi dari negerinya. Sejak itulah dimulai periode terdiaspora kaum Yahudi ke negara-negara di benua Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika.

Ketika kekaisaran Romawi pecah pada tahun 395 Masehi, Palestina menjadi bagian dari kerajaan Bysantium. Pada waktu itu, penduduknya yang sebagian besar keturunan penduduk asli Kanaan memeluk agama Kristen. Pada tahun 634 M datang orang-orang Arab dari Semenanjung Arabia yang membawa keyakinan Islam, mereka kemudian membangun Masjid *Dome of the Rock* di Jerusalem Timur pada tahun 691 M. Masjid ini diyakini sebagai tempat peristiwa “Mi’raj” Nabi Muhammad, yakni peristiwa naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsha menuju “Shidratul Muntaha” (langit ke tujuh) untuk menerima perintah sholat lima waktu bagi ummat Islam, sehingga sampai sekarang kota Jerusalem menjadi salah satu kota suci ummat Islam selain kota Mekkah dan Madinah. Kedatangan orang-orang Arab ini membawa konsekuens iArabisasi Palestina, yakni suatu proses asimilasi antara pendatang dan penduduk asli, sehingga penduduk Palestina lama-kelamaan menjadi berbangsa dan berbahasa Arab serta beragama Islam. Identitas penduduk Palestina sebagai orang Arab dan Islam ini berlangsung sampai pertengahan abad XX. Namun demikian, kekuasaan Arab ini hanya berlangsung sampai tahun 1071 M, ketika bangsa Seljuk Turki mengambil alih kekuasaan di kawasan tsb.

Dalam abad-abad berikutnya, setelah terjadi Perang Salib abad XI\_XIII, Palestina kemudian diperintah oleh bangsa Tartar, Mongol, Mamluk Mesir, dan sejak tahun 1517 sampai dengan Perang Dunia I diperintah oleh kekaisaran Ottoman, Turki. Meskipun demikian, siapapun yang memerintah Palestina, penduduknya sebagian besar tetap orang Arab dan Muslim, bahkan sejak abad XIII penguasa Palestina selalu orang Muslim hingga tumbuhnya nasionalisme bangsa Arab pada akhir abad XIX dan awal abad XX.

**Klaim Wilayah Berdasarkan Pertimbangan Keagamaan**

Meskipun bangsa Yahudi mengalami kondisi terdiaspora (keterpencar-pencaran) sebagai akibat penjajahan dan pengusiran oleh bangsa asing, namun semangat mereka untuk kembali ke Palestina tidak pernah surut. Hal ini karena didorong oleh keyakinan relijius bahwa Kanaan atau Palestina adalah “negeri yang dijanjikan Tuhan” (*The Promised Land*) untuk mereka. Oleh karena itu, kondisi-kondisi penderitaan seperti pengembaraan, bencana kelaparan, perbudakan, dan penjajahan mereka yakini sebagai sebuah periode yang harus dilalui untuk dapat kembali ke negeri tersebut. Kerinduan relijius mereka disimbolkan melalui ibadah-ibadah ritual di sinagoge dan Tembok Barat (*The Western Wall*), yakni pecahan kuil tempat ibadah Yahudi di Jerusalem, yang oleh penguasa Romawi tidak ikut dihancurkan dan dibiarkan sebagai saksi bisu atas apa yang pernah terjadi waktu itu. Perjuangan untuk kembali ke Palestina pun diperlihatkan oelh aktivitas para Rabbi Yahudi yang berziarah dan belajar di kota suci Jerusalem, Safed, Tiberias, dan Hebron. Mengalirnya orang-orang Yahudi tersebut, terutama sebelum munculnya gagasan zionisme, semata-mata didorong oleh semangat keagamaan.

Bagi kaum Yahudi, terutama kota Jerusalem di wilayah Tepi Barat, memiliki kisah sejarah yang amat dalam. Kota yang mula-mula bernama “Urusalim” ini direbut oleh Raja Daud dari tangan Filistin pada tahun1000 SM (*Kompas*, 12-9-2000, hal.3). Oleh Daud, nama kota ini kemudian diubah menjadi Jerusalem, yang artinya”kota perdamaian”, karena dari kota itu dulu memang dikenal kisah-kisah tentang perdamaian, persaudaraan, dan cinta-kasih. Hal ini misalnya kisah cerita tentang “Dari Jericho ke Jerusalem”, yang mengisahkan tentang seorang Smaria yang penuh persaudaraan menolong seorang Yehuda (Judea) yang terluka parah karena dianiaya oleh perampok dalam perjalanannya dari Jericho ke Jerusalem, padahal selama beratus-ratus tahun antara orang Samaria dan Judea ini bermusuhan. Kisah tentang perdamaian dan persaudaraan di Jerusalem di era modern ini menjadi ironis, karena di kota inilah justru krisis politik antara bangsa Arab dan Israel itu berawal.

Kota Jerusalem memiliki makna keagamaan yang mendalam bukan hanya bagi ummat Yahudi, tetapi juga ummat Islam dan Kristen. Khususnya di kompleks Kota Lama *(Old City*) di Jerusalem Timur yang luasnya hanya sekitar satu kilometer persegi itulah peninggalan sejarah tiga agama itu berada. Di sebelah barat kompleks Kota Lama terdapat Tembok Ratapan, yang merupakan tempat ibadah ummat Yahudi. Di sebelah timur Tembok Ratapan, dan hanya dipisahkan oleh tembok, terdapat Masjid Al Aqsha. Di dalam kompleks Kota lama juga terdapat Gereja Al Qiyamah (Gereja Makam Kudus) yang diyakini sebagai tempat turunnya Roh Kudus yang menandai kelahiran Gereja, sehingga diperingati sebagai Hari Pantekosta sampai saat ini. Bagi orang Kristen, kota Jerusalem adalah tempat Yesus (Nabi Isa) menderita, wafat, dan bangkit dalam kemuliaan. Di kota itu pula Nabi Isa diyakini akan datang kembali untuk menegakkan pengadilan terakhir sebelum datangnya hari kiamat. Dalam peribadatan Yahudi, yakni Pesach (Paskah Yahudi) dan Yom Kippur (Hari Pertobatan), Jerusalem nampaknya merupakan “tujuan akhir”, hal ini terlihat dari akhir kedua ibadat itu yang selalu diserukan doa “Tahun Depan di Jerusalem”, maksudnya ibadat Pesach dan Yom Kippur hanya akan terasa bila diadakan di Jerusalem, bila hal itu belum terlaksana, maka Jerusalem tidak boleh dilupakan. Melupakan Jerusalem adalah sebuah bencana bagi mereka, seperti yang dijelaskan dalam kitab mereka, “jika aku (sampai) melupakan engkau, hai Jerusalem, biarlah tangan kananku menjadi kering !” (*Kompas*, 24-7-2000, hal.3). Oleh karena itu, dalam kitab suci Yahudi, nama Jerusalem disebut 667 kali. Di bawah ini memperlihatkan situs tiga agama samawi di Jerusalem Timur:

**Gambar 1**

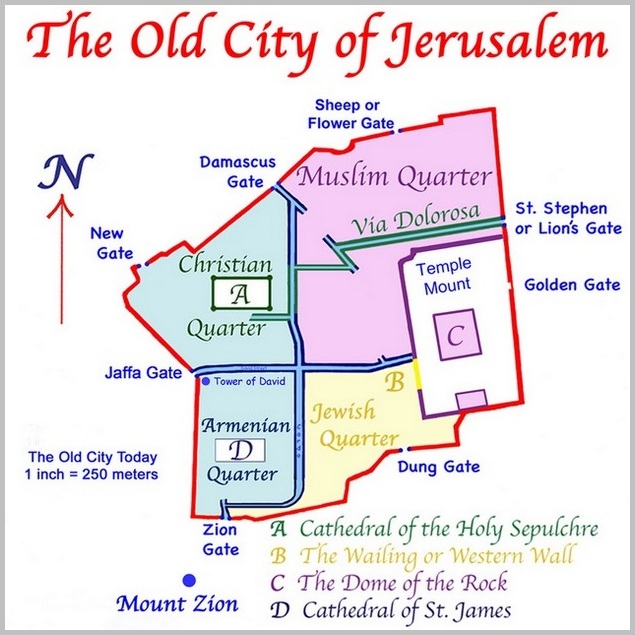
**Situs agama Islam, Kristen, dan Yahudi di Jerusalem Timur**



*Sumber*: Republika.co.id

**Peta 2**

**Pusat Ritual Tiga Agama Besar Dunia**



*Sumber*: portal-islam.id

Betapa pentingnya arti kota Jerusalem bagi bangsa Yahudi, makan nama kota inipun menjadi inspirasi bagi munculnya ide zionisme. Zionisme sendiri berasal dari kata “Zion” atau “Sion”, yaitu sinonim dari kata “Jerusalem” (*Ensiklopedi Umum*, 1973:1221). Kata “Zion” adalah dalam bahasa Inggris, sedang dalam bahasa Latin “Sion”, dan dalam bahasa Ibrani “Tsyon”. Arti dari istilah itu pada mulanya adalah bukit, yaitu bukit suci Jerusalem. Dalam keyakinan Yahudi, Zion termasuk bukit yang disucikan *Yahwe* (Tuhan), karena di tempat itu, dalam keyakinan mereka, Tuhan pernah melantik dan memerintahkan raja Yahudi untuk memimpin kaum yang dikasihiNya. Dalam kitab Perjanjian Lama diceritakan bahwa Zion merupakan salah satu bukit atau gunung yang terletak di sebelah timur dua buah bukit dalam wilayah Jerusalem, yang oleh Daud dijadikan ibukota kerajaannya. Kuil Sulaiman juga didirikan di atas bukit sebelah utara kota Jerusalem itu. Kata “Zion” dalam Perjanjian Lama disebut sebanyak 152 kali, semuanya menunjuk nama Jerusalem. Dari perkataan “Zion” itulah nama gerakan nasionalisme Yahudi berasal.

Istilah zionisme pada awalnya dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang menganut ajaran Judaisme. Para penganut Judaisme ini menginginkan datangnya Sang Juru Selamat kelak di akhir jaman. Pada masa itu semua manusia di dunia akan dipanggil ke “kerajaan” Tuhan, dan “kerajaan” ini akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Musa. Zionisme keagamaan ini hanya menginginkan sebuah pusat kegiatan spiritual yang memnungkinkan tersebarnya agama dan kebudayaan Yahudi ke seluruh dunia, mereka tidak menghendaki negara tersendiri. Oleh karena itu, kehadiran mereka di Jerusalem tidak mengakibatkan keresahan, bahkan mereka bisa bergaul dengan penduduk setempat yang beragama Islam mauoun Kristen. Zionisme keagamaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Theodore Herzl untuk melegitimasi Gerakan kolonialisme Yahudi secara besar-besaran di Palestina pasca-Konggres Zionis Sedunia tahun 1897.

**Gerakan Zionisme sebagai Asal Mula Konflik**

Konflik Palestina-Israel sebagai konflik perebutan wilayah antara bangsa Arab Palestina dan Bangsa Yahudi yang tergabung dalam gerakan zionisme, diawali adanya pembelian tanah-tanah bangsa Arab Palestina secara besar-besaran oleh para imigran Yahudi dunia beberapa saat pasca Konggres Zionis I di Bazel, Swiss tahun 1897. Mereka bukan hanya membeli secara murah, tetapi juga merebut tanah-tanah bangsa Arab secara paksa dan menggusurnya untuk dijadikan pemukiman Yahudi, suatu aksi yang kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Israel hingga saat ini. Kemampuan orang-orang Yahudi dunia bermigrasi ke Palestina yang berasal dari Rusia, Austria, Inggris, Rumania, Polandia, Jerman, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, dan negara-negara Afrika berkat adanya organisasi yang kuat dan jaringan institusi yang komprehensif seperti Lembaga Keuangan Yahudi (*Jewish Colonial Trust Ltd*.) yang bergerak di bidang perbankan, Badan Pengumpulan Dana Yahudi (*Jewish National Fund*) yang berfungsi melaksanakan pembelian tanah di Palestina bagi para pemukim Yahudi, dan *Jewish Agency*, yaitu agen penyalur orang-orang Yahudi menuju Palestina.

Migrasi orang-orang Yahudi dunia menuju ke wilayah Palestina disebabkan oleh perlakuan pemerintah negara-negara Eropa yang represif dan diskriminatif terhadap kaum diaspora Yahudi, karena sifat eksklusif mereka yang susah berasimilasi dengan komunitas lain. Sebagai contoh, pada tahun 1882 Pemerintah Rusia menerbitkan Undang-Undang May (*The May Law*) atau yang disebut sebagai kebijakan “pogrom”, yakni kebijakan diskriminatif Kekaisaran Rusia terhadap masyarakat Yahudi, yang melarang orang-orang Yahudi tinggal dan memiliki harta kekayaan di kota-kota besar, pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan rintangan terhadap kaum Yahudi untuk mencapai kemajuan (Akiva Orr, 1994:20).

Untuk mengatasi ketertindasan di negara-negara Eropa tsb mereka mula-mula melakukan gerakan zionisme yang bersifat relijius, budaya, dan filsafati, tokoh-tokohnya antara lain Eliezer Ben Yehuda (1858-1922), Nachman Baialik (1873-1934), dan Leo Pinsker (1821-1891). Pinsker, seorang ahli fisika Yahudi Rusia mengemukakan pemikirannya bahwa melakukan asimilasi dengan penduduk setempat adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi kaum Yahudi, dan kebijakaan anti-semitisme akan terus berlangsung sampai bangsa Yahudi mampu membentuk negara sendiri dan menjadi sebuah bangsa yang normal. Dia menyebut wilayah Palestina sebagai salah satu lokasi yang memungkinkan bagi berdirinya negara Yahudi. Pinsker juga menyerukan agar masyarakat Yahudi bersatu untuk membentuk satu bangsa, satu komunitas dengan tempat kediaman sendiri. Seruan ini kemudian bergema dalam bentuk gerakan zionisme yang didirikan berdasarkan keputusan Koferensi Carlowitz tahun 1884.

Pemikiran-pemikiran Pinsker ini selanjutnya diadopsi oleh Theodore Herzl (1860-1904), seorang jurnalis Yahudi Austria yang menyaksikan sendiri tindakan anti-Semit yang meluas di Perancis dan Austria. Dia kemudian menerbitkan sebuah buku kecil dengan judul “Der Judenstaat” (*The Jewish State*) pada tahun 1886. Dalam tulisannya itu ia menumpahkan perasaannya bahwa jika Yahudi sebagai sebuah kelompok masyarakat tidak diijinkan hidup dalam komunitas Eropa, maka mereka harus Bersatu ke dalam sebuah negara yang mereka dirikan sendiri. Dia menyebut bangsa Yahudi sebagai “sebuah masyarakat tanpa wilayah” (*a people without land*) dan melukiskan wilayah Palestina secar salah sebagai “sebuah wilayah tanpa penduduk atau masyarakat” (*a land without people*). Pernyataan Herzl ini kemudian menjadi slogan terkenal Gerakan Zionis, “A land without a people for a people without a land”, yang mencerminkan sebuah konsepsi Palestina sebagai wilayah kosong, karena tidak dihuni atau dikembangkan oleh bangsa Eropa (Aland C. Brownfeld, 1998:31). Premis ini sekaligus mengabaikan kenyataan atau eksistensi bangsa Arab Palestina yang sudah berabad-abad menghuni wilayah tersebut. Meskipun demikian, Herzl tercatat sebagai tokoh yang mampu mengubah *proto-zionisme* Yahudi yang bersifat relijius dan filsafati menjadi suatu gerakan organisasi Zionisme dunia yang bercorak politis. Dalam Konggres Zionis Dunia I di Bazel, Swiss tahun 1897, Hrezl terpilih sebagai ketua Gerakan organisasi Zionis Dunia. Konggres juga menegaskan kembali resolusi akhir bagi problem Yahudi, yaitu mendirikan “rumah’ (*national homeland*) bagi masyarakat Yahudi di Palestina.

Meskipun terlihat cukup berhasil, gerakan politik kebangsaan model zionisme sejak awal mendapat tentangan dari kalangan Yahudi itu sendiri. Ahad Ha’am, seorang ahli filsafat terkenal Yahudi Rusia, sejak awal menolak pengabaian bangsa Arab di tanah Palestina. Dalam esainya “The Truth from The Land of Israel”, setelah kunjungannya ke Palestina tahun 1891, ia berkesimpulan bahwa adalah berkhayal jika membayangkan Palestina sebagai wilayah kosong. Dia jugaterusik dengan sikap para pemukim Yahudi yang sering berperilaku kejam dan kasar terhadap tetangga Arabnya. Dia mengkritik bangsanya yang tidak dapat belajar dari pengalaman pahitnya sebagai minoritas di negeri asing.

Kritik serupa juga dilontarkan oleh Yitzhak Epstein, seorang pengajar kelahiran Rusia yang bermukim di Palestina. Selain itu ada lagi nama seperti Yosef Luria, seorang wartawan dan guru kelahiran Rumania; Arthur Rupin, seorang ketua Asosiasi Perjanjian Damai (*Covenant of Peace*); Amos Elon, seorang penulis buku “Israelis: Founders and Sons”; Geoffrey Wheatcroft, seorang penulis buku “The Controversy of Zion”; ahli fisika Yahudi Amerika, Albert Einstein; ahli filsafat, Martin Bubber; guru besar Universitas Hebrew, Prof. Judah I. Magnes, dst. Mereka semua adalah para pemikir Yahudi yang menolak paham zionisme karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam realisasi paham tersebut.

Dari kalangan Orthodoks, para Rabbi (pendeta Yahudi) sejak awal menentang dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan Herzl yang melakukan politisasi keagamaan. Di mata para Rabbi, Herzl sendiri adalah seorang yang ingkar agama, yang menentang semua orang yang merumuskan Judaisme sebagai sebuah agama. Meskipun kebanyakan para Rabbi menentang gerakan zionisme, tetapi ada pula kalangan Orthodoks yang berpartisipasi dalam gerakan ini, mereka mendirikan organisasi *Mizrachi*, yang memakai semboyan rasialis “Negara Israel untuk bangsa Israel, sesuai dengan hukum Israel” (Aland C. Brownfeld, *loc.cit*). Organisasi para Rabbi radikal inilah yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok ultra kanan di kalangan Yahudi saat ini.

Sejak munculnya gerakan zionisme yang diikuti dengan realisasi migrasi Yahudi dunia secara besar-besaran, terutama sejak awal abad ke-20 hingga terbentuknya negara Israel pada tahun 1948, jumlah mereka di Palestina mencapai 31% dari total penduduk Palestina, sedang penguasaan mereka atas tanah-tanah Palestina mencapai 77% pasca-perang Arab\_Israel I tahun 1948-1949, dari semula 56% yang dialokasikan untuk Yahudi berdasarkan Rencana Partisi PBB tahun 1947. Dewasa ini, penguasaan Israel atas tanah Palestina, terutama di wilayah Tepi Barat sudah mencapai 85%.(https://www.republika.co.id/berita/qqu33j382/israel-caplok-85-persen-wilayah-palestina, diunduh 21-5-2021)

**Dukungan Inggris dan Amerika Serikat**

Kesuksesan gerakan zionisme dan kolonisasi tanah-tanah milik warga Arab Palestina tidak lepas dari peran dan dukungan negara-negara besar, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Peran Inggris tampak menonjol pada periode sebelum berdirinya Israel tahun 1948, sedang seiring dengan bangkitnya kekuatan AS sesudah Perang Dunia II, negara adidaya ini mampu menggeser peran Inggris dalam ikut mempertahankan eksistensi Yahudi zionis di Palestina.

Dukungan pemerintah Inggris terhadap Gerakan zionisme Yahudi terlihat jelas dari dikeluarkannya Deklarasi Balfour tahun 1917, yang memiliki dampak yang sangat besar bagi gerakan zionisme dan menjadi peletak dasar terjadinya konflik antara bangsa Arab dan Yahudi. Pertimbangan pemerintah Inggris pada waktu itu didasarkan pada pemikiran bahwa terciptanya pemerintahan Yahudi di Palestina dapat memperkuat posisi Inggris di dunia Arab setelah Perang Dunia I. Dengan dukungan dana dan politik kaum Yahudi dunia, Inggris berharap rute jajahannya ke India dapat dijalin secara aman pula. Komitmen Inggris terhadap gerakan zionisme ini berkat kelihaian para tokoh zionis semacam ChaimWeizmann, seorang ahli kimia Yahudi kelahiran Rusia yang menjadi pengajar di Universitas Manchester, yang berhasil menjalin hubungan baik dengan pemerintah Inggris sehingga mampu meyakinkan pemerintah Inggris bahwa posisi Inggris akan semakin kuat di Kawasan Timur Tengah bila Palestina berada di bawah dominasi Yahudi. Sebelum mendekati Inggris, para tokoh zionis ini mencoba mendekati pemerintah Usmaniyah (penguasa Palestina tahun1517-PD I) agar menyetujui dibentuknya suatu badan khusus untuk pemukiman Yahudi, tetapi usahanya ini ditolak oleh pemerintah Usmaniyah. Setelah berpaling ke Inggris, pemerintah Inggris menawarkan wilayah protektorat Afrika Timur (Uganda dan Kenya) sebagai *homeland* Yahudi, namun tawaran tsb ditolak oleh para tokoh zionis yang tidak melihat alternatif selain Palestina. Jalinan persahabatan antara para tokoh zionis dan pemerintah Inggris inilah yang kemudian melahirkan *Deklarasi Balfour*.

Deklarasi Balfour merupakan surat dari James Arthur Balfour, seorang menteri luar Inggris waktu itu, pada tanggal 2 November 1917 kepada Lord Lionel Walter Rothchild, seorang tokoh terkemuka zionis, yang berisi jaminan dan dukungan resmi pemerintah Inggris atas dibentuknya suatu negara Yahudi yang akan berkedudukan di Palestina. Surat itu berbunyi:

“*His majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, anda will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done wich may prejudice the civil and religious right of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jewish in any other country*” (Alasdiar Drysdale&Gerald G. Blake, 1985:283)

Akibat langsung dari Deklarasi Balfour ini adalah semakin banyak kaum Yahudi dari seluruh dunia bermigrasi ke Palestina. Berkat dukungan dana dari *The Jewish National Fund*, mereka berhasil membeli dan menguasai tanah-tanah Palestina secara besar-besaran, dan hingga menjelang berakhirnya mandat Inggris di Palestina tahun 1947, orang-orang Yahudi telah menguasai 12 % tanah Palestina (*Ibid*, p.296).

Imigrasi Yahudi secara besar-besaran di Palestina telah membawa akibat tersulutnya konflik antara penduduk Arab yang telah lama mendiami wilayah tsb. dengan para imigran Yahudi. Konflik yang semakin memanas mendorong pemerintah mandat Inggris membuat kebijakan dengan mengeluarkan *Churchill White Paper* (Buku Putih Churchill) pada tahun 1922. Namun buku putih tsb justru menunjukkan ketidaktegasan Inggris dalam bersikap, karena memiliki makna ganda. Di satu sisi, Inggris berusaha menghilangkan kecemasan Arab sebagai hasil interpretasi dari Deklarasi Balfour, dan berusaha menenteramkan mereka bahwa Inggris tidak bermaksud menghilangkan atau merendahkan penduduk, bahasa, dan budaya Arab. Di pihak lain, Inggris juga berusaha menenangkan Yahudi bahwa ia tidak akan mengingkari jani sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Balfour.

Dalam tahun 1929-1930 Inggris mengirim *The Shaw and Hope Simpson Commissions* untuk menyelidiki sebab-sebab kerusuhan di Palestina.Hasil dari investigasi tsb mengungkapkan bahwa bangsa Arab merasa terganggu dan gelisah oleh pembelian tanah-tanah dari para imigran Yahudi secara besar-besaran. Mereka khawatir bahwa akhirnya mereka akan menjadi minoritas di negeri sendiri, karena bagaimanapun bangsa Arab yang telah nmenetap di Palestina sejak abad VII M lebih mempunyai hak hidup daripada bangas Yahudi yang sejarahnya di Palestina telah berakhir sejak ditaklukkan oleh kekaisaran Romawi dan bangsa-bangsa asing lainnya. Perselisihan antara kedua bangsa terus berlanjut dan untuk kedua kalinya setelah kerusuhan tahun 1936 Inggris kembali menunjuk tim investigasi di bawah *The Peel Royal Commissions* untuk mengetahui keadaan sesungguhnya di Palestina. Tim tsb menyimpulkan bahwa konflik antara Arab dan Yahudi adalah perselisihan antara “hak melawan hak, dan perselisihan itu hanya dapat diselesaikan melalui pembagian Palestina. Ide pembagian ini akan memberikan Yahudi 20% tanah Palestina, termasuk wilayah Galilee, sedang Jerusalem, Bethlehem, dan daerah sekitar Nazareth tetap akan di bawah control Inggris, sementara itu bagian untuk bangsa Arab yang meliputi *West Bank* (Tepi Barat), Jalur Gaza, dan Gurun Negev akan digabungkan dengan Transjordan. Ide tsb. Ditolak keras oleh bangsa Arab baik karena secara prinsip bertentangan dengan kehendak bangsa Arab maupun kenyataan bahwa sebagian besar tanah yang dialokasikan kepada mereka merupakan tanah tandus. Oleh karena itu pemerintah Inggris kemudian membatalkan rencana partisi tsb.

Menjelang Perang Dunia II pemerintah Inggris mengubah kebijakannya terhadap bangsa Arab menjadi lebih netral. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Inggris akan kehilangan kontrol atas Terusan Suez dan akses menuju kawasan kaya minyak. Inggris kemudian lebih memilih penyelesaian *binational*, Palestina akan diberi kemerdekaan dalam tempo 10 tahun ke depan, sedang kedua bangsa, Arab dan Yahudi, akan berkuasa sama. Imigrasi Yahudi juga akan dibatasi sebanyak 75 ribu orang dalam kurun waktu lima tahun, sehingga akan memungkinkan komunitas Yahudi menduduki sepertiga dari jumlah penduduk Palestina *(Ibid*.) Rencana kebijakan Inggris ini kemudian berubah seiring dengan terjadinya peristiwa *holocaust* di Jerman yang telah mengakibatkan munculnya gelombang simpati di AS dan negara-negara Eropa, termasuk Inggris, sehingga pemerintah Inggris kembali mengubah kebijakannya dengan menghilangkan pembatasan bagi imigran Yahudi. Selama periode 1940-1948 jumlah imigran Yahudi di Palestina mencapai 110 ribu orang, dan kebanyakan dari mereka adalah para korban kekejaman Nazi Jerman. Kebijakan terakhir Inggris ini kemudian menimbulkan ketegangan antara negara-negara Arab dengan pihak Barat. Negara-negara Arab memperingatkan Inggris dan AS bahwa ide pembentukan negara zionis di Palestina merupakan ancaman bagi perdamaian di Kawasan Timur Tengah. Melalui organisasi Liga Arab mereka juga mengecam AS yang dianggap tidak berhak ikut campur dalam masalah Palestina.

Sikap Inggris dan AS yang sedemikian pro-Israel disebabkan oleh pengaruh propaganda Yahudi. Di AS, kaum Yahudi yang jumlahnya hanya 3% dari seluruh penduduk AS memegang posisi-posisi kunci di bidang politik, pemerintahan, bisnis dan keuangan, komunikasi massa, kebudayaan, dan pendidikan hingga sekarang. Mereka juga berhasil membangun opini dunia bahwa peristiwa genosida Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman mendesak dan mengharuskan segera dibentuknya negara Yahudi di Palestina sebagai solusinya.

Situasi kritis yang berkembang antara negara-negara Arab dengan pihak Barat di satu pihak, serta aksi-aksi terror yang dilancarkan oleh organisasi ektremis zionis, *Stern* dan *Irgun*, terhadap Inggris di sisi lain, telah membuat posisi Inggris semakin terjepit. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Inggris kemudian menyerahkan tanggugnjawabnya kepada organisasi PBB, Majelis Umum PBB segera membentuk UNSCOP (*United Nations Special Committee on Palestine*) untuk mencari solusi kasus Palestina. Pada tanggal 29 November 1947, setelah melalui pemungutan suara, MU PBB mengeluarkan Resolusi No. 181 tentang Rencana Partisi Palestina, yang akan membagi tanah Palestina menjadi beberapa wilayah yang diperuntukkan negara Arab, negara Yahudi, dan kota Jerusalem yang akan ditempatkan di bawah perwalian PBB (*lihat peta di bawah*). Resolusi tsb diterima baik oleh pihak zionis, tetapi ditentang keras oleh negara-negara Arab. Akibat resolusi tsb perkelahian antara komunitas Yahudi dengan Arab semakin tidak terhindarkan, apalagi menyusul pengumuman Inggris bahwa pemerintah mandat tsb akan ditarik dari Palestina pada 14 Mei 1948. Kelompok Yahudi kemudian berusaha mengamankan wilayah melebihi dari yang diperuntukkannya, sebaliknya komunitas Arab yang sudah lama berang mulai menyerang tempat-tempat pemukiman Yahudi. Menyusul ditariknya Inggris, pada tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi secara rsemi mengumumkan berdirinya Israel, yang segera dijawab dengan solidaritas negara-negara Arab dengan mengirimkan pasukan dan peralatan perangnya, dan menandai dimulainya Perang Arab-Israel I (1948-1949). Ratusan ribu penduduk Arab Palestina yang cemas terhadap perkembangan yang terjadi segera mengungsi, peristiwa pengungsian secara besar-besaran warga Arab Palestina ini menandai dimulainya diaspora bangsa Arab Palestina ke negara-negara sekitarnya.

**Peta 3**

**Pembagian Wilayah Palestina Sesuai Rencana Partisi PBB 1947**

Map

Description automatically generated

*Sumber*: Alasdair Drysdale and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa*, Oxford University Press, 1985, hal.280

Pasca perang Arab-Israel I tahun 1948-1949 penguasaan tanah-tanah Palestina oleh orang-orang Yahudi menjadi 77% dari semula yang dialokasikan berdasarkan Rencana Partisi PBB tahun 1947 (*lihat peta 4*). Dengan bertambah luasnya wilayah ini, pemerintah Israel segera mengeluarkan Undang-Undang *Law of Return* 1949 yang memberi kewarganegaraan penuh bagi orang-orang Yahudi yang ingin Kembali ke Palestina. Di tahun itu juga, sebanyak 250.000 orang imigran dari Jerman berdatangan ke Palestina. Pada tahun 1950, pemerintah Israel juga mengeluarkan Undang-Undang *Absentee Property Law* yang memberi kekuasaan pemerintah untuk menyita tanah milik warga Arab Palestina yang ditinggal mengungsi sejak November 1947. Dengan undang-undang terakhir tersebut, pemerintah Israel telah mencabut hak milik pengungsi Palestina dan melarang mereka untuk Kembali ke kampung halamannya. Perdana Menteri Israel, Golda Meir, waktu itu bahkan berucap sarkastis: “It was not as though there was a Palestinian people…and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist” (Peter Beaumont, 1988:439-449). Pasca-Perang Arab-Israel tahun 1967, seluruh tanah Palestina yang diperuntukkan kepada Bangsa Arab jatuh ke tangan Israel hingga sekarang (*lihat peta 5*)

**Peta 4**

**Wilayah Palestina**

**Pasca Perang Arab-Israel 1948-1949**

Map

Description automatically generated

*Sumber*: Alasdair Drysdale and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa*, Oxford University Press, 1985, hal.281

**Peta 5**

**Wilayah Palestina**

**Pasca-Perang Arab-Israel tahun 1967**

Diagram

Description automatically generated

*Sumber*: Alasdair Drysdale and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa*, Oxford University Press, 1985, hal.290

Selain dukungan Inggris, peran AS bagi eksistensi zionis Israel di Palestina telah menjamin keberlangsungan mereka hingga saat ini. Komitmen AS terhadap Israel sejak tahun 1948 hingga kini tidak pernah surut. Rata-rata bantuan yang didapat setiap tahunnya mencapai 3 milyar dollar AS, dengan 1,2 milyar dollar untuk bantuan ekonomi dan 1,8 milyar dollar untuk bantuan militer. Pada tahun 2019 AS bahkan memberikan 3,8 milyar dollar bantuan militer kepada Israel, selain 8 milyar dollar sebagai pinjaman. Dari data yang didapat, total bantuan AS ke Israel sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 146 milyar dollar, terbesar sepanjang sejarah. (“Berdiri Secara Kontroversi di Palestina, Hingga Dibantu AS, Ini Penyebab Israel Jadi Negara Kaya di Dunia”, https:www.Akurat.Co,diakses 14 Mei 2021)

Selain bantuan ekonomi dan militer, AS juga memberikan dukungan politik kepada Israel terkait dengan isu pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menghukum Israel selalu diveto oleh AS.Negara adidaya tersebut telah menggunakan hak veto DK PBB sebanyak 42 kali terkait dengan Israel (*Ibid*). Dukungan ekonomi dan politik AS yang sangat kuat kepada Israel ini telah menempatkan Israel menjadi negara kecil yang sangat kuat secara militer di Kawasan Timur Tengah. Dalam masa Perang Dingin, alasan yang dikemukakan AS dalam konteks *special relationship* ini selalu klise, yakni melindungi mitra abadinya yang berfungsi sebagai penjamin stabilitas politik dan militer AS di Timur Tengah. Israel yang stabil dan aman akan berpengaruh pula pada keamanan Kawasan Timur Tengah, sehingga kelancaran arus minyak bagi kepentingan industry AS dan sekutu Baratnya akan terjamin. Di era pasca-Perang Dingin, kekuatan Israel tetap diperlukan sebagai *deterrence* bagi negara-negara Arab anti-Barat. Keberpihakan AS kepada Israel yang sangat mencolok ini justru telah mengakibatkan terjadinya kekacauan politik di Kawasan Timur Tengah. Upaya-upaya perundingan damai Palestina-Israel yang dimediasi oleh AS sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993 hingga sekarang bahkan semakin jauh dari harapan. Israel bahkan semakin berekspansi dengan memperluas dan membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilyah Tepi Barat secara masif.

**Penutup**

Konflik yang tidak berkesudahan antara bangsa Arab Palestina dan Yahudi Israel perlu segera dicarikan solusi yang adil. Kesepatan perdamaian yang telah terbengkelai sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993 hingga kini perlu ditinjau ulang. Langkah-langkah yang ideal untuk penyelesaian konflik tsb adalah :

1. Melanjutkan kembali upaya perdamaian Palestina-Israel dengan mendasarkan pada Resolusi DK PBB No. 242 dan No. 338, serta menerapkan kembali konsep land for peace (pengembalian tanah pendudukan dengan imbalan perdamaian) sebagai prasyarat mutlak. Dalam Resolusi DK PBB No. 242 ditekankan tentang larangan penguasaan wilayah melalui perang. Resolusi juga menegaskan bahwa penegakan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah harus meliputi penerapan 2 prinsip,yakni:
2. Penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan sejak tahun 1967.
3. Penghentian seluruh klaim atau keadaan perang serta penghormatan dan pengakuan terhadap kedaulatan, integritas territorial, dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah tersebut, maupun hak mereka untuk hidup secara damai, aman, dan pengakuan batas-batas wilayah yang bebas dari ancaman atau serangan.

Resolusi DK PBB No 338 yang dikeluarkan pasca-Perang Yom Kippur tahun 1973 menghendaki kedua belah pihak untuk mengimplementasikan keputusan Resolusi No. 242 yang diikuti dengan penghentian tembak-menembak/ gencatan senjata untuk memulai negosiasi yang bertujuan menetapkan perdamain Timur Tengah yang adil dan bertahan lama (abadi).

1. Mediator dalam perdamaian harus bersikap netral atau tidak boleh berat sebelah. Pengalaman perundingan damai Palestina-Israel yang pernah ditempuh menunjukkan ketidaknetralan AS yang cenderung berpihak ke Israel, hal ini bisa dilihat Kembali dalam proses perdamaian tahun 2000 yang kemudian mengalami kebuntuan dan berakhir dengan tersulutnya konflik antara kedua belah pihak. Kenetralan sikap mediator akan menentukan kualitas perdamaian yang ditempuh, sebaliknya jika mediator bersikap berat sebelah maka perdamaian tidak akan pernah tercapai, dan yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan dan tak berujung-pangkal.
2. Untuk menghindari peran mediator yang tidak netral, maka dalam perundingan damai harus menyertakan peran pro-aktif organisasi PBB dan negara-negara lain sebagaimana pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu dalam bentuk Kelompok Kuartet Perdamaian (AS, PBB, Rusia, dan Uni Eropa).
3. Melanjutkan upaya solusi dua negara (*two-state solutions*) melalui upaya diplomasi dan negosiasi seperti yang pernah ditempuh beberapa waktu yang lalu.
4. Sesuai dengan Resolusi No. 181 MU PBB, kota-kota suci di Jerusalem harus berada di bawah mandat PBB untuk menghindari situasi saling klaim dan pertikaian.
5. Perlunya kekompakan dan pro-aktif dari anggota-anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Arab agar bisa berpartisipasi dalam mencari solusi perdamaian Palestina-Israel.

Upaya Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, yang melakukan kunjungan ke Israel dan Palestina pada tanggal 25 Mei 2021, untuk memastikan gencatan senjata bertahan lama, pantas untuk diapresiasi. Demikian pula sikap Presiden AS, Joe Biden, yang berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara dan menjanjikan paket bantuan untuk membangun kembali Gaza yang telah porak poranda. Sikap AS yang berimbang dan solutif terus dinanti oleh masyarakat internasional yang sudah sangat bosan melihat peperangan dan menginginkan dunia yang damai dan adil.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abd. Rahman, Mustafa, *Dilema Israel : Antara Krisis Politik dan Perdamaian*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Beaumont, Peter, *The Middle East : A Geographical Study*, Second Edition, David Fulton Publisher Ltd., London, 1998.

Daya, Burhan, *Agama Yahudi*, P.T. Bagus Arafah, Yogyakarta, 1982.

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. blake, *The Middle East and North Africa : A Political Geography*, Oxford University Press, London, 1985.

*Ensiklopedi Umum*, 1973.

Harmiyati, *Konflik Palestina-Israel*, Jurusan HI FISIP UPNVY, 2013.

Orr, Akiva, *Israel : Politics, Myths, and Identity Crises*, London Press, London, 1994.

Maulana, Z.A., *Zionisme : Gerakan Menaklukkan Dunia*, Penerbit Daseta, Jakarta, 2002.

Rais, M. Amien, *Timur Tengah*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1989.

Sihbudi, Riza, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Eresco, Bandung, 1993.

**Majalah dan Surat Kabar Cetak**

Brownfeld, Alan C., ”Zionism at 100 : The Myths of Palestine as A Land Without People”, *The Washington Report on The Middle East Affairs*, Maret 1998, Vol XVIII, No. 2.

*Kompas*, 12-9-2000, hal.3

*Kompas*, 24-7-2000, hal.3

**Internet**

“Berdiri Secara Kontroversi di Palestina hingga dibantu AS, Ini Penyebab Israel Jadi Negara Kaya di Dunia”,https://www.Akurat.Co, diakses 14 Mei 2021

“Lebih Dari 60 Anak Palestina Gugur Dalam Agresi Israel”, [https://parstoday.com/id/news/middle\_east-i97606 lebih\_dari\_60\_anak\_palestina\_gugur\_dalam\_agresi\_israel](https://parstoday.com/id/news/middle_east-i97606%20lebih_dari_60_anak_palestina_gugur_dalam_agresi_israel), diakses 21-5-2021

“Usai Gencatan Senjata, AS: Iron Dome Israel Diperkuat Lagi”,<https://republika.co.id/berita/qtfn23440/usai-gencatan-senjata-as-iron-dome-israel-diperkuat-lagi>, diakses 21-5-2021

“Israel Caplok 85 Persen Wilayah Palestina”, https://www.republika.co.id/berita/qqu33j382/israel-caplok-85-persen-wilayah-palestina, diakses 21-5-2021

## **LATAR BELAKANG INVASI ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Sejak tanggal 8 Juli sampai dengan 26 Agustus tahun 2014, selama sekitar 50 hari, Israel melakukan invasi ke Gaza yang dinamai *Operation Protective Edge*. Operasi yang dimaksud untuk mengakhiri serangan roket Hamas dari wilayah Gaza tersebut telah mengakibatkan 2.157 orang warga Gaza meninggal (2/3 dari mereka adalah kaum perempuan, anak-anak, para manula, dan kaum difabel), lebih dari 11.000 orang mengalami luka-luka, dan puluhan ribu lainnya berada di lokas pengungsian.(http://international.okezoen.com) Invasi Israel kali ini adalah yang ketiga kalinya. Invasi pertama pada 27 Desember 2008 sampai dengan 17 Januari 2009 (agresi22 hari), sedang invasi kedua pada November 2012 (agresi 8 hari), dan yang terakhir adalah yang berlangsung pada tahun 2014 yang lalu.

Sebenarnya invasi Israel tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah perang, karena menampilkan dua kekuatan yang tidak seimbang. Israel memiliki kekuatan tentara aktif sebesar 176.500 orang, sedang Arab Palestina hanya memiliki pasukan para militer sekitar 56.000 orang.Dari segi kapabilitas persenjataan, Israel memiliki sekitar 300 hulu ledak nuklir, system pertahanan udara iron dome, rudal arrow, rudal patriot, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, dan kapal selam.Sedang pejuang Palestina hanya bersenjatakan roket, bom, ranjau, mortar, dan berbagai senjata ringan. Dari segi teknologi, Israel memiliki satelit militer Ofeq dan Tec-STAR (Polaris), sedang para pejuang Hamas dan Jihad islam hanya mengandalkan data Google Earth.(*Republika,* 18 Juli 2014*)*. Dari deskripsi tersebut di atas lantas muncul pertanyaan: apa yang sesungguhnya mendasari invasi Israel ke Gaza pada tahun 2014 ini ?

**Faktor Rekonsiliasi Hamas-Fatah**

Invasi Israel ke Gaza, yang didasarkan pada alasan pembunuhan tiga remaja Israel di kota Hebron dan diduga dilakukan oleh pejuang Hamas, sesungguhnya hanya merupakan alasan pembenar (justifikasi) dari serangan tersebut, alasan sebenarnya adalah kegeraman dan rasa frustrasi Pemerintah Israel di bawah Benyamin Netanyahu terhadap adanya rekonsiliasi antara faksi Hamas dengan faksi Fatah yang pernah berseteru sejak tahun 2007. Upaya rekonsiliasi ini telah membuyarkan angan Israel untuk terus mendikte Pemerintah Otoritas Palestina di bawah pemerintahan Mahmoud Abbas agar memenuhi kemauan Israel.Pemerintah Palestina dibawah payung PLO dengan didominasi faksiFatah selama ini sangat tunduk pada kemauan Israel melalui perundingan-perundingan damai Palestina-Israel yang justru kontraproduktif karena merugikan pihak bangsa Arab Palestina. Sejak tercapainya kesepakatan damai Palestina-Israel dari tahun 1993 hingga saat ini, Israel selalu mengingkari hasil-hasil kesepakatan, bahkan sejak tercapainya kebuntuan negosiasi damai pada tahun 2010, Israel justru memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur, suatu wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Palestina merdeka kelak. Sementara rekonsiliasi Hamas-Fatah dianggap akan membahayakan posisi keamanan Israel, karena faksi Hamas dikenal sebagai kelompok pejuang bersenjata yang gigih dan sangat tidak mempercayai segala perundingan damai dengan Israel, dan asumsi Hamas tersebut memang terbukti.

Rekonsiliasi antara faksi Hamas dan Fatah, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai di Kairo, dengan dimediasi oleh Mesir, pada tanggal 4 Mei 2011 menyepakati dibentuknya pemerintahan teknokrasi yang berasal dari kedua kubu.Perdamaian internal Palestina ini merupakan prasyarat bagi terbentuknya Negara Palestina yang bersatu dan berdaulat, serta menjadi dasar bagi diakhirnya konflik dengan Israel. Rekonsiliasi internal Palestina ini bukan hanya didukung oleh Negara-Negara Arab melalui organisasi Liga Arab, tetapi juga didukung oleh Organisasi Uni Eropa dalam rangka mencapai solusi dua Negara, Palestina dan Israel.

Namun, Pemerintah Israel tetap bersikukuh, bahkan mengancam akan memutuskan aliran listrik dan air di wilayah Gaza, serta tidak akan mencairkan uang milik Pemerintah Otoritas Palestina jika pemerintahan persatuan nasional terbentuk.Netanyahu bahkan mengutus mantan Menlu Israel, Tzipi Livni, juga Raja Yordania, Abdullah II, ke Ramallah untuk membujuk Mahmoud Abbas agar membatalkan rekonsiliasi internal, dan secepatnya memulai perundingan damai dengan Israel. Akan tetapi,rekonsiliasi internal Palestina yang dalam perkembangannya justru semakin solid ini telah membuat pemerintah Israel frustrasi, dan opsi terakhir untuk menghancurkan rekonsiliasi adalah dengan cara menghancurkan Hamas sebagai kendala utama agenda Zionis Israel.

Upaya penghancuran kelompok Hamas oleh Israel bukan hanya dilakukan dengan cara serangan militer,tetap juga melalui blokade wilayah Jalur Gaza yang bertujuan menimbulkan dampak psikologis, politis, dan ekonomis bukan hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi rakyat Arab Palestina secara keseluruhan di wilayah itu. Blockade Israel di Gaza, yang dimulai pasca penculikan seorang prajurit Israel, Gilad Shalit, pada tahun 2006 semakin diperketat pasca perpecahan Hamas-Fatah pada Juli 2007. Isolasi wilayah Gaza dengan cara mematikan aliran listrik, air,penghentian pasokan pangan dan bahan bakar di wilayah tersebut telah mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakat di wilayah itu kian memburuk. Ibarat hidup di penjara terbesar di dunia, sekitar 1,5 juta orang warga Gaza tengah menunggu lonceng kematian di depan mata. Perlakuan Pemerintah Israel ini merupakan satu bentuk aksi genosida (pembasmian etnis) terhadap rakyat Arab Palestina di Gaza. Data Dana dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebutkan bahwa sejak blockade Israel tahun 2007 telah mengakibatkan 45,2% penduduk Gaza menganggur, dan kondisi pertanian mereka merosot karena lahan-lahan pertanian milik warga Gaza dibuldoser oleh pihak tentara Israel, serta adanya larangan mengekspor hasil-hasil pertanian mereka.(http:www.republika.co.id)

Perilaku Pemerintah Israel dan tragedi kemanusiaan di Gaza ini telah menimbulkan respon negatif yang luar biasa di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Misi-misi bantuan kemanusiaan semacam MER-C yang telah berhasil membangun Rumah Sakit Indonesia, di kawasan Beit Lahiya, Gaza Utara, International Solidarity Movement, Freedom Flotilla I&II, adalah beberapa contoh dari aksi-aksi kemanusian untuk Gaza.Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, sangat aktif ikut memperjuangkan nasib bangsa Arab Palestina melalui multitrack diplomacy, yaitu satu bentuk diplomasi melalui jalur resmi pemerintah (first track) dan jalur non-pemerintah (second track) yang melibatkan LSM, kelompok pengusaha, dan aktivis2 kemanusiaan lainnya. Dukungan nyata Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi sekitar 1200 orang warga Palestina untuk menyerap ilmu di Indonesia, menerima perwakilan Palestina dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) untuk belajar tentang demokrasi, dan dukungan peningkatan kapasitas untuk Palestinadi bidang pertanian, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, serta light manufacturing. (http://www.republika.co.id)

**Faktor Menguatnya Dukungan Iran**

Alasan berikutnya yang mendorong invasi Israel ke Gaza pada tahun 2014 adalah karena menguatnya pengaruh Iran ke Hamas, terutama sejak lebih dari dua tahun terakhir, dimana Iran mentransfer teknologi militer ke kelompok pejuang Hamas dan Jihad Islam. Sejak invasi ke-2 Israel ke Gaza pada November 2012 (agressi 8 hari), pejuang Hamas telah mampu mempertahankan diri dari serangan Israel berkat kemampuannya memproduksi roket sendiri tanpa pengiriman langsung dari Iran. Transfer teknologi militer Iran tersebut berupa roket Fajr 5 yang memiliki daya jangkau 75 km, yang dalam agressi Israel pada tahun 2014 lalu mampu menjangkau kota-kota penting Israel: Tel Aviv, Jerusalem, dan reactor nuklir Israel, Dimona, di Gurun Negev.

Transfer teknologi militer Iran ke Hamas diakui sendiri oleh Mohsen Rezaei, *Secretary of the Expediency Discernment Council* Iran, yang menyatakan bahwa: “Rudal perlawanan Palestina adalah berkat transfer teknologi Iran. Kita perlu mentransfer teknologi defensif dan militer untuk palestina sehingga mereka dapat membangun senjata di bawah blokade dan membela diri”.(<http://international> okezone.com). Rezaei yang juga mantan komandan Garda Revolusi Iran telah menulis surat kepada Presiden Iran, Hassan Rouhani, untuk menyediakan system pertahanan udara ke Hamas, sehingga Hamas bisa memukul balik pesawat Israel. Rezaei mengatakan pula, Hamas harus terus menggali terowongan yang akan digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk Gaza dari hantaman roket Israel. (*Ibid*) Tindakan Iran untuk mempersenjatai kelompok-kelompok pejuang Palestina tidak hanya ditunjukkan melalui transfer teknologi roket Fajr 5, tapi juga melalui pengiriman pesawat drone *Ababil* buatan Iran yang dioperasikan oleh para pejuang Hamas. Drone tersebut tersembunyi dari sistem radar dan pertahanan Israel yang mahal. (http://news.liputan6.com)

Dukungan Iran yang sangat gigih bagi perjuangan bangsa Arab Palestina adalah sejalan dengan kebijakan luar negeri Iran pasca Revolusi Khomeini tahun 1979, yang antara lain: tidak mengakui eksistensi Israel, tidak mengakui kesepakatan damai Palestina-Israel, dan menolak perluasan hegemoni asing di kawasan, khususnya di Teluk Persia.Kebijakan luar negeri tersebut merupakan manifestasi dari demokrasi agama sebagai dasar Republik Islam Iran yang mengusung slogan perjuangan, kebebasan, dan tuntutan kehormatan. (<http://indonesian.irib.ir>) Penolakan terhadap Israel dan hegemoni asing di kawasan Timur Tengah juga merupakan bagian dari Eksistensi Republic Islam Iran yang menolak terhadap arogansi pihak lain dan perlawanan terhadap brutalitas kekuatan adidaya di dunia. Israel, menurutperspektif para pemimpin Iran, adalah sumber persoalan di kawasan Timur Tengah. Mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad bahkan mengatakan bahwa rezim Zionis Israel harus ditumbangkan dalam rangka mengembalikan ketenangan di kawasan. (<http://indonesian.irib.ir>)

Sikap dan kebijakan luar negeri Iran yang demikian telah mengakibatkan perseteruan yang berkepanjangan antara Iran dan Israel pasca revolusi tahun 1979. Hal ini lebih diperparah lagi dengan kenyataan pengembangan nuklir Iran pasca Perang Teluk I ( Perang Iran-Irak tahun1980-1988). Sesuai traktat NPT (*Non-Proliferation Treat*y) PBB, Iran berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai: kepentingan industri, pembangkit listrik, kedokteran, dan pertanian. Meskipun pihak IAEA (*International Atomic Energy Agency*) telah berkali-kali melakukan investigasi ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran dan menyimpulkan bahwa pengembangan nuklir Iran tidak diarahkan ke pengembangan senjata nuklir, tetapi hal ini tidak mampu mengubah sikap Israel yang merasa terancam oleh pengembangan nuklir Iran tersebut.

Sikap Iran yang terang-terangan anti-Israeltersebut tidak mengakibatkan konflik Iran *vis a vis* Israel secara langsung. Hal ini didasarkan oleh dua alasan, *pertama*, doktrin militer Iran bersifat defensif (bertahan), tidak ditujukan untuk menginvasi atau menyerang negara lain. Msekipun demikian, para pemimpin Iran berkali-kali mengatakan bahwa negaranya akan membalas secara destruktif apabila ada pihak yang berani menyerang. (<http://indonesian.irib.ir>) *Kedua*, disamping memiliki doktrin militer defensif, anggaran militer Iran hanya sekitar 7 milyar dolar AS/ tahun atau 1,8 % dari GDPnya, atau setengah dari anggaran militer Israel yang mencapai 15 milyar dolar AS/ tahun. (*Ibid*) Dengan anggaran militer sebesar itu, tidak mungkin bagi Iran untuk mengerahkan pasukan dan peralatan tempur ke Israel yang jaraknya 1.500 km dari ibukota Teheran.

Sebaliknya, perseteruan Iran-Israel berkali-kali membuat Israel geram, apalagi dengan adanya pemanfaatan energi nuklir Iran yang sewaktu-waktu bisa dikonversi ke kepentingan militer. Israel berkali-kali mengancam akan menyerang Iran bersama-sama dengan sekutunya, Amerika Serikat. Sekalipun demikian, ancaman Israel tersebut sulit terwujud, hal ini sesuai dengan pendapat Anthony Cordesman, peneliti pada *Center for Strategic and International Studies* AS, yang mengatakan bahwa profil militer Israel tidak akan mampu melakukan serangan ke Iran. Untuk menyerang Iran, Israel harus mengerahkan seperempat pasukan udaranya dan semua pesawat tempurnya, sehingga tidak ada cadangan pesawat untuk berjaga-jaga.Pesawat-pesawat tempur itu harus melewati perbatasan Suriah-Turki sebelum terbang di atas udara Irak dan Iran, dan dua wilayah terakhir ini adalah wilayah paling rawan bagi Israel. Menurut Cordesman, berdasarkan jumlah pesawat yang diperlukan, proses pengisian bahan bakar yang harus dilakukan sepanjang perjalanan menuju Iran, serta usaha mencapai target gempuran tanpa terdeteksi sangatlah beresiko tinggi dan kecil kemungkinan keseluruhan operasi militer tersebut akan berhasil. (*Ibid*) Oleh karena itu, bila Israel bersikeras untuk menyerang Iran, maka ia harus melibatkan AS, dan bila AS menyetujui permintaan Israel ini, AS harus mengerahkan ratusan pesawat dan kapal tempur, dan harus mengalokasikan kekuatan yang sangat besar, termasuk pesawat pembom utama, upaya penghancuran system pertahanan udara lawan, pesawat-pesawat pendamping untuk melindungi pesawat pembom, peralatan perang elektronik, dan patrol udara untuk menahan serangan balasan dari Iran.

Pada waktu yang bersamaan, AS harus menghalangi Iran agar tidak melakukan aksi apapun di Selat Hormuz. Jika Iran sampai berhasil memblokir Selat Hormuz, maka suplai minyak dan gas ke dunia Barat akan terhambat, dan akan melumpuhkan perekeonomian AS dan sekutu-sekutunya tersebut. Sebaliknya, Iran selama ini justru sangat memperkuat kemampuan militernya di wilayah Selat Hormuz miliknya itu untuk mengantisipasi terjadinya perang. Penguatan militer AS di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan UEA pun tidak mampu menggentarkan tekad Iran untuk memperkuat penguasaan Selat Hormuz, wilayah yang secara geopolitik dan geostrategis merupakan ‘kartu as” bagi Iran bilamana ia berada dalam situasi terpojok. Belum lagi jika Iran diserang, Rusia dan Cina diperkirakan akan turut campur untuk mengamankan kepentingan mereka masing-masing di wilayah Timur Tengah. Besarnya resiko perang Teluk yang sangat besar inilah yang menjadi alasan AS enggan meluluskan permintaan Israel untuk menyerang Iran. Leon Panetta, Menteri Pertahanan AS waktu itu, bahkan berujar: “Sangat jelas bahwa bila AS melakukan serangan itu, kita akan mendapatkan akibat yang sangat buruk”. (*Ibid*)

**Berakhirnya *Operation Protective Edge***

Bagaimanapun, perseteruan dan dukungan Iran yang sangat besar ke Hamas telah mejadi salah satu alasan invasi Israel ke wilayah Gaza pada tahun 2014 yang lalu.Dengan menyerang Hamas, paling tidak Israel mampu melemahkan dukungan Iran ke kelompok pejuang Palestina tersebut.Namun kenyataannya, setelah 50 hari invasi, kelompok Hamas justru semakin menguat dan mampu bertahan.Sebaliknya, para prajurit Israel justru semakin banyak yang terbunuh dalam pertempuran darat. Tidak seperti yang diakui oleh pemerintah Israel sendiri yang mengklaim bahwa prajuritnya yang terbunuh sebanyak 67 orang, informasi dari koresponden harian Israel, *Haaretz*, mengatakan bahwa tentara Israel yang tewas dalam pertempuran Gaza sebanyak 497 orang prajurit, 113 orang perwira, dan 270 orang tentara bayaran. Sementara yang luka-luka sebanyak 879 orang prajurit, 362 orang perwira, dan 620 orang tentara bayaran.Sedang mereka yang bunuh diri sebanyak 166 orang prajurit, dan mereka yang luka karena menembak diri-sendiri sebanyak 166 orang prajurit.

Kekalahan Israel dalam agresi ke Gaza tahun 2014 ini diakui sendiri oleh Menteri pariwisata Israel, Uzi Landau, yang mengatakan bahwa: ”Kami kalah strategi tempur di front Gaza” (<http://web>.inilah.com) Menurut Landau, daya tangkal Israel terkikis secara dramatis selama 26 hari. Israel yang menggempur Gaza dari laut, udara, dan darat terbukti tidak berhasil menghancurkan Hamas. Pendapat ini dibenarkan oleh mantan Kepala intelijen Israel, Mossad, Efraim Halevy, yang mengatakan bahwa Israel mengalami kegagalan strategi, baik dalam konflik Gaza maupun dalam menangani eskalasi di al Quds (Jerusalem). Banyaknya tentara yang terbunuh inilah yang mendorong diakhirinya agresi militer Israel ke Gaza, yang ditandai dengan terjadinya gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus 2014berkat prakarsa Pemerintah Mesir.

Disamping karena banyaknya tentara yang terbunuh, alasan diakhirinya invasi ke Gaza karena Israel mulai kehabisan stok rudal yang terpasang pada system Iron Dome. Israel juga terkesan tidak efektif dalam memanfaatkan teknologi canggih yang mereka banggakan tersebut, terbukti dari hampir 120 roket yang ditembakkan Hamas dari Jalur Gaza, hanya 8 buah yang berhasil dicegat oleh sistem itu. Sementara sekitar 110 roket berhasil menghantam wilayah pendudukan, bahkan mencapai sasaran bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sehingga sempat melumpuhkan aktivitas penerbangan Israel selama 36 jam. Ketidakefektifan sistem perisai rudal Iron Dome sebenarnya telah dialami sejak Invasi Israel ke Gaza pada bulan November tahun 2012 (*Operation Pillar of Defense*). Sistem yang membutuhkan dana besar baik untuk memproduksi, pemasangan, dan pemeliharaan ini terbukti hanya mampu menghadang roket-roket Hamas kurang dari 20 %. Padahal untuk peluncuran satu roket Iron Dome dibutuhkan biaya lebih dari 60 ribu dolar AS, sedang biaya satu pelontar roket di sistem tersebut sekitar 50 juta dolar AS, sementara jumlah pelontarnya ada 13 buah. Media Israel, Haaretz, memberitakan waktu itu, bahwa 800 roket Hamas mengenai sasaran di berbagai wilayah Israel, termasuk 5 roket yang berhasil dilontarkan ke kota Tel Aviv. (<http://indonesian.irib.ir>) Ini menunjukkkan bahwa Iron Dome sebenarnya bukanlah sistem pertahanan yang sempurna. Namun demikian,krisis rudal Israel telah mendorong Presiden AS, Barack Obama, menandatangani bantuan pendanaan senilai 225 juta dolar AS untuk pengembangan system Iron Dome. Jumlah itu di luar dana sekitar 351 juta dolar AS yang sudah didiskusikan untuk Iron Dome Israel pada tahun fiscal 2015 yang akan berjumlah 576 juta dolar AS.

**Penutup**

Agresi militer Israel ke Gaza, yang telah berlangsung sebanyak tiga kali, terbukti tidak mampu menghancurkan Hamas, bahkan sebaliknya, kian hari kelompok pejuang Palestina tersebut semakin menunjukkan kemampuannya melawan kebrutalan Israel. Manuver yang dilakukan Israel pun justru semakin kontraproduktif, selain karena ketidakefektifan penggunaan teknologi canggih sistem Iron Dome yang dimilikinya, agresi Israel juga telah menimbulkan tragedi yang mengusik rasa kemanusiaan masyarakat dunia lintas etnis, agama, dan budaya karena telah mengakibatkan korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak, yang harusnya mendapat perlindungan dari kekejaman perang. Kebrutalan Israel yang demikian, pada gilirannya akan semakin mengucilkan Negara tersebut dari pergaulan dunia internasional. Hal paling ideal yang harus dilakukan adalah kembali ke meja perundingan perdamaian Israel-Palestina, Karena perdamaian adalah kunci untuk mengakhri konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari satu abad tersebut. Perdamaian Israel-Palestina pulayang akan mengembalikan stabilitas regional kawasan Timur Tengah. Meskipun perdamaian adalah sesuatu yang sangat mahal bagi kedua bangsa, tetapi hal itu harus dipayakan terus-menerus tanpa mengenal lelah.

**Daftar Pustaka**

Abd. Rahman, Mustafa, *Dilema Israel: antara Krisis Politik dan Perdamaian*, penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Rais, Amien, *Timur Tengah*, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.

Sihbudi, M.Riza, *Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Menyandera Timur Tengah*, P.T. Mizan Publika, Jakarta, 2007.

*Republika*, 18 Juli 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_, 19 Juli 2014.

“Ahmadinejad: Harus Ditumbangkan, Israel Penyebar Terorisme di Dunia”, <http://www.republika.co.id>, diakses 16-5-2011.

“Dari 120 Roket Gaza, hanya 8 yang Berhasil Dicegat”, http:www.pkspiyungan.rog/2014/08/dari-120-roket-gaza-hanya-8-yang.html, diakses 5-8-2014.

“Demokrasi Agama, Dasar Republik Islam Iran”, http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/42410/demokrasi-agama-dasar-republik-islam-iran, diakses 14-4-2012.

“Hamas: Gencatan Senjata hanya Pengalihan Isu”, <http://international.okezone.com/read/2014/08/04/412/1019848/hamas-gencatan-senjata-hanya-pengalihan-isu>, diakses 5-8-2014.

“Iran Banggakan Bantuan Teknologi Roket untuk Hamas”, <http://www.liputan6.com/read/2001694/iran-banggakan-teknologi-roket-untuk-hamas>, diakses 22-7-2014.

“Israel Akui Gagal Total di Gaza”, <http://web.inilah.com/read/detail/2124876/israel-akui-gagal-total-di-gaza#U-DWe6FF-So>, diakses 5-8-2014.

“Roket Muqawama Palestina vs Iron Dome Israel”, <http://indonesian.irib.ir>, diakses 21-11-2012.

Suleiman, Dina Y., “Mengapa Iran Tak Serang Israel ?”, <http://indonesian.irib.ir>, diakses 21-11-2012.

“Teknologi Militer Hamas Pernah Disuplai Iran”, <http://international.okezone.com/read/2014/08/412/1020077/teknologi-militer-hamas-pernah-disuplai-iran>, diakses 5-8-2014.

“Tiga Kerjasama Penting Indonesia dan Palestina”, <http://www.republika.co.id./berita/internasional/palestina-israel/14/02/28/n1> pgti-tiga-kerja-sama-penting-indonesia-dan-palestina, diakses 1-3-2014.

## **REKONSILIASI INTERNAL PALESTINA: LANDASAN UTAMA NEGOSIASI DAMAI PALESTINA-ISRAEL\*[[2]](#footnote-2)**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Pada tanggal 12 Oktober 2017, rakyat Palestina di wilayah pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan (Gaza Strip and West Bank River) meluapkan kegembiraan pasca-penandatanganan kesepakatan damai atau rekonsiliasi antara dua faksi besar yang berseteru sejak tahun 2007, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah yang mendominasi organisasi PLO (*Palestine Liberation Organization*). Kesepakatan tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya pasca kesepakatan tahun 2011 yang difasilitasi oleh Mesir, di ibukota Kairo. Rekonsiliasi internal Palestina ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi langkah diplomasi Palestina menuju pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa faksi Hamas dan Fatah bermusuhan selama sekian lama ? Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak ? Bagaimana respon Israel dan prospek perjuangan Palestina merdeka pasca rekonsiliasi ?

**Organisasi-Organisasi Perjuangan Palestina**

Sejak didirikannya Negara Israel pada 14 Mei 1948, konflik antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi di Palestina tidak dapat dihindarkan. Konflik bahkan meluas dan sudah memicu perang besar Arab-Israel sebanyak tiga kali, yaitu perang tahun 1948-1949, Perang 6 Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Konflik ini telah mengakibatkan sebagian rakyat Palestina mengungsi dan tercerai-berai ke berbagai Negara, seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Libya, bahkan ke Amerika Serikat, Negara-negara Amerika Latin, Jerman, dan Inggris (London). Dari tempat persebarannya di negara-negara Arab tersebut mereka mendirikan organisasi-organisasi perlawanan yang tergabung ke dalam PLO.

Organisasi PLO lahir sebagai akibat desakan kepentingan bersama antara bangsa Arab Palestina dan bangsa Arab di sejumlah Negara Arab. Mereka menginginkan sebuah organisasi yang bisa mewakili identitas Palestina dan bisa diterima oleh semua Negara Arab. Urgensi mendirikan organisasi perlawanan tersebut terungkap dari hasil KTT Arab di Kairo, Mesir, pada awal tahun 1964 yang memutuskan perlunya mengembalikan identitas rakyat Palestina dan membuat organisasi Palestina serta angkatan perangnya (Sihbudi, 1993: 27). Sementara itu, bangsa Palestina menginginkan suatu organisasi yang bisa mencakup seluruh aspirasi orang-orang Palestina, sehingga pada tanggal 28 Mei sampai dengan 2 Juni 1964 diadakan konggres Bangsa Arab Palestina I di Jerusalem Timur, dan berhasil mendirikan PLO dengan dua badan penting, yaitu Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council) yang berfungsi sebagai parlemen Palestina di pengasingan dan Komite Eksekutif (Executive Committee). Dalam konggres tersebut Ahmad Al-Syuqairi terpilih sebagai ketua PLO yang pertama dan menjabat sampai dengan tahun 1967, posisinya digantikan oleh Yahya Hamuda sampai tahun 1969. Yasser Arafat, ketua faksi Fatah, kemudian menggantikan Yahya Hamuda dari tahun 1969 sampai meninggal Nopember 2004.

Dalam piagam pendirian PLO dinyatakan bahwa:

1. Palestina adalah tanah air bangsa Arab Palestina yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah air Arab yang besar, sedangkan bangsa Palestina merupakan bagian dari bangsa Arab.
2. Palestina dengan batas-batasnya yang telah ada pada masa perwalian Inggris merupakan kesatuan wilayah yang integral.
3. Bangsa Arab Palestina adalah penentu sah di tanah airnya. Setelah Bangsa Palestina meraih kemerdekaan tanah airnya, merekalah yang berhak menentukan nasibnya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kemurnian, kehendak, dan pilihannya.

Piagam PLO menghendaki penghancuran Israel dan pendirian sebuah negara yang sekuler dan demokratis di wilayah yang diduduki oleh Israel (Alasdair Drysdale dan Gerald H. Blake, 1985: 287). Markas PLO semula ada di Jerusalem, tetapi setelah perang tahun 1967 berpindah ke Yordania. Pasca peristiwa *Black September* (September hitam) tahun 1970, yaitu peristiwa pengusiran tentara PLO oleh tentara Yordania, markas PLO berpindah lagi ke Beirut, Lebanon. Terakhir, akibat peristiwa pembantaian pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatilla tahun 1982, markas mereka berpindah ke Tunisia. Sejak dipimpin oleh Yasser Arafat, pamor PLO semakin meningkat dan pada KTT Arab di Rabbat, Maroko, pada tahun 1974 diputuskan bahwa PLO adalah satu-satunya wakil sah rakyat Palestina, status ini kemudian dikukuhkan pula oleh Majelis Umum PBB pada 22 Nopember 1974. *Palestine Liberation Army* merupakan sayap militer resmi PLO. Perjuangan PLO, selain melalui cara-cara militer juga berjuang secara diplomatik, tetapi sejak konferensi Madrid, Spanyol, pada Nopember 1991, yang menjadi titik awal serangkaian perundingan bertahap Palestina-Israel, PLO sudah mulai meninggalkan perjuangan dengan kekerasan senjata.

Diantara gerakan-gerakan perlawanan, terdapat juga organisasi-organisasi gerakan di luar PLO yang berjuang secara non-kooperatif terhadap Israel, mereka itu adalah Jihad Islam dan Hamas yang berideologi Islam. Kedua organisasi tersebut mendapat dukungan luas dari rakyat di wilayah Gaza sejak akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an, sebagai dampak dan pengaruh dari revolusi Islam Iran tahun 1979 di kawasan Timur Tengah. Jihad islam (*Islamic Jihad Movement*) didirikan pada tahun 1980 oleh anak-anak muda Palestina yang menuntut ilmu di berbagai universitas di Mesir. Dalam perjalanan perjuangannya, organisasi ini pecah menjadi tiga kelompok, yaitu Jihad Islam pimpinan Fathi Asy- Syaqaqi, Jihad Islam Baitul Maqdis pimpinan Syaikh As’ad, dan Jihad Islam Batalion Al-aqsha pimpinan Ibrahim Sibril. Diantara ketiga kelompok tersebut, Jihad Islam pimpinan Asy-Syaqaqi menjadi kelompok yang mempunyai pengikut terbanyak, namun ketiganya tidak bersedia berpartisipasi dalam politik.

HAMAS atau singkatan dari *Harakat Al-Muqawamah Al- Islamiyah* (Gerakan Perlawanan Islam) adalah organisasi perlawanan Palestina yang didirikan pada bulan Agustus 1988, beberapa bulan pasca-intifadah pertama Desember 1987, oleh Syeikh Ahmad Yassin, seorang tokoh spiritual Hamas dan kepala Islamic Center di Gaza. Cikal-bakal dari organisasi Hamas adalah organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Sebelum menjadi organisasi Hamas, kelompok ini lebih memusatkan perhatiannya pada gerakan-gerakan sosial dan moral. Pada September 1988, Hamas mengeluarkan piagam 40 halaman yang berisi program dan pandangan mereka tentang pemecahan Palestina. Bagi Hamas, isu pembebasan Palestina harus dikaitkan dengan tiga hal, yaitu: Palestina, Arab, dan Islam. Untuk itu, semangat jihad harus disebarluaskan di kalangan ummat Islam, dan masalah Palestina hanya bisa dipecahkan jika seluruh ummat Islam terlibat dalam jihad melawan kaum zionis Israel (Riza Sihbudi, 1993 :81-82). Kelompok Hamas ini aktif menggerakkan intifadah di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat, dan hingga kini, kelompok ini adalah yang terkuat dalam melawan penindasan Israel. Berbeda dengan PLO, Hamas menolak segala bentuk kompromi dengan Israel, tesis Hamas yang menganggap sia-sia melakukan negosiasi dengan Israel, terbukti dengan kegagalan demi kegagalan kesepakatan dan perundingan perdamaian Palestina-Israel yang dimulai sejak Oslo I tahun 1993 hingga tahun 2000, dan kini menemui jalan buntu. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu alas an mengapa popularitas Hamas kian melambung di kalangan rakyat Palestina di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat.

**Perseteruan Hamas dan Fatah di Palestina**

Perbedaan-perbedaan prinsip perjuangan, perbedaan ideologi, dan persaingan pengaruh antara Hamas dan Fatah, memuncak dalam bentuk perseteruan keduanya pasca kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif yang demokratis pada 25 Januari 2006. Awal konflik dan perebutan pengaruh sebenarna terjadi sejak terbentuknya organisasi Al-Ikhwan Palestina di Jalur Gaza pada tahun 1960 dan bangkitnya Ikhwanul Muslimin di Tepi Barat yang mengakibatkan

para pemuda dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina terpecah ke dalam kedua organisasi tersebut. Pada akhir tahun 1970-an, pernah terjadi konflik fisik dan politik antara Ikhwan dan kaum nasionalis sekuler yang memperebutkan sejumlah kursi lembaga-lembaga sosial dan kemahasiswaan di sejumlah universitas di Gaza. Pemerintah kolonial Israel pun bersikap melakukan pembiaran terhadap menguatnya pengaruh Ikhwanul Muslimin yang berhaluan Islam dan berbasis di Mesir untuk beroperasi di Palestina, dengan harapan kelompok Islamis ini bisa membantu melemahkan Fatah yang saat itu masih dianggap sebagai kelompok perlawanan yang berbahaya oleh Israel, tetapi dalam perkembangannya kemudian kelompok Hamas ini ternyata justru terbukti lebih militant dibanding kelompok nasionalis sekuler yang tergabung dalam PLO.

Pada peristiwa intifadah I pada 8 Desember 1987, Ikhwan pada mulanya tidak mau melibatkan diri dan tidak bersedia menjalin kerjasama dengan kaum nasionalis sekuler, tetapi pada Agustus 1988, pasca pengumuman pendirian Hamas, kelompok ini mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan intifadah, dan menolak klaim sepihak PLO sebagai penggerak utama intifadah. Kelompok Hamas ini pada awalnya juga tidak mau terjun ke dunia politik, terbukti ketika pemilu I tahun1996 organisasi ini melakukan boikot dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kuatnya pengruh Ikhwanul Muslimin dalam organisasi Hamas mendorong organisasi ini mementingkan gerakannya di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Hamas membangun sekolah-sekolah, masjid-masjid sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi ummat. Organisasi ini juga membangun rumah sakit-rumah sakit dan berbagai fasilitas layanan public yang tidak terpenuhi oleh pemerintah Fatah. Aktivitas-aktivitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi NGO (*Non-Governmental Organization*), sehingga memudahkan organisasi Hamas membangun hubungan keterdekatan dengan masyarakat bawah. Pasca intifadah II tahun 2000, dukungan masyarakat Palestina di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat terhadap Hamas semakin meningkat, hal inilah yang kemudian menjadi bekal bagi Hamas untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2006.

Penilaian masyarakat Palestina terhadap kinerja institusi-institusi social Hamas yang relatif bersih dan efektif, serta kosistensi prinsip gerakan organisasi ini yang anti-kolonialisme dan tidak kompromistis terhadap Israel, sementara di lain pihak kinerja pemerintahan oleh Fatah yang tidak efissien dan korup, serta kenyataan adanya kegagalan-kegagalan kesepakatan damai Palestina-Israel yang dijalankan pemerintah Fatah, telah mendorong rakyat Palestina di daerah pendudukan untuk lebih memilih Hamas dalam pemilu. Kepopuleran Hamas terbukti dari perolehan suara dalam pemilu legislative pada 25 Januari 2006 sebesar 76 kursi dari 132 kursi parlemen, sementara Fatah hanya memperoleh 43 kursi ([www.infopalestina.com](http://www.infopalestina.com)). Dengan perolehan suara lebih dari 50% tersebut, faksi Hamas berhak untuk membentuk pemerintahan baru. Meskipun demikian, tidak mudah bagi Hamas untuk menjalankan pemerintahannya karena adanya pemboikotan, baik internal maupun eksternal Palestina.

Secara internal, kelompok Fatah yang sudah lama mendominasi kekuasaan pemerintahan Palestina, melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan baru di bawah Hamas. Pada bulan Maret 2006, pemimpin sayap militer Fatah menyatakan penolakan terhadap perintah dari anggota parlemen Palestina dari kubu Hamas terkait rencana pengambilalihan sector keamanan dari tangan Fatah. Mereka bahkan kemudian melakukan aksi-aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para anggota Hamas, sehingga konflik nersenjata antara keduanya pun tak terhindarkan. Meskipun kedua belah pihak sempat beberapa kali mengumumkan gencatan senjata, namun intensitas konflik antara keduanya semakin meningkat pada Desember 2006. Mahmoud Abbas, Presiden Palestina dan sekaligus pemimpin Fatah, sempat meminta digelarnya kembali pemilu Palestina, namun permintaannya tersebut ditolak oleh Hamas yang menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu kembali dalam jeda waktu yang singkat bertentangan dengan peraturan resmi yang berlaku.

Pada bulan Februari 2007, dengan difasilitasi oleh Arab Saudi, perwakilan Hamas dan Fatah bertemu di Mekkah untuk melakukan perundingan damai, mereka pun sepakat untuk menghentikan kontak senjata dan membentuk pemerintahan koalisi. Namun, perbedaan muncul terkait siapa yang akan menduduki jabatan menteri dalam negeri, sebuah posisi yang amat vital karena memiliki kontrol atas angkatan bersenjata. Perbedaan pendapat yang menajam inipun kemudian berakhir dengan kontak senjata. Pada tanggal 10 Juni 2007, para personil Hamas menahan beberapa anggota Fatah, bahkan mengeksekusi salah satu diantara mereka. Tindakan Hamas tersebut dibalas oleh Fatah dengan menembaki kediaman P.M. ismail Haniya dan membunuh imam masjid besar Gaza. (http://www.infopalestina.com, diakses 2-11-2017). Hamas kemudian berhasil menduduki Markas Angkatan Keamanan Nasional milik Fatah yang berlokasi di Gaza Utara dan merebut kantor Dinas Keamanan Pencegahan Palestina dari tangan Fatah. Para personil Fatah yang terdesak oleh pasukan Hamas akhirnya meninggalkan pos-pos militernya di Jalur Gaza sambil meledakkannya dengan maksud Hamas tidak bisa memanfaatkan pos-pos tersebut. Dengan mundurnya pasukan Fatah, Jalur Gaza sepenuhnya berada di bawah kendali Hamas, Presiden Mahmoud Abbas kemudian memutuskan untuk membubarkan pemerintahan koalisi Hamas dan Fatah, dan sebagai akibatnya, wilayah Palestina terpecah menjadi dua, yaitu wilayah Jalur Gaza yang sepenuhnya dikuasai oleh Hamas dan wilayah Tepi Barat yang dikuasai Fatah.

Keterpecahan Palestina sebenarnya tidak lepas dari scenario Amerika Serikat (AS), Israel, dan Uni Eropa yang tidak menginginkan Hamas berkuasa di Palestina, karena menurut mereka Hamas adalah kelompok teroris yang tidak bersedia mengakui keberadaan Israel. Padahal cara-cara perlawanan militer adalah bentuk resistensi Hamas terhadap kolonialisme Israel yang telah berpuluh-puluh tahun menyengsarakan rakyat Palestina di wilayah pendudukan, Resistensi ini adalah sah sebagaimana dikemukakan oleh Dubes Rusia untuk Iran, Lowan Jackryan, yang mengatakan: “*Resistance is a legitimate national right for all people under occupation, resistance is not terrorism* “ (<http://www.parstoday.com>, diakses 2-11-2017).

Sejak kemenangan Hamas dalam pemilu, AS dan Israel mulai memperkuat Fatah dengan memasok sejumlah logistic dan persenjataan, serta pelatihan-pelatihan militer untuk melawan Hamas. Pada tanggal 18 agustus 2007, AS dan UE memutuskan untuk membuka kembali hubungan dengan pemerintah Palestina tanpa melibatkan Hamas. Di lain pihak, Israel dan Mesir memulai blockade militernya ke wilayah Gaza, sehingga mengakibatkan terjadinya isolasi dan tragedy kemanusiaan terhadap sekitar 1,5 juta orang di wilayah tersebut. Hal ini kemudian mendorong lembaga-lembaga kemanusiaan dunia untuk beraksi di Gaza. Lembaga-lembaga tersebut semacam MER-C Indonesia (*Medical Emergency Rescue-Committee*), *International Solidarity Movement, Freedom Flotilla*, Amesti Internasional, *Human Right Watch*, dll. Sejak aksi blockade militer, Israel telah tiga kali melakukan invasi di Gaza dengan tujuan melemahkan Hamas, yaitu tahun 2008, tahun 2012, dan tahun 2014. Sementara Mesir menutup pintu gerbang penyeberangan Rafah yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir, sedang pemerintah Fatah menghentikan pasokan listrik, bahan bakar, obat-obatan, dan suplai makanan ke wilayah itu. Kondisi yang demikian menempatkan rakyat palestina di Jalur Gaza berada dalam penjara terbesar di dunia.

**Upaya Rekonsiliasi Damai dan Prospeknya**

Berbagai upaya untuk menghentikan konflik antara faksi Hamas dan Fatah pernah beberapa kali dilakukan. Pada Maret 2010, perwakilan Hamas dan Fatah melakukan pertemuan di Doha, Qatar, untuk membahas masalah masa depan Palestina berupa debat resmi dan disiarkan melalui stasiun televise agar bisa disaksikan secara luas oleh public. Kemudia pada Maret 2011 kedua pihak melakukan pertemuan di Kairo, Mesir, yang berhasil mencapai kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi sementara, pembebasan para tahanan dari kedua pihak, dan pelaksanaan pemilu presiden dan dan perdana menteri pada tahun 2012. Pelaksanaan pemilu ini hingga sekarang masih juga belum terealisasi. Kedua pihak juga sepakat membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 2014, namun pelaksanaannya juga terus tertunda.

Upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah kembali dilakukan di Kairo, Mesir, yang menghasilkan kesepakatan pada tangga 12 Oktober 2017, guna mengakhiri lebih dari satu dekade perselisihan internal Palestina. Poin-poin dari kesepakatan itu adalah:

1. Kedua pihak sepakat menyerahkan pengamanan perbatasan Gaza dan Mesir di Rafah kepada pemerintah bersama Palestina dengan pengawasan Badan Perbatasan Uni Eropa. Pengawal Kepresidenan Palestina akan ditugasi menjaga perbatasan yang selama ini dikelola oleh pegawai Hamas.
2. Kedua kubu menyepakati penyerahan secar penuh kendali administrasi di Gaza kepada pemerintah bersama pada 1 Desember 2017.
3. Kedua pihak sepakat bahwa Pemerintah palestina akan mengadakan pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani.
4. Dimulainya negosiasi yang lebih luas diantara semua faksi di palestina terkait pembentukan pemerintahan bersama.
5. Disepakatinya masalah restrukturisasi kepolisian dan intelijen pemerintahan bersama serta penerjunan 3000 orang polisi di Gaza, sedang 5000 orang pegawai yang dipekerjakan Hamas di Jalur Gaza juga langsung bekerja di bawah pemerintahan bersama (*Republika*, 13 Oktober 2017:1)

Seluruh kesepakatan tersebut akan ditinjau kembali oleh Pemerintah Mesir dan harus terlaksana sebelum 1 Desember 2017.

Kesepakatan rekonsliasi ini disambut baik oleh seluruh rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan oleh sejumlah Negara Arab, juga pemerintah Indonesia. Dengan adanya rekonsliasi dan persatuan internal Palestina, diharapkan perjuangan Palestina menuju cita-cita Negara merdeka akan terwujud. Meskipun demikan, hal itu tidaklah mudah untuk ditempuh mengingat respon Israel dan sekutunya AS yang mensyaratkan bahwa kelanjutan perundingan damai Palestina-Israel harus didahului dengan komitmen Hamas yang harus mengakui keberadaan Negara Israel, melucuti persenjataannya, dan menanggalkan perlawanan terhadap Israel secara militer. Persyaratan-persyaratan Israel tersebut sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilaksanakan oleh Hamas, mengingat tingginya tensi ketegangan antara rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan pihak militer Israel, dan ketidakpercayan Hamas yang sangat tinggi terhadap komitmen Israel. Konsistensi Hamas pada prinsip perjuangannya dikemukakan kembali oleh Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshal, yang mengatakan bahwa Hamas tetap akan menjalankan misi perlawanannya terhadap Israel melalui jalur militer (<http://www.parstoday.com>, diakses 10-11-2017).

Dari perspektif Israel, upaya rekonsiliasi Hamas-Fatah ini tentu saja akan menimbulkan kegeraman yang sama oleh Perdana Menteri Israel. Benyamin Netanyahu, sebagaimana terjadi ketika tercapai rekonsiliasi internal Palestina pada mei 2011. Rekonsiliasi internal Palestina telah membuyarkan angan-angan pemerintah Israel untuk terus mendikte Pemerintah Otoritas Palestina di bawah Pemerintahan Mahmoud Abbas agar memenuhi kemauan Israel. Pemerintah Abbas selama ini sangat tunduk kepada kemauan Israel yang justru kontraproduktif karena merugikan phak Arab Palestina, hal ini misalnya dapat dilihat dari kebijakan penghentian pasokan makanan, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan ke wilayah Gaza, juga penghentian dan penundaan gaji pegawai Hamas yang bekerja di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari instruksi pemerintah Israel terhadap pemrintahan Otoritas Palestina, jika Abbas tidak mengindahkan perintah pemrintah Israel tsb maka dana pajak Palestina akan dibekukan oleh Israel.

Sejak tercapainya kesepakatan damai Palestina-Israel dari tahun 1993 hingga saat ini, Israel selalu mengingkari hasil-hasil kesepakatan. Bahkan sejak kebuntuan perundingan damai pada tahun 2010, Israel justru memanfaatkan momentum tersebut untuk terus memperluas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur, suatu wilayah yang diklaim sebagai bagian wilayah Negara Palestina merdeka kelak. Segala bentuk pengingkaran Israel tersebut telah membuktikan tesis Hamas yang tidak mempercayai perundingan damai apapun dengan Israel. Meskipun sulit bagi Hamas untuk menerima persyaratan-persyaratan Israel bagi negosiasi damai Palestina-Israel, bagaimanapun persyaratan utama bahwa rakyat Palestina harus bersatu merupakan persyaratan mutlak bagi langkah-langkah diplomasi berikutnya Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya.

**Daftar Pustaka**

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa: A Political Geography*, 1985

Fraser, T.G. *The Arab-Israeli Conflict*, Macmillan Press Ltd., London, 1995.

Harmiyati, *Konflik Palestina-Israel*, HI UPN ‘Veteran” Yogyakarta, 2003.

Rais, Amien, *Timur Tengah*, HI UGM Yogyakarta, 1989.

Sihbudi, Riza, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, P/T.Eresco, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Timur Tengah, Dunia Islam*, dan Hegemoni Amerika, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.

http://www.infopalestina.com, diakses 2-11-2017.

<http://www.parstoday.com>, diakses 2-11-2017

*Republika*, 13 Oktober 2017

## **DIMENSI EKONOMI, TEKNOLOGI, DAN KEAMANAN DALAM INVASI AS KE IRAK\*[[3]](#footnote-3)**

**Harmiyati**

**Pendahuluan**

Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 jam 05.35 waktu Baghdad atau jam 09.35 WIB, selama 21 hari, sejarah dunia kembali mencatat sikap arogan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat (AS) dengan memulai serangan ke Irak tanpa alasan yang jelas dan tanpa dukungan PBB maupun mayoritas masyarakat intemasional. Serangan ini sebelumnya didahului oleh ultimatum George W. Bush kepada Saddam dan keluarganya untuk meninggalkan lrak dalam tempo 48 jam atau menghadapi konsekuensi perang, dan rupanya pilihan terakhir inilah yang diambil Saddam untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya. Langkah tidak populer AS tersebut dilakukan setelah negara adidaya itu menemui jalan buntu di forum Dewan Keamanan PBB, karena terganjal oleh Perancis, Rusia, dan Cina selama berminggu-minggu untuk memaksakan upaya militer guna menyerang lrak. Mengapa AS bersikeras untuk tetap menyerang Irak kendati harus mengesampingkan peran PBB ? Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku AS tersebut, baik dipandang dari dimensi teknologi, keamanan, maupun ekonomi.

**Dimensi Teknologi**

Sebenarnya secara logika, lrak sebagai negara yang kalah perang pasca Perang Teluk II telah demikian tidak berdaya baik secara ekonomi maupun militer. Secara ekonomi, pemerintah Irak yang telah mengalami sanksi embargo yang sudah berjalan selama 12 tahun harus menanggung kesengsaraan yang.luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnlya, pemerintah Irak juga dituntut untuk membayar rampasan perang terhadap Kuwait dan memperbaiki fasilltas-fasilitas perusahaan minyak AS di Kuwait yang hancur akibat invasi Irak ke negeri dinasti Al-Sabah tersebut. Berdasarkan. resolusi DK PBB No. 986 tahun 1995 dan di bawah program *oil for food,* Irak diharuskan membayar 30% hasil penjualan minyaknya untuk dana kompensasi perang.

Demikian pula secara militer, 80% persenjataan Irak sebenarnya telah dihancurkan oleh pasukan koalisi pimpinan AS pada tahun 1991. Penghancuran ini kemudian dilanjutkan oleh tim UNSCOM *(United Nations Special Committee)* yang memperoleh mandat PBB antara tahun 1991-1998 untuk menginspeksi dan menghancurkan senjata pemusnah massal Irak. Catatan UNSCOM mengungkapkan bahwa pada tahun 1998sebanyak 817 dari 819 rudal *Scud* Irak telah dihancurkan. Irak juga telah dilucuti 95% kekuatannya. Sementara itu, Lembaga Internasional untuk Studi Strategis *(lISS* = *International Institute for Strategic Study)* yang berbasis di London dalam laporannya awal September 2002 yang lalu mengakui bahwa akibat Perang Teluk II banyak fasilitas senjata nuklir Irak dihancurkan. Fasilitas itu antara lain : instalasi dan pusat riset nuklir *AI-Thuwaitha,* pabrik pemisahan uranium *AI-Qaim* dan *Al-Jesira,* fasilitas *AI-Tarmiya* dan *AI-Sharqat* yang digunakan untuk memproduksi uranium, dan markas besar *AI- Theerm* untuk mendesain senjata nuklir (Hans C. von Sponeck, 2002: 1-2). Kenyataan·kenyataan ini menunjukkan bahwa Irak memang sudah sangat tidak berdaya secara militer, namun mengapa AS bersikeras untuk tetap menyerang Irak ?

Kemenangan kelompok loyalis Yahudi dalam kabinet Bush lah yang menjadi sumber pendorong *policy* AS yang sangat keras terhadap Irak. Kelompok loyalis atau lebih dikenal sebagai kelompok kanan ini direpresentasikan melalui figur-figur resmi scperti Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Wakil Presiden Dick Cheney, Penasehat Keamanan Nasional Con doleeza Rice, dan Deputi Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz yang pernah menjabat sebagai Dubes AS untuk RI di era tahun 1980-an . Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan P.M. Israel, Ariel Sharon, dan memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keamanan Israel dan menjamin keunggulan Israel atas seluruh bangsa Arab, termasuk di bidang teknologi militer. Kemenangan lobi Yahudi di Senat dan Konggres AS untuk memaksakan *policy* AS terhadap Irak, bahkan telah tercapai sejak Operasi Badai Gurun *(Operation Desert Storm)* pada perang Teluk II. Seperti diketahui, operasi tersebut yang tujuan utamanya memaksa lrak keluar dari Kuwait sesuai mandat resolusi PBB No.660, ternyata telah melenceng jauh dengan menghancurkan pusat-pusat industri yang dicurigai sebagai tempat pembuatan senjata kimia, nuklir, dan biologi Irak. Operasi ini sekaligus merupakan momentum bagi Israel untuk mempertahankan 'supremasi" teknologi militemya dalam pertarungan melawan Irak sebagai musuh strategis dan potensial utama di dunia Arab. Kekhawatiran Israel terhadap ancaman Irak memang terasa berlebihan setelah Irak berhasil membangun teknologi persenjataan militer secara besar-besaran di awal 1980-an sampai 1990. Kemajuan teknologi yang dicapai Irak, sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1959 ketika Baghdad mendirikan Komite Energi Nuklir lrak *(Iraqi Nuclear Energy Committee).* Pada tahun yang sama, Irak bergabung dalam Badan Tenaga Atom Internasional *(lAEA* = *lnternational Atomic Energy Association).* Sepuluh tahun kemudian, pada 29 Oktober 1969, pemerintah Irak menandatangani Perjanjian Larangan Pengembangan Nuklir *(NPT* = *The Nuclear Non-Proliferation Treaty),* dan tiga tahun kemudian meratifikasinya. Pada tahun 1960, jauh sebelum Saddam berkuasa, Irak menjalin kerjasama dengan Uni Soviet (Rusia sekarang) untuk membangun riset reaktor nuklir di Al-Tuwaitha, sebuah kota di selatan Baghdad, yang pernbangunannya dimulai sejak 1963 dan selesai pada tahun 1968 (Adel Darwish, 1991: 115). Reaktor nuklir yang hanya berkekuatan 5 Mega Watt ini, pada tahun *1975 diupgrade* menjadi 40 MW dengan melibatkan Perancis.

Pada permulaan tahun 1976, Irak menandatangani perjanjian dengan Italia mengenai suplai perlengkapan dan teknologi nuklir, termasuk daur ulang bahan bakar nuklir dan pemrosesan kembali bahan bakar radiasi *(****Ibid****).* Pada tahun berikutnya, dengan bantuan Perancis, pemerintah Irak berhasil membangun reaktor nuklir, yang dikenal dengan proyek *Osirak,* tetapi kemudian didesain sebagai proyek *Tammuz I7*. Kedua reaktor ini adalah *Tammuz I* yang berkekuatan. 50 MW dan *Tammuz II* yang berkekuatan jauh lebih kecil, hanya 1 MW. *Tammuz I* menggunakan bahan baker uranium yang diperkaya *(enriched uranium)* dan mampu mernproduksi plutonium (Pu-239) 10 kg per tahun (untuk membuat satu senjata nuklir diperlukan kira-kira 6 kg plutonium). Pada bulan Juli 1980, Perancis rnengapalkan 12 kg dari total kebutuhan 80 kg uranium (U-235) ke Irak. Reaktor Tamnuz I mernbutuhkan tiga muatan dari 12 kg U-235 per tahun, sementara Tammuz II hanya membutuhkon satu muatan dari 12 kg U-235.

Pada era 1980-an tersebut, Irak bukan hanya berhasil membangun reaktor nuklir, tetapi juga teknologi rudal serta mampu mengembangkan senjata kimia dan biologi. Pengembangan teknologi rudal Irak berlangsung sejak tahun 1984 dengan bantuan konstruksi dan teknologi dari perusahaan raksasa Jerman, *Messerschmitt-Bolkow-B/ohm* (MBB), yang pembangunannya mencapai kesempurnaan pada tahun 1989 dengan berdlrinya Pusat Riset dan Pengembangan Rudal dan Senjata Kimia yang terkenal dengmi nama *Saad* 16, dan berlokasi di sebelah utara kota Mosul, Irak Utara. Perlengkapan Saad 16 ini disuplai dari negara·:ncgara Barat. Pada tahun 1986, perusahaan *Hwellet Packard,* di bawah lisensi pemerintah AS, mengapalkan peralatan komputer senilai I juta dollar AS ke pusat riset tersebut. Hal serupa diikuti oleh perusahaan *Tektronix* dan *Wi/tron.* Keterlibatan perusahaan Jerman yang lain bagi kepentingan Saad 16 adalah Fritz Warner Armament Industries, Karl Kolb, Voest, Carl Zeiss of Baden Wurttemburg, dan Degussa of Stuttgart. Sementara, Inggris menyediakan konsultan teknik senior di bidang aerodinamika *(Ibid,* p.93).

Kemajuan teknologi rudal lrak mencapai prestasi tinggi dengan keberhasilan para insinyur 1rak melakukan modifikasi atas rudal *Scud-B* buatan Uni Soviet dalam berbagai daya jelajah. Dengan bantuan para teknisi Mesir, Irak berhasil mdakukan modifikasi melalui pengurangan ukuran muatan kepala nuklir dari 1000 kg menjadi 500 kg dan meningkatkan jangkauannya dari 300 km menjadi 600 km. Rudal modifikasi yang terkenal sebagai *A/­Hussein* ini telah teruji kemampuannya uniuk menghancurkan kota Teheran dalam Perang Teluk 1. Dari 360 buah rudal yang digunakan 1rak dalam konflik Perang Teluk I, sebanyak 200 buah telah dipakai untuk menekan Iran antara Februari-April 1988, sehingga secara psikologis berhasil memaksa Teheran untuk menerima gencatan senjata pada bulan Juli 1988. Perlu dicatat, bahwa rudal yang dipakai Irak untuk memerangi Pemerintah Iran, bukan hanya *A/­Hussein,* tetapi juga *Badr-2000* yang dibeli dari Mesir. Rudal yang terakhir ini merupakan hasil modifikasi *Scud-Bs* dengan pengurangan muatan sampai 27 5 kg dan bcrjangkau 600 km. Disamping untuk menghajar Iran, rudal *A/-Hussein* juga digunakan dalam Perang Teluk II

untuk menghajar Tel Aviv, Haifa, dan Jerusalem di Israel.

Selama tahun 1988, lrak juga berhasil memodifikasi rudal *Scud-B* menjadi *A/-Abbas* dengan muatan nuklir 300 kg dan jangkauan 900 km. Kemampuan rudal *A/-Abbas* telah teruji dalam Perang Teluk II untuk menghajar kota Riyadh, Dahran, dan AI-Khobar di Arab Saudi, sebagai kota-kota pangkalan militer AS. Pada Desember 1989, Irak mencatat prestasi gemilang dengan menempatkan satelit Tammuz-1 buatan sendiri yang diluncurkan dari pusat antariksa *AI·Anbar.* Satelit tcrsebut diluncurkan dengan menggunakan roket ballistic *AI-Abeed* yang mampu membawa hulu ledak 750kg dan berdaya jelajah 2000 km. Perkembangan lebih jauh dicapai pada bulan November 1990, ketika Irak berhasil melakukan uji coba rudal ballistik yang lain *(AI-Hijarat)* di wilayah Gurun Mauritania, yang mampu mencapai jarak 1200 km. Dalam Perang Teluk II, rudal *AI-Hijarat* ini digunakan untuk menghajar pusat reaktor nuklir Israel, Dimona, di gurun Negev.

Kemajuan teknologi satelit dan rudal Irak ini, diiringi dengan keberhasilan mengembangkan senjata kimia dan biologi yang dirintis sejak tahun 1974. Pembangunan senjata pemusnah massaI ini sejak semula dimaksudkan untuk mencapai paritas militer dengan Israel dan memberikan kemampuan *detterent* terhadap negara Yahudi tersebut. Dalam penggunaannya, senjata tersebut pernah diujicobakan dalam perang Teluk 1 melawan Iran dalam pertempuran di Panjivan (Iran) tahun 1983 dan terhadap rakyatnya sendiri (etnis Kurdi) pada 16 Maret 1988 di kota Halabjah. Iraq juga berkali-kali mengancam .Is:ael untuk membumihanguskan separoh wilayah Israel dengan rudal berhulu ledak kimia, seperti yang diperingatkan Saddam terhadap Israel pada 2 April 1990 : " *I swear to* God, *we will let our fire eat up half of Israel,if* *it tries to do anything againts Iraq, we do not need an atomic bomb, because we have binary chemicals* "(Donald Neff, 1991: 16).

Kemampuan penguasaan teknologi militer Irak inilah yang telah membawa kepanikan pihak Israel. Seperti diketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-­negara Arab selalu mendapat perhatian se:rius dari Israel dan AS, yang tidak rela melihat terjadinya perubahan perimbangan kekuatan yang menguntungkan pihak Arab. Untuk itu, Israel selalu menggunakan segala cara untuk menghalang-halangi bahkan menghancurkan kemajuan-kemajuan yang dicapai negara-negara Arab. Dalam kasus Irak ini, Israel sejak awal berusaha memonitor untuk kemudian mematahkannya. Pada awal pembangunan proyek *Tammuz* 17, Israel memprotes dukungan yang diberikan Perancis terhadap Baghdad. Melalui sandi *Operasi Sphinx,* agen-agen rahasia Israel, *Massad.* mclakukan penyusupan ke pusat riset nuklir dan berusaha memperoleh data informasi akurat tentang kemajuan Tammuz 17. Aksi­-aksi *Mossad* ini, berlanjut pada 4 juli 1979 dengan melakukan pengrusakan terhadap bagian­-bagian reaktor senilai 23 juta dollar AS di sebuah perusahaan di La Seinesur-Mer, dekat Toulon Perancis (Richard Wilson, 1991: 10). Bagian-bagian reaktor tersebut semula akan dikirimkan ke irak.

Agen-agen *Mossad* juga berusaha membunuh para pakar yang ikut mengembangkan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi militer lrak. Pada I4 Juni 1980, seorang insinyur kelahiran Mesir y,mg bekerja pada reaktor *Tammuz,* Dr. Yahia El Meshad, dibunuh di kamar hotelnya di Paris. Pada bulan Juni 1981, Dr. Salman,\_seorang anggota senior pada Komisi Tenaga Atom Irak yang sedang melakukan penelitian kerja sama di CERN, Swiss, ditemukan meninggal karena penyakit *paralisis* (keracunan makanan). Pada tanggal 22 Maret 1990, Gerald Vincent Bull, seorang ahli artileri Kanada, mati tertembak di luar apartemennya di Brussel, Belgia, setelah dipublikasikan memiliki hubungan dengan program persenjataan lrak. Kurang dari seminggu kemudian, empat warga Irak dan seorang *Warga* Perancis ditahan di Inggris karena dituduh menyelundupkan *krytron,* semacam alat picu nuklir, yang akan dibawa ke 1rak.

Kegiatan perusakan paling parah yang dilakukan Israel adalah ketika negara Yahudi itu melakukan aksi-aksi penghancuran terhadap reaktor Tammuz-I yang baru saja selesai dibangun. Pada waktu itu, tanggal 7 Juni 1981, dengan menggunakan sandi *Operasi Baby/on*, 8 buah Jet tempur F-15 *Eagle* & 8 buah jet tempur F-16 *Fighting Fa/con* tinggal landas secara rahasia dari bandara Etzion, menuju Al-Thuwaitha, dengan memakan waktu 2,5 jam, untuk menghancurkan fasilitas nuklir *Tammuz-l (Osirak)* yang merupakan simbol pencapaian teknologi paling *pregtigious* dari rezim Partai Baath, yang bukan hanya mampu dibanggakan pada rakyat Iraq, namun juga di lingkungan dunia Arab secara luas. Masing-masing pesawat Israel tersebut menjatuhkan 2 buah *high- explosive bombs* yang berkekuatan 2 x 975 kg (Urnar A. Jenie, 1992:1). Hanya dalam tempo 2 menit *Operasi Baby/on* berjalan lancar tanpa gangguan sedikitpun.

Pemboman oleh Israel itu telah rnengakibatkan reaksi keras dari masyarakat internasional yang tertuang dalam bentuk resolusi DK PBB No *487* tanggal 10 Juni 1981 yang intinya:

1. Mengutuk keras aksi-aksi penyerangan Israel sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB.

2. Meminta Israel untuk tidak rnengulangi perilakunya tersebut.

3. Menyerukanbahwa penyerangan tersebut merupakan ancaman terhadap IAEA NPT

4.Mengakui hak seluruh bangsa untuk mengejar pengembangan nuklir untuk perdamaian.

5. Meminta Israel untuk menyerahkan fasilitas-£asilitas nakhr kepada perlindungan IAEA

6. Menyerukan bahwa Irak berhak untuk mendapat ganti kerugian.

Sekalipun demikian, tidak satupun point-point dalam resolusi tersebut dilaksanakan olch Israel. Perdana Menteri Menachem Begin pada waktu itu bahkan berkeyakinan sambil mempropagandakan opini bahwa terdapat sebuah ruang rahasia. untuk memisahkan plutonium dan membuat bam di bawah Reaktor Osirak. Tetapi kesaksian Dr. Richard Wilson, seorang fisikawan nuklir dari Universitas Harvard AS, yang sempat berkunjung ke reaktor Osirak pada tahun 1982 telah mengesampingkan tuduhan-tuduhan P.M. Israel tersebut. Menurut Wilson, setelah masuk ke ruang bawah, dia tidak menemukan. ruang rahasia seperti yang dituduhkan Begin. Bahkan sebaIiknya, seperti pernah dikemukakan oleh Mordechai Vanunu, seorang pakar nuklir yang pernah bekerja pada Reaktor Dimona milik Israel, kepada surat kabar *London Sunday Times* pada 5 Oktober 1986 menjelaskan bahwa di Dimona terdapat laboratorium enam lantai yang digunakan untuk membuat. bom nuklir. Wilson juga memperingatkan fisikawan penasehat P.M. Begin, Yuuval Neeman, untuk mampu membedakan kondisi Reaktor Osirak dengan Reaktor Dimond.

Dalam analisis Wilson, reaktor nuklir Osirak berbeda dengan reaktor nuklir Dimona. Reaktor Osirak yang dibeli dari Perancis dan memiliki kekuatan 70 MW ini, hanya menggunakan air biasa *(light water)* sebagai moderatornya, dan hanya memiliki sedikit cadang netron *(neutron spare),* sehingga kesempatan untuk digunakan memproduksi plutonium semakin kecil. Di samping itu, reaktor Osirak menggunakan bahan bakar uranium yang sangat diperkaya *(very high enriched uranium* ), sehingga kadar U-238nya kecil dan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat diubah me1njadi plutonium (Pu-239) oleh sinar netron. Sebaliknya, berdasarkan keterangan Vanunu, reaktor Dimona rnerniliki kekuatan awal 50 MW yang kemudian ditingkatkan menjadi 150 MW. Bahan bakar uranium kasar disuplai secara rahasia dari Afrika Selatan, sedangkan muatan uranium yang diperkaya (*enriched uranium)* atau U-235 didapat dengan mencuri dari fasilitas-fasilitas nuklir di AS. Menurut Wilson, setidaknya bila reaktor nuklir Dimona ini telah beroperasi 50%, waktu itu tahun 1991, maka ia alcan dapat memproduksi plutonium yang dapat dipakai untuk membuat 300 bom nuklir.

Tetapi, analisis Wilson tentang kemampuan nuklir Israel tersebut mungkm masih di bawah perkiraan, karena Israel sendiri, sebagaimana Perancis, Cina, india, Pakistan, dan, Afrika. Selatan, bukanlah negara penandatangan NPT, sehingga fasllitas nuklirnya tidak bisa diperiksa oleh IAEA Kasus yang menimpa lrak menunjukkan, bahwa negara penandatangan NPT pun sesungguhnya tidak aman dari rongrongan negara bukan penandatangan NPT. Padahal sesuai aturan, negara penandatangan NPT seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman yang tidak dikehendaki.

Barangkali inilah ironi dari organisasi NPT, yang sejak awal pembentukannya tidak menunjukkan tingkat kesederajatan dalam keanggotaannya. Sejak dibentuk tahun 1968, Perjanjian Larangan Pengembangbiakan Nuklir bersifat diskriminatif dari awalnya. Negara-­negara besar pemilik bom nuklir (AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina) dapat memiliki akses bebas dalam teknologi nuklir. Bahkan, Perancis dan Cina sempat urung untuk menandatangani perjanjian sampai sekarang. Sementara 137 negara lainnya harus bersedia rnenyerahkan fasilitas nuklirnya agar dapat diperiksa oleh lAEA untuk menentukan apakah Negara-negara yang bersangkutan mengembangkan nuklir untuk kegiatan yang tidak merusak. Sekali lagi, sungguh ironis, bahwa sejak penandatanganan NPT, banyak negara-negara di dunia yang telah mengembangkan bom nuklir tanpa dapat dipantau oleh IAEA seperti Israel di atas. Rongrongan Israel untuk terus melumpuhkan kemampuan teknologi Irak yang didukung oleh pemerintah AS saat ini boleh dikata merupakan kemenangan gemilang negara Yahudi tersebut atas bangsa Arab. Hilangnya kendala dan musuh potensial Arab ini akan memuluskan jalan bagi kedua negara, Israel dan AS, untuk semakin memperluas hegemoninya di Timur Tengah.

**Dimensi Keamanan**

Perilaku militeristik AS di Timur Tengah dewasa ini, khususnya di Irak, sebenamya tidak lepas dan agenda Doktrin Ofensif baru AS yang dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih pada tanggal 17 September 2002 yang lalu. Doktrin yang digunakan sebagai pembenaran teoritis dan politis militerisme AS itu telah menjadi petunjuk bagi kebijakan AS menyerang pihak-pihak yang dianggap bisa mengancam kepentingan AS. Dalam hal ini, Presiden Bush memberi kriteria bahwa pihak-pihak tersebut adalah kelompok teroris, para pemerintah tiran, dan negara-negara tertentu pemilik senjata pemusnah massal. Doktrin Keamanan ini meliputi tujuh elemen, yakni :

1. Amerika harus mempertahankan dunia yang unipolar dan mencegah munculnya kompetitor baru di Eropa dan Asia.

2. Pengakuan bahwa terorisme merupakan ancaman baru, sehingga perlu dimusnahkan.

1. Menyatakan bahwa konsep pencegahan, kedaulatan, dan perimbangan kekuatan sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perlu strategi baru, bahwa untuk bisa aman tidak ada pilihan lain kecuali menyerang. Oleh karena itu, menurut Doktrin Ofensif ini, penggunaan kekuatan perlu dilakukan lebih dulu (perlunya *pre-emptive* strike) untuk meneegah mereka yang digolongkan sebagai ancaman potensial berubah menjadi persoalan besar.
2. AS harus melakukan pembongkaran dan penyusunan kedaulatan baru (perlunya pemaknaan ulang arti kedaulatan), sehingga AS dapat melakukan intervensi kemana­-mana setiap saat guna menghancurkan ancaman.
3. Strategi baru ini merupakan depresiasi umum terhadap aturan-aturan dan perjanjian-­perjanjian internasional serta kemitraan keamanan internasional.

6. AS memainkan peran secara langsung dan leluasa dalam menjawab ancaman-ancaman.

7 . Dengan strategi baru ini AS perlu pula menilai ulang mengenai stabilitas internasional.

Dalam kasus Irak, melalui Doktrin Ofensif tersebut AS dengan mudah mampu menjatuhkan stigma kepada Saddam Hussein sebagai pemilik senjata pemusnah massal. Apalagi, upaya penggulingan Saddam telah dirancang secara sistematis pasca Perang Teluk II tahun IJ91 *(Kompas,* 2003:5). Pada waktu itu, Paul Wolfowitz (seorang tokoh Yahudi AS) yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk Perencanaan Kebijakan AS mengajukan sebuah konsep tentang Doktrin Pertahanan Baru AS yang dikenal sebagai *Defence Planning Guidance for /994 -1999.* Dalam konsepnya itu ia mengusulkan tiga hal :

1. Untuk menjaga ketertiban baru dunia, AS perlu mencegah munculnya rival baru
2. Agar AS menggunakan doktrin *pre-emptive strike* (serangan dini) tanpa harus tergantung pada kekuatan koalisi dcngan negara-negara lain.
3. Perlunya serangan militer ke Irak untuk mencegah jatuhnya senjata pemusnah massal ke tangan teroris.

Dalam perkembangan selanjutnya, Wolfowitz dan para kelompok kanan lainnya merancang *Project for the New American Century* (PNAC) tahun 1997. Melalui proyek ini, mereka sempat mengusulkan kepada mantan Presiden Bill Clinton tentang perlunya mcnyingkirkan Presiden Saddam Hussein, dengan catatan bahwa upaya itu akan berjalan lambat , kecuali terdapat malapetaka besar seperti "Pearl Harbour baru" (Foreign Affairs, 1999:24-41) . Usulan kelompok Wolfowitz ini mendapatkan 'momentumnya dalam kahinet Bush saat ini karena dukungan penuh dari tokoh-tokoh kunci seperti Mentcri Pertahanan Donald Rumsfeld dan Wakil Presiden Dick Cheney. Usulan "Pearl Harbour baru" yang terealisasi dalam bentuk tragedi WTC 11 September 2001 telah menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan Doktrin Keamanan AS bukan hanya di Irak, tetapi juga secara luas di berbagai kawasan dunia ini.

**Dimensi Ekonomi**

Disamping alasan-alasan di atas, alasan lain yang dapat menjeIaskan ambisi besar AS mengagresi lrak adalah keinginan AS untuk menguasai minyak kawasan Teluk, khususnya Irak. Potensi minyak Irak menduduki ranking keempat setelah Arab Saudi dan produksinya nomor tiga setelah Iran *(lihat tabel* 1). Sementara dari data terakhir, Irak diperkirakan memiliki cadangan minyak mentah sekitar 112 milyar barrel, dan diprediksi masih memiliki deposit minyak lain sebesar 220 milyar barrel serta deposit gas, alam sebesar 110 juta kaki kubik *(Kampas,* 2002: 3). Dengan kekayaan minyak dan gas sebanyak itu, Irak memiliki posisi kuat secara geopolitik dan geoekonomi di wilayah Teluk.

**Tabel 1**

**Cadangan dan Produksi Minyak Dunia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Wilayah/negara** | **Jaminan Cadangan**  **(Juta Barrel)** | **Andil Total** | **Produksi**  **(barrel/hari)** | **Andil Total**  **(%)** |
| 1 | TimTeng dan Afrika Utara | 433.200 | 61,5 | 14.875 | 25,7 |
| 2 | Aljazair | 9000 | 1,3 | 990 | 1,5 |
| 3 | Abu Dhabi | 30.500 | 4,3 | 840 | 1,4 |
| 4 | Dubai | 1.400 | 0,2 | 365 | 0,6 |
| 5 | Mesir | 3200 | 0,5 | 915 | 1,6 |
| 6 | Iran | 48.500 | 6,9 | 2.195 | 3,9 |
| 7 | Iraq | 44.500 | 6,3 | 1.170 | 2,0 |
| 8 | Kuwait | 90.000 | 12,7 | 985 | 1,7 |
| 9 | Libya | 21.100 | 3,0 | 1.115 | 1,9 |
| 10 | Zona Netral | 5400 | 0,8 | 420 | 0,8 |
| 11 | Oman | 3500 | 0,5 | 420 | 0,8 |
| 12 | Qatar | 3400 | 0,5 | 425 | 0,7 |
| 13 | Saudi Arabia | 169.000 | 23,9 | 4.690 | 8,1 |
| 14 | Lain-lain | 3700 | 0,5 | 345 | 0,6 |
| 15 | Amerika Utara | 42.800 | 6,1 | 11.940 | 20,1 |
| 16 | Amerika Latin | 83.300 | 11,8 | 6.705 | 11,9 |
| 17 | Eropa Barat | 24.700 | 3,5 | 3800 | 6,5 |
| 18 | Afrika Sub Sahara | 20.800 | 3,0 | 2054 | 3,7 |
| 19 | Asia/Pasifik | 18.600 | 2,5 | 3320 | 5,8 |
| 20 | Blok Timur/Cina | 83.800 | 1,8 | 15.115 | 26,5 |
|  | **Total** | 707.200 | 100,0 | 57.800 |  |

*Sumber:* Alasdair Drysdale, "Oilfields and Pipelines", *The Cambridge Atlas of The 'Middle East and North Africa.* p.66

Di sisi lain, ketergantungan AS akan minyak semakin meningkat. Berdasarkan *T'he National Energy Policy Report* AS yang diumumkan Gedung Putih pada Mei 2001, ketergantungan minyak dari Teluk telah mencapai setengah dari total konsumsi AS, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan ketergantungan ini akan mencapai dua pertiga dari seluruh konsumsi minyak AS. Sementara cadangan minyak AS sendiri hanya di bawah 50 juta barrel dengan produksi mencapai 19,7 ribu barrel perhari dan dipastikan akan cepat habis. Oleh karena itu, sesuai kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, AS harus memperoleh strategi yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk menopang kepentingannya itu.

Dalam konteks Irak, kendala terbesar untuk merealisasikem kepentingan tersebut adalah terletak pada pribadi Saddam yang dikenal sangat anti terhadap hegemoni AS (dan juga Israel). Oleh karena itu, menyingkirkan Saddam Hussein dari tampuk kekuasaan Irak adalah kebutuhan AS paling *urgen.* Gedung Putih pun segera menyusun rancangan untuk mendiskreditkan Saddam di forum intemasional melalui tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, dengan harapan suatu saat dapat mengambil alih kendali minyak Irak. Lebih-lebih, diketahui bahwa *inner cyrcle* dari kabinet Bush terkenal sebagai milyuner yang sangat terkait dengan bisnis minyak. Figur-figur itu adalah George W. Bush sendiri dengan perusahaanlnya Arabusto dan Harken, Dick Cheney yang pernah menjabat sebagai *chief executive* di Haliburton, sebuah perusahaan minyak yang juga merupakan salah satu perusahaan besar di dunia sebagai penghasil alat-alat berat pertambangan. Sementara, Menteri Perdagangan Donald Evans rnemiliki saham antara 5-25 juta dollar AS di Tom Brown Inc., yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas. Sedang Penasihat Keamanan Nasional Condoleeza Rice dikabarkan pernah menjabat sebagai direktur Chevron (sebelumnya bernama Standard Oil of California atau SOCAL, pecahan dari Standard Oil yang dimiliki oleh John D. Rockefeller).

Untuk memperlancar jalan penguasaan minyak Irak ini, pemerintah AS telah mempersiapkan pemerintahan oposisi pengganti Saddam yang akan mengurusi masalah perminyakan. Kalangan oposisi di bawah payung *Iraqi National Kongres (/NC)* bahkan menjamin akan meninjau kembali semua kesepakatan bisnis yang telah dijalin oleh sejumlah negara dengan pemerintahan Saddam. "Kami akan meninjau semua perjanjian yang ada", kata insinyur perminyakan yang memirnpin Kongres Nasional Irak di London, Faisal Qaragholi *(Kompas,2002:3).*

Namun, obsesi AS untuk menikmati *bonanza* minyak Irak masih terbentur oleh kendala yang lain, yakni kepentingan negara-negara besar seperti Perancis, Rusia, dan Jerman yang tidak menyukai dominasi AS dalam bisnis minyak di Irak. Negara-negara tersebut telah menjalin kerjasama bisnis minyak Irak sejak program *oil for food* diberlakukan.. Di tengah-­tengah . penerapan sanksi embargo ekonomi terhadap Irak, mereka bahkan berhasil meningkatkan kontrak-kontrak dagang yang menggiurkan dengan menandatangani. sejumlah MOU dengan Irak, yang realisasinya akan terwujud segera setelah sanksi embargo ekonomi dicabut. Sebaliknya, maksud lain dari pendekatan Irak terhadap negara-negara besar anggota DK PBB (Perancis, Rusia, dan Cina) itu tidak lain adalah mengupayakan dukungan bagi pencabutan sanksi. Rusia, dalam hal ini, telah menandatangani kerja sama bisnis minyak, energi listrik, dan jalan kereta api senilai US$ 40 milyar dengan Irak pada pertengahan Agustus 2002 yang lalu. Perusahaan minyak Rusia yang telah membuka cabangnya di Irak adalah *LukOil.* Terhadap Rusia, Irak memiliki hutang sebesar 16 milyar dollar AS pasca perang Teluk II. Oleh karena itu, dalam kerjasama tersebut diharapkan hutang-hutang Irak dapat terhapus.

Demikian pula dengan Perancis. Perusahaan-perusahaan minyak Perancis seperti *Elf Aquitaina* dan *Total* adalah perusahaan Barat pertama yang membuat kontrak bisnis dengan. lrak pasca Perang Teluk Il. Pemerintah Irak bahkan mengusulkan suatu monopoli produksi bagi perusahaan tersebut dalam mengembangkan ladang-ladang minyak di kepulauan Majnoun dan Nahr Ummar yang dapat memproduksi minyak sebesar satu juta barrel perhari. Sebagai gantinya, pemerintah Irak meminta Perancis aktifmelakukan lobi bagi pencabutan sanksi-sanksi PBB. Terhadap Perancis, Irak terlibat hutang sebesar 8,7 milyar dollar AS (**Cordesman, 1997 :205**). Sementara negara-negara lain yang telah mengikat kontrak kerjasama bisnis dengan Irak adalah Jernan, Spanyol, Italia, Belanda, Portugal, Cina dan masih banyak lagi yang lain. Mayoritas mereka khawatir jika Saddam tergusur nanti, perusahaan minyak AS akan mendominasi dan mereka akan tersingkir, kendati pemerintah AS sudah berulang kali berusaha meyakinkan mereka untuk memberikan jaminan keuntungan jika mereka bersedia membantu penggulingan Saddam. Sekalipun demikian, pihak negara-negara non-Amerika tetap bersikap skeptis akan prospek bisnisnya di Irak, apalagi dengan adanya pemyataan pemimpin *INC* Ahmed Chalabi, yang berterus terang akan lebih berpihak pada konsorsium pimpinan AS untuk mengembangkan perminyakan Irak. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan AS seperti Exxon Mobil Oil, Chevron, St.andard Oil, dsb. akan memainkan peranan besar .

Fenomena kekhawatiran negara-negara non-Amerika ini agaknya kian terbukti pasca invasi AS ke Irak 20 Maret lalu, yang ditunjukkan dengan adanya persiapan Bush yang telah menunjuk lima perusahaan minyak AS untuk merekonstruksi Irak pasca perang. Lima perusahaan pemenang tender itu adalah Kellog Brown and Root dari Halliburton Co. di Houston; Bechtel Group dari San Francisco; Fluor dari Aliso Viejo, California; Louis Berger Group dari East Orange, New Jersey dan Parsons Corp. dari Pasadena, California. Perusahaan Halliburton bahkan menerima kontrak pemadaman ladang-Iadang minyak Irak yang terbakar tanpa harus melalui proses tender. Pemerintah AS, dalam hal ini, telah menyediakan biaya talangan untuk program rekonstruksi Irak sebesar 1,7 milyar dollar, dengan harapan biaya itu bisa kcmbali setelah AS berhasil mengontrol industri minyak Irak pasca invasi. Sementara sejumlah perusahaan minyak non-Amerika, oleh pihak Pentagon, telah direncanakan untuk masuk dalam daftar *blacklist,* yang termasuk di dalamnya adalah Shell dari Inggris, Total dari Perancis, dan ENI dari Italia. Selain itu, AS juga berusaha mernbatasi peran PBB dalam rekonstruksi Irak pasca perang, dan menuntut peran lebih hanya di pihak koalisi AS. Sikap AS yang demikian ini telah mengakibatkan penolakan Inggris sebagai sekutu satu-satunya selama ini yang tetap bersikeras mengusulkan dominasi peran PBB pasca perang.

**Penutup**

Dari penjelasan dan uraian di atas, terlihat bahwa faktor teknologi-keamanan-ekonomi telah bertali-temali dalam mewujudkan kebijakan politik luar negeri AS di Irak. Dalam hal ini, AS terkesan terlalu mencari-cari alasan untuk menyerang Irak, sebab hingga babak terakhir invasinya, yang ditandai dengan raibnya Saddam beserta sekitar 60 ribu pasukan elitnya serta tiadanya perlawanan ketika pasukan koalisi memasuki ibu kota Baghdad pada hari Rabu 9 April lalu, AS ternyata tidak mlampu membuktikan adanya senjata pemusnab massal Irak. Dengan demikian, pergeseran skenario AS dari tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal ke penggulingan rezim yang sah di Irak, semakin meyakinkan masyarakat dunia bahwa memang ada *grand strategy* yang telah disiapkan secara matang oleh pihak Washington untuk menguasai minyak Irak disamping kepentingan untuk meliudungi sekutu abadinya Israe1. Tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, dalam. hal ini, hanya dijadikan dalih bagi kepentingan jangka pendek AS di Irak. Sementara kepentingan pemenuhan kebutuhan energi AS dan upaya memenangkan supremasi politik-militer Israel dalam hubungan konflik Arab-lsrael merupakan kepentingan jangka panjang yang harus diperjuangkannya secara terus menerus.

Satu pelajaran berharga yang dapat ditarik dari pengalaman invasi AS ke Irak ini adalah bahwa pemaksaan kehendak melalui kekuatan militer semata-mata ternyata tidak cukup untuk menundukkan pihak lain agar mematuhi kemauan imperialistik Suatu negara super power. Penggunaan kekuatan militer secara ilegal dan unilateral bukan hanya telah mengusik sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga merusak tatanan hukum internasional dan mengacaukan keamanan dunia. PBB sebagai organisasi supranasional pun semakin kehilangan kredibilitas karena tidak mampu mencegah agresitivas AS. Perilaku politik-militer AS yang demikian, jika tidak segera dihentikan, akan menjadi *presedence* buruk bagi pihak-pihak yang dianggap tidak kompromistis terhadap kepentingan AS bukan hanya di wilayah Timur Tengah, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan satu suara dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi PBB untuk mendesak AS menghentikan perilaku militeristiknya, sambil mengingatkan bahwa kampanye antiterorisme AS yang selama ini didengung-dengungkan pasca tragedi WTC akan semakin kehilangan dukungan masyarakat internasional karena mereka mulai memiliki kesan bahwa ternyata AS adalah teroris terbesar dunia.

**Daftar Pustaka**

Cordesman, Anthony, H. and Ahmad S. Hashim, *Iraq : Sanction and Beyond,* Westview Press, United Kingdom, 1997.

Darwis, Adel, and Gregory Alexander, *Unholly Babylon, The Secret History of Saddam’s War,* Victor Gollanz Ltd., London, 1991.

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Cambridge Atlas of The Middle East and North Africa*, Cambridge University Press, London, 1987.

Jenie, Umar A. *Kasus Perburuan Nuklir Irak*, makalah seminar pada Pusat Penelitian Masalah-Masalah Timur Tengah (PPMTT) Fisipol UGM, 19-11-1992.

Neff, Donald, “The US, Iraq, Israel, and Iran : Backdrop to War”, *Journal of Palestine Studies*, Vol.XX, No.4, Summer, 1991.

Von Sponeck, Hans C., *Iraq : Four Questions, Four Answers*, makalah seminar pada Pertemuan Eropa, Brussels, 25 September, 2002.

Wilson, Richard, “Nuclear Proliferation and The Case of Iraq”, *Journal of Palestine Studies*, Vol. XX, Spring, 1991.

*Kompas*, 24 November 2002

\_\_\_\_\_\_\_, 22 Maret 2003

## **KONFLIK INTERNAL SURIAH DAN UPAYA PENYELESAIAN DAMAI**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Revolusi tingkat akar rumput yang melanda dunia Arab atau lebih dikenal sebagai revolusi *Arab Spring* atau *Jasmine Revolution* sejak awal tahun 2011 telah memaksa para pemimpin otoriter dan berkuasa terlalu lama di kawasan itu untuk meletakkan jabatan. Mereka itu adalah Zine El Abidin Ben Ali dari Tunisia, Hosni Mubarak dari Mesir, Muammar Khadafi dari Libya, dan Ali Abdullah Saleh dari Yaman.Keberhasilan revolusi di Tunisia dan Mesir telah menginspirasi para aktivis gerakan reformasi di Suriah untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjatuhkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad yang berkuasa sejak tahun 2000. Namun, upaya menggulingkan Bashar bukannya berhasil, malah telah menyeret negara superpower AS dan Rusia untuk melakukan intervensi atas konflik internal Suriah yang telah berlangsung selama dua setengah tahun tersebut. Besarnya kepentingan negara-negara besar semakin mempersulit solusi untuk mengakhiri konflik, kendati pada akhirnya upaya diplomasi Rusia berhasil menyelamatkan Suriah dari ancaman invasi AS dan sekutunya.

**Latar Belakang Konflik**

Gelombang protes massal di Suriah dimulai sejak 15 Maret 2011 dikota Daraa, Suriah Selatan, yang dipicu oleh kekurangan pasokan air di kota tersebut. Namun, tanggapan kurang aspiratif pemerintah lokal dan pusat, serta kegagalan mengatasi persoalan di Daraa telah berkembang menjadi aksi protes menentang Pemerintah Presiden Bashar Al Assad. Aksi protes kemudian menyebar ke kota-kota lain: Aleppo, Damaskus, Latakia, Homs, Hama, dan Banias. Aksi-aksi demonstrasi justru dijawab oleh pemerintah melalui kekerasan militer, aksi pun berubah menjadi keinginan pergantian rezim dan berakhirnya kekuasaan Partai Baath sejak tahun 1963. Mereka menuntut diadakannya amandemen konstitusi, pencabutan Undang-Undang Darurat Militer yang berlaku sejak tahun 1963, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik untuk mereka yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menentang presiden, dan tuntutan mundurnya Bashar al Assad dari kursi kepresidenan (http:www.republika.co.id).

Tuntutan kaum reformis tersebut direspon positif oleh Pemerintah Bashar al Assad melalui penyelenggaraan referendum tentang amandemen konstitusi dan reformasi politik. Pelaksanaan referendum yang diselenggarakan pada 26 Februari 2012 menghasilkan 157 pasal, yang dalam draf konstitusi baru ditegaskan bahwa peran Partai Baath sebagai penguasa tunggal dihapus, digantikan oleh system multi partai.Dalam UU baru Suriah ditegaskan pula bahwa setengah anggota parlemen harus dari wakil para buruh dan petani. Berdasarkan pasal 88 UUD tersebut Presiden Suriah hanya memiliki kesempatan menjabat selama dua periode, dengan setiap periode jabatan adalah tujuh tahun. Pasal tersebut akan berlaku sejak pemilu kepresidenan pada tahun 2014 mendatang (http:indonesian. irib.ir).

Pengesahan referendum ditolak oleh kaum demonstran yang tetap bersikukuh pada tuntutannya agar Presiden Bashar al Assad mundur dari tampuk kekuasaan. Tuntutan pihak reformis tersebut ditolak oleh Pemerintah Assad yang tetap berusaha mengutamakan jalur dialog untuk mengatasi persoalan politik Suriah. Namun, kaum reformis tetap pada pendiriannya, bahkan dunia internasional, dalam hal ini AS dan Turki, tetap mengkritik Pemerintah Assad agar menghentikan kekerasannya terhadap para demonstran.Kelompok reformis kemudian menyatakan membentuk kelompok oposisi dan mendapat dukungan penuh pihak Barat melalui Pemerintah Turki.

**Keterlibatan Turki**

Dukungan Turki sebagai garda depan perlawanan dan campurtangan Barat terhadap urusan internal Suriah dibuktikan dengan pendirian sejumlah kamp pengungsi di kota perbatasan Antokia, Turki, yang menampung lebih dari 11.000 orang pengungsi Suriah. Di kota itu pula pemerintah pusat Ankara membuka pintu kamp-kamp pengungsinya untuk para tentara yang memisahkan diri dari pemerintah Suriah, dan membentuk Tentara Pembebasan Suriah (*FSA= Freedom Syrian Army).*serta menjadikan kota tersebut sebagai markas aslinya. Pemerintah Turki juga menjadi tuan rumah pertemuan pertama kelompok oposisi Suriah di kota Anatolia. Selain itu, Pemerintah Turki juga memfasilitasi pertemuan kelompok oposisi Suriah di kota Istanbul pada 18 Maret 2013 untuk membentuk pemerintah sementara dengan 12 calon untuk jabatan perdana menteri. Dari ke-12 kandidat tersebut mayoritas teknokrat yang berbasis di pengasingan, dan hanya dua nominasi yang berasal dari wilayah Suriah. (<http://www.wartanews.com>).

**Peta 1**

**Wilayah Suriah**



Sumber: https://www.republika.co.id/berita/mfo59e/suriah-negeri-sunyi-yang-bergolak-3habis

Secara militer, Pemerintah Turki juga berperan menyelundupkan kelompok-kelompok bersenjata yang bertujuan mengacaukan situasi Suriah, dari wilayah Propinsi Idlib di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Mereka disuplai senjata dari perbatasan laut dan darat Turki. Selain itu, Pemerintah Turki juga berusaha melakukan tindakan provokatif dengan melakukan latihan militer di selatan propinsi Hatay, dekat perbatasan Suriah (*lihat peta*). Latihan yang bertujuan menguji system mobilisasi tentara dan komunikasi antara lembaga publik dan angkatan bersenjata jka terjadi perang telah melibatkan 40 kendaraan militer dan 730 personil yang berpartisipasi dalam latihan perang yang diberi sandi *Yildirim* (Petir) 2011 (http:indonesian.irb.ir, Turki juga mengirim helikopter militer dalam rangka pengintaian di wilayah perbatasan, meskipun manuver Turki tersebut telah menuai akibatnya dengan ditembak jatuhnya jet tempur F-4 Phantom oleh pihak militer Suriah karena dianggap melanggar zona udara Suriah.

Langkah-langkah militer Turki terhadap Suriah merupakan realisasi dari usulan AS yang meminta Turki untuk terlibat secara militer di perbatasan Suriah. Berdasarkan usulan tersebut, militer Turki akan diturunkan di kawasan yang sedang bergolak. Melalui campurtangan terbatas, militer Turki akan masuk ke sebagian wilayah Suriah, sehingga tercipta kawasan yang terpisah dari pemerintah pusat Damaskus, seperti yang terjadi di Benghazi, Libya. Pada tahap berikutnya, wilayah tersebut akan dijadikan pangkalan perlawanan bersenjata melawan Pemerintah Suriah. Dalam usulan AS tersebut, ketika rencana itu dilaksanakan, maka militer Turki akan mendapat dukungan dari media massa Arab dab Barat, yang akan membantu propaganda gerakan maju militer Turki, sehingga gelombang penentangan rakyat Suriah dapat tersebar ke seluruh wilayah, dan akhirnya rezim Suriah akan terguling. Sebagai imbalannya, AS dan Perancis akan berupaya mempercepat proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa. (http:indoneian.irib.ir).

Langkah-langkah Turki dan Barat untuk mengacaukan situasi Suriah mendapat respon tegas dari Pemerintah Bashar Al assad, yang berusaha menumpas aksi-aksi kekerasan bersenjata kelomok teroris yang didukung Barat. Sejak muncul aksi demonstrasi Maret 2011 hingga September 2013 jumlah korban tewas mencapai 132.000 orang, dan memaksa 2 juta warga Suriah meninggalkan tanah airnya.(<http://www.wartanews.com>)

Sebenarnya, tidak mudah bagi Turki untuk merealisasikan kemauan AS dan Barat di Suriah. Secara internal, mayoritas rakyat Turki menginginkan Pemerintah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih netral terkait konflik Suriah. Sebuah jajak pendapat oleh *Ankara Social Research Center* menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga rakyat Turki menentang intervensi di Suriah, meskipun ada insiden penembakan pesawat militer Turki di atas perairan Suriah.(http:Indonesian.irib.ir). Kenyataan ini semakin sulit digunakan oleh Pemerintah Erdogan untuk memprovokasi dan memanipulasi publik untuk mendukung perang.

Sementara secara eksternal, langkah-langkah Turki untuk memainkan peran destruktif di Suriah juga tidak mudah dilaksanakan secara penuh. Usulan Turki tentang *no-fly zone* untuk Suriah dan upaya menciptakan kota Aleppo seperti Benghazi ditolak oleh NATO. Upaya Turki dengan memanfaatkan isu tertembaknya pesawat Turki di perairan Suriah pada 22 Juni 2012, dan tembakan mortir ke wilayahnya ternyata tidak cukup menarik dukungan negara-negara Barat. Hal ini karena kenyataan bahwa Pemerintah Presiden Bashar Al Assad tidak mudah digulingkan, karena bersama dengan rakyat Suriah rezim ini masih bersatu, sedang kelompok oposisi tidak bisa diandalkan dan lemah untuk mengcounter kekuatan Pemerintah Bashar disebabkan oleh kondisi mereka yang terpecah-pecah. Sekitar 100.000 orang militan yang didukung asing terpecah menjadi 1000 kelompok, sebanyak 10.000 militan berjuang untuk kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, seperti Front Al-Nusra, sedang sisanya berjuang untuk kelompok-kelompok militant yang berbeda. Bukti menunjukkan bahwa sejumlah besar (95%) pejuang Suriah didatangkan dari luar negeri (terutama dari Eropa: Austria, Spanyol, Swedia, Jerman, Belgia, Belanda, Irlandia, Perancis, dan Inggris), dan hanya 5% yang berasal dari wilayah Suriah.(<http://www.republika.co.id>). Tercatat lebih dari 15.000 orang warga asing berada di garis depan perlawanan terhadap rezim Bashar al Assad.

**Keterlibatan AS**

Keterlibatan AS dalam instabilitas politik Suriah, didasarkan pada dua alasan: *pertama*, adanya kebijakan AS yang ingin terus memperkokoh Israel, terutama dalam menghadapi musuh besar dan terdekatnya, Suriah. Komitmen AS untuk tetap memperkuat Israel secara ekonomi, politik, dan militer tidak diragukan lagi sejak negeri zionis tersebut berdiri pada 14 Mei 1948. Secara politik dan militer, keberadaan Israel yang kuat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah AS dalam rangka mengamankan pasokan energi minyak dari Timur Tengah, terutama dari kawasan Teluk Persia sebagai pensuplai utama. Israel dibutuhkan sebagai elemen penakut terhadap kekuatan-kekuatan dunia Timur Tengah yang tidak akomodatif terhadap kepentingan AS di kawasan. Untuk itu, AS berusaha memperkuat Israel melalui dukungan persenjataan, dana, dan teknologi militer sampai ke tingkat yang *sophisticated*. Kepemilikan Israel atas pesawat-pesawat tempur F-16 buatan AS, pengembangan rudal *Arrow*, pembangunan sistem perisai rudal *Iron Dome*, hingga penguatan proyek nuklir di reaktor Dimona, Gurun Negev (Israel Selatan ), merupakan bukti betapa AS sangat mendukung Israel secara militer. Secara ekonomi, komitmen AS terhadap Israel dibuktikan melalui bantuan-bantuan ekonomi AS yang langgeng sejak 1948. Data terakhir (2012) membuktikan bahwa total bantuan AS ke Israel telah mencapai lebih dari 115 milyar dollar AS, dengan lebih dari 67 milyar dolar untuk bantuan militer (<http://www.eramuslim.com>). Pemerintah Washington juga tidak pernah mengurangi bantuan tahunan sebesar 3 milyar dolar AS,meskipun AS mengalami resesi terburuk dalam bebeapa dasawarsa yang telah mendorong Pemerintah AS untuk memberlakukan pemotongan besar pada sebagian besar program pelayanan public bagi warga negaranya.

Suriah, sejak awal Israel berdiri adalah salah satu Negara Arab yang konsisten mendukung perjuangan bangsa Arab Palestina. Hal ini dibuktikan melalui dukungan Pemerintah Damaskus terhadap lahirnya faksi-faksi perjuangan Palestina seperti organisasi gerilyawan *Al Sa’iqa*, PFLP (*Popular Front Liberation of Palestine*) pimpinan George Habash, PFLP-GC (*Popular Front Liberation of Palestine-General Command*) di bawah Ahmad Jibril, dan faksi Hamas yang kesemua gerakan tersebut berbasis di ibukota Damaskus.(Riza Sihbudi, 1991:120). Secara sosial-ekonomi, Assad adalah “bapak” bagi jutaan pengungsi Palestina (dan juga Irak). Sejak tahun 1948, Suriah adalah tempat berlindung bagi orang-orang palestina yang terusir dari tanah air mereka. Kondisi 500.000 pengungsi Palestina di Suriah jauh lebih baik daripada di Lebanon atau Yordania. Para pengungsi ini mendapat layanan kesehatan dan perumahan yang sama sebagaimana rakyat Suriah (http;Indonesian.irib.ir).

Di mata Israel, Suriah adalah batu sandungan bagi perluasan hegemoni Israel dan juga AS di Timur Tengah, karena sikapnya yang anti-zionisme dan anti-imperialisme AS di kawasan. Kecenderungan sikap Suriah yang anti-Israel ini terbukti dari keterlibatannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948, 1967, dan tahun 1973.(M.A.Rais, 1989: 199-233). Dalam perang Arab-Israel tahun 1973 atau disebut sebagai Perang Yom Kippur, Suriah harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan wilayah Dataran Tinggi Golan yang direbut oleh Israel dan diduduki hingga sekarang. Ditambah dengan kenyataan bahwa Mesir sebagai negara pengobar perang melawan Isreal justru menandatangani perjanjian damai Camp David secara sepihak bersama Israel, membuat Suriah tampil sebagai pemimpin kelompok Arab yang menentang perdamaian dengan Israel. Bentuk penentangan ini ditunjukkan melalui pembentukan *The Steadfastness Group of States*, yang terdiri dari Aljazair, Libya, Yaman selatan, PLO, Irak, dan Suriah. Sejak Mesir berdamai dengan Israel, Suriah telah menjadi negara terdepan dalam menghadapi Israel. Untuk itu, sejak tahun 1980 Presiden Hafez Al Assad melakukan kerjasama militer dengan Uni Soviet, dan menandatangani *Treaty of Friendship and Cooperation*. (Bantarto Bandoro, 1991:11). Aliansi strategis Suriah-Uni Soviet ini terus berlangsung hingga kepemimpinan putra Hafez, Bashar Al Assad, saat ini dalam rangka mengurangi superioritas mutlak Israel atas Suriah. Kerjasama militer Suriah-Uni Soviet yang kini berubah menjadi Suriah-Rusia ini dibuktikan dengan masih adanya pangkalan Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartous,Suriah.

Alasan ke dua keterlibatan AS di Suriah adalah ketidaksenangan AS dan Israel atas dominasi Suriah-Iran-Hizbullah di kawasan Timur Tengah yang telah mencemaskan eksistensi Israel.Sikap anti-AS dan anti-Israel dari ketiga kekuatan tersebut telah menjadi kekuatan poros di Timur Tengah dalam melawan ancaman Israel. Suriah telah menjadi sekutu Iran dalam mendukung milisi Hizbullah di Lebanon Selatan melawan Israel, itulah sebabnya dalam konflik internal Suriah pemerintah Iran dan kelompok Hizbullah mendukung pemerintah Bashar Al Assad dalam memerangi kelompok pemberontak.

Keterlibatan AS di Suriah tidak hanya didukung oleh Pemerintah Turki, melainkan juga oleh sekutu-sekutunya yang lain di kawasan Timur Tengah, terutama Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Qatar. Kedua Negara yang terakhir ini telah mengeluarkan dana masing-masing 5 milyar dolar AS untuk membayari kelompok pemberontak yang didatangkan dari luar Suriah. Disamping itu, Arab Saudi juga mendukung fasilitas persenjataan kelompok pemberontak yang didatangkan dari Kroasia. Laporan surat kabar Kroasia, Jutarnji List, menyatakan bahwa 3.000 ton senjata dibayar oleh Arab Saudi atas permintaan AS, dan dikirim ke pemberontak Suriah melalui Yordania sejak Nopember 2012 (<http://www.wartanews.com>).

AS sejak awal munculnya konflik Suriah juga berusaha membujuk negara-negara besar anggota Dewan Keamanan PBB untuk menghukum Suriah, tetapi usaha AS untuk merealisasikan sanksi DK PBB tersebut terganjal oleh penolakan Rusia dan Cina yang menginginkan negara-negara di dunia untuk melihat persoalan Suriah secara obyektif dan lebih berimbang. Upaya AS untuk menjatuhkan Pemerintah Bashar Al Assad juga ditunjukkan melaui pelatihan-pelatihan militer oleh agen-agen CIA terhadap kelompok pemberontak di wilayah perbatasan Yordania-Suriah, sementara sekutu utama Baratnya: Inggris, Perancis, dan Israel juga memasok persenjataan untuk kaum pemberontak.

Upaya AS mempercepat destabilisasi Suriah akhirnya ditunjukkan melalui tuduhan penggunaan senjata kimia oleh tentara Suriah sejak Maret 2013. Tuduhan ini diulanginya ketika terjadi peristiwa pembunuhan warga sipil di desa pinggiran ibukota Damaskus pada tanggal 21 Agustus 2013 yang menewaskan 1.400 orang. AS pun mulai meningkatkan tekanan terhadap Pemerintah Suriah untuk segera menyerangnya, hal ini ditunjukkan melalui pengiriman kapal induk dan 5 kapal perang AS yang merapat di perairan Laut Mediteran (L.Tengah). Meskipun demikian, upaya AS untuk menyerang Suriah tidak mendapat restu Kongress AS dan mayoritas rakyat AS yang tidak melihat urgensi perang di Suriah, apalagi trauma perang Afghanistan dan perang Irak masih membekas di kalangan masyarakat AS.

**Penolakan Rusia dan Upaya Penyelesaian**

Manuver AS yang terus-menerus terhadap Suriah telah mendapat respon negatif, terutama dari pihak Rusia sebagai sekutu strategis Suriah di kawasan Timur Tengah.Sejak awal krisis, Rusia bersama Cina telah tiga kali menggagalkan upaya AS untuk mengeluarkan Resolusi DK PBB terkait Suriah. Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan AS bahwa serangan terhadap Suriah bisa menghasilkan lebih banyak korban tidak bersalah dan menimbulkan gelombang terorisme di seluruh dunia. Sejak tahun 2001, Rusia menyaksikan AS dan sekutunya ikut campur dalam urusan Timur Tengah, mengatur serangan militer, dan mengorganisir atau memicu serangan, Dimulai dari Afghanistan, Irak, dan yang terakhir di Libya, AS memimpin invasi dengan berbagai dalih, baik ada restu DK PBB maupun tidak. Dampak dari campurtangan AS ini adalah terciptanya ketidakstabilan politik di ketiga Negara tersebut hingga kini. Oleh karena itu, Putin mengemukakan tentang pentingnya dialog dalam upaya menyelesaikan persoalan Suriah. Menurut Putin, penyelesaian krisis Suriah harus ditempuh melalui beberapa tahap secara urut, yaitu penghentian kekerasan, dimulainya perundingan, mencari solusi dan menetapkan kerangka konstitusi untuk masa depan Suriah, dan yang terakhir dilakukan reformasi mendasar. (<http://indonesian.irib.ir>). Bagi Putin, segala bentuk solusi yang ditawarkan namun tidak melalui tahap-tahap tersebut maka akan menimbulkan kekacauan di Suriah.

Prakarsa Putin tersebut diusulkan ketika Barat dan sekutu Timur Tengahnya terus memaksakan ambisi mereka untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Pemerintah Rusia memahami bahwa jika terjadi intervensi militer dan Pemerintah Bashar terguling, maka Rusia tidak akan dapat melanjutkan hubungannya dengan Suriah, dan kondisi ini tidak hanya akan merugikan ekonomi Rusia, tetapi dari segi militer Pemerintah Moskow juga akan mengalami kerugian besar karena kehilangan pangkalan militernya di Tartous dan pasar senjata di Suriah. Berdasarkan laporan lembaga riset SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), impor senjata Suriah selama lebih dari lima tahun belakangan meningkat 600 persen.(http://indonesian.irib.ir). Rusia menjadi penjamin 78 persen dari persenjataan Suriah, berton-ton senjata dan suku cadangnya telah dikirim ke Suriah, dan jumlahnya semakin meningkat sejak pemberontakan meletus. Tahun 2012, Rusia dan Suriah berhasil mencapai kesepakatan untuk mensuplai Suriah dengan 130 pesawat tempur type Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta dolar AS dan kontrak bisnis peralatan mliter lainnya senilai 700 juta dolar AS.

Sambil mengutamakan upaya diplomasi, Pemerintah Rusia menunjukkan dukungan penuh secara militer kepada Pemerintah Suriah. Hal ini ditunjukkan melalui pengiriman rudal jelajah anti-kapal yang mampu menjangkau seluruh garis pantai Suriah dari kemungkinan serangan dari laut. Pada Desember 2011, Rusia mengerahkan kapal perusak anti-kapal selam Admiral Tributs bersama-sama dengan konvoi 9 kapal perangnya dari Armada Laut Hitam, Arnada Baltik, dan Armada Utara Rusia yang dipimpin oleh kapal induk Admiral Kuznetsov ke perairan Suriah untuk memblokir setiap serangan yang dipimpin oleh aliansi militer Barat terhadap Suriah dengan dalih intervensi kemanusiaan. (http://indonesian.irib.ir).

Variasi upaya diplomasi dan tekanan psikologis-militer Rusia terhadap pihak Barat membawa hasil dengan disepakatinya proposal untuk menghancurkan senjata kimia Suriah setelah pertemuan selama tiga hari antara Menlu AS, John Kerry, dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov. Berdasarkan proposal tersebut, Suriah harus mengajukan daftar pasokan senjata kimia dalam satu pekan. Proposal juga mengatur kinerja pengawas senjata PBB di Suriah sebelum Nopember 2013, yang tujuannnya untuk menghancurkan seluruh pasokan senjata kimia Suriah hingga pertengahan tahun 2014. Kerry dan Lavrov sepakat jika Suriah melanggar proposal tersebut, maka Pemerintah Bashar akan menghadapi konsekuensi pasal 7 piagam PBB, yaitu intervensi militer.

**Penutup**

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa krisis politik di suriah telah semakin berkepanjangan akibat adanya kepentingan geopolitik superpower yang saling berlawanan. Berbeda dengan yang terjadi di Libya, Pemerintah Presiden Bashar Al Assad ini tidak mudah dijatuhkan karena secara eksternal didukung penuh oleh Rusia. Diplomasi Rusia berhasil menekan AS dan sekutunya untuk mendudukkan persoalan Suriah ke meja perundingan. Usulan penyelesaian konflik internal Suriah melalui upaya penghancuran senjata kimia Suriah paling tidak telah mengamankan posisi Israel dari resiko ancaman Suriah.Dengan melucuti Suriah, jika AS dan sekutunya memutuskan untuk melakukan serangan secara cepat ke Suriah, maka negara tersebut sudah tidak memiliki senjata kimia untuk mempertahankan diri, sehingga akan mudah untuk menundukkan Suriah. Di lain pihak, usulan penyelesaian konflik Suriah telah menunjukkan kemenangan diplomasi Rusia atas AS. Dampak yang diperoleh dari kemenangan Rusia ini adalah meningkatnya peran Rusia di Timur Tengah dan naiknya kredibilitas internasional Rusia. Jika Rusia berhasil mencegah perang di Timur Tengah dan mencegah rezim boneka Barat berkuasa di Suriah, maka ini akan menjadi kemenangan Pemerintah pusat Moskow untuk pertama kalinya di wilayah Timur Tengah.

**Daftar Pustaka**

Bandoro, Bantarto, *Timur Tengah pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*, CSIS, Jakarta, 1991.

Rais, M.Amien, *Timur Tengah*, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.

Sihbudi, Riza, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991.

“Ambisi Turki Mengobar Perang di Suriah”, <http://indonesian.irib.ir?fokus/-/asset> publisher/v5Xe/content/ambisi-turki-mengobar-perang-di-suriah, diakses 28-6-2012.

“AS tak Lihat Peran Iran dalam Akhiri Kekerasan di Suriah”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/12/m709bs-as-tak-lihat-peran-iran-dalam-akhiri-kekerasan-di-suriah>, diakses 12-7-2012.

“Bantuan AS ke Israel telah Mencapai 115 Miliar Dolar”, dalam <http://www.eramuslim.com>, diakses 25-11-2013.

“Demi Uni Eropa, Turki Obok-Obok Suriah”, dalam <http://indonesian.irib.ir>, diakses 8-10-2011.

“Kelompok Oposisi Suriah Bentuk Pemerintahan Baru di Istanbul”, dalam <http://www.wartanews.com/timurtengah/065d2a10-Oc6d-24f4-b843-5fea36048539/kelompok-oposisi-suriah-bentuk-pemerintahan-baru-di-istanbul>, diakses 18-3-2013.

“Kelompok Pemberontak Suriah Meminta Bantuan Senjata ke AS”, dalam <http://www.wartanews.com/timurtengah/ae447ec-3803-3/a/-eeeb-71f359600dae/kelompok-pemberontak-suriah-meminta-bantuan-senjata-ke-as>, diakses 13-4-2013.

“Meski Gagal, Musuh-Musuh Suriah Tingkatkan Tekanan”, diakses dari <http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset> publisher/v5Xe/content/meski-gagal-musuh-musuh-suriah-tingkatkan-tekanan, diakses 27-2-2012.

“Perdamaian Suriah Dijadwalkan Pertengahan Desember”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/11/18/mwgn4h-perdamaian-suriah-dijadwalkan-pertengahan-desember>, diakses 25-11-2013.

“Ribuan Warga Eropa Terlibat Perang Suriah”, dalam <http://www.republika.co.id>, diakses 4-4-2013.

“Soal Suriah, Rusia Tetap Tidak Bergeming Menghadapi Barat”, dalam <http://indonesian.irib.ir>, diakses 21-3-2012.

“Suriah, Ajang Perang Rusia dan Barat”, dalam <http://indonesian.irib.ir>, diakses 3-12-2011.

“Turki Mulai Latihan Dekat Perbatasan Suriah”, dalam <http://indonesian.irib.ir>, diakses 7-10-2011.

## **KONFLIK YAMAN DAN KEPENTINGAN GEOPOLITIK ARAB SAUDI\*[[4]](#footnote-4)**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Konflik di Yaman yang telah berlangsung sejak tahun 2011 berkenaan dengan efek domino dari Revolusi Arab Spring, adalah konflik yang sangat rumit dan berkepanjangan. Konflik internal tersebut bahkan telah berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional yang telah melibatkan negara-negara besar, khususnya Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Inggris untuk ikut campur dalam persoalan Yaman. Intervensi Arab Saudi dan kawan-kawan lebih jauh ditandai dengan invasi militer pada tanggal 26 Maret 2015. Keterlibatan asing dalam kasus konflik Yaman mengakibatkan persoalan kian bertambah rumit dan tidak kunjung selesai. Meskipun akhir-akhir ini sudah ada upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, tetapi tidak ada jaminan bahwa konflik di Yaman bisa terselesaikan melalui jalan perundingan karena besarnya kepentingan asing dalam konflik tersebut. Meskipun banyak analis yang berusaha mensimplifikasi kasus Yaman menjadi sekedar pertikaian antar faksi, antar suku, bahkan antar mahzab Sunni-Syi’ah, kenyataan keterlibatan negara-negara besar menunjukkan bahwa terdapat kepentingan geopolitik yang dominan dalam konflik tesersebut.

**Sejarah Panjang Konflik Yaman**

Konflik yang terjadi di Yaman adalah konflik yang rumit, berkepanjangan, dan melibatkan pihak asing sejak awal mula munculnya konflik. Jika menengok sejarah konflik Yaman, faktor asing begitu dominan sebagaimana terjadi dalam setiap konflik di Negara Timur Tengah. Pasca Perang Dunia I, yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan imperiumOttoman, wilayah Yaman Selatan (terutama wilayan Aden) beralih ke Inggris.

Sementara itu, Yaman Utara dikuasai oleh Imam Yahya yang bermahzab Syi’ah Zaidiyah dan membentuk kerajaan Yaman. Sampai dengan tahun 1962, Yaman Utara masih menjadi salah satu bentuk konservatisme yang tangguh di dunia Arab, berkat sistem imamah yang begitu ketat. Kekuatan asing lah yang kemudian berusaha meruntuhkan kerajaan Yaman Utara. Inggris yang telah menguasai Yaman Selatan mendukung gerakan *Free Yemenis* di Yaman Utara yang berafiliasi dengan kelompok *Ichwanul Muslimin.* Upaya Inggris untuk menghancurkan pemerintahan Imam Yahya ini disebabkan oleh tekad Imam Yahya yang berusaha mengusir Inggris dan ingin menyatukan Yaman. Gerakan ini kemudian berhasil menggulingkan pemerintahan Imam Yahya dan memproklamasikan Republik Arab Yaman di Yaman Utara tahun 1962. Kendati demikian, pemberontakan militer *Free Yemenis* yang dipimpin oleh Abdullah Sallah ini tidak mudah dipatahkan karena pemerintahan keras yang berkuasa waktu itu, Imam Mohammad Badr, tidak bersedia menyerah begitu saja, sehingga, perang saudara antara perndukung imamah dan pendukung Republik tidak dapat dihindarkan, dan perang ini berlangsung selama 8 tahun. Perang saudara sampai dengan tahun 1970 ini merupakan bentuk “*a war by proxy*”, antara Arab Saudi yang membantu Imam Badr dan Mesir serta Inggris (yang mendukung Sallah). (M.A.Rais, 1989:162).

Pada tahun 1970, perang saudara di Yaman Utara berhasil dipadamkan, dan berdasarkan konstitusi 1970, kekuasaan politik dipegang oleh troika (*triple ruler*) yang terdiri dari presiden, perdana menteri, dan majelis menteri (kabinet). Meskipun demikian persoalan legitimasi politik kerap menjadi isu besar dalam pemerintahan Republik Arab Yaman yang ditandai dengan pergantian pemerintahan melalui cara kekerasan dan inkonstitusional. Pada tahun 1976, Presiden Abdul Rahman Iryani yang memimpin Troikadigulingkan oleh Kolonel Ibrahim Al Hamd, setahun kemudian (tahun 1977) AL Hamd dibunuh secara misterius dan digantikan oleh Ahmad Al Ghasmi.

Pada tahun 1978, Al Ghasmi dibunuh oleh seorang agen Presiden Salim Rubai Ali dari Yaman Selatan dan 2 hari setelah terbunuhnya Al Ghasmi, Rubai Ali sendiri dibunuh di Aden. Letkol Ali Abdullah Saleh kemudian menggantikan Al Ghasmi hingga terbentuknya Yaman bersatu tahun 1990 *(Ibid*). Politik Luar Negeri Yaman Utara pun sejak pertengahan tahun 1970an lebih ditentukan/ didikte oleh Arab Saudi karena setiap rezim Yaman Utara bergantung pada bantuan ekonomi Saudi.

Pada tahun 1967, di Yaman Selatan, kelompok sosialis membentuk pemerintahan Republik Demokrasi Rakyat Yaman. Munculnya rezim *Marxist-Leninist* ini harus dilihat dari konteks radikalisasi politik Arab yang terjadi pada tahun 1960an. Pada periode itu, sumber konflik utama di Timur Tengah adalah antara kekuatan monarkhi konservatif melawan republik nasionalis. Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir waktu itu), dengan gagasan-gagasannya yang reformis sebagi pencetus nasionalisme Pan-Arab menjadi symbol orientasi revolusioner dunia Arab (Hudson, 1977:354). Selain Nasserisme, Partai Baath dengan ide sosialisme Arab yang mencita-citakan transformasi social ekonomi dan kultural juga disukai di kalangan kelas menengah Arab dan terpelajar Arab. Ideologi Partai Baath ini kemudian menghadirkan penguasa di Irak dan Suriah.

Arus ideologi ketiga adalah Gerakan Nasionalis Arab (*The Arab Nationalist Movement* = ANM) yang didirikan di Beirut, Lebanon, oleh seorang pejuang Palestina pada tahun 1948. Orientasi ideology ANM ini adalah Pan-Arabisme dan menyerukan kembalinya wilayah Palestina melalui persatuan Arab. Ketika Nasser muncul sebagai pahlawan pan-Arabisme di pertengahan 1950-an, Organisasi ANM ini menjadi penopangnya selama kurun waktu 1950-an sampai dengan 1960-an. ANM membentuk kelompok-kelompok revolusioner Arab, termasuk di Yaman Selatan. ANM ini kemudian membentuk kelompok revolusioner Front Pembebasan Nasional, dan memulai perjuangannya mengusir Inggris, menghancurkan federasi para syeikh dan sultan yang diharapkan dapat menggantikan kedudukan Inggris di Yaman Selatan. Front. Pembebeasan Nasional ini tidak hanya mampu mengusir Inggris, tetapi juga dapat mengalahkan rival-rivalnya Front Pembebasan Yaman Selatan (*Front for the Liberation of Occupied South Yemen*= FLOSY) ciptaan Mesir. Pada tahun 1969, faksi Abdul Fattah Ismail dari Front Pembebasan Nasional merebut kekuasaan dari faksi Qatham Al-Sha’bi dan mendirikan rezim Marxist radikal yang berorientasi politik luar negerinya ke Uni Soviet.

Perbedaan orientasi politik luar negeri kedua Yaman (Yaman Utara dan Yaman Selatan), dan persoalan perbatasan kedua negara sering mewarnai konflik-konflik di antara keduanya. Meskipun demikian, memudarnya pengaruh USSR *(Union of Soviet Socialist Republics*) dan cita-citamendirikan Yaman bersatu terus berjalan hingga terwujud pada Mei 1990 dengan nama Republik Arab Yaman dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden dan Ali Salim Beidh (yang semula Presiden Yaman Selatan dari Partai Sosialis) sebagai wakil presiden.

**Konflik di Era Modern**

**Peta 1**

**Wilayah Yaman**Map

Description automatically generated

*Sumber*: parstoday.com

Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Ali Abdullah Saleh harus memerangi rakyatnya sendiri dengan cara menundukkan faksi-faksi politik yang ada di sekitarnya. Guna menundukkan orang-orang sosialis, Presiden Saleh bekerjasama dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang mendirikan Partai Islah atau Partai Reformasi pada 13 September 1993. Tujuan didirikannya Partai Islah itu sendiri, menurut pendirinya, Syeikh Abdullah bin Hassan Al-Ahmar, adalah untuk melawan orang-orang sosialis. Presiden Saleh harus menggunakan tangan Partai Islah karena partainya sendiri (*The General People’s Congress*) terikat perjanjian unifikasidengan Partai Sosialis. Namun belakangan Partai Islah, Sosialis, dan Nasserite justru bergabung melawan Saleh dengan membentuk *Joint Meeting Parties* (JMP) (<http://liputanislam.com/opini/peta-konflik-yaman/>, diakses 2-4-2019).

Di lain pihak, Presiden Saleh juga tidak menyukai posisi kelompok Ikhwanul Muslimin yang semakin menguat paska keberhasilan IM menggulingkan kekuasaan Imam Yahya. Peningkatan kekuatan IM dalam birokrasi pemerintahan Saleh, pengaruhnya yang sangat besar di institusi pendidikan Yaman (karena mereka menguasai institusi pendidikan Yaman), serta besarnya dana IM berkat kemurahan Arab Saudi membuat Presiden Saleh berusaha melucuti kekuasaan IM dengan cara merombak sistem pendidikan. Pada tahun 2001, sejak itu, dukungan IM melalui Partai Islah terhadap Presiden Saleh menjadi terhenti. Hal ini terbukti pada perbandingan pilpres tahun 1999, dimana Partai Islah mencalonkan Saleh sebagai presiden, tetapi pada tahun 2006, mereka mendukung lawan Saleh, yaitu Faisal bin Shamlan, meskipun dimenangkan oleh Saleh.

Pada tahun 2004, suku Houthi yang bermahzab Syi’ah Zaidiyah menuntut otonomi khusus di wilayah Saadah sebagai protes atas bentuk diskriminasi di bidang sosial ekonomi terhadap kelompok ini oleh rezim Saleh. Namun, tuntutan Houthitersebut justru dihadapi dengan kekerasan senjata oleh Presiden Saleh yang dibantu Arab Saudi, sehingga meletus perang sipil yang menewaskan lebih dari 5000 tentara dan masyarakat sipil suku Houthi pada kurun waktu tahun 2004-2008 (*Ibid*).

Pada tahun 2009, kelompok Salafi atau Gerakan Yaman Selatan *(Al Hirak Al Janoubi*) yang dipimpin oleh Tariq Al Fadhli berusaha mengangkat senjata melawan Presiden Saleh. Al Fadhli (alumni jihad Afghanistan) yang bersama-sama jenderal Mohsenyang pernah berperan membantu Al Ahmad Saleh dan menundukkan faksi sosialis dan suku Houthi justru berpaling melawan Saleh karena dituduh akan merebut kekuasaan pemerintahan Saleh. Mereka kemudian bersekutu dengan Partai Islah untuk menghadapi Saleh. Di tahun yang sama, 2009, muncul aktor baru Yaman yaitu *Al Qaeda of the Arabian Peninsula* (AQAP). Organisasi AQAP ini, menurut pengakuan Hillary Clinton dalam *Hard Choices* (2011), adalah organisasi bentukan AS dan didanai oleh Arab Saudi yang tujuannya adalah mengamankan kepentingan AS di Yaman. Gerakan-gerakan AQAP di Yaman turut memperkeruh kekacauan social-politik Yaman, yang kemudian pada tahun 2015 ISIS bergabung dengan AQAP, bersekutu dengan Al Fadhli dan melakukan aksi pengeboman di sebuah masjid di ibukota Sana’a, sehingga menewaskan 142 orang jamaah, 351 orang luka-luka. Dengan alasan mengejar anasir-anasirAQAP, AS kemudian membombardir Yaman, sehingga antara tahun 2009-2011, ratusan rakyat sipil Yaman, termasuk anak-anak telah menjadi korban serangan bom pesawat tempur AS atas ijin Presiden Saleh. Dengan alasan menumpas Al Qaeda pula, AS kemudian memberikan dana bantuan keamanan sebesar USD 500 juta kepada Presiden Saleh dengan imbalan diijinkan Pulau Socotra milik Yaman untuk dipenuhi berbagai peralatan militer yang menjadi pangkalan canggih AS (*Ibid*)

**Revolusi *Arab Spring* di Yaman**

Di bawah pemerintahan Saleh, rakyat Yaman mengalami kondisi kemiskinan yang sangat parah. Menurut Indeks Pembangunan Manusia PBB, Yaman adalah salah satu negara paling miskin di dunia, menduduki urutan ke -154 dari 187 negara. Satu dari tiap 5 orang warga Yaman atau 20% penduduknya mangalami kelaparan, dan 1 dari tiap 3 orang tidak memiliki pekerjaan. Tiap tahun 40.000 anak-anak meninggal sebelum berusia 5 tahun (https: [www.voaindonesia](http://www.voaindonesia), diakses 25 Maret 2019).

Sebaliknya, di tengah-tengah kesengsaraan rakyat Yaman, Slaeh justru berperilaku korup dan nepotism. Dia memimpin Yaman dengan merekrut orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Selama lebih dari 3 dasawarsa berkuasa, Saleh telah menumpuk kekayaan secara fantastis. Dari hasil sidang DK PBB pada 7 Desember 2017, dinyatakan bahwa Presiden Saleh telah melakukan korupsi atau mencuri uang negara sebesar USD 60 miliar atau setara dengan Rp 771 Triliun (<https://focustoday.com/2017/12/07/pbb-korupsi-771-trilyun-mantan-presiden-yaman-ali-abdullah-saleh/>, diakses 5-4-2019) . Kekayaan Saleh ini diyakini berasal dari kontrak penjualan minyak dan gas di Yaman. DK PBB juga menuduh Presiden Saleh, koleganya, keluarganya, dan rekan-rekan bisnisnya mencuri uang dari program subsidi minyak. Korupsi telah mengalir ke Presiden Saleh sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp 28 Triliun setiap tahun selama lebih dari 3 dekade kekuasaannya.

Kemiskinan, korupsi, kediktatoran, dan kekejaman Presiden Ali Abdullah Saleh di kalangan mayoritas rakyat Yaman dan konsentrasi kekuasaan di kalangan keluarga dan orang-orang dekatnya, telah mendorong munculnya perlawanan masif rakyat Yaman yang dalam waktu bersamaan juga dipicu oleh efek domino dari pemberontakan rakyat Arab melawan rezim-rezim despotik di negaranya atau dikenal sebagai Revolusi *Arab Spring*. Revolusi yang dimulai dari Tunisia tersebut kemudian menjalar ke Yaman. Ribuan orang demonstran turun ke jalan menuntut Presiden Saleh untuk mundur. Namun, tuntutan rakyat justru dijawab dengan kekerasan senjata. Sedikitnya 50 orang tewas ditembaki oleh para *sniper* suruhan Presiden Saleh. Kemarahan massa semakin menjadi, sehingga pada Juni 2011, istana kepresidenan di ibukota Sana’a diserang massa. Presiden Saleh terluka bakar hebat dan dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani perawatan.

Seiring dengan kondisi kesehatannya yang mulai pulih, Presiden Saleh bersikeras untuk pulang dan memimpin Yaman kembali, tetapi sekutu internasionalnya, termasuk AS dan Arab Saudi, mendesak dia untuk turun. Negara-negara Arab Teluk bahkan menjanjikan tempat tinggal yang layak di negara mereka, termasuk kekebalan hukum jika Saleh bersedia mundur. Pada Februari 2012 Presiden Saleh akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, Abdu Rabbo Mansour Hadi. Namun, penyerahan kekuasaan ke Hadi ini hanya dilakukan setengah hati, terbukti Saleh memanfaatkan momentum demo massa yang didominasi oleh kelompok Houthi dengan bergabung atau bersekutu bersama-sama kelompok tersebut untuk menggulingkan Mansour Hadi. Dalam kondisi terdesak, Presiden Mansour Hadi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi, dan pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi beserta koalisinya yang terdiri dari Maroko, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Yordania, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Sudan melakukan invasi ke Yaman, membombardir posisi-posisi kelompok Houthi di Sana’a dan merebut kembali pelabuhan Hudaydah yang dikuasai Houthi. Invasi Arab Saudi dan kawan-kawan ini tentu saja atas restu dari Amerika Serikat (AS). Dalam invasi ke Yaman yang tanpa resolusi Dewan Kemanan PBB ini AS menyediakan dukungan logistic, perangkat bom, pengisian bahan bakar pesawat tempur, dan bantuan intelijen. Sikap yang sama ditunjukkan oleh AS Ketika NATO menginvasi Libya tahun 2011, dengan membiarkan Inggris dan Perancis memimpin perang, padahal AS adalah kekuatan utama di balik itu. Dengan menerapkan strategi “leading from behind” AS tidak ingin dilibatkan dalam tuduhan pelanggaran hukum internasional dalam kedua agresi tersebut.

Kekhawatiran Arab Saudi akan kemajuan kekuatan Houthi sejak demonstrasi besar-besaran pada September 2014 melawan Pemerintah transisi Abdu Rabbo Mansour Hadi membuat negara kerajaan tersebut frustrasi dan berhitung untuk menyerang Yaman. Kemajuan Houthi, yang dibuktikan dengan penguasaan ibukota Sana’a, kota Aden, dan pelabuhan Hudaydah, sebenarnya berkat bantuan unit tentara dan intelijen yang masih setia kepada Ali Adullah Saleh. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2014 mantan Presiden Saleh beraliansi dengan kelompok Houthi dengan harapan mampu menyingkirkan Presiden Hadi dan akhirnya ia bisa berkuasa kembali. Presiden Hadi akhirnya terdesak dan pada awal tahun 2015 ditangkap oleh kelompok Houthi, meskipun ia kemudian berhasil kabur dan melarikan diri ke Aden, yang selanjutnya diungsikan ke Riyadh oleh Pemerintah Arab Saudi. Aliansi Ali Abdullah Saleh dengan pemberontak Al Houthi inilah yang kemudian mengakhiri hidup Saleh pada 5 Desember 2017, karena dibunuh oleh pejuang Houthi yang menganggap Saleh telah berkhianat.

Melihat kondisi politik Yaman yang semakin memburuk tersebut mendorong Arab Saudi dan koalisinya menyerang posisi-posisi Houthi di ibukota Sana’a pada tanggal 26 Maret 2015.

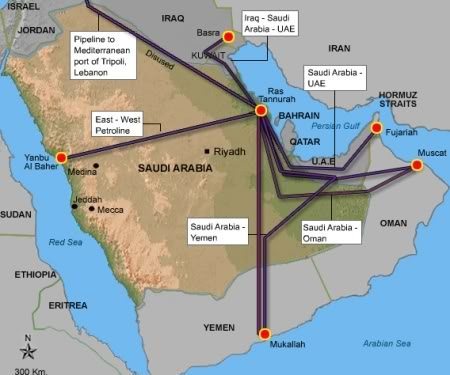
Pasukan koalisi Saudi ini menerapkan strategi “shock and awe” guna menakut-nakuti musuh dan membuatnya tidak berkutik. Itulah sebabnya mengapa pasukan koalisi membabi-buta atau tidak pandang bulu dalam membombardir sasaran yang kebanyakan mengenai obyek sipil termasuk kamp pengungsi, pesta pernikahan, kendaraan sipil, kawasan pemukiman sipil, fasilitas medis, sekolah, masjid, pasar, pabrik, gudang makanan, airport, dan pelabuhan. Sedang bom yang digunakan oleh passukan koalisi Arab Saudi adalah jenis bom *cluster* (bom tandan) yang penggunaannya dilarang oleh PBB karena dampaknya yang sangat mematikan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan upaya blockade koalisi Saudi terhadap pelabuhan Hudaydah yang menjadi pintu masuk bantuan makanan dan obat-obatan dari luar. Menurut data NGO, *Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED), korban tewas di Yaman sejak invasi Arab Saudi adalah 60.000 orang, termasuk 85.000 anak-anak yang meninggal karena kelaparan (http: //dunia.tempo.co, diakses 25 maret 2019)

**Kepentingan Geopolitik Arab Saudi**

Di balik kisah invasi koalisi Arab Saudi di Yaman, sebenarnya terdapat tujuan besar Saudi, yaitu membangun jalur pipa migas baru agar ketergantungan terhadap Selat Hormuz dapat dikurangi. Sektor energy merupakan 90% pendapatan Saudi dari ekspor, dan 45% dari GNP, oleh karena itu faktor keamanan menjadi sangat penting bagi negara kerajaan tersebut. Keinginan membangun jalur migas Saudi ini diketahui berdasarkan kabel rahasia dari kedubes AS di Yaman kepada Menlu AS tahun 2008 yang menginformasikan bahwa Saudi berniat membangun jalur pipa migas yang sepenuhnya dikuasai dan dioperasikan Arab Saudi melewati Propinsi Hadramaut hingga ke Teluk Aden (*lihat peta*). Hal ini yang kemudian mudah dipahami mengapa dalam aksi bombardier Yaman oleh koalisi Saudi Propinsi Hadramaut tidak pernah menjadi sasaran. Demikian juga dengan pelabuhan dan bandara internasional Al Mukalla (juga di Propinsi Hadramaut) yang dalam kondisi prima di bawah control AQAP yang didukung Arab Saudi. Rencana pembangunan pipa migas Saudi ini tidak pernah dipublikasikan oleh para pejabat Saudi dan AS, mereka selalu mengedepankan konflik proxy Saudi-Iran sebagai alasan perang di Yaman.

**Peta 2**

**Rencana jalur Pipa Minyak Arab Saudi**



*Sumber*: <https://ic-mes.org/energy/pecah-belah-dan-kuasai-yaman-dan-pipa-minyak/,diakses> 25 Maret 2019.

Pada tahun 2007 Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, UEA, Oman, dan Yaman bersama-sama meresmikan proyek *Trans-Arabian Oil Pipeline*. Proyek ini direncanakan dibangun dari Saudi (Ras Tannurah) dan UEA menuju ke Teluk Oman dan Teluk Aden. Pada tahun 2012 jalur Abu Dhabi-Fujairah (UEA) telah beroperasi, tetapi perjanjian jalur pipa dari Oman ke Iran untuk mengekspor gas Iran ke Oman telah menimbulkan ketidakpercayaan Saudi terhadap Oman. Hal ini kemudian semakin mendorong Arab Saudi untuk menguasai kawasan Hadramaut guna mewujudkan impian lamanya membangun jalur alternative yang tidak bergantung kepada Iran (Selat Hormuz). Untuk mempertahankan dan mengontrol Propinsi Hadramaut itulah maka Arab Saudi menanam dan mempersenajatai AQAP *(Al Qaeda of The Arabian Peninsula*).

Aliansi Arab Saudi-AQAP-Pemerintah Presiden Mansour Hadi terungkap ketika pada bulan Juni 2016, Presiden Hadi mengirim utusannya ke Jenewa, Swiss, untuk melakukan perundingan damai PBB. Utusan Presiden Hadi tersebut adalah seorang tokoh Al Qaeda Yaman, Abdulwahab Humayqani, yang terdaftar dalam list anggota teroris internasional. Humayqani aktif merekrut dan mendanai Al Qaeda Yaman, ia juga dicurigai berada di balik pemboman Al Qaeda di markas militer Yaman pada tahun 2012. Fenomena ini menunjukkan bahwa yang diinginkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman bukanlah menegakkan demokrasi, melainkan penguasaan geografis dan jalur strategis Yaman untuk tujuan politik mereka.

Nilai strategis Yaman bagi Arab Saudi dan AS, sebagaimana dikemukakan oleh konsulat militer AS dan NATO, Anthony Cordesman dari *Center for Strategic and International Studies*, bahwa “Yaman memiliki nilai yang sangat penting dan strategis bagi AS, dan penting bagi stabilitas Arab Saudi di tengah Negara-Negara Teluk. Wilayah Yaman dan pulau-pulaunya memainkan peran kritis dalam keamanan lalu lintas global, Bab el-Mandeb”.(<https://ic-mes.org/politics/perang-di-yaman-untuk-siapa>, diakses 3-4-2019). Selat Bab el-Mandeb adalah “a chokepoint” antara tanduk Afrika dan Timur Tengah, dan penghubung strategis antara Laut Mediterania dan Samudera Hindia, yang membawa hampir semua ekspor dari Teluk Persia menuju Terusan Suez dan jalur minyak Suez-Mediterania.(*lihat peta*) Bab el-Mandeb juga merupakan kawasan tersibuk ke-4 dunia, yang merupakan lintasan kapal-kapal tanker pembawa minyak sebanyak 3,3 juta barel per hari. Sedang lintasan tersibuk pertama adalah Selat Hormuz (17 juta barel per hari), disusul Selat Malaka (15 juta barel per hari), Terusan Suez (4,5 juta barel per hari), Teluk Turki ( 2,4 juta barel per hari), Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) sebanyak 1 juta barel per hari, dan Terusan Panama 0,5 juta barel per hari.(<http://theglobal-review.com/membaca-krisis-yaman-dari-perspektif-geopolitik-dan-kawasan>, diakses 3-4-2019). Mengingat arti penting Bab el-Mandeb dan wilayah strategis Yaman secara keseluruhan ini, maka setiap kekuatan berbahaya di Yaman akan mengancam lalu lintas yang melewati Terusan Suez, termasuk minyak dan produk turunannya.

**Peta 3**

**Wilayah Bab el-Mandeb**

**Map

Description automatically generated**

*Sumber*:egypttoday.com

**Kendala Al Houthi dan Iran**

Upaya penguasaan jalur strategis Yaman oleh Arab Saudi tidaklah mudah, dan terkendala oleh meningkatnya kekuatan pemberontak Al Houthi, terutama sejak kelompok ini berhasil menduduki ibukota Sana’a pada September 2014, merebut kota pelabuhan internasional Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb, serta membentuk pemerintah sementara pada Januari 2015. Pergerakan Houthi ini sangat mengusik kepentingan AS dan Barat, serta membuyarkan rencana Arab Saudi untuk menguasai Yaman. Betapa pentingnya Kawasan Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb bagi AS dan sekutunya mendorong AS membuat sistem kendali melalui *US Control Command* dengan menempatkan Armada-5 untuk mengawasi hilir mudik tanker-tanker minyak di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Sementara Armada-6 mengawasiTerusan Suez, Selat Turki, dan BTC pipeline, sedang Armada-7 memantau Selat Malaka (*Ibid*). Bagi sekutu AS yang lain, yakni Israel, penguasaan kawasan Bab el-Mandeb oleh Al Houthi dapat mengganggu akses Israel ke Samudera Hindia, lebih khusus lagi akan memotong kemampuan Israel yang dengan mudah menyebarkan kapal selam nuklir ke Teluk Persia sebagai ancaman terhadap Iran. Oleh karena itu, dalam aksi invasi koalisi Negara-Negara Teluk ke Yaman pada Maret 2015 yang lalu, Israel ikut berpartisipasi dengan mengerahkan pilot-pilotnya untuk mengoperasikan pesawat-pesawat tempur Arab Saudi.

Menguatnya kemampuan kelompok pemberontak Houthi tidak bisa lepas dari dukungan Iran di belakangnya. Pasca-revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini tahun 1979, Iran mampu menempatkan diri sebagai kekuatan baru dan berpengaruh di Kawasan Timur Tengah, menggeser pengaruh negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Meskipun antara kelompok Houthi dan Iran memiliki persamaan mahzab syiah, tetapi kerjasama keduanya lebih didasari oleh kepentingan politik. Politik luar negeri Iran yang anti-hegemoni asing di kawasan Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia adalah kendala bagi kekuatan-kekuatan eksternal untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan itu. Sementara Yaman sebagai jalur strategis dengan kepemilikan Selat Bab el-Mandeb dan Teluk Aden adalah rangkaian dari jalur kepentingan geopolitik Iran mulai dari Teluk Persia dan Selat Hormuz. Oleh karena itu, kekuatan asing yang berusaha mengusik Yaman akan segera mendapat respon dari pemerintah pusat Teheran.

Dukungan Iran terhadap eksistensi Houthi dimulai sejak tahun 2005, Ketika Iran mendanai pembelian roket dan melatih para pemberontak Houthi di Propinsi Sa’adah, wilayah utara Yaman. Selanjutnya pada bulan April 2009, menurut laporan Dewan Keamanan PBB, sebuah kapal Iran memindahkan peti-peti senjata ke kapal Yaman di perairan internasional. Pada Mei 2009, 6 kapal Iran berlayar ke Teluk Aden dan dibenarkan oleh Komandan AL Iran, Laksamana Habibullah Sayyari, bahwa berlayarnya kapal Iran di wilayah territorial Yaman bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Iran di bagian selatan, dan juga untuk melindungi pasukan Houthi di utara Yaman yang sedang bertempur melawan Arab Saudi. Pada bulan Agustus 2009, televisi Al-Arabiya melaporkan bahwa tantara Yaman menemukan 6 gudang senjata milik Houthi yang menyimpan senapan mesin buatan Iran, roket jarak pendek, dan amunisi lainnya dalam jumlah besar.(“UN: Iran Arming Houthi rebels in Yemen since 2009”, <http://www.timesofisrael.com/un-iran-arming-houthi-rebels-in-yemen-since-2009/>, diakses 16-3=2019).

Pada bulan Februari 2011, sebuah kapal nelayan Iran disita oleh otoritas Yaman karena ditemukan membawa 900 senjata anti-tank buatan Iran dan roket anti-helikopter. *The New York Times*, dalam artikelnya pada bulan Maret 2012 mengutip pernyataan pejabat militer dan intelijen AS bahwa Pasukan Quds, suatu pasukan elit dari Korps Garda Revolusi Islam Iran *(Islamic Revolution Guard Corps, IRGC*), telah menyelundupkan sejumlah besar AK-47, granat berpeluncur roket, dan senjata lain untuk pemberontak Al Houthi di Yaman. Hasil investigasi atas penyitaan kapal Iran pada tahun 2013 menemukan 40 ton senjata berupa roket Katyusha M-122, *heat-seeking surface-to-air missiles*, RPG-75, *night vision googles*, system artileri dengan pelacakan target sejauh 40 kilometer, *silencer*, bahan peledak RDX sebanyak 2,66 ton, peledak C-4, dan senjata-senjata lainnya yang semuanya ditujukan untuk Houthi (*Ibid*).

Pasca-pengambilalihan ibukota Sana’a oleh pemberontak Houthi pada bulan September 2014, bantuan Iran ke Al Houthi terus meningkat. Unit IRGC menempatkan pasukannya di Yaman untuk melatih dan melengkapi barisan pasukan Al Houthi. Selain itu, banyak pejuang Houthi melakukan perjalanan ke Iran dan Lebanon untuk pelatihan militer bersama kelompok Hizbullah. Sejak awal pemerintahan sementara Houthi tahun 2015, pengiriman bantuan logistic Iran ke Yaman semakin intensif. Bantuan logistik sebesar 15.000 ton makanan tsb berupa tepung, beras, gula, dan obat-obatan menuju kota Pelabuhan Hudaydah, dengan dikawal oleh dua kapal perang Iran yang bertujuan untuk menghindari serangan pasuka koalisi Teluk. Dukungan Iran terhadap pejuang Al Houthi di satu pihak, dan dukungan koalisi Teluk di bawah pimpinan Arab Saudi di pihak lain, telah menempatkan kedua negara yang bersaing di Kawasan Timur Tengah tersebut dalam situasi perang proxy (*proxy war*).

**Penutup**

Konflik Yaman adalah konflik yang multi-dimensional dan sebuah contoh konflik yang sangat rumit. Posisi geografis Yaman yang sangat strategis telah menjadi sasaran negara-negara sekitarnya dan juga superpower AS beserta sekutunya untuk mengambil bagian dalam konflik. Konflik internal Yaman, yang kemudian berubah menjadi perang proxy antara Arab Saudi dan sekutunya vis a vis Iran tidak bisa semata-mata hanya dilihat dari perspektif konflik antara mahzab Sunni dan Syiah. Tetapi kepentingan geopolitiklah yang menonjol dalam persoalan ini. Konflik yang rumit dan berkepanjangan ini telah menimbulkan tragedi di kalangan rakyat sipil Yaman, dan mengusik rasa kemanusiaan bagi siapapun yang mengikuti perkembangan situasi konflik di Yaman. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk segera mengakhiri pertikaian menuju proses politik guna menyelesaikan peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

**Daftar Pustaka**

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa: A Political Geography*, Oxford University Press, 1985.

Gerges, Fawaz A., *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?* , AlvaBet, Jakarta, 2002.

Gray, Colin S., and Geoffrey Sloan, *Geopolitics, Geography, and Strategy*, Frank Cass Publisher, London, 1999.

Hudson Michael C., *Arab Politics: The Search for Legitimacy*, Yale University Press, USA, 1977.

Sihbudi, Riza, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Rais, Amien, *Timur Tengah*, Pusat Studi Sosial, UGM, 1989.

<http://liputanislam.com/opini/peta-konflik-yaman/>, diakses 2-4-2019.

https: [www.voaindonesia](http://www.voaindonesia), diakses 25 Maret 2019

<https://focustoday.com/2017/12/07/pbb-korupsi-771-trilyun-mantan-presiden-yaman-ali-abdullah-saleh/>, diakses 5-4-2019

http: //dunia.tempo.co, diakses 25 Maret 2019. <https://ic-mes.org/politics/perang-di-yaman-untuk-siapa>, diakses 3-4-2019.

<http://theglobal-review.com/membaca-krisis-yaman-dari-perspektif-geopolitik-dan-kawasan>, diakses 3-4-2019.

“UN: Iran Arming Houthi rebels in Yemen since 2009”, <http://www.timesofisrael.com/un-iran-arming-houthi-rebels-in-yemen-since-2009/>, diakses 16-3=2019).

## **LEDAKAN AMONIUM NITRAT: FAKTOR PEMICU URGENSI PERUBAHAN SISTEM POLITIK DI LEBANON\*[[5]](#footnote-5)**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Pada tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Beirut, Lebanon, yang telah menewaskan sebanyak 200 orang, melukai 6.000 orang, dan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang dipicu oleh terbakarnya sebuah gudang ammonium nitrat milik perusahaan pembuat bahan peledak tambang di Mozambik, *Fabrica de Explosivos Mocambique (FEM)*, telah memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Lebanon. Mereka menuntut perubahan sistem politik dan mundurnya para elit politik karena ketidakmampuan mengurus negara. Mengapa sistem politik Lebanon harus diubah ?

**Sistem Konfesionalisme Lebanon**

Sistem politik “confessional’ atau “consociational” yang berlaku di Lebanon sebenarnya merupakan peninggalan sistem “millet” di jaman Kekaisaran Ottoman, Turki, yang membagi-bagi kekuasaan pemerintahan berdasarkan komposisi keagamaan.(M.A.Rais, 1989:111). Sistem ini sesungguhnya sangat rapuh, dan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan identitas nasional, yang berujung pada kesulitan mewujudkan legitimasi politik di Lebanon, akan tetapi sistem ini terus diadopsi oleh Pemerintah Lebanon dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan hingga saat ini. Sistem politik yang dikukuhkan dalam Pakta Nasional (*Al Mitzaq Al Wathani*) 1943 dan disponsori oleh Perancis ini menetapkan bahwa penduduk Muslim akan bergabung dengan penduduk Kristen dalam membela kedaulatan Lebanon, dengan syarat penduduk Kristen tidak akan mencari proteksi Barat bagi Lebanon dan tidak akan menyetujui intervensi Barat dalam masalah Lebanon; penduduk Kristen akan membagi kekuasaan dengan penduduk Muslim berdasarkan rasio 6:5 bagi posisi-posisi pemerintahan baik di lembaga legislatife maupun eksekutif.

Pakta Nasional 1943 juga mengatur bahwa presiden harus berasal dari kelompok Kristen Maronit, perdana menteri dari golongan Islam Sunni, dan ketua parlemen dari golongan Islam Syi’ah.(Sihbudi, 1991:29). Pakta Nasional ini merupakan sebuah perjanjian tidak tertulis (konvensi) yang dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, komposisi demografis masyarakat Lebanon menjadi berubah. Pada tahun 1970 jumlah penduduk Muslim Syi’ah semakin besar dan menjadi mayoritas, sehingga mereka menuntut perubahan sistem konfesional agar mencerminkan kondisi yang lebih obyektif dan adil. Usulan ini ditolak oleh mereka yang telah menikmati kondisi statusquo selama berpuluh-piluh tahun, terutama oleh kelompok Kristen Maronit, yang memegang kekuasaan untuk memperkaya kelompoknya sendiri. Sementara kelompok Muslim, baik Sunni maupun Syi’ah telah mengalami keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akibat pembagian kekuasaan berdasarkan sistem tersebut. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan ini kemudian memicu perang saudara pada tahun1958, berkat intervensi Amerika Serikat pada waktu itu konflik berhasil diakhiri. Namun, perang saudara kembali terjadi dan memakan waktu yang panjang (tahun 1975-1990) sebagai akibat semakin kompleksnya persoalan.

Pasca perang saudara, Pakta Nasional 1943 kemudian direvisi berdasarkan Perjanjian Ta’if tahun 1989, yang membagi kekuasaan dengan rasio 1:1 untuk kelompok Kristen dan Islam. Meskipun demikian, Perjanjian Ta’if tetap meneguhkan sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon, sehingga tidak menutup kemungkinan sistem ini akan memicu munculnya konflik-konflik berikutnya di kemudian hari. Tabel di bawah menjelaskan alokasi kursi parlemen Lebanon sebelum dan sesudah Perjanjian Ta’if.

**Tabel 1**

**Alokasi Kursi Parlemen Lebanon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Agama | Sebelum Perjanjian Ta’if | Sesudah Perjanjian Ta’if |
| 1. | Kristen Maronit | 30 | 34 |
| 2. | Ortodoks Timur | 11 | 14 |
| 3. | Katolik Melkit | 6 | 8 |
| 4. | Ortodoks Armenia | 4 | 5 |
| 5. | Katolik Armenia | 1 | 1 |
| 6. | Protestan | 1 | 1 |
| 7. | Kristen minoritas lainnya | 1 | 1 |
|  | Total Kristen | 54 | 64 |
| 8. | Sunni | 20 | 27 |
| 9. | Syi’ah | 19 | 27 |
| 10. | Alawi | 0 | 2 |
| 11. | Druze | 6 | 8 |
|  | Total Islam | 45 | 64 |
|  | Total | 99 | 128 |

*Sumber*: Issam Michael Saliba (Okt.2007),”Lebanon: Presidential Election and Conflicting Constitutional Interpretations”, US Library Congress.

Dari tabel di atas terlihat bahwa komposisi kursi di parlemen telah berubah pasca-Perjanjian Ta’if, kelompok muslim menjadi berimbang di parlemen. Meskipun demikian, jabatan-jabatan penting di pemerintahan tetap tidak berubah, presiden dari kelompok Kristen Maronit, perdana menteri dari kelompok Islam Sunni, dan ketua parlemen dari kelompok Islam Syi’ah. Meskipun kekuasaan presiden telah berkurang pasca-Perjanjian Ta’if, presiden tetap memiliki kewenangan yang kuat secara konstitusi, misalnya: menetapkan Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen, mengeluarkan peraturan tambahan dalam pelaksanaan UU, dan meratifikasi perjanjian dengan negara lain. Dalam hal ini, presiden dipilh oleh parlemen untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali sampai 6 tahun sejak masa jabatan pertama berakhir. Sementara perdana menteri dan wakilnya ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan parlemen. Pemilu parlemen diselenggarakan pertama kalinya pada 29 Mei sampai dengan 19 Juni 2005, pasca penarikan pasukan Suriah dari Lebanon.

Dalam kehidupan kepartaian, pasca terbunuhnya P.M.Rafiq Al Hariri pada tahun 2005, masyarakat Lebanon terbelah ke dalam dua kubu partai politik, yaitu Aliansi 8 Maret dan Aliansi 14 Maret. Terbunuhnya P.M.Hariri ini telah memicu munculnya Revolusi Cedar, yaitu aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat Lebanon yang menuntut ditariknya sebanyak 14.000 pasukan Suriah dari Lebanon dan mundurnya pemerintahan yang didukung oleh Suriah. Polarisasi kubu-kubu partai politik Lebanon ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2**

**Koalisi Oposisi (Aliansi 8 Maret)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Partai Politik | Asal Partai Politik  (Unit Konstituen) |
| 1. | Free Patriotic Movement | Kristen Maronit |
| 2. | Amal Movement | Syi’ah |
| 3. | Lebanese Democratic Party | Druze |
| 4. | El Marada Movement | Kristen |
| 5. | Glory Movement | Sunni |
| 6. | Armenian Revolutionary Federation | Armenia |
| 7. | Syrian Social Nationalis Party | Sekuler |
| 8. | Arab Socialist Ba’ath Party-Lebanon Region | Sekuler |
| 9. | Solidarity Party | Kristen Maronit |
| 10. | Skaff Bloc | Kristen Katolik Yunani |
| 11. | Popular Nasserist Organization | Sunni |
| 12. | Arab Democratic Party | Alawi |

*Sumber*: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi-partai-dan-militan-di> libanon, diakses 20-8-2020.

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar partai yang bergabung di Aliansi 8 Maret berideologi Syi’ah dan didukung oleh partai politik di Suriah yang dipimpin oleh anggota kelompok Hizbullah dan Amal. Aliansi ini menolak orientasi pro-Barat yang dilakukan oleh aliansi 14 Maret. Aliansi 8 Maret ini juga menguasai pemerintahan Lebanon yang dipimpin oleh P.M. Najib Mikati tahun 2011-2013. Pada tahun 2009, aliansi ini mendapat jatah kursi 120 di Parlemen.

**Tabel 3**

**Koalisi Revolusi Cedar (Aliansi 14 Maret)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Partai Politik | Asal Partai Politik  (Unit Konstituen) |
| 1. | Future Movement | Sunni |
| 2. | Lebanese Forces | Kristen Maronit |
| 3. | Kataeb Party | Kristen Maronit |
| 4. | Social Democrat Hunchakian Party | Armenia |
| 5. | Armenian democratic Liberal Party Ramgavar | Armenia |
| 6. | National Liberal Party | Kristen Maronit |
| 7. | Democratic Left Movement | Sekuler |
| 8. | Islamic Group | Sunni |
| 9. | Democrtic Renewal | Sekuler |
| 10. | Lebanese National Bloc | Kristen Maronit |
| 11. | Independence Movement | Kristen Maronit |
| 12. | Free Shia Movement | Syi’ah |
| 13. | Syriac Union of Lebanon | Assiria |
| 14. | Shuraya Party | Assiria |
| 15. | Lebanese Peace Party | Sekuler |

*Sumber*: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi-partai-dan-militan-di> libanon, diakses 20-8-2020.

Aliansi 14 Maret di atas adalah koalisi berideologi Sunni, Druze, dan Kristen yang terbentuk pada waktu Revolusi Cedar, kubu ini dipimpin oleh Saad Al Hariri, putra dari P.M. Rafiq Al Hariri yang terbunuh. Pada tahun 2009, aliansi ini mendapat jatah 90 kursi di parlemen. Perseteruan antara dua kelompok aliansi di atas yang bertujuan untuk merebut pengaruh ideologis di pemeintahan dan wilayah, semakin bereskalasi setelah meluasnya konflik Suriah ke Lebanon.

**Konsentrasi Eksklusif dan Ketimpangan Sosial**

Selain pemberlakuan sistem konvensional yang telah menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, konsentrasi demografis secara eksklusif kelompok-kelompok masyarakat sectarian Lebanon telah mengakibatkan sulitnya tercapai integrasi nasional. Secara geografis, luas wilayah Lebanon sekitar 10.400 , yang terdiri dari 4 wilayah, yaitu wilayah pantai, lembah Bekaa, pegunungan Lebanon, dan pegunungan Anti Lebanon (*Lihat Peta*).

**Peta 1**

**Wilayah Lebanon**

Di wilayah pantai yang tidak begitu luas, terdapat kota-kota penting, yaitu Beirut sebagai ibukota, Tripoli, dan Sidon. Empat kelompok masyarakat yang saat ini memainkan peran politik di Lebanon secara eksklusif terkonsentrasi di wilayah-wilayah terpisah. Golongan Maronit menempati pegunungan Lebanon bagian utara, yaitu Jubayl, Batrun, dan Baharri. Pegunungan Lebanon bagian selatan ditempati golongan Druze, kelompok Syi’ah tinggal di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel Utara dan lembah Bekka. Kristen Ortodoks berada di daerah Kura, sedang kelompok Islam Sunni menempati kota Beirut, Tripoli, dan Sidon (Zaenuddin, 1977: 25).

Kelompok Kristen Maronit menempati pegunungan Lebanon sejak abad ke 7, sebagai tempat mengungsi karena datangnya pasukan Islam. Kehadiran kelompok Kristen Maronit yang kemudian menjadi kelompok yang dominan dalam kehidupan social, politik, dan ekonomi Lebanon tidak lepas dari pengaruh Perancis sejak awal abad ke-12. Dalam peristiwa Perang Salib pada waktu itu, kelompok Maronit mendukung Perancis melawan pasukan Islam. Meskipun pada akhirnya pasukan salib kalah dalam perang di abad ke-13, hubungan yang erat antara kelompok Maronit dan Perancis telah membawa kemajuan yang berarti bagi kelompok ini. Pemerintah Perancis menjadi penghubung antara kelompok Maronit dengan gereja Roma, dan pada tahun 1580 untuk pertama kalinya didirikan Dewan Gereja di Lebanon atas bantuan Paus. Pada tahun 1584, sekolah Maronit dibuka di Roma yang bertujuan mendidik generasi muda Maronit untuk menjadi pemimpin keagamaan Lebanon. Pada tahun 1875, kaum misionaris Perancis mendirikan Universitas Saint Joseph di Beirut. Beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1866 orang-orang Kristen Presbyterian dari AS mendirikan American University of Beirut.

Kemajuan Maronit akibat keberpihakan Perancis di bidang pendidikan ini membawa konsekuensi semakin kuatnya kelompook ini di bidang politik dan militer. Kelompok Maronit kemudian memiliki milisi yang tangguh dan terkenal, *Phalangis*. Di bidang politik, kelompok ini menjadi kekuatan paling dominan dalam politik dan pemerintah Lebanon, demikian pula di bidang ekonomi yang kemudian menciptakan ketimpangan sosial. Dalam laporan resmi pemerintah, hanya 4% penduduk Lebanon yang tergolong sangat kaya, dan mereka berasal dari golongan Kristen Maronit, 14% penduduk termasuk kategori kaya, 32% kategori sedang, dan 50% hidup dalam garis kemiskinan. Mereka adalah kelompok Muslim Syi’ah, Sunni, dan Druze. Ketimpangan social, ekonomi, dan pendidikan inilah yang menjadi factor lain bagi keterpecahan Lebanon.

**Krisis Ekonomi**

Karut-marut persoalan sistem politik Lebanon yang hanya menghasilkan kompromi antar elit politik sektarian telah terbukti menyengsarakan rakyat. Kompromi tersebut hanya menguntungkan segelintir elit lama dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak (yang dimaksud dengan elit lama disini, missal : mantan KSAD Jenderal Michael Aoun yang menjadi presiden, keluarga dinasti Gamayel, keluarga dinasti Chamoun, keluarga dinasti Geagea,keluarga dinasti Hariri, dst). Berkuasanya segelintir elit lama juga telah mengakibatkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi-jadi di Lebanon. Menurut laporan *Transparency International*, Lebanon berada di peringkat 137 dan 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2019 (https: //www.bbc.cpm/Indonesia/dunia-5365962, diakses 20/8/20). Menurut lembaga tersebut, partai-partai politik, parlemen, dan lembaga kepolisian merupakan lembaga-lembaga terkorup di Lebanon.

Praktek korupsi yang merajalela di Lebanon kian diperparah dengan kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung selama satu dekade ini. Hutang Lebanon saat ini mecapai 85 juta dollar AS atau setara dengan 150% dari total pendapatan dan ini adalah yang tertinggi ketiga di dunia, angka pengangguran mencapai 25% , dan hampir sepertiga dari penduduk Lebanon yang berjumlah 6 juta jiwa hidup di bawah garis kemisikinan, sementara kekayaan 7 konglomerat Lebanon mencapai 13,3 juta dollar AS. (<https://news.detik.com/kolom/d-4767065/musim-semi-politik-lebanon>, diakses 20/8/20). Menurut Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Lebanon turun drastis menjadi USD 33 miliar tahun 2020, dari USD 55 miliar pada tahun 2018, sementara mata uang lokal (pound) terus turun setelah kehilangan 90 % nilainya selama dua tahun terakhir.

Dalam kondisi yang demikian, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar telah membuat rakyat semakin marah dan frustrasi. Listrik yang seringkali padam dan hanya menyala selama 4 jam sehari, kurangnya air minum yang aman, terbatasnya layanan kesehatan, dan koneksi layanan internet yang buruk memaksa rakyat turun ke jalan untuk berdemonstrasi secara besar-besaran sejak awal Oktober 2019 dan memaksa PM Saad Al Hariri meletakkan jabatan. Kondisi ekonomi yang buruk ini semakin parah sejak pandemi Covid-19 melanda Lebanon pada Februari 2020. Sejak karantina wilayah diberlakukan pada pertengahan Maret 2020 yang lalu, banyak usaha bisnis terpaksa memberhentikan staf atau mengenakan cuti tanpa gaji, sehingga nilai tukar mata uang Lebanon pada pasar resmi dan pasar gelap melebar, dan bank-bank memperketat kontrol modal. Sementara harga-harga membumbung tinggi, sehingga banyak keluarga tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Kesulitan ekonomi ini telah memicu kerusuhan dimana-mana, lintas sektarian. Tuntutan dari para demonstran hanya satu, bubarkan sistem konfessional dan ganti dengan sistem demokrasi yang dipimpin oleh kelompok teknokrat professional, karena konfessionalisme terbukti telah menciptakan kekuasaan oligarkis yang tidak berpihak kepada rakyat.

**Penutup**

Lebanon, negara yang semula makmur dan terkenal sebagai “Paris of Middle East” karena pariwisatanya yang indah kini harus terpuruk menjadi negara miskin dan di ambang kehancuran. Keterpurukan Lebanon disebabkan oleh persoalan yang kompleks dan bertali-temali. Diawali dengan diterapkannya sistem politik confessional yang membagi-bagi kekuasaan berdasarkan komposisi keagamaan dari berbagai kelompok masyarakat, ditambah dengan kenyataan kesulitan mewujudkan integrasi nasional masyarakat Lebanon karena penduduknya yang tidak bisa berbaur dan terkonsentrasi secara eksklusif di wilayah-wilayah tertentu, mengakibatkan sulitnya terwujud integrasi nasional Lebanon. Pembagian kekuasaan secara sektarian tersebut telah pula memunculkan kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga yang eksis dan dominan serta mampu mempertahankan status quo kekuasaan selama berpuluh-puluh tahun. Mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi Lebanon dan memudahkannya untuk melakukan korupsi. Oligarki kekuasaan ini telah mengakibatkan munculnya ketimpangan social, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi mayoritas masyarakat Lebanon yang terdeprivasi secara relative dan didorong oleh munculnya krisis ekonomi bahkan sebelum terjadinya kasus pandemic covid-19, mengakibatkan munculnya ledakan social-politik yang berkepanjangan, bukan sekedar ledakan amonium nitrat sebagai factor pemicunya. Pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Lebanon adalah pentingnya perubahan system politik yang terbukti rapuh dan menjadi dasar ketidakstabilan politik-ekonomi, ke arah system politik yang lebih demokratis dan egaliter.

**Daftar Pustaka**

Drysdale, Alasdair, *The Middle East and North Africa, A Political Geography*, Oxford University Press, New York,1985

Hudson, Michael, *Arab Politics, The Search for Legitimacy*, Yale University Press, USA, 1977

Rais, M.Amien, *Timur Tengah*, PAU, UGM, 1989

Saliba, Issam Michael, ”Lebanon: Presidential Election and Conflicting Constitutional Interpretations”, *US Library Congress*, 2007

Sihbudi, Riza, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991

----------------, *Menyandera Timur Tengah*, Mizan, Jakarta, 2007

Zaenuddin, A. Rachman, “Beberapa Aspek Kesejarahan perkembangan Struktur Sosial dan Politik di Lebanon”,*Masalah-Masalah Internasional Masa Kini*,No.8, 1977.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi-partai-dan-militan-di> libanon, diakses 20-8-2020.

<https://news.detik.com/kolom/d-4767065/musim-semi-politik-lebanon>, diakses 20/8/20

## **DOMINASI IRAN DALAM PERCATURAN POLITIK REGIONAL TIMUR TENGAH ERA PEMERINTAHAN MAHMOUD AHMADINEJAD (2005-2013)**

***Arif Hidayat dan Harmiyati***

**Pendahuluan**

Pengaruh Iran di Timur Tengah dari waktu ke waktu semakin menguat. Menguatnya peran politik Iran akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari semakin melemahnya peran negara-negara Arab Teluk yang lebih banyak bergantung secara politik dan keamanan kepada Amerika Serikat. Semakin menguatnya peran Iran di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari kemampuan Iran dalam mengembangkan dan membangun kekuatan yang semakin berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Pengaruh Iran saat ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang memiliki penganut mazhab Syi’ah seperti Irak dan Lebanon, namun negara-negara Arab Sunni juga saat ini banyak berhubungan dengan Iran seperti Arab Saudi dan negara-negara teluklainnya. Ini bukan hanya semata-mata karena Iran adalah sebuah pemerintahan Islam atau karena mampu mengembangkan nuklir, tetapi juga faktor lainnya, baik itu secara geopolitik maupun kedekatan emosional dan kedekatan politis dengan negara-negara Timur Tengah, dan juga faktor politik pragmatis yang di jalankan dalam pemerintahannya. Iran memiliki pandangan tersendiri dalam membaca kondisi Dunia Arab. Kemampuan Iran dalam menunjukkan identitas pun harus diakui cukup baik, yaitu ketika konflik Israel-Palestina menemui jalan buntu, ada rasa frustrasi dan kemarahan terhadap fakta bahwa proses perdamaian tidak jelas penyelesaiannya. Berbagai isu pun dilontarkan oleh Iran untuk mempertanyakan kembali kebenaran sejarah, apakah itu hanya sebuah rekonstruksi semata.

**Diplomasi Dan Dominasi Iran Dalam Percaturan Politik Di Timur Tengah**

Tidak bisa dipungkiri, Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2007 menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Belum lagi, kemampuan nuklir Iran yang membuat negara-negara Barat tidak bisa meremehkan. Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Bebagai keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi Iran tersebut tak lepas dari tingginya riset yang dilakukan ilmuwan Iran, mereka melakukan rekonstruksi persenjataan dan teknologi yang mereka impor dari Rusia, Cina. Semua alat utama sistem senjata (Alutsista) Iran hanya untuk pertahanan saja. (<http://anneahira.com/teknologi-militer-iran.htm>).

Di kawasan Teluk Persia, politik luar negeri Iran yang aktif dan cerdas menjadikan Iran sebagai negara yang merangkul neagar-negara Timur Tengah. Kalangan politisi dan media Barat menilai itu sebagai kemenangan lain diplomasi Iran di kawasan Timur Tengah. Kebijakan politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah dan seluruh negara-negara Islam berlandaskan upaya mewujudkan persatuan di dunia Islam. Mahmoud Ahmadinejad menjadi populer bagi masyarakat Timur Tengah yang selama ini tertekan oleh dominasi politik dan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap pemerintah mereka. Hadirnya Iran sebagai kekuatan baru tidak terlepas dari keberhasilan diplomasi di kawasan regional Timur Tengah. Keberhasilan Politik Luar negeri Iran di berbagai bidang telah menguatkan asumsi bahwa pasca Perang teluk II Iran mengalami perkembangan yang signifikan.

Karisma Ahmadinejad dan solidnya dukungan masyarakat Iran serta restu dari ulama sekaligus pemimpin tertinggi Iran, ditambah dengan pemaksimalan potensi dalam negeri yang responsif akan berbagai peluang dan tantangan internasional adalah kunci Iran bisa berhasil dan sukses seperti sekarang. Meskipun didera embargo puluhan tahun dan persaingan yang dinamis dalam tatanan dunia anarki, Iran sanggup bertahan dan berdiri sendiri. Kemampuan Iran dalam mengembangkan nuklirnya menjadikan Iran dapat meraup untung lebih dari ekspor minyaknya. Karena dengan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut Iran dapat menghemat pemakaian hasil minyaknya sendiri, sehingga Iran dapat memaksimalkan hasil minyaknya tersebut untuk di ekspor ke negara-negara lain. Dengan kata lain, Iran menjadi negara yang memanfaatkan semua bidang, dan tidak terus menerus bergantug kepada negara-negara adidaya, seperti negara-negara Timur Tengah lainnya yang menjadi negara boneka Amerika. Bahkan negara-negara boneka tersebut sulit untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh di kawasan seperti Iran. Dari beberapa faktor tersebut, pantaslah bila kita menyebut Iran sebagai negara paling berpengaruh di Timur Tengah, belum lagi Iran di bawah Ahmadinejad menjadi negara yang sangat di perhitungkan bukan saja di kawasan tetapi juga di panggung internasional. (<http://indonesian.irib.ir/en/telisik/-/asset_publisher/k0Z8/content/id/4891112/pop_up?_101_INSTANCE_k0Z8_viewMode=print>,).

Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Republik Islam Iran menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Kemampuan Iran diakui oleh tokoh-tokoh Barat yang menasehati Gedung Putih agar tidak memandang sebelah mata peran dan posisi Iran di Timur Tengah. Perundingan segitiga Baghdad menunjukkan posisi Iran sangat menentukan di peta politik Timur Tengah. Perundingan segitiga terlaksana setelah permintaan resmi Amerika Serikat dan desakan pemerintah Irak. Satu hal yang menggembirakan, ketika Timur Tengah menjadi pusat konsentrasi tekanan politik dan militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran, keberhasilan diplomasi Iran lebih mendominasi. (<http://www.islamtimes.org/vdcfjcdj.w6dxta8,iw.html>,)

Dengan politik pragmatisnya Iran dapat merangkul negara-negara di kawasan Timur Tengah bahkan Rusia, China, Venezuela juga menjadi negara sahabat Iran. Itu karena Iran akan merangkul semua negara yang dapat membawa hal positif bagi Iran, karena pasca revolusi Islam, Iran mengalami keterpurukan dalam segi ekonomi, sehingga Iran harus merangkul negara-negara lain guna memperbaiki perekonomian negaranya.

Kemampuan diplomasi Iran di kawasan Timur Tengah pada masa Ahmadinejad memang sedikit mengalami hambatan. Salah satu faktornya adalah karena Iran di bawah Ahmadinejad sangat aktif dalam mengembangkan kebijakan nuklir untuk tujuan damainya. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi bahkan meminta Amerika dan Sekutunya untuk segera menghentikan pengembangan nuklir Iran. Karena menganggap Iran dapat menjadi negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, sehingga revolusi yaang pernah terjadi di Iran dapat merambat ke negara-negara teluk yang di menganut sistem monarki. Ini dapat membuat rakyat yang merasa jenuh dengan sistem pemerintahan diktator dan monarki ini akan melakukan seruan demi seruan untuk menggulingkan rezim-rezim tersebut. Tetapi disamping itu semua Iran dengan politik pragmatismenya tetap dapat merangkul negara-negara Timur Tengah yang berbeda mazhab sekalipun. Itu karena Iran dengan prinsip yang di cetuskan sejak awal revolusi untuk dapat merangkul negara-negara Islam dan menolak adanya hubungan dengan Amerika yang menjadi salah satu trauma bagi rakyat Iran, karena pada masa Shah Reza Amerika dapat dengan mudah menguras sumur-sumur minyak Iran. (Eva Patricia Rakel, *The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since The Islamic Revolution,* Duitsland: 2008, hal, 147-148.)

Kian meluasnya pengaruh strategis Iran di kawasan pasca meletusnya kebangkitan rakyat Arab baru-baru ini, berpengaruh terhadap tampilnya Iran di Timur Tengah, yang paling terlihat adalah keteladanannya bagi negara lain, pengaruh besarnya di kawasan, kebijakan luar negerinya, kekuatan lunak dan kokoh, kondisi strategis geopolitiknya dan sumber daya manusia yang tinggi, dan terkristalkan dalam *Iran's Strategy* dan tersalurkan di diplomasi Iran di kancah internasional. (<http://indonesian.irib.ir/hi/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5072241/pop_up?_101_INSTANCE_v5Xe_viewMode=print>.)

**Posisi Iran Dalam Memperkuat Dominasinya Secara Geopolitik Di Kawasan Timur Tengah**

Dua faktor yang membuat Iran mendominasi percaturan politik di Timur Tengah adalah satu faktor sistem diplomasi yang dijalankan oleh Iran pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad adalah politik pragmatis. Dengan politik pragmatisnya Iran dapat merangkul negara-negara kawasan Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika. Tetapi dengan politik pragmatis dan juga kedekatan emosional dan kedekatan politis membuat Iran dapat menjadikan negara sekutu Amerika di Timur tengah itu menjadi negara sahabat. Kedua faktor geopolitik, Iran dengan posisi strategis di Timur Tengah sebagai pengendali Selat Hormuz yang menjadi Selat yang penting di dunia karena selat tersebut dilalui oleh semua kapal utnuk memenuhi cadangan minyak dunia. Dalam geostrategis Iran juga diuntungkan karena sebagai salah satu dari lima negara terbesar penghasil minyak dan gas alam dunia. Posisinya yang berada di Timur Tengah dan juga Eurasia Iran menghasikan cadangan minyak dan gas alam dari Laut Kaspia, dimana Laut tersebut memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. (http://hankam.kompasiana.com/2012/07/12/sebuah-analisa-jika-as-menyelenggarakan-perang-ke-iran-476393.html.)

Di tengah derasnya gelombang sanksi Barat selama lebih dari tiga dekade untuk mengucilkan Iran di arena internasional, Republik Islam berhasil menggagalkan berbagai konspirasi itu. Salah satu penyebab kegagalan Amerika Serikat yang berupaya menumbangkan Iran selama lebih dari tiga dekade sejak kemenangan Revolusi Islam adalah adanya berbagai faktor, salah satunya faktor geopolitik dan geoekonomi Iran di kawasan Timur Tengah. Para analis meyakini minyak dan gas memainkan peran penting dalam geopolitik regional dan global, sekaligus pusat sumber energi fosil dunia. Betapa tidak, sejak dahulu Timur Tengah merupakan jembatan antara tiga benua ; Asia, Eropa dan Afrika. Dengan demikian Timur Tengah memiliki posisi strategis di tingkat internasional, dan selalu menjadi incaran negara-negara arogan yang berupaya menjarah sumber energi dunia itu. Saat ini sekitar 60 persen cadangan minyak dunia yang diketahui, dan 35 persen sumber gas dunia berada di kawasan Timur Tengah, yang sebagian besar berada di Teluk Persia. (http://indonesian.irib.ir/equilibrium/-/asset\_publisher/yB7o/content/id/5282320.)

Peran geopolitik Iran juga menjadi salah satu mengapa Iran tetap dapat berkembang di tengah banyaknya sanksi embargo yang di jatuhkan oleh Amerika dan Sekutunya. Ini karena, Iran merupakan salah satu dari lima negara penghasil minyak terbesar di dunia, dimana negara-negara industri sangat bergantung sekali dengan suplai minyak dari kelima negara tersebut. Sehingga Iran dapat meningkatkan perekonomiannya dari hasil minyaknya tersebut. Bukan hanya itu, Iran sebagai negara penghasil minyak dan gas juga memiliki faktor kuat lainnya yang menjadikan Iran sebagai simbol kekuatan di Timur Tengah yaitu Iran mengendalikan salah satu selat yang paling berpengaruh di dunia yaitu Selat Hormuz yang menjadi rute perlintasan kapal-kapal pengangkut minyak yang dimuat dari negara-negara Teluk. Dengan demikian posisi Iran di kawasan sangat berpengaruh besar dalam percaturan politiknya di Timur Tengah. Belum lagi Iran yang berada di wilayah Eurasia yang dikenal dengan *heartland,* karena negara-negara di wilayah tersebut menjadi negara yang menghasilkan minyak dan gas yang melimpah.( http://www.ipabionline.com/2012/01/secara-geografis-al-iran-sulit.html.)

Iran merupakan negara penting bagi kawasan Teluk Persia. Republik Islam memainkan peran sebagai pemain kunci bagi transit barang, terutama minyak dan gas di kawasan dan dunia. Dengan demikian, selain memiliki posisi geopolitik yang tinggi di kawasan, Iran juga memiliki geoekonomi yang besar di kawasan. Ikatan antara geopolitik dan geoekonomi Iran di Laut Kaspia dan Asia Tengah menyebabkan Iran memiliki kemampuan untuk mengontrol kawasan strategis itu.

Posisi geostrategis Iran dengan jaringan *pipelines*-nya dan sebagai produsen OPEC terbesar kedua juga menjadikannya aktor kunci dalam energi dunia. Laut Kaspia dan sumber daya minyak dan gas alamnya merupakan cadangan terbesar ketiga di dunia. Tahun 1921, Iran dan Uni Soviet menandatangani perjanjian yang membagi dua Laut Kaspia. Kawasan ini memiliki cadangan minyak 49 billion barrel, atau sama dengan produksi setengah anggota OPEC seperti Kuwait dan cadangan gas alam sebesar 230 *trillion cubic feet*. Iran memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan cadangan gas terbesar kedua setelah Rusia. Devisa ekspor minyak Iran mencapai sedikitnya 45 miliar dollar Amerika Serikat tahun 2007 atau 50 persen dari anggaran belanja tahunannya. Iran juga menyuplai 5 persen minyak dunia. (http://indonesian.irib.ir/ekonomi/-/asset\_publisher/ShX2/content/minyak-di-ladang-baru-iran-berkualitas-tinggi-dan-mahal.)

Terkait dengan pembahasan Laut Kaspia yang masih terus dikaji antara Iran dengan 4 negara seperti Rusia, Azerbaijan, Turkmenistan dan Kazakhtan, segala kesepakatan baru soal rezim hukum Laut Kaspia harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya antara Iran dan Rusia. Berdasarkan kesepakatan tahun 1921 dan 1940, Laut Kaspia adalah wilayah bersama Iran dan Rusia dan menurut statemen Desember 1991 Jerman, selama proses penentuan rezim hukum Laut Kaspia maka kesepakatan terdahulu masih berlaku. (http://indonesian.irib.ir/c/journal/view\_article\_content?groupId=10330&articleId=4893541&version=1.0.)

**Penutup**

Dua faktor yang membuat Iran mendominasi percaturan politik di Timur Tengah adalah satu faktor sistem diplomasi yang dijalankan oleh Iran pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad adalah politik pragmatis. Dengan politik pragmatisnya Iran dapat merangkul negara-negara kawasan Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika. Kedua faktor geopolitik, Iran dengan posisi strategis di Timur Tengah sebagai pengendali Selat Hormuz yang menjadi Selat yang penting di dunia karena selat tersebut dilalui oleh semua kapal utnuk memenuhi cadangan minyak dunia. Dalam geostrategis Iran juga diuntungkan karena sebagai salah satu dari lima negara terbesar penghasil minyak dan gas alam dunia. Posisinya yang berada di Timur Tengah dan juga Eurasia Iran menghasikan cadangan minyak dan gas alam dari Laut Kaspia, dimana Laut tersebut memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar.

Dari kedua faktor tersebut, faktor geopolitiklah yang membuat Iran menjadi negara yang mendominasi di kawasan Timur Tengah. Karena kebijakan politik di Iran akan berbeda setiap berganti pemimpinnya. Misalnya pada era Ahmadinejad yang lebih menekankan kepada diplomasi nuklir damainya yang membuat Iran terisolasi dari dunia internasional akibat dari sanksi barat. Karena geopolitik Iran sudah menjadi takdir bagi Iran, maka dengan geografi dari negara Iran yang berada di jantung sumber cadangan energy fosil, Iran hanya perlu mengelola dan memanfaatkan sumber minyak dan gas alam tersebut.

Dengan kemandirian Iran tersebut yang memanfaatkan segala kemungkinan dan memaksimalkan kemampuannya Iran menjadi negara yang mendominasi di kawasan Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara kawasan lainnya yang hanya bisa di layani oleh negara-negara Barat tanpa memanfaakan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya seperti Iran. Dengan demikian Iran adalah satu-satunya negara di kawasan yang berkembang dalam segala bidang dengan kemandiriannya dan berhasil mendominasi percaturan politik di kawasan Timur Tengah dengan memanfaatkan posisinya secara geopolitik untuk melancarkan diplomasinya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Daftar Pustaka

<http://anneahira.com/teknologi-militer-iran.htm>.

<http://indonesian.irib.ir/en/telisik/-/asset_publisher/k0Z8/content/id/4891112/pop_up?_101_INSTANCE_k0Z8_viewMode=print>,

<http://www.islamtimes.org/vdcfjcdj.w6dxta8,iw.html>,

Eva Patricia Rakel, *The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and*

*Foreign Relations since The Islamic Revolution,* Duitsland: 2008, hal, 147-148.

<http://indonesian.irib.ir/hi/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5072241/pop_up?_101_INSTANCE_v5Xe_viewMode=print>.

http://hankam.kompasiana.com/2012/07/12/sebuah-analisa-jika-as-menyelenggarakan-perang-ke-iran-476393.html.

http://indonesian.irib.ir/equilibrium/-/asset\_publisher/yB7o/content/id/5282320.

http://www.ipabionline.com/2012/01/secara-geografis-al-iran-sulit.html.

http://indonesian.irib.ir/ekonomi/-/asset\_publisher/ShX2/content/minyak-di-ladang-baru-iran-berkualitas-tinggi-dan-mahal.

http://indonesian.irib.ir/c/journal/view\_article\_content?groupId=10330&articleId=4893541&version=1.0.

## **FAKTOR - FAKTOR PENDORONG KEMENANGAN HASSAN ROUHANI DALAM PEMILU IRAN JUNI 2013**

***Ali Bin Zed dan Harmiyati***

**Pendahuluan**

Iran baru saja menggelar pesta demokrasi terbesar nya pada bulan juni 2013 ini, dan mengahasilkan seorang calon presiden dengan harapan perubahan yang lebih baik untuk Iran kedepannya.Hasil ini tentu menjadi sebuah kejutan bagi kalangan elit politik iran dan dunia internasional. Jika sebelumnya Iran berada di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad dari kubu konservatif,kini Iran akanmenyongsong masa depan yang lebih terbuka terhadap dunia internasional dibawah kendali Hassan Rouhani dari kubu reformis.kemenangan ini bukan tanpa alasan, Hassan Rouhani merupakan sosok moderat yang lebih fleksibel di bandingkan Mahmoud Ahmadinejad yang cenderung keras dan berpendirian teguh. Tulisan ini akan membahasfaktor-faktor apa sajakah yang mendorong kemenangan mutlak Hassan Rouhani dalam pemilu Iran 2013.

Pemilihan presiden iran kesebelas akan digelar pada 14 Juni 2013 dan diikuti delapan calon dari 686 peserta yang disetujui oleh dewan pengawal revolusi. Siapapun pemenangnya akan menggantikan posisi Mahmoud Ahmadinejad yang tidak boleh mencalonkan kembali karena sudah menjabat dua kali berurut, berikut delapan calon presiden Iran yang telah mendapat persetujuan dari Pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayyatollah Ali Khamanei dan dewan pengawal revolusi :

1. Mohammad Baqer Qalibaf
2. Ali Akbar Velayati
3. Hassan Rouhani
4. Gholamali Haddad-Adel
5. Mohammad Reza Aref
6. Mohsen Rezai
7. Mohammad Gharazi

Namun pada kenyataannya menjelang pemilu, dua kandidat presiden justru menyatakan mundur. Mohammad Reza Aref, kandidat reformis tunggal pemilihan presiden Iran 14 Juni mendatang, mengundurkan diri dari pencalonannya. Pengunduran diri itu dilakukan setelah Aref mendapat nasihat dari mantan presiden reformis Mohammad Khatami.Belakangan, tokoh-tokoh kaum reformis juga menelepon Aref dan memintanya untuk mundur dan membantu kandidat kaum moderat, Hassan Rouhani.Atas saran itu, Aref kemudian mundur.Rouhani adalah mantan negosiator ulung yang dimiliki Iran setelah Khatami.Ia juga pernah bekerja untuk kantor keamanan tahun 1997 hingga 2005 dan dekat dengan mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani.

Kemudian, kandidat lainnya, Gholam-Ali Haddad Adel juga mengundurkan diri dari pencalonannya dalam pemilu.Namun, Haddad-Adel tak menyebutkan alasan pengunduran dirinya.Gholam-Ali Haddad-Adel pernah menjadi juru bicara parlemen.Berbeda dengan Aref, Haddad-Adel adalah calon dari kubu konservatif.Beberapa pihak menduga pengunduran dirinya memiliki kaitan dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.Haddad-Adel adalah besan Ayatollah Khomeini.Putrinya menikah dengan putra Khomeini.Kandidat dari kubu garis keras menyatakan tak akan memecah dukungan mereka bagi kandidat lainnya, seperti yang dilakukan kubu Aref. Pemilihan presiden sebelumnya ramai dengan karnaval warna-warni menjelang debat kandidat dan pidato-pidato politik. Sementara pemilu kali ini hanya diramaikan oleh dinding-dinding yang penuh dengan tempelan poster para calon kandidat.

Namun siapa yang menyangka Hassan Rouhani berhasil memenangkan pemilihan presiden di Iran dalam putaran pertama.Banyak yang berharap, Rouhani bisa melakukan perubahan.Puluhan ribu orang membanjiri jalan-jalan di Teheran, ketika Komisi Pemilihan Umum Iran mengumumkan kemenangan Rouhani.Tidak ada yang menyangka Rouhani bisa menang hanya dalam satu putaran. Kebanyakan pengamat tadinya memperkirakan, pemilihan presiden akan dilangsungkan dalam dua putaran.Diakhir menjelang batas waktu pemungutan suara, dukungan terhadap Hassan Rouhani memang terus meningkat. Tidak ada prediksi yang menyatakan bahwa salah satu dari enam kandidat akan mampu merebut mayoritas absolut dalam putaran pertama.Karena itu cukup mengejutkan, bahwa Rouhani mampu merebut hampir 51 persen suara. Semua kandidat lain tidak ada yang berhasil mengumpulkan suara lebih dari 20 persen. Pesaing terkuat Rouhani, Walikota Teheran Mohammed Bagher Ghalibaf hanya mengumpulkan sekitar 17 persen.Tidak disangka, Rouhani bisa menang telak.Kandidat konservatif seperti juru runding nuklir Sayed Jalili, hanya mendapat 11 persen suara.Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya berusaha mengajukan calon-calon ultrakonservatif.Yang jadi favorit terutama Sayed Jalili dan mantan menteri luar negeri Welajati.Kandidat presiden dari kubu reformis dicoret dari daftar kandidat.Juga mantan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani tidak diijinkan maju dalam pemilu presiden.

Akhirnya para pendukung kubu reformis sepakat mendukung Hassan Rouhani.Ternyata, dukungan yang didapat Rouhani sangat besar.Perolehan suara Jalili dan Welajati malah tertinggal jauh.Rouhani memang tidak berasal dari kubu reformis.Ia termasuk kandidat konservatif yang cukup moderat. Tapi pada hari-hari terakhir menjelang pemilu, ia mendapat dukungan langsung dari mantan presiden Mohammad Khatami dan Rafsanjani.Selama kampanye, Rouhani berjanji akan melakukan pendekatan dengan negara-negara barat. Terutama untuk memperbaiki situasi ekonomi di negaranya yang semakin buruk.Tadinya kubu reformis merasa kecewa karena calon-calonnya dicoret oleh Dewan Pengawas yang punya wewenang menetapkan siapa saja yang boleh maju dalam pemilu presiden.Kubu reformis sempat menyerukan aksi boikot pemilu.Tapi tokoh-tokoh moderat kemudian memutuskan untuk mendukung Rouhani.Para pemilih menyadari, mereka tidak akan mencapai apa-apa dengan aksi boikot. Seruan tokoh politik seperti Khatami dan Rafsanjani agar pemilih mendukung Rouhani berhasil meyakinkan rakyat dengan janji kampanyenya.Namun para pengamat politik barat sepertinya tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada pengganti Ahmadinejad itu.Bagaimanapun, kekuasaan dan kebijakan politik di Iran tetap berada di tangan Ayatollah Ali Khamenei dan kubu konservatifnya.Berikut adalah table quick count yang di lakukan oleh kementrian dalam negeri Iran.

**Analisis Kemenangan Hassan Rouhani**

1. **Isu Dalam Negeri Iran**

**Merosotnya nilai mata uang Iran terhadap dollar Amerika**

Berbagai fakta menunjukkan bahwa target utama sanksi Iran, sebagaimana dijelaskan oleh mantan menlu AS, Hillary Clinton, untuk melumpuhkan perekonomian Iran. Sejatinya, para pengambil kebijakan AS sejak dua tahun lalu hingga kini berkesimpulan bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi Iran, dan Tehran pun tidak menunjukkan sikap tunduk terhadap Barat terkait program nuklir sipilnya.Dengan pertimbangan tersebut, AS bersama Uni Eropa melancarkan babak baru sanksi terhadap Iran. Meski demikian, AS dan Israel berulangkali mengancam akan melancarkan opsi invasi militer jika sanksi internasional dinilai gagal menghentikan program nuklir sipil Iran. Pada saat yang sama para pejabat AS berulangkali mengungkapkan sikapnya yang siap berunding dengan Iran. Tapi maksud Barat mengenai perundingan adalah menekankan ambisinya terhadap Tehran, bukan pertukaran pandangan untuk menemukan solusi kolektif.Untuk itulah Republik Islam menolaknya. Terkait hal ini Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, Republik Islam Iran bukan hanya tidak akan merevisi pandangannya, bahkan semakin yakin akan melanjutkan jalan yang telah ditempuh bangsa Iran.

Kini muncul pertanyaan besar, jika selama ini program nuklir Iran terbukti tidak menyimpang dari tujuan damainya, lalu mengapa Barat tetap melancarkan sanksi yang semakin masif terhadap Tehran?Washington mengklaim Iran tidak sedang membuat senjata nuklir, namun memiliki ambisi untuk membuat senjata pemusnah masal itu. Pertanyaannya, apakah sebuah dugaan saja cukup menjadi alasan bagi AS untuk menekan Iran melalui berbagai sanksi ?Realitasnya, berbagai tekanan sanksi yang dilancarkan Barat terhadap Iran merupakan tindakan ilegal di dalam perspektif hukum internasional. Tapi mengapa  sanksi itu terus berlanjut dengan frekuensi yang semakin masif? Salah satu alasan utamanya adalah Israel yang menjadi "anak emas" AS. Doktrin nuklir Tel Aviv adalah tidak boleh ada sebuah negarapun di Timur Tengah yang menguasai teknologi nuklir, kecuali  Israel. Kini, kemajuan besar yang dicapai Iran di bidang teknologi nuklir sipil memicu kekhawatiran Israel. Rezim Zionis melalui tekanan sanksi ekonomi sekutunya terutama AS terhadap Iran, berupaya menjegal kemajuan program nuklir sipil Iran dengan berbagai cara

**Permasalahan Tingginya Tingkat Pengangguran dan Inflasi**

Setelah mengambil alih jabatan Presiden pada awal Agustus, Hassan Rouhani akan menghadapi sejumlah panjang tantangan ekonomi. Masalah ekonomi dan menangani pengangguran menjadi prioritas tertinggi, tetapi jelas bahwa proses membalikkan tren negatif dalam beberapa tahun terakhir akan membutuhkan proses. Dalam poin ini akan membahas tantangan yang harus dihadapi pemerintah Rouhani yang muncul di bidang ekonomi. Presiden terpilih Hassan Rouhani akan mengambil alih jabatan kepresidenan di awal bulan Agustus 2013. Setelah pengangkatan kabinetnya dan memperoleh kepercayaan dari Majlis (Parlemen), ia akan membuktikan janji janjinya untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Iran.

Saat tampil di televisi nasional Iran pada Senin (27/5), Hassan Rohani berjanji akan memperbaiki iklim bisnis dan produksi dalam negeri jika terpilih dalam pemilu presiden 14 Juni nanti. Ia mengatakan, "Anda tahu bahwa semua masalah di sektor ekonomi dan di sektor lain berakar pada masalah manajemen dan efisiensi administrasi. Tetapi dalam bidang ekonomi, solusi untuk semua masalah adalah produktivitas."Menurutnya, kendala terkait mekanisme produksi dapat diatasi dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang.Dia menjelaskan, "Jika kita dapat menyelesaikan persoalan produktivitas ekonomi, maka masalah pengangguran juga akan terselesaikan."

Ketika ditanya masalah ekonomi muqawama (ekonomi resistensi), capres dari kubu reformis ini menandaskan, ekonomi muqawama tidak berarti penghematan, seperti Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran nyatakan.Rohani berpandangan bahwa ekonomi muqawama menuntut sebuah gerakan menuju produksi dalam negeri, ekonomi muqawama berarti kita harus mengejar tujuan ekonomi kita.Ia menambahkan, "Selain rencana untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan budaya serta masalah dalam kebijakan dalam dan luar negeri, saya punya rencana jangka pendek untuk diimplementasikan dalam satu bulan dan 100 hari." Menurutnya, melalui kerjasama dan berkonsultasi dengan elit negara, universitas dan para ahli, pemerintahan mendatang akan memberikan nafas kehidupan baru kepada ekonomi nasional. Rohani berjanji akan menghidupkan kembali dua lembaga negara yang telah dibubarkan, Lembaga Perencanaan dan Anggaran, dan Lembaga Manajemen dan Perencanaan. Ia berpendapat bahwa kondisi ekonomi negara saat ini adalah hasil dari pandangan ekstremis terhadap isu-isu budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

1. **Isu Nuklir Dan Konflik Suriah**

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rohani mengatakan, pemerintah Tehran akan memajukan negosiasi nuklirnya hingga tuntutan legal dan hak-hak bangsa Iran terpenuhi.Rohani dalam wawancara khusus dengan surat kabar Amerika Serikat, Washington Post menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan surat kabar tersebut tentang berbagai isu termasuk isu nuklir Iran, hubungan antara Tehran dan Washington dan transformasi di Suriah. Menurut laporan IRNA, wawancara tersebut dilakukan di sela-sela sidang tahunan ke-68 Majlis Umum PBB di New York, Rabu (25/9).Presiden Iran mengatakan, jika Barat mengakui semua hak legal bangsa Iran dan menerima pengayaan uranium di negara ini, maka saya yakin transparansi Iran berdasarkan hukum dan peraturan internasional tidak akan bermasalah.

Mengenai transformasi di Suriah, Rohani menandaskan, kita semua harus membantu menyelesaikan krisis Suriah. Terkait kehadiran Republik Islam Iran untuk menyelesaikan konflik regional termasuk krisis Suriah, Rohani mengatakan, Tehran akan menghadiri semua perundingan tanpa syarat termasuk pertemuan Jenewa-2. Ia menambahkan, yang pasti telah terjadi penggunaan senjata kimia di Suriah dan belum jelas kelompok mana yang telah menggunakan senjata pemusnah massal itu, namun yang jelas penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun harus dikecam, dan kami sebagai korban senjata tersebut telah memahami benar dampak tidak manusiawi dari senjata kimia.

Rouhani juga mengungkapkan kepuasannya atas keputusan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).Mengenai hubungan antara Tehran dan Washington, presiden Iran menuturkan, "Menurut `Pemerintahan Bijak dan Harapan,` upaya untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan AS adalah pekerjaan benar dan positif."Rohani juga menyinggung adanya ketidakpercayaan mendalam antara pemerintah Iran dan AS.Ia mengatakan, menurut pandangan pemerintah dan rakyat Iran, kebijakan-kebijakan pemerintah AS di semua wilayah termasuk Iran adalah salah. Presiden Iran menjelaskan bahwa semua upaya dan energi pemerintah telah dikerahkan untuk menyelesaikan isu nuklir melalui jalur diplomatik dan perundingan. Menurutnya, keputusan pemerintah dapat diambil setelah adanya penyelesaian isu-isu nuklir dan tema-tema lain yang menjadi perhatian dua negara melalui negosiasi berdasarkan kriteria-kriteria hukum yang menjamin hak-hak bangsa Iran

**Faktor Daya Tarik Hassan Rouhani**

Rouhani dianggap menjadi politikus yang moderat dan pragmatis, Rouhani terpilih sebagai Presiden dengan dukungan kubu reformis, dan berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai paham reformisnyadan menggunakan statusnya dalam pemerintah untuk menjembatani dan membagi antara kubu reformis dan konservatif. Dengan jargon kampanye kebebasan berekspresi dan hak yang sama untuk wanita, Rohani berhasil merebut hati kaum moderat dan liberal.Pria 64 tahun ini bukan orang baru di perpolitikan Iran.Pria kelahiran tahun 1948 di Provinsi Semnan ini dikenal baik sebagai ulama maupun politisi yang ulung.Dia memulai kariernya usai Revolusi Iran tahun 1979 sebagai anggota parlemen.Pria dengan tiga gelar pendidikan ini juga dikenal sebagai ulama senior Syiah dan anggota Dewan Ahli.Saat perang Iran-Irak tahun 1980-an, Rohani merupakan Komandan Pertahanan Udara Nasional.Setelah perang berakhir, dia menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Tinggi Nasional selama 13 tahun sebelum Ahmadinejad memimpin negeri itu.Rouhani menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi (SNSC) selama 16 tahun. Peran utama dalam perundingan nuklir yang membawanya mendapat julukan ' Diplomat Sheikh', pertama kali diberikan kepadanya oleh koran Sharq pada November 2003 dan sering diulang setelah itu oleh media asing dan media berbahasa Persia. Karirnya di Dewan mulai di bawah Presiden Hashemi Rafsanjani dan dilanjutkan di bawah penggantinya, Presiden Khatami.bagaimanapun Jabatannya sebagai negosiator nuklir Iran hanya terbatas 678 hari (dari 6 October 2003 untuk 15 Agustus 2005). Periode itu dimulai dengan pesan internasional tentang program energi nuklir Iran dan pengadopsian resolusi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Bulan Juni 2004, Dewan Gubernur IAEA mengeluarkan pernyataan yang diikuti oleh resolusi di September pada tahun yang sama, yang berfokus pada kasus nuklir Iran dengan tujuan untuk memaksakan komitmen yang sulit terhadap Iran. Yang menjadi poin permasalahan bagi Iran adalah aktivitas pengayaan energi nuklir ini bersamaan dengan kemenangan Amerika di perang Irak dan eskalasi retorika perang di wilayah itu.Masyarakat internasional mengalami ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat kemajuan nuklir Iran ditanggapi dengan sensitivitas yang tinggi. Upaya pengembangan energy nuklir oleh pemerintah Iran ternyata memicu ketegangan meningkat, mengingat perbedaan yang ada antara Kementerian Luar Negeri dan organisasi Energi Atom Iran, menteri luar negeri Kamal Kharazi mengajukan proposal yang diterima oleh Presiden dan pemimpin Iran lainnya. Sesuai dengan isi proposal, keputusan untuk memberhentikan sementara program nuklir Iran dibuat untuk membangun citra politikdi mata dunia internasional dan kepatuhan hukum internasional.Dalam perundingan ini Hassan Rouhani tampil sebagai sosok yang mampu menjadi contoh bahwa masih ada kemungkinan untuk berdialog dengan Iran.

Tim negosiator di bawah pimpinan Hassan Rouhani didelegasikan dengan kemampuan khusus untuk merumuskan rencana secara komprehensif agar interaksi antara Iran dengan IAEA dan berbagai organisasi yang bersangkutan di dalam negeri dapat berjalan lancar, Oleh karena itu berdasarkan perintah Presiden Mohammad Khatami dengan persetujuan dari Ali Khamenei, Hassan Rouhani ditunjuk untuk mengambil alih kasus nuklir Iran pada tanggal 6 Oktober 2003. selanjutnya, negosiasi antara Iran dan tiga negara Eropa dimulai di Teheran dan kemudian di Brussels, Jenewa dan Paris. Rouhani dan timnya, yang anggotanya telah diperkenalkan oleh Velayati dan Kharazi sebagai diplomat terbaik di Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan upaya mereka pada dialog dalam upaya membangun keyakinan internasional dari segala propaganda dan tuduhan barat, Sebagai langkah pertama, mereka berupaya untuk mencegah tuduhan pengembangan senjata nuklir oleh Negara barat sampai ke dewan keamanan PBB, sebagai upaya untuk menghindari sanksi internasional.

Dengan pertimbangan dari tim negosiator nuklir Iran, akhirnya disepakati untuk memberhentikan kegiatan pengembangan energi nuklir demi membangun kepercayaan internasional dan menghindari sanksi PBB. Selain membangun kepercayaan diri, pihak Iran bersikeras untuk mengurangi tekanan internasional dan kemungkinan perang. Namun, keputusan yang dibuat oleh tim nuklir di bawah kepemimpinan Rouhani dikritik oleh beberapa kalangan. Dalam dua tahun kemudian, Setelah pemilihan Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden, Rouhani melepaskan jabatannya sebagai Sekretaris dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi setelah 16 tahun pada 15 Agustus 2005 dan digantikan oleh Ali Larijani sebagai Sekretaris baru yang juga mengambil alih kasus nuklir Iran.Saat Rouhani menjalankan tugasnya, hubungan Iran dengan Barat akur.karena, Rohani sepakat menghentikan pengayaan uranium mereka dan siap bekerja sama dengan pengawas nuklir internasional.

**Penutup**

Kemenangan Hassan Rouhani adalah kemenangan rakyat. Kemenangan ini sesuai dengan apa yang di butuhkan dan diharapkan rakyat pada Iran pada saat ini. Iran yang tengah berada dalamkepungan dunia internasional memang membutuhkan Hassan rouhani sebagai presiden. Gaya diplomasi Rouhani dipandang memang paling tepat untuk memimpin Iran yang sedang membutuhkan sosok yang mampu berdialog dengan dunia internasional. Dari dua alasan berdasarkan teori perilaku memilih dari Angus Campbell, penulis menyimpulkan bahwa faktor isu yang berkembang menjadi alasan utama di banding faktor orientasi kandidat.Berdasarkan isu yang sedang berkembang di Iran sekarang yang penuh dengan tekanan dan permasalahan dalam negeri, Hassan Rouhani adalah figur yang paling tepat untuk memipin Iran saat ini.Hassan Rouhani yang merupakan tokoh moderat adalah jawaban dari permasalahan dalam negeri seperti hak hak wanita dan suara dari kaum pemuda yang merupakan kelompok mayoritas di Iran sekarang.Keterpurukan perekonomian sebenarnya adalah akibat sanksi dan embargo yang di berlakukan oleh Negara barat terkait kebijakan pengembangan energy nuklir dibawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad, jika tidak dapat berunding dengan baik, maka Iran akan semakin memburuk perekonomiannya karena pihak barat keberatan dengan program nuklir Iran, dalam hal ini kemampuan Hassan Rouhani sebagai *“diplomatic syeikh”* sangat dibutuhkan untuk berunding agar pihak barat mencabut sanksi dan embargo demi memperbaiki perekonomian Iran. Sedangkan untuk permasalahan politik luar negeri, berkaitan dengan persoalan nuklir dan konflik regional yang sedang berlangsung di Suriah, Rouhani dianggap sebagai tokoh yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan, lagi- lagi karena kemampuan diplomasinya yang sudah dikenal baik oleh dunia internasional.

**Daftar Pustaka**

Campbell, Angus,*The American Voters*, John Willey and Son, New York, 1960.

“Delapan Kandidat Presiden Iran” dalam, <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/115483078/pemilu-iran-inilah-profil-8-calon-presiden,/1/7>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2013.

“Kemenangan Mengejutkan Hassan Rouhani” dalam, <http://www.dw.de/kemenangan-rouhani-di-iran-mengejutkan/a-16886582>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013.

“Janji kemenangan Hassan Rouhani” dalam, <http://indonesian.irib.ir/headline/-/asset_publisher/eKa6/content/menyongsong-pemilu-presiden-iran-bagian-18/pop_up>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

“Wawancara Presiden Iran dengan Washington Post “ dalam, <http://indonesian.irib.ir/hi/hidden-2/-/asset_publisher/yzR7/content/id/5524490/pop_up?_101_INSTANCE_yzR7_viewMode=print>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

"Masa Depan Iran ditangan Hassan Rouhani, Sang “Diplomat Syekh” dalam, <http://stayaware.wordpress.com/2013/09/19/masa-depan-iran-ditangan-hassan-rouhani-sang-diplomat-syekh/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA DOMINASI PARTAI AKP DALAM PEMILU LEGISLATIF TURKI TAHUN 2015**

***Frederikus Nong Wair***

***dan Harmiyati***

**Pendahuluan**

Pada tanggal 7 juni 2015 sebuah pesta demokrasi akbar berhasil dilaksanakan secara sukses oleh pemerintah Turki serta warga negarannya, pesta yang akan menetukan nasib serta perjalanan sebuah bangsa besar yeng telah tercatat dalam sejarah umat manusia untuk 4 tahun kedepan. Pada pesta demokrasi tersebut turut serta 21 partai politik yang memperebutkan kursi di parlemen Turki. Diantara partai-partai politik tersebut terdapat partai AKP sebagai partai penguasa di pemerintahan, dan CHP sebagai oposisi pemerintahan yang berlandaskan pada ideologi sekuleriseme. Kedua partai ini adalah representasi kehidupan sosial serta politik Turki dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini. Selama AKP hadir serta mengikuti pemilu legislatif Turki tercatat sudah empat kali partai ini memenangi pemilu termasuk pemilu yang terakhir ini, pemilu-pemilu tersebut yakni pada tahun 2002 berhasil meraup 34 % suara serta mengutus 363 wakilnya duduk di parlemen, kemudian tahun 2007 meraup 47 % suara serta mengutus 341 wakilnya di parlemen, kemudian tahun 2011 partai ini semakin meningkat jumlah pemilihnya dengan berhasil meraup pemilih hampir mencapai 50% suara serta mengirim wakilnya di parlemen sebanyak 326 anggota. Keberhasilan tersebut terulang lagi dalam pemilu yang terakhir ini, tahun 2015 akan tetapi berbeda maknanya, kemenangan ini dinilai sebagai “kekalahan” yang perlahan-lahan akan mengerogoti keperkasaannya. Karena walaupun memenangi pemilu legislatif akan tetapi gagal dalam meraup suara secara mayoritas, diamana ketentuan konstitusi Turki menharuskan partai yang hendak membentuk pemerintahan tunggal harus memiliki setidaknya 276 wakil di perlemen. Dengan demikian harus mencapai setidaknya 50 + 1 % suara dalam pemilihan tersebut. Berikut hasil pemilu yang diumumkan oleh hurriyetdailynews. (Result of Parlementari Election “ http://www. Hurriyetdailynews.com /election/default.html).AKP 40,98 % suara, CHP( *Cumhuriyet Halk Partisi*) 24,82 % suara, MHP (*Miliyet Hareket Partisi*) 16,27 % suara, serta HDP (*Halklarin Demokrat Partisi*) sebesar 13,44 % suara, sedangkan sisanya belum mencukupi parlementari Treshold yang berlaku di Turki yakni sebesar 10 %.

**AKP dalam Sejarah**

Untuk memahami alur serta dinamika perpolitikan di negara Turki maka kesemuanya itu sangat berkaitan erat dengan sejarah negara Turki yang panjang.Konsep sekularisme dan isu islamisasi tidak terlepas dari perjalanan negara Turki sejak konstatinopel direbut oleh Muhammad Fatih, Raja Imperium Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan kota pelabuhan yang didirikan oleh Imperium Romawi pada tahun 330 masehi oleh raja Constantin pertama.perkembangan selanjutnya dibawah kekasaan dinasti Utsmani (*ottoman empire*) Turki mengalami masa keemasan dan mencapai puncaknya.Di era inilah Turki mengalami peningkatan pesat dalam bidang militer, pemerintahan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sastra, keagamaan, dan arsitektur.( Sejarah peradaban islam di Turki”,http://ow.ly/KNICZ.com) Tapi pada tahun 1566 (sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni) masa keemasan Turki mengalami kemunduran akibat dari tingginya konflik internal perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Akibat konflik ini beberapa wilayah kekuasaan Turki pun lepas. Kondisi sosial dan politik domestik Turki pun terganggu. Akibatnya, pengaruh negara lain (Eropa) yang sebelumnya sulit masuk, pada masa ini mulai merambah masuk ke Turki dan dunia Islam sampai pada awal abad ke-20.(*ibid*)

Tingginya konflik internal dan potensi ancaman keutuhan wilayah kekuasaan, akhirnya mendorong pemimpin Turki pada masa berikutnya Sultan Mahmud II (1826 M) untuk melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Tradisi aristokrasi digantinya dengan sistem demokrasi *(sekuler*). Terjadi pemisahan yang tegas antara urusan agama dan politik/pemerintahan. Berbagai perubahan pun terjadi, mulai dari sistem kemiliteran (pendidikan militer ala Barat) sampai pada bidang pendidikan (pemaduan pendidikan agama dan umum). Pada masa ini pula mulai ada banyak pengiriman pelajar Turki ke Eropa. Mereka inilah yang setelah kembali dari Eropa turut mengadakan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan di Turki . Sehingga pada masa inilah pola pikir, ide, dan tradisi Barat semakin berkembang di Turki. Inilah awal proses sekularisasi yang terjadi di Turki dalam rentangan sejarahnya.(*ibid*)

Sekularisme Turki mendapat bentuknya saat Mustafa Kemal Altaturk berkuasa pada awal abad ke- 20.Isu sekularisme ini terbentuk oleh sebab pengaruh dari revolusi Perancis mengenai kebebasan (*liberty*),persamaan (*Egality*) dan persaudaraan (*Fraternity*), dalam konsep kebangsaan yang mana selama ini Turki menganut sistem pemerintahan berdasarkan garis keturunan.konsep tanah air dan bangsa (*national-state*) merupakan awal mula pembentukan negara Turki berdasarkan sistem Republik (Rebeka Harsono, 2002).

Akibat dari kebijakan ini Turki mengalami berbagai macam persoalan, khususnya masalah hak-hak sipil serta partisipasi politik. Terhitung sudah empat kali partai berbasiskan islam yang dibubarkan dengan alasan sekulerisme serta simbol-simbol keagamaan dilarang, seperti pemakaian jilbab ditempat-tempat umum dan penggunaan bahasa Turki dalam mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran menggantikan bahasa Arab. Inti dari kesemuannya itu ialah pemerintah berusaha mempertahankan sekulerisme dengan memisahkan antara urusan agama dengan pemerintahan serta menghapus secara sistematis hal-hal keagamaan yang bisa memudarkan konsep sekulerisme tersebut.(Komarudin Hidayat dalam Pengantar,Binnaz Toprak, 1999),

Kemunculan partai AKP pada agustus 2001 menjadi pengobat sakit akan segala derita yang dialami oleh masyarakat Turki pada umumnya serta umat Islam pada khususnya, setelah partai-partai sebelumnya dibubarkan mulai dari Partai Orde Nasional/PON (1969-1971), Partai Keselamatan Nasional/PKN (1972-1981), Partai Kesejahteraan/Partai Refah ( 1983-1997), serta Partai Kebajikan/Virtue Party (1998-2001). Genetologi partai AKP (Rofii Sya’roni, 2002)

Ideologi Islam

Ideologi Sekuler

Genealogi Partai AKP

Partai Orde Nasional ( 1969 – 1971 )

Partai Keselamatan Nasional ( 1972-1981)

Partai Kesejahteraan /Rafah (1983-1997)

Partai Kebajikan (1998-2001)

Partai AKP (2001- )

Sejak awal kemunculannya dengan tegas melalui menterinya yang bernama [Hüseyin Çelik](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCseyin_%C3%87elik&action=edit&redlink=1), menegaskan kembali bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan Turki merupakan sebuah partai berhaluan demokratis konservatif terhadap nilai moral dan sosial (Fenomena Erdogan dan kelemahan posisi Turki,dalam*www:// DW. De.com/*). Hal inipun dibuktikan dengan program serta kerja AKP yang tidak berhubungan dengan proses Islamisasi. Program serta kerja Partai AKP bertalian dengan karakteristik Turki yang telah terbangun dimana memenuhi konsep demokratif yang dicetuskan oleh Robert A Dahl yakni : (Reksa Fiaji Tamaral, 2011)

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintah tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya pemilu yang jujur dan adil.
5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.
6. .Konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi

Dalam perkembangannya AKP mendapat pengaruh yang sangat kuat dari beberapa Tokoh pentingnya, diantaranya Recep Tayyib Erdogan dan Abdullah Gul yang terkenal sebagai politikus yang handal dengan berbasiskan pendidikan ekonomi yang mumpuni, Bulent Arinc politikus yang memiliki dasar pendidikan hukum serta Ahmet Devotoglu yang memiliki pendidikan Hubungan Internasional ditambah beberapa tokoh penting lainnya AKP berhasil menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dalam serta luar negeri dengan berhasil mencapai prestasi dalam berbagai bidang, khusunya bidang ekonomi serta politik. Sebagai aplikasi dari *National Interest* yang dicetuskan oleh Morgenthou(Mochtar Mas’oed, 1989) berupa kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan kesejahteraan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, serta kepentingan promosi nilai-nilai, politik luar negeri memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan hunbungan internasional Turki yang didasarkan pada pertimbangan kebijakan luar negeri yakni kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi serta militer, serta konteks internasional (William D. Coplin, 1992). Pertimbangan ini kemudian dirumuskan oleh Ahmet Devotoglu kedalam prinsip-prinsip kebijakan politik luar negeri Turki berupa keseimbangan antara keamanan dan demokrasi, “zero problem policy toward Turkey’s neighbors”, pengembangan hubungan dengan negara tetangga, pelaksanaan politik luar negeri yang multi-dimensional, dan pelaksanaan rhythmic diplomacy (Ramin Ahmadov, 2008).

Hasilnya kondisi politik serta keamanan dalam dan luar negeri Turki terbina dengan hubungan yang harmonis antara warga negara dengan pemerintah serta hubungan yang baik antara pemerintah Turki dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Uni Eropa serta sekutunya Amerika Serikat

Berlanjut pada prestasinya di bidang ekonomi turki menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % pertahun, serta meningkatkan pendapatan perkapita dari 3000 $ menjadi 10.000 $. Selama terjadinnya krisis ekonomi global, Turki merupakan satu-satunya negara yang mampu bangkit lebih cepat yakni kurang dari setahun untuk segera membenahi ekonominya serta keluar dari krisis ekonomi yang membelit hampir seluruh negara di dunia tersebut.keberhasilan ini menjadikan Turki menduduki peringkat ke-16 dalam peringkat ekonomi global terbesar.

Terlepas dari hal tersebut, sosok Erdogan adalah jantung dari AKP, sehingga AKP lebih dikenal sebagai *“Erdoganisentris*” akibat pengaruh serta dominasinya yang begitu kuat dalam tubuh AKP. Hal ini terlihat dari bagaimana Erdogan berusaha mempertahankan kekuasaan diri serta partai AKP-nya melalui strategi-starteginya diantaranya menggebrak ekonomi Turki dengan mencanangkan kebijakan reformasi neoliberal. Erdogan menunjuk ekonom Ali Babacan, yang kemudian membuat strategi pembangunan makroekonomi Turki sesuai dengan petuah-petuah *Washington Consensus* (Syarief Taghia, 2011)*.*Strategi Erdogan tersebut langsung ditangkap oleh para borjuis Anatolia, orang-orang *Neo Ottomanist*pendukung AKP yang berada di sekitar Istanbul, untuk mengembangkan industri mereka dan bermain di pasar global.

Untuk masuk ke Uni Eropa dan menjalankan politik luar negeri 'gaya baru'-nya, Erdogan ditopang oleh tim 'intelektual' yang mengarsiteki kebijakan luar negerinya. Di antara nama-nama arsitek kebijakan luar negeri itu ialah Ahmet Davutoglu, Ibrahim Kalin, dan Egemen Bagis. Davutoglu adalah pakar Hubungan Internasional di Universitas Bogazici. *T*  Kalin adalah Doktor filsafat lulusan George Washington University. Sementara Bagis malang-melintang di Amerika Serikat sebagai diplomat dan peraih gelar Master dari Baruch College, New York. Jadilah kombinasi para intelektual 'kelas berat' yang menopang Erdogan. Tim ini tidak main-main; mereka mempersiapkan sebuah blok baru yang mereka beri nama *Pax Ottomana.*Ketika ditanya oleh para oposisi soal kebijakan yang dinilai 'membangkitkan' kembali kenangan lama ini, Argumen Davutoglu sederhana saja: "tujuan kami cuma untuk menciptakan perdamaian regional, membentuk *order,*dan tentu saja mendukung kepentingan nasional Turki. Jika tujuannya hanya untuk mengontrol *order,*apakah ini tidak boleh dilakukan? Dengan kapasitasnya sebagai ahli Hubungan Internasional, Davutoglu mampu meyakinkan koalisi dan oposisi dan bersama Erdogan, mengegolkan kebijakan luar negeri yang progresif tersebut.( Akp dalam panggung kekuasaan”,[http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/partai-akp-diaerdogan-di-turki-islamis.html](http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/partai-akp-erdogan-di-turki-islamis.html)/)

Rekonsiliasi suku Kurdi merupakan taktik Erdogan dalam mendulang simpati enis Kurdi.Setelah sekian lama dalam pengasingan Erdogan mempersilakan Selahattin Demirtas untuk kembali ke Turki. Etnis Kurdi selama beberapa dekade mengalami diskriminasi, dan sejak Erdogan berkuasa Ia mulai membuka pintu rekonsiliasi bagi keterlibatan etnis Kurdi dalam kehidupan bernegara. Hal ini terbukti sukses dengan perolehan suara saat pemilu periode sebelumnya dimana daerah yang menjadi sarang Kurdi banyak memberikan suara bagi partai besutan Erdogan ini. Dalam bidang politik Erdogan berhasil menyingkirkan militer yang selama ini menjadi “mata” serta “telinga” dalam menjaga identitas Turki yang sekuler. Walaupun Erdogan adalah seorang muslim, namun Ia pandai dalam membuat kebijakan-kebijakan yang “Islami”. Hasilnya militer berhasil digiring masuk ke dalam “kandang” berkat kepercayaan masyarakat Turki kepada Erdogan selaku pimpinannya

**Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum pemilu legislatif 2015 serta dampak yang ditimbulkan**

1. Pertentangan Erdogan dan Fethullah Gulen

Keretakan antara ke 2 tokoh besar ini mulai terjadi saat insiden *MaviMarmara*, pada tahun 2010. Fethullah Gulen dalam wawancara dengan Wall Street Journal mengkritik kebijakan anti Israel Erdogan dan pandangan ini secara konsisten dipertahankan sang Hoca ketika kembali diwawancarai BBC di awal 2013. Gulen kembali menyalahkan kampanye Freedom Flotilla yang telah merenggut 9 nyawa aktivis kemanusiaan, bukannya, Israel.(,http://www.dakwatuna.com/2014/04/06/49101/dinamika-politik-dan-kemenangan-akp-turki-melihat-dalam-perspektif-berbeda/) Kemudian berlanjut pada isu luar negeri diamana Gulenis tidak begitu menyukai dukungan ‘tanpa kompromi’ pemerintah Erdogan atas Ikhwan dan Hamas pasca Arab Spring, kecenderungan asertif Turki atas isu Suriah, kedekatan Turki dengan Iran namun di sisi lain dinilai semakin menjauh dari Uni Eropa hingga kebijakan yang dipandang anti-nasionalistik Erdogan atas isu Kurdi. Maka dalam konteks ini, mengutip Levent Basturk, retaknya hubungan kedua tokoh ini tidak lagi dipandang semata rivalitas kedua tokoh ini, namun lebih merupakan perbedaan cara pandang politik (*Ibid*). Fethullah Gullen sendiri adalah seorang tokoh kharismatis dan sangat berpengaruh di Turki, melalui kegiatan dakwah dan pendidikan,Ia berhasil membentuk jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat Turki, tidak hanya itu dalam bidang ekonomi pun tokoh ini sangat berpengaruh.

1. Protes Gezi Park

Gezi park merupakan suatu daerah berupa kawasan hijau yang terletak di tengah kota istabul dan  Lapangan Taksim Istanbul  yang merupakan salah satu ikon kota tersebut. Pada Mei tahun 2013 terjadi demo besar-besaran atas kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Gezi park sebagai lokasi pembangunan replika barak militer Utsmani (yang dihancurkan pada tahun 1940 oleh rezim Kemal Attaturk) dan dipadu dengan simbol kemakmuran ekonomi berupa pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman elite.

Oleh barbagai kalangan kebijakan ini merupakan salah satu indikator Erdogan mulai menunjukan cara memimpinnya yang otoriter tanpa melihat aspirasi serta kepentingan masyarakat juga merupakan salah satu bentuk pembangunan simbol romantisme dan kebangkitan kekhalifaan Turki era Utsmaniyah. Karena taman Gezi dan kawasan lapangan Taksim dianggap merupakan representasi simbol hegemoni sekularisme (Kemalis) yang harus ditata ulang untuk mewakili representasi rezim yang berkuasa sekarang, yaitu Erdogan dan AKP nya yang Islamis, yang kemudian dipadu dengan pembangunan pertokoan dan perumahan elite yang mewakili bentuk Neoliberalisme dari pemerintahan yang berkuasa sekarang(http://www.muhammaddudi.com/politik-luar-negeri turki).

1. Skandal korupsi

Skandal korupsi yang menyerang pemerintahan Erdogan terjadi pada penghujung tahun 2013, pada saat itu digelar operasi anti suap secara besar-besaran oleh pihak kepolisian Turki. Hasilnya  polisi menangkap 52 orang dekat Erdogan, diantaranya tiga anak menteri, Wali Kota Istanbul, pengusaha konstruksi dan pejabat Kementerian Keuangan. Mereka dituduh terlibat korupsi dan suap dalam proyek infrastruktur dan penggelapan emas ke Iran(<http://dunia.tempo.co/read/news/krisis-turki-menelan-biaya-us-100-miliar,>) .Episode ini diikuti episode pembocoran rekaman percakapan para pejabat tinggi Turki dan bahkan Erdogan sendiri. Target operasi ini para petinggi dan pengusaha di sekitar AKP. Yang mengakibatkan sejumlah menteri mengundurkan diri serta anak seorang menteri ditangkap, menteri-menteri itu seperti Menteri Lingkungan Hidup Erdogan Bayraktar, Menteri Ekonomi Zafer Caglayan, dan Menteri Dalam Negeri Muammer Guler ([http://finance.detik.com/ mata-uang-turki-terus-anjlok-gara-gara-banyaknya-kasus-korupsi)](http://finance.detik.com/%20mata-uang-turki-terus-anjlok-gara-gara-banyaknya-kasus-korupsi))

Pada tahap awal penyelidikan yang dipublikasikan pada 17 Desember, pengusaha Iran-Azerbaijan Reza Zarrab dituduh membayar suap untuk tokoh senior pemerintah dalam skema yang diduga melibatkan Barış Güler, putra mantan Menteri Dalam Negeri Muammer Güler, dan Salih kaan Caglayan, putra mantan Menteri Perekonomian Zafer Caglayan. Kemudian tersangka lain dalam penyelidikan adalah Süleyman Arslan, mantan manajer *state-run Halbank*, Arslan menghadapi tuduhan transfer ilegal emas ke Iran dengan imbalan uang melalui Halkbank. Kegiatan ilegal ini juga melibatkan Reza Zarrab. Dalam kasus lainnya yang melibatkan Aslan juga menyeret nama Erdogan karena pernyataan Arslan yang mengatakan penemuan uang sebesar $ 4.500.000 di kediamannya merupakan dana sumbangan dari pemerintah Erdogan untuk kegiatan amal. ( Turkey's massive corruption case dropped by prosecutor”,http://www.hurriyetdailynews.com)

Selanjutnya pemerintahan Erdogan kembali diserang skandal korupsi yang kali ini secara langsung menyerang dirinya, diamana terungkap rekaman percakapan dirinya beserta anaknya Hilal Erdogan yang membahas penyimpanan uang dengan jumlah besar.Skandal ini menimbulkan sejumbelah perdebatan dikalangan politisi Turki, baik politisi AKP sendiri maupun oposisi serta tidak ketinggalan para akademisi serta kalangan menengah keatas di Turki.

1. Pemilu Lokal serta Pemilu Presiden

Pada tahun 2014,kurun waktu dari bulan maret sampai dengan juli Turki melaksanakan pemilu lokal yang memilih kepala-kepala daerah serta pemilu presiden yang memilih presiden Turki. Sebagai catatan ini kali pertama Turki melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Kandidat-kandidatnya seperti **Recep Tayyip Erdogan dari partai pemerintah, Ekmeleddin Ihsanoglu yang didukung oleh belasan partai serta 2 partai besar yakni CHP dan MPH, serta Selahattin Demirtas yang didukung oleh partai HDP serta kalangan Kurdi dan kaum buruh. Hasilnya pada pemilu lokal AKP berhasil meraih kemenangan dengan prosentase sebesar 44% dan pada pemilu presiden Raccip Tayyib Erdogan berhasil keluar sebagai pemenangnya dan berhak duduk sebagai Presiden Turki**

**Dampak akibat peristiwa-peristiwa tersebut pada dinamika politik dalam serta luar negeri Turki ialah persoalan pada bidang**

1. Persoalan Sosial Politik

Dalam permasalahan ini Turki dihadapkan pada dilema antara menangani gejolak yang terjadi dalam negeri serta hubungan politiknya dengan negara-negara tetangga disekitar kawasan yang turut melibatkan sekutu dekatnya Amerika Serikat.Persoalan yang paling dramatis adalah terputusnya hubungan dengan Bashar Al-Assad dari Suriah, dengan komentarnya yang secara terang-terangan meminta Bashar Al-Assad segera turun dari kekuasaannya.Persoalan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Seperti, jutaan pengungsi berbahasa Arab yang tidak disambut baik membanjiri Turki, perang antarwakil pemerintahan dengan Iran, mengingat Suriah mempunyai hubungan yang baik dengan Iran, China, serta Rusia. terhambatnya route perdagangan Iran menuju banyak kawasan Timur Tengah dan terciptanya pasukan pejuang jihad yang menghasilkan Negara Islam dan pemerintahan kekalifahan yang diproklamasikannya sendiri. Dukungannya terhadap kelompok Sunni Irak menyebabkan jatuhnya hubungannya dengan Bagdad. Kebencian ala Nazi yang dilancarkannya kepada Israel mengakhiri ikatan regional Ankara yang paling kuat. Dukungan mati-matian Erdogan terhadap pemerintahan Persaudaraan Muslim di Mesir yang berakhir dalam satu tahun, 2012-2013, belakangan berganti dengan kebencian terbuka terhadap penggantinya. Berbagai ancaman yang dilancarkannya terhadap Siprus setelah negara kecil itu menemukan gas, justru lebih memperumit hubungan saling bermusuhan kedua negara. Apalagi, para kontraktor negara itu kehilangan lebih dari 19 miliar dolar Amerika dalam aksi anarki di Libya (http://www.danielpipes.org/15100/betapa-turki-berubah-jadi-jahat) Lalu hubungannya dengan Amerika dipertanyakan akibat dukungannya terhadap Hamas dan Negara Islam, berbagai upayanya merusak otoritas Bagdad, sikapnya yang membahayakan Israel termasuk ancamannya atas Siprus. Ditambah lagi kebijakannya yang represif terhadap pengunjuk rasa, sikap otoriter yang ditunjukan dalam berkuasa dengan menutup media sosial serta kekangannya terhadap kebebasan pers semakin membuat Amerika geram, yang mana hal-hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap demokrasi yang selama ini sudah tercipta dan dibagun di Turki. Bentuk kegeraman tersebut terlihat saat pengangkatan resmi Erdogan sebagai presiden tahun 2014 silam, Obama hanya mengirimkan kuasa usahanya mewakili kehadirannya kala itu , juga mengenai rencana pemindahan basis militer Amerika dari Turki menuju kawasan Kurdi Irak. Perubahan kebijakan luar negeri ini membuat Turki banyak disorot oleh banyak media asing.

Dampak dari kebijakan luar negeri yang berada diluar jalur ini menyebabkan tekanan politik dalam negeripun meningkat.Mulai dari pertikaiannya dengan Fethullah Gullen yang mengakibatkanmunculnya kebijakan penutupan lembaga bimbingan belajar yang bertujuan mempersiapkan siswa masuk ke perguruan tinggi (*Dersanes*). karena menurutErdogan lembaga ini hanya sebagai kesia-siaan karena sudah ada sekolah negeri yang formal. Lembaga bimbel ini milik gerakan hizmet yang didirikan oleh ulama besar Fethullah Gulen. Kebijakan ini mendorong pihak Gulen dan gerakan hizmet berang dan melakukan kritik keras terhadap Erdogan dan AKP.

Protes Gezi Park sejak 28 Mei 2013. Kebijakan pemerintah Turki untuk menata kota Istanbul memunculkan protes keras dari berbagai kelompok yang ada. Gerakan masa yang disertai dengan Protes dan demonstrasi yang bersifat masif ini berlangsung di berbagai kota besar di Turki yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari demonstran maupun dari pihak kepolisian.Tercatat 6 orang demonstran meninggal dalam peistiwa tersebut, ratusan luka-luka serta banyak yang ditahan. Dalam bukunya gerakan massa, Timur Mahardika menjelaskan tentang gerakan massa dengan proses mendesakan aspirasi perubahan. Tingkat keberhasilan desakan tersebut akan sangat begantung pada kulaitas dari kekuatan yang menghendaki perubahan. Maka dapat dikatakan bahwa suatu gerakan tidak lain dari proses penyusunan kekuatan dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan, dan secara bertahap menggelar tindakan-tindakan nyata (aksi), sedemikian rupa sehinnga perubahan mengalir. Kenyataan bahwa masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat atau manusia, pada umumnya tidak lepas dari kinerja penguasa yang *patos.*Para penguasa yang lalim, menjadi penyebab tam adari kehinaan begitu banyak orang, sementar penguasa tersebut dilengkapi dengan kelengkapan infrastruktur kekuasaan yang canggih dan lengkap, termask alat-alat intelijen, tilik sand dan bahkan alat-alat kekerasan (pemaksa, *koersif*). Dihadapan penguasa yang menyandang senjata, rakyat miskin tidak ubahnya seperti binatang yan tidak bemakna, yang bisa disingkirkan, bahkan ntuk alasan yang sangatmenusuk : demi keindahan dan kenyamanan kota; atau menggangu ketenangan golongan *the have*. ( Timur Mahardika,). Hal ini sejalan dengan situasi yang terjadi akibat kebijakan terhadap pembanggunan di tama Gezi, banyak kelompok penentang, mulai dari kelompok pecinta lingkungan Turki karena menganggap bahwa Taman ini adalah satu-satunya kawasan hijau dikawasan lapangan Taksim, dan kemudian menjadi momentum perlawanan aktivis dari berbagai kalangan termasuk gerakan perlawanan para Kemalist (pendukung sekuler) karena perencanaan pembangunan replika barak militer Utsmaniyah (simbol kubu konservatif-islamis), kemudian oleh kalangan anti-kapitalis/neolib dan kalangan terpinggirkan (buruh, bahkan termasuk kalangan islamis) karena pembangunan pusat perbelanjaan dan komplek perumahan elite (simbol kapitalisme/neoliberalisme), serta kalangan yang tidak puas dengan perilaku otoriter rezim Erdogan yang akhirnya membuat aksi demonstrasi menyebar ke seantero wilayah Turki.

Dengan semakin maraknya aksi masyarakat Turki menentang kebijakan pemerintah, lagi-lagi skandal korupsi yang melibatkan orang-orang terdekat partai AKP termasuk Erdogan sendiri menguak ke permukaan.Hal ini semakin menjatuhkan reputasi dari kepemimpinan Erdogan selama ini.Pengunduran menteri-menteri yang disangkakan korupsi dari kabinet, perombakan kabinet, serta pemecatan sekitar 550 polisi yang terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi ini menjadi gambaran nyata kemunduran pemerintahan AKP(http://www.pikiran-rakyat.com/) Belum habis dengan hal tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pemblokiran media sosial. Sepekan sebelum pemilu lokal serentak di Turki, pemerintah Turki memblokir dua media sosial yaitu Twitter dan Youtube. Penutupan ini terkait dengan tersiar dan tersebarnya rekaman suara skandal korupsi yang melibatkan Erdogan dan anaknya. Selain juga tersebarnya rekaman kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Pemblokiran ini berefek pada protes masyarakat Turki dan dunia yang menyebut pemerintahan Erdogan sebagai pemerintahan bercorak otoritarian.

Setelah memenangi pemilu presiden, jabatan perdana menteri dan ketua partai diserahkan kepada Ahmet Davutoğlu selanjutnya Erdogan menjadi presiden Turki.Yang menarik dari perubahan kepemimpinan ini ialah bergulirnya suatu kebijakan baru mengenai konsepsi perubahan konstitusi dari parlemanter menjadi presidensial.Selama ini jabatan presiden hanya sebagai simbol kepala negara, sedangkan penguasa pemerintahan sendiri ada ditangan perdana menteri.Erdogan menilai sistem parlementer yang selama ini dianut sebagai penyebab utama mandeknya laju perekonomian Turki, oleh sebab segala kebijakan harus melalui dan diproses dalam parlemen, sedangkan isu-isu yang krusial membutuhkan reaksi yang cepat. Sehinga perubahan konstitusi dianggap sebagai cara yang ampuh dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dengan memiliki kuasa eksekutif presiden dapat segera mengambil keputusan tanpa harus dan melalui persetujuan parlemen. Hal ini dianggap oleh kalangan AKP sendiri dan juga masyarakat luas sebagai bentuk mempetahankan serta memperkuat posisi Erdogan sebagai penguasa Turki, dan ini mencerminkan gaya otoriter yang hendak dibangun oleh Erdogan.

1. Persoalan Ekonomi

Dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan” Sahid Gatara menjelaskan pola hubungan antara politik dan ekonomi dari segi hubungan kausal kata yang bersifat deterministik, hubungan politik dan ekonomi dibagi atas dua yaitu *Pertama*, kebijakan umum (*public policy*)/politisisme yang melihat politik menentukan ekonomi.Kedua, ekonomisme yang liberal atau marxis yang melihat ekonomi menetukan politik.Teori lain menggambarkan hubungan politik dan ekonomi sebagai sifat interaktif atau timbal balik, sedangkan teori yang lain lagi menggambarkan hubungan politik dengan ekonomi sebagai perilaku yang berkesinambungan.( A.A. Sahid gatara, ) Dalam kasus Turki gejolak ekonomi mulai terasa saat terjadi aksi penentangan masyarakat atas kebijakan pemerintah seperti soal taman Gezi, penutupan sekolah *Dersanes,* pengaturan tempat tinggal antara siswa pria dan wanita, yang diperparah lagi dengan skandal korupsi pemerintah, semakin menambah kebencian sebagian masyarakat Turki kepada Erdogan sebagai representasi partai AKP. Instabilitas politik ini mengacu pada buruknya situasi serta keamanan Turki serta kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah Erdogan. Pasca terbongkarnya kasus korupsi tersebut perekonomian Turki anjlok, dengan turunnya nilai mata uang lira,(“Mata Uang Turki Terus Anjlok Gara-gara Banyaknya Kasus Korupsi,”*op.Cit)* Banyak perusahaan asing dilaporkan menunda untuk memperluas jaringan mereka di negara ini . Ini merupakan peringatan bahwa Turki masih bergantung pada investasi asing dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan resesi ekonomi menengah.( Investor Turki : Kasus Korupsi Ini Memalukan,”dalam,http://infoturki.com) a enaikan suku bunga oleh oleh bank sentral Turki diharapkan mampu untuk menaikan nilai tukar Lira Turki terhadap mata uang lain, akan tetapi resiko inflasi sudah pasti menanti, pendapatan nasioanal Turki menurun, (GDB), akibat daya beli atau transaksi ekonomi masyarakat Turki menurun. Turki adalah asalah satu negara yang sangat bergantung pada arus masuk modal asing,apalagi disaat resesi anggaran seperti ini(“Turkey Economic Crisis from Both Sides,”dalam,http://www.wealthdaily.com)

**Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Dominasi Partai AKP dalam Pemilu Legislatif Turki Tahun 2015**

1. Gambaran Umum Perbandingan Hasil Pemilu Legislatif Turki Tahun 2011 dan 2015

Pada pemilu sebelumnya yakni bulan juni 2011 partai AKP berhasil memenangi pemilu di 71 wilayah provinsi Turki dari 81 provinsi yang ada. Akan tetapi pada bulan juni 2015 saat pemilu yang sama dilaksakan partai ini cuma unggul di 56 provinsi, harus kehilangan 15 provinsi yang sebelumnya dikuasai oleh AKP. Hal ini semakin menarik tatkala melihat jumlah perolehan suara permasing-masing provinsi dimana hampir disetiap provinsi AKP mengalami jumlah penurunan suara yang sangat signifikan,walaupun di provinsi-provinsi tersebut antara tahun 2011 dan 2015 AKP yang menjadi juaranya, kecuali dibeberapa provinsi seperti Diyarbakir, antalya, Bitlis, Edirne dan Hakkari AKP mengalami peningkatan perolehan jumlah suara. Berikut data perbandingan peolehan suara partai AKP yang disadur dari sumber Election Resources On the Internet : Election to the Turkish Grand National Assembly

**Tabel 1. Perbandingan jumlah total pemilih partai AKP tahun 2011 dan 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2011** | **2015** | **Selisih suara** |
| **21.399.082** | **18.867.411** | **2.531.671** |

Dengan demikian total berkurannya dominasi partai AKP dalam perolehan suara pemilihan umum legislatif Turki antara tahun 2011 dengan 2015 sebesar 2.531.671 suara pemilih. Turunnya dominasi ini merupakan suatu pukulan telak bagi partai AKP pada umumnya serta Erdogan pada khususnya karena momentum pemilu ini ingin dijadikan sebagai langkah awal dalam mengubah konstitusi Turki dari palementer menjadi presidensial oleh penguasa Turki tersebut.

1. Faktor utama serta faktor pendukung turunnya dominasi Partai AKP dalam Pemilu Legislatif Turki 2015

Untuk mengetahui turunnya dominasi partai AKP dalam pemilu Parlementer tahun 2015 digunakan beberapa pendekatan ilmiah seperti konsep fungsi partai politik serta konsep behaviour politics.Maka dari itu diharapkan dengan meggunakan ke 2 pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan tentang turunnya dominasi partai AKP dalam pemilu tersebut.

Konsep partai politik menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,nilai-nilai dan cita-cita bersama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dengan demikian partai politik ini mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik serta sarana pengatur konflik.

Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik yang bertujuan menampung serta mengabung aspirasi politik yang ada untuk mencapai kepentingan bersama partai AKP harus bertarung dengan partai-partai lain yang mempunyai basis serta pendukung yang kuat.Apalagi dengan berlakunya sistem multi partai sudah tentu pemilu yang diselenggarakan di Turki dengan diikuti oleh 21 partai politik merupakan satu tantangan besar dalam menjalankan komunikasi politik dengan kepentingan yang hendak dicapai tersebut. Berdasarkan rilisan terbaru IMF world Economic Outlook yang dirilis bulan April tahun 2014 jumlah keseluruhan populasi warga Turki sebesar 77.324 juta (“Turkey GDP and Economic Data”,https://www.gfmag.com/Global-Data/country-data/Turkey-gdp-country-report)dengan angka partisipasi pemilu yang dkeluarkan oleh Election Recources to the Turkish grand National Assembly sebesar 42.941.763(Profil Lengkap Negara Turki,http://www.kembangpete.com/2014/08/18/profil-lengkap-negara-turki) berarti masing-masing partai harus menanamkan pengaruhnya untuk mendapatkan jumlah aspiran politik yang banyak. Pada saat pemilu bulan juni kemarin terdapat 4 patai besar yang mendominasi perolehan suara, yakni AKP, CHP, MPH serta HDP. AKP dalam pemilu kali ini harus kehilangan lebih dari dua juta suara, salah satu penyebabnya adalah keikutsertaan partai HDP yang berlatarbelakang komunis serta mempunyai pendukung dari kalangan Kurdi yang pada pemilu tahun 2011 mengikuti jalur independent, tetapi karena adanya aksesi yang lebih luas kepada partai ini serta pemimpinnya yakni Sellahatin Demitras dari pemerintah akhirnya partai HDPmemutuskan untuk menggunakan jalur partai dalam pemilu kali ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan, setidaknya partai HDP berhasil meraup kemenangan di 14 provinsi yang diantaranya adalah basis-basis yang semula merupakan sarangnya AKP. AKP sendiri harus kehilangan 15 basis suaranya yang diperebutkan oleh kontestan peserta pemilu yang lain.

Selanjutnya dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik yang mana bertujuan membentuk sikap serta orientasi pribadi, kelompok juga masyarakat berdasarkan pada nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi serta hak dan kewajiban tentu partai-partai peserta pemilu di Turki pasti memilikinya. Seperti partai AKP yang berideologi demokrat-konservatif,mempunyai basis dari segala lapisan sosial serta agenda-agenda yang ingin dicapai contohnya dalam masalah kebebasan. kemudian CHP yang berideologi sekuler, MPH yang berideologi Nasionalis dan HDP yang berhaluan Kiri (Komunis). Pemilu legislatif Turki 2015 merupakan ajang demokrasi yang mana penyelengaraan serta prosesnya melibatkan berbagai macam suku bangsa, ideologi, kelas sosial, serta berbagai kepentingan yang ada. Kemunduran suara partai AKP merupakan representase sosialisasi politik yang selama ini dibangun, khususnya pada masa pemerintahan periode ke tiga, yang banyak terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok sekuler, aktivis lingkungan serta kalangan homoseksual. Ketidakmampuan AKP dalam mengatur kebijakan serta kekuasaanya menyebabkan partai-partai lain mampu menarik hati para pemilih dalam masyarakat Turki tersebut.

Fungsi selanjunya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, partai AKP dalam hal ini telah melakukan suatu kesalahan dengan tidak melihat kembali bagaimana kaderisasi yang telah dilakukan sebelumnya pada pemilu-pemilu yang lalu. Perselisihan antara Erdogan dengan Fethullah Gullen yang berakhir pada penutupan sekolah persiapan menuju perguruan tinggi atau desarnesyang dikelola Himzetmerupakan suatu kekeliruan, disamping menunjukan wajah otoriternya dalam penutupan sekolah tersebut, hal ini juga mengakibatkan rekrutmen anggota AKP yang dipersiapkan menjadi kader AKP terganggu. Karena desarnes sendiri merupakan sekolah yang bercirikan islam dan bertugas membentuk pemuda-pemuda Turki yang taat pada ajaran agama. Hal ini sesuai dengan agenda tersembunyi yang dimiliki oleh Erdogan untuk meningkatkan keislaman warga Turki. Alasannya ialah Himzet adalah organisasi bentukan Fethullah Gullen

Pada bagian ini AKP keluar dari track yang seharusnya. Sebagai sarana pengatur konflik di negara yang “sekuler”, mulai etnis, masyarakat yang heterogen, sosial ekonomi yang beranekaragam serta agama AKP telah gagal pada periode ini. Kebijakan-kebijakannya yang lebih mengutamakan partai serta posisi kekuasaan menyebabkan partai melupakan fungsinya ini. Permasalahan serta kejadian-kejadian yang terjadi merupakan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, akibat adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja serta prestasi partai AKP dalam memerintah. Seperti dalam bidang ekonomi, Turki mengalami permasalahan serius akibat ketidakmampuan Erdogan beserta partai AKP dalam mempertahankan keunggulannya dalam bidang ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang, inflasi yang meningkat serta angka penganguran yang tinggi belum lagi hilangnya kepercayaan investor asing pada pemerintah.

Konsep Behaviour Politics, menurut saiful Mujani dan William Liddle menekankan pendekatan ini pada model sosiologis, model psikologis serta model rasionalis. Model yang pertama ialah model sosiologis, inti dari konsep ini menekankan pada aspek tingkatan ekonomi, pendidikan, kelas sosial, serta agama.Kemenangan AKP yang dimaknai sebagai berakhirnya era Erdogan menyisahkan banyak pertanyaan, AKP yang begitu dominan dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya harus puas untuk melihat hasil yang ada. Banyak suara yang beralih ke partai-partai lain, dalam pendekatan model sosiologis ini sebenarnya AKP masih memiliki keuntungan dalam hubungannya dengan tingkatan ekonomikarena basis-basis kemenangannya terletak di kota-kota besar kecuali Izmir,seperti provinsi Ankara serta Istanbul yang memiliki tingkat populasi terbesar, disamping itu provinsi-provinsi yang memiliki tingkat perekonomian yang baik seperti Bursa, Aydin, Denisly, Gazientep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, manisa, Kahrahmanmaras, Sakarya serta Sanliurva dimana pupulasinya diatas satu juta warga AKP terbukti tetap menjadi yang pertama. Dari sisi pendidikan AKP masih unggul karena para pemilihnya termasuk golongan berpendidikan, akan tetapi perlu diingat kebijakan-kebijakan Erdogan tentang pendidikan, khususnya kebijakan tempat tinggal antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang harus dipisahkan serta penutupan sekolah Desarnesyang memicu gelombang unjuk rasa mempertanyakan kebebasan individual dalam pendidikan setidaknya mengurangi perolehan jumlah suara yang seharusnya dimiliki oleh AKP berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagai contoh untuk wilayah Ankara,baik Ankara satu dan dua masing-masing mengalami penurunan suara walaupun statusnya sebagai pemenang didaerah tersebut, yakni berkurang 20 ribu untuk Ankara satu serta 95 ribu suara, sedangkan didaerah pemilihan Istanbul mengalami masalah serupa yakni Istanbul satu berkurang sebesar 130 ribu suara, Istanbul dua sebesar 200 ribu suara dan Istanbul tiga 116 ribu suara. Hal ini tanpa mengeyampingkan situasi yang sering terjadi di kedua provinsi ini, yakni konflik anta warga dan pemerintah mengenai isu-isu yang terjadi.

Selanjutnya dalam pendekatan sosiologis juga terdapat aspek kelas sosial, pada bagian ini AKP masih mempertahankan reputasinya,terbukti AKP mencatat hampir disemua lokasi pedesaan, namanya masih sangat harum di daerah-daerah ini. Kemungkinan keterbatasan akses informasi perkembangan negara serta tidak trmasuk daerah yang terjadi konflik vertikal. Aspek yang benar-benar sangat menguntungkan partai AKP ialah masalah keagamaan, menurut data dari CIA dan World Fact Book (Turkey GDP and Economic Data”,op.cit ) dari total keseluruhan populasi warga Turki, yang beragama Islam adalah sebesar 99,8 %, yang berarti Cuma 0,2 % saja warga negara Turki yang menganut agama lain. Hal ini menjelaskan bagaimana sejak awal partai AKP berhasil memenangi pemilu legislatif, karena disamping tokoh-tokohnya memiliki latar belakang keagamaan Islam yang baik, program konservatifnya mengenai simbol-simbol agamapun mencerminkan kalau partai ini tetap mengedepankan agama dalam perjuangannya.

Model perilaku politik selanjutnya ialah psikologis, pendekatan ini menekankan pada aspek party id, opini publik serta kepribadian tokoh . Sejak menjadi penguasa tunggal dalam parlemen, sosok Erdogan sebagai orang nomor satu dalam negara Turki tidaklah terbantahkan.Erdogan mampu mengukir prestasi yang sebelumnya sulit dibuat oleh pendahulu-pendahulunya.Prestasi dalam segala aspek kehidupan disertai dengan ketokohannya yang kharismatis membuat patai besutannya ini memiliki tempat dihati para pemilih.Akan tetapi memasuki periode ketiga masa pemerintahannya partai ini mulai kehilangan taji, banyak kesalahan yang telah diperbuat sehingga menimbulakan aksi protes masyarakat yang berujung pada kebencian yang mendalam terhadap AKP beserta Erdogan. Walaupun tidak serta merta merusak party id yang sudah tertanam lebih dari satu dekade, namun gejolak demonstrasi serta stigma anti anti erdogan yang dinilai represif serta otoriter setidaknya menimbulkan keragu-raguan dalam pemilihan. Hal ini jelas tergambar dari jumlah pemilih partai AKP tahun sebelumnya, yakni diatas 20 juta pemilih, harus berkurang hampir mencapai tiga juta pemilih.Dalam pembentukan opini publik sebenarnya terjadi perang yang sengit antara masing-masing partai, bahkan erdogan pun sampai harus turun tangan menyerang partai lain yang dengan jelas menyudutkan partai besutannya, dengan slogan-slogan “demokraside ekonomide”, “melayani rakyat melayani Allah” setidaknya tetap memikat hati para pemilih di Turki. Hanya saja dalam ketokohan, patai ini harus kehilangan suara akibat figur Erdogan yang dinilai oleh bebagai kalangan sebagai penguasa yang sangat otoriter.Terlihat dari kebijakannya yang ingin mengubah sistem konstitusi dari parlementer menjadi presidensial, yang memberikan akses sebesar-besarnya pada pengambilan keputusan tanpa harus mendiskusikannya terlebih dahulu di parlemen.

Rasional choice atau pilihan rasional memposisikan pada pendekatan ekonomi.Kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan naiknya harga bahan makanan sehingga menimbulkan kenaikan barang-barang yang lain (inflasi), penurunan nilai tukar Lira Turki, angka pengangguran yang semakin meningkat serta pendapatan nasional yang mulai menurun menyebabkan defisit anggaran yang besar dalam pemerintahan Turki.Harapan untuk meningkatkan investasi modal asing ternyata terhambat dengan kasus korupsi yang melingkari partai penguasa pemerintahan Turki tersebut

**Penutup**

Hasil yang diterima oleh partai AKP dalam pemilu legislatif Turki dimana AKP mengalami penurunan akan dominasinya terhadap suara pemilih yakni disebabkan ketidakmampuan Erdogan dalam mempertahankan prestasi dalam bidang ekonomi sehinnga menyebabkan Turki mengalami permasalahan serius terkait Ekonomi, dimana mata uang lira mengalami pelemahan terhadap mata uang Negara lain, naiknya harga makanan serta berbagai kebutuhan hidup lainnya, serta jumlah angkatan pengangguaran yang semakin meningkat di Turki.

Hal ini merupakan faktor utama penyebab turunnya dominasi partai AKP, selain adanya persepsi negative terhadap Erdogan yang dianggap handak menciptakan Negara yang otoriter dibawah kekuasaannya dengan contoh kejadian-kejadian yang telah merefleksikan perubahan sikap serta gaya kepemimpinan Erdogan tersebut seperti:

1. Menciptakan konflik dengan pemuka atau Tokoh Turki yang sangat berpengaruh, yakni Fethullah Gulen, sampai berakibat pada penutupan sekolah *Desarnes* yang merupakan sekolah persiapan menuju perkuliahaan, disamping sebagai sekolah pembentuk pemuda-pemuda yang memiliki integritas keislaman yang kuat. Sekolah ini dibawah otoritas gerakann *Himzet* pimpinan Fethullah Gullen.
2. Pembangunan taman Gezi park yang dinilai masyarakat sengaja ingin membangkitkan kembali kenangan atas kejayaan kekaisaan Ottoman, yang saat ini direpresentasekan kembali oleh Erdogan. Disamping kebijaknnya tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, mengingat taman Gezi merupakan satu-satunya kawasan hijau ditengah kota Istanbul. Akibatnya terjadi banyak demonstrasi hingga pemerintah menggunakan jalur kekerasan untuk membubarkan aksi tersebut. Akan tetapi usaha pemerintah tersebut harus dibayar mahal denga adanya korban tewas dalam aksi tersebut. hal ini membuat kemarahan wargah hamper diseluruh penjuru wilayah Turki.
3. Skandal korupsi yang menyeret menteri-menteri dalam kabinet Erdogan, sampai pada pengusaha yang berada di lingkup partai AKP, akibatnya menteri-menteri yang terlibat dalam skandal tersebut mengundurkan diri, serta anak-anak mereka yang terlibat langsung praktik korupsi ditangkap pihak kepolisian. Balasannya Erdogan menghalang-halangi upaya pengusutan yang hendak ditelusuri oleh pihak kepolisian dengan memecat ratusan anggota polisi yang terlibat dalam operasi korupsi tersebut. Sedangkan perwira yang terlibat penyelidikan diberhentikan dari jabatannya. Selang beberapa bulan Erdogan bersama anaknya kembali terjerat skandal korupsi melalui rekaman percakapan di media sosial, seperti youtube dan twitter. Akibatnya Erdogan mengumumkan opersai anti media dan segera setelah itu diumumkan pembekuan serta pemblokiran media youtube dan twitter. Gelombang unjuk rasa menyikapi kejadian ini, tindakan Erdogan ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa dalam masyarakat Turki. Akibatnya, situasi serta keamanan Turki terganggu, dan ekonomi Turki yang bergantung pada dana investasi asing harus terpuruk akibat banyak investor yang merasa tidak aman berada di Turki, serta ketidakpercayaan investor kepada pemerintah yang dinilai tidak transparan serta kredibel dalam memerintah

**Daftar Pustaka**

Coplin, William D, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, (edisi ke-2), Sinar Baru, Bandung , 1992.

Gatara, A.A. Sahid, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Harsono, Rebeka*,Cultural Studies,NasionalismedanEtnisitas,*PenerbitBukuKompas, Jakarta, 2002

Hidayat, Komarudin dalam Pengantar,Binnaz Toprak., *Islam danPerkembangan Politik di Turki* , Tiara Wacana, Yogyakarta , 1999.

Mahardika, Timur, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara Damai*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.

Mas’oed Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989

Reksa,Fiaji Tamara1”,AnalisiskemenanganAdaletveKalkinmaPartisi (AKP) dalampemiluTurki 2011”,*eJournalIlmuHubunganInternasional hi.fisip-unmul.org*,2013.

Taghia, Syarief, *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2011

Ramin,Ahmadov, “Counter Transformation in the Center and Periphery o Turkish Society and the Rise of Justice and Development Party*,” Alternatives Journal*, Vol. 7. No. 2 & 3.Summer & Fall 2008.

Rofii,Sya’roni, “Partai AKP danIdeologi Islam di TurkiModeren 2001-2007”,*Skripsi SI IlmuHukumIslam,*FakultasSyaria’ah UIN SunanKalijaga Yogyakarta,2002.

“AKP dalam panggungkekuasaan”,[http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/partai-akp-diaerdogan-di-turki-islamis.html](http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/partai-akp-erdogan-di-turki-islamis.html)/diaksestanggal 5 juli 2015.

“Betapa Turki Berubah Jadi Jahat”,dalam<http://www.danielpipes.org/15100/betapa-turki-berubah-jadi-jahat,diakses>tanggal 16 juli 2015

“Dinamika Politik dan Kemenangan AKP Turki: Melihat Dalam Perspektif Berbeda”  
dalam, <http://www.dakwatuna.com/2014/04/06/49101/dinamika-politik-dan-kemenangan-akp-turki-melihat-dalam-perspektif-berbeda/.diakses> tanggal 26 juni 2015.

“Fenomena Erdogan dan kelemahan posisi Turki”,dalam*www:// DW. De.com/*).diakses tanggal 27 juni 2015

“Gara-gara Kasus Korupsi di Pemerintahan, Kurs Lira Turki Merosot”dalam,<http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2013/12/27/263838/gara-gara-kasus-korupsi-di-pemerintahan-kurs-lira-turki-merosot,diakses>tanggal 18 juli 2015.

“Investor Turki : Kasus Korupsi Ini Memalukan,”dalam,http://infoturki.com/investor-turki-kasus-korupsi-ini-memalukan/,diakses tanggal 15 juli 2015

“KrisisTurkiMenelanBiaya U$$ 100 Miliar,”dalam,<http://dunia.tempo.co/read/news/2013/12/31/115541291/krisis-turki-menelan-biaya-us-100-miliar,diakses>tanggal 18 juli 2015.

“Mata Uang Turki Terus Anjlok Gara-gara Banyaknya Kasus Korupsi,”diakses

<http://finance.detik.com/read/2014/01/06/201545/2459798/4/2/mata-uang-turki-terus-anjlok-gara-gara-banyaknya-kasus-korupsi,diakses>tanggal 20 juli 2015.

“PM Turki Erdogan; dari Messiah menjadi Phariah”,http://www.muhammaddudi.com/politik-luar-negeri turki,diakses tanggal 27 juni 2015.

“Profil Lengkap Negara Turki”,http://www.kembangpete.com/2014/08/18/profil-lengkap-negara-turki, diakses tanggal 19 juli 2015

“Result of Parlementari Election “ http://www. Hurriyetdailynews.com election/default.html,diakses tanggal 26 juni 2015

“Sejarah peradaban islam di Turki”,http://ow.ly/KNICZ.com diakses tanggal 27 juni 2015

“Turkey Economic Crisis from Both Sides,”dalam http://www.wealthdaily.com,diakses tanggal 19 juli 2015

“Turkey GDP and Economic Data”,dalam,https://www.gfmag.com/Global-Data/country-data/Turkey-gdp-country-report,diakses tanggal 20 juli 2015.

**“Turkey's massive corruption case dropped by prosecutor”,dalam,**[**http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-massive-corruption-case-dropped-by-prosecutor.aspx,diakses**](http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-massive-corruption-case-dropped-by-prosecutor.aspx,diakses)**tanggal 4 juli 2015.**

## **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN DI ERA PRESIDEN HASSAN ROUHANI**

***Riezky Poetra Phoenna***

***Dan Harmiyati***

**Pendahuluan**

Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 termasuk peristiwa yang menggemparkan dunia. Betapa tidak seorang ulama tua berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk menjatuhkan sebuah rezim yang memiliki angkatan besenjata yang sangat kuat dan dibantu oleh negara *super power*, Amerika Serikat. Adalah Ayatullah Khomeini yang menjadi tokoh di balik peristiwa bersejarah yang merubah tatanan perpolitikan Iran tersebut. Khomeini merupakan tokoh sentral yang berhasil menjatuhkan Rezim Shah Reza Pahlevi dan mengakhiri tradisi kerajaan yang telah berjalan selama 2.500 tahun di Iran. Revolusi tersebut juga mengubah persahabatan Amerika Serikat–Iran selama tiga dasawarsa menjadi permusuhan. Shah Reza Pahlevi dikecam karena dianggap terlalu takluk pada negara Barat khususnya Amerika Serikat. Referendum pada Maret 1979 berhasil merubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik Islam, dengan sistem politik yang menempatkan kaum Mullah (ulama) pada posisi sentral (John L. Esposito & John O. Voll, 1999: 67).

Pasca terjadinya revolusi beberapa peristiwa menarikpun terjadi seperti, peristiwa penyanderaan sejumlah diplomat Amerika Serikat di kedutaan besar mereka yang terletak di Teheran, terjadinya peperangan dengan Irak yang berlangsung selama 8 tahun (1980-1988), serta pengeluaran fatwa oleh Imam Khomeini untuk menghukum mati Salman Rushdie yang merupakan seorang penulis sebuah novel berjudul “Ayat-Ayat Setan” yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, Iran ditempatkan sebagai musuh oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat khususnya (Riza Sihbudi, 2007: 245). Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan baik dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara akibat peristiwa penyanderaan sedangkan hubungan Iran dengan negara-negara Eropa sekutu Amerika Serikat masuk mulai merenggang akibat fatwa mati Salman Rushdie.

Rentetan peristiwa yang terjadi pasca revolusi berlangsung membuat segalanya menjadi berubah. Revolusi Islam Iran yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik Iran- Amerika Serikat menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa yang menyebabkan Iran semakin dimusuhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa tersebut pula yang melandasi Ayatullah Khomeini selaku pencetus revolusi untuk mengubah kebijkan luar negeri terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini menganggap bahwa keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah dan Iran khususnya hanya menerapkan hegemoni dan imperialisme yang menguntungkan kepentingannya sendiri tanpa membawa manfaat bagi rakyat Iran. Pemikiran tersebut yang kemudian menjadikannya bersikap radikal dan tidak bersahabat dengan Amerika Serikat.

Menanggapi hal tersebut Amerika Serikat tidak tinggal diam, sebagai sebuah negara super power Amerika Serikat berusaha untuk menggulingkan Revolusi Islam Iran dengan upaya sanksi-sanksi terutama sanksi berupa embargo terhadap penyokong ekonomi Iran, yaitu industri perminyakan. Tak hanya itu Amerika Serikat mencoba untuk mengajak negara-negara Eropa yang menjadi sekutunya untuk bersama-sama menerapkan embargo terhadap Iran. Selain embargo sanksi berupa pembekuan aset Iran yang memiliki nilai milyaran US$ pada saat itu juga dibekukan ( “Menlu Rusia Bergabung dalam Perundingan Nuklir Iran di Jenewa”, http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menlu-rusia-bergabung-dalam-perundingan-nuklir-iran-di-jenewa ). Upaya tersebut dianggap dapat melemahkan bahkan menjatuhkan revolusi yang baru terjadi. Pada kenyataannya Iran tetap bertahan dan eksis di bawah sanksi dan tekanan. Namun sanksi yang menyebabkan isolasi terhadap perekonomian Iran tetap menjadi penghambat bagi Iran.

Pasca Ayatullah Khomeini wafat jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Iran digantikan oleh Ali Khamenei. Pada masa Khamenei perpolitikan Iran tetap berjalan dengan baik meskipun isu-isu yang menyudutkan Iran tak dapat dihindari. Pada saat yang sama ada upaya perbaikan dan normalisasi hubungan Iran- Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan terpilihnya Khatami dan Rafsanjani sebagai presiden di periode yang berbeda. Khatami dan Rafsanjani mencoba untuk melakukan normalisasi agar Iran kembali dapat di terima oleh dunia Internasional. Selain itu upaya tersebut dilakukan untuk menjauhkan Iran dari anggapan bahwa Iran merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan. Namun upaya tersebut tak mendapat respon positif baik dari Amerika Serikat maupun sekutu Eropanya setelah serangkaian peristiwa di masa lalu. Meskipun begitu berbagai kebijakan luar negeri Iran sepenuhnya ditentukan oleh pemimpin tertinggi yaitu, Ali Khamenei.

Upaya yang telah dilakukan oleh Khatami dan Rafsanjani justru berbanding terbalik dari penerusnya yaitu, Mahmoud Ahmadinejad. Hubungan Iran dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel menjadi titik balik pasca peristiwa revolusi. Pada dua periode kepemimpinannya, Ahmadinejad mencoba untuk menerapkan nilai-nilai revolusi sebagaimana yang diterapkan oleh Ayatullah Khomeini dulu. Kebijkan luar negerinya terhadap Amerika Serikat dan Israel sangat konfrontatif dan radikal.

Ketika program nuklir Iran mulai menjadi perhatian khusus negara-negara Barat, Ahmadinejad menjadikan program nuklir tersebut sebagai prioritas dari kebijakan luar negerinya. Selama dua periode kepemimpinannya ia kerap menanggapi keras berbagai tuduhan terhadap program nuklir yang sedang dijalankan Iran. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk menghentikan program nuklir tersebut, namun Ahmadinejad justru semakin intensiv dalam peningkatan program nuklirnya. Hal ini yang kemudian membuat negara-negara Barat mencoba untuk bernegosiasi dengan Iran. Di sisi lain Ahmadinejad menganggap bahwa negosiasi tersebut justru membuat posisi Iran kian lemah dalam persoalan nuklir. Sikap Ahmadinejad tersebut di balas negara-negara Barat dengan memperberat dan memperpanjang sanksi terhadap Iran terkait persoalan nuklir tersebut.

Sanksi yang diterima Iran di era Ahmadinejad menjadi lebih berat dari masa pasca revolusi. Hal tersebut ditandai dengan sanksi bersama yang dijatuhkan oleh PBB yang berjumlah Enam Resolusi dan ditambah dengan sanksi regional dari Uni Eropa. Sanksi-sanksi tersebut kemudian menyebabkan perekonomian Iran menjadi tidak stabil. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran menimbulkan inflasi sebesar 40% dan membuat perekonomian Iran berjalan lambat. Bahkan nilai Riyal Iran harus anjlok akibat dari berbagai sanksi-sanksi tersebut (“Harapan dari Teluk Persia”, <http://nasional.sindonews.com/read/810523/18/harapan-dari-teluk-persia-1385518272>).

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai penerus Ahmadinejad menimbulkan harapan baru bagi masyarakat Iran. Isolasi ekonomi hingga embargo membuat Rouhani bertekad segera memperbaikinya. Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan moderat dan hal tersebut ia terapkan pada saat ia menjadi presiden Iran. Ketika pidatonya dalam forum Sidang Umum PBB ia menunjukkan karakternya yang moderat dengan cara menyampaikan nilai-nilai dan kepentingan Iran tanpa menunjukkan gerakan verbal yang menyudutkan pihak tertentu. Contohnya saja, ia tetap menyinggung Israel yang ikut turut campur dalam kebijakan luiar negeri Amerika Serikat yang berupaya untuk menjatuhkan Iran. Namun hal tersebut ia sampaikan tanpa pernyataan keras seperti yang ditunjukkan Ahmadinejad (,"Menanti Rouhani", <http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13581&type=4#.U1v2p6Kw7IV>).

Janjinya untuk segera memperbaiki perekonomian Iran ia mulai dengan menormalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat. Bahkan ia sendiri melakukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan Iran-Amerika Serikat, yaitu dengan melakukan komunikasi telepon dengan Barrack Obama. Kemudian Rouhani juga langsung secara aktif mengupayakan negosiasi dan diplomasi yang sebelumnya kerap berakhir tanpa keputusan jelas terkait penyelesaian program nuklir. Dengan menunjuk perwakilan Iran, Javad Zarif dalam negosiasi bersama kelompok P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Jerman), ia berupaya untuk segera mengakhiri polemik nuklir.

Perundingan di Jenewa, Swiss pada tanggal 22 November 2013 merupakan perundingan lanjutan yang dilakukan di era Hassan Rouhani. Iran berhasil meyakinkan negara-negara P5+1 untuk menyepakati hasil perundingan tersebut dimana Iran wajib menghentikan sebagian aktivitas atomnya selama enam bulan. Iran dilarang membangun instalasi sentrifugal baru bagi pengayaan uranium dan Iran juga setuju membuka program nuklirnya untuk diselidiki oleh inspektor internasional, mulai tanggal 20 Januari 2014 (“IAEA Desak Iran Agar Lebih Kooperatif”, <http://www.dw.de/iaea-desak-iran-agarlebih-kooperatif/a-16240539>). Kebijakan ini tentu sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil oleh presiden Iran sebelumnya, Mahmoud Ahmadinejad.

Kesepakatan interim di awal pemerintahan Rouhani membuat PBB dan negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi bilateral terhadap Iran untuk merancang pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi membuat Iran berpeluang untuk kembali ke perekonomian Internasional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan dunia yang menghendaki kerjasama dan investasi di Iran. Dengan berbagai perubahan dalam kebijakan luar negeri Iran baik itu strategi dan sikap yang ditunjukkan Rouhani, ia membuktikan bahwa keputusannya tersebut merupakan jalan terbaik agar Iran dapat segera memperbaiki keadaan perekonomiannya yang sempat terpuruk dan kembali untuk bersaing dalam perekonomian internasional.

**Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Iran**

Pasca Revolusi Islam Iran, politik luar negeri Iran mengalami banyak perubahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan pengaruh dari rezim Shah Pahlevi kembali merebak di Iran. Kebijakan luar negeri Iran yang telah berubah pasca revolusi, sepenuhnya diambil oleh para Mullah terdahulu. Dalam hal ini Ayatullah Khomeini sebagai pencetus revolusi dan pemimpin tertinggi Iran pada saat itu membuat kebijakan yang sepenuhnya menjadi bagian dari konstitusi Iran dan berlaku hingga saat ini.

Kebijakan politik luar negeri Iran justru mulai terstruktur setelah Ayatullah Khomeini mengkonsepkan dasar pemikiran Islam dalam konsep *Wilayatul Faqih* (baca; Velayat E-Faqih). Konsep Wilayah Al-Faqih, merupakan konsep yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin serta disetujui mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut Wali al-Faqih atau rahbas (Persia = pemimpin). Wali Al-Faqih pertama adalah almarhum Ayatullah Khomeini (1979 - 1989). Selanjutnya dijabat oleh Ayatullah Ali Khamenei. Akan tetapi, seorang Wali Al-Faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Untuk jajaran eksekutif, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (Umar Shihab, Abdul Aziz Dahlan (ed), 2005 : 15-122).

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Iran terdapat 5 prinsip politik luar negeri Iran yang masih di terapkan hingga saat ini ((M Riza Sihbudi, 1989:143-144). *Pertama*, Iran menentang campur tangan dan hegemoni asing di Timur Tengah, khususnya di wilayah Teluk. Alasannya jelas bahwa peristiwa revolusi juga merupakan bagian dari penentangan terhadap hegemoni Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini membuat kebijkan ini karena pertimbangan bahwa hegemoni dan campur tangan asing di tanah Iran hanya akan membawa kerugian lebih jauh. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada masa rezim Shah Reza Pahlevi potensi sumber daya alam milik Iran justru di manfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menunjang industri negaranya. Pada saat itu Amerika Serikat akan menjanjikan bahwa Iran akan menjadi polisi kawasan jika bersedia dieksplorasi sumber daya alamnya khususnya minyak bumi dan gas. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan Imam Khomeini dalam membuat kebijakan luar negeri.

*Kedua,* Iran tidak pernah mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara resmi. Prinsip umum yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara merupakan harga mati untuk dipertahankan menjadikan Iran tak pernah mengakui keberadaan Israel. Dalam hal ini Imam Khomeini melihat bahwa berdirinya Israel di tanah yang memiliki kedaulatan penuh yaitu Palestina. *Ketiga,* Iran tidak pernah mengakui kesepakatan damai Palestina-Israel. Alasannya jelas bahwa kesepakatan hanya akan membuat Palestina semakin tersudutkan. Sebagai contoh saja kesepakatan Oslo pada tahun 1993 yang melahirkan deklarasi prinsip atau yang dikenal dengan *Declaration of Principle* (DOP). DOP diharapkan mampu mengakhiri permusuhan dan menandai era baru dalam sejarah Timur Tengah. Namun kesepakatan tersebut hanya membuat Palestina semakin jauh dari cita-citanya menjadi negara merdeka. Sesuai dengan kesepakatan Israel hanya akan menyerahkan kewenangan pemerintahan sipil hanya untuk periode 5 tahun saja kepada Otoritas Palestina. Sementara dalam kesepakatan DOP, setelah periode 5 tahun berakhir, Israel dapat dengan leluasa untuk membatalkan kesepaktan secara sepihak, karena DOP bukanlah sebuah perjanjian yang mengikat. (Harmiyati, 2003:54-60). Hal ini menyebabkan Palestina tetap tersudutkan meskipun beberapa kali diadakannya kesepakatan.

*Keempat,* Iran tetap mempertahankan wilayah Shatt Al-Arab, Thumbs Besar, Thumbs Kecil dan Abu Musa di Selat Hormuz dari klaim negara lain. Tiga pulau yang terdapat di wilayah Selat Hormuz merupakan pulau yang menjadi sengketa Iran dengan Uni Emirat Arab (UEA) sejak tahun 1971. Bagi Iran wilayah yang diperebutkan dengan Uni Emirat Arab tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Iran yang ditandai dengan dimilikinya sebelum UEA berdiri sebagai sebuah negara. *Kelima,* pasca revolusi 1979, Iran menganut prinsip *“La Syarqiyyah, La Gharbiyyah”* (Tidak Timur dan Tidak Barat). Pasca revolusi tahun 1979, Iran memiliki prinsip politik luar negeri Non-Blok. Pada saat itu kekuatan dunia masih didominasi oleh dua kubu yaitu Uni Soviet dengan sebagai kiblat Komunisme dan Amerika Serikat sebagai Kapitalisme. Dalam prakteknya prinsip tidak ke Barat lebih ditekankan. Hal tersebut dikarenakan Ayatullah Khomeini melihat lebih banyaknya campur tangan yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlebih buruknya hubungan diplomatik kedua negara ini membuat Imam Khomeini sangat menekankan prinsip tidak ke Barat.

**Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Mahmoud Ahmadinejad**

Ahmadinejad memimpin Iran selama 2 periode yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2013. Pada periode awal kepemimpinannya Ahmadinejad mencoba untuk menerapkan apa yang ia sebut dengan “Revolusi Ketiga” (Musa Kazhim & Alfian Hamzah, 2007:160). Ia mencoba untuk menerapkan kebijakan yang pernah diterapkan oleh Ayatullah Khomeini. Menurut Ahmadinejad Iran telah jauh dari nilai-nilai revolusi. Bahkan ia mengkritik status quo yang dalam sistem internasional yang hanya menguntungkan negara besar saja sedangkan negara dunia ketiga justru dalam ketidakadilan.

Sebagai seorang tokoh konservatif, dalam penerapan kebijkan luar negerinya, Ahmadinejad cenderung radikal dan konfrontatif terhadap negara-negara yang dianggapnya ingin mendominasi dunia. Periode pertama kepemimpinannya, isu nuklir telah menjadi perhatian bagi dunia internasional. Muncul kekhawatiran berlebih dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Israel terhadap pengembangan program nuklir tersebut. Sehingga negara-negara Barat mencoba untuk menghentikan program nuklir ysang sedang dikembangkan tersebut. Hal inilah yang membuat Ahmadinejad menjadi lebih radikal dan konfrontatif terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel.

Di saat program nuklir semakin berkembang, negara-negara Barat terus berupaya untuk menghentikan agenda tersebut. Diplomasi dan negosiasi kerap dilakukan untuk membujuk Iran agar mau menghentikan program nuklirnya. Namun Ahmadinejad sendiri tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan program nuklir. Perundingan yang dilakukan baginya hanya menyudutkan posisi Iran lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah kooperatif jika negara Barat terus menyudutkan Iran. Akibatnya Iran terpaksa menerima sanksi baik secara bilateral, regional maupun internasional. Amerika Serikat sendiri justru memperbanyak sanksi di era Ahmadinejad, akibatnya hubungan Iran-Amerika Serikat semakin memanas. Bahkan pada periode awal kepemimpinan Ahmadinejad, Iran dijuluki sebagai *Axis of Evil* oleh Bush Jr.

Untuk memperoleh dukungan dari negara-negara yang dianggap Ahmadinejad dapat diajak kerjasama, ia mencoba untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan sejumlah negara baik di kawasan maupun di luar kawasan. Ahmadinejad kerap melakukan orasi saat melakukan kunjungan kepresidenan ke negara-negara teluk tentang program nuklir tujuan damai yang dikembangkan Iran. Selain itu kerjasama bilateral dengan negara besar lainnya seperti Cina dan Rusia semakin ditingkatkan. Berkat hubungannya tersebut Iran masih dapat eksis dan sedikit terbantu meski telah di jatuhkan berbagai sanksi.

Selain semakin buruknya hubungan Iran-Amerika Serikat di eranya, Ahmadinejad juga mengecam keberadaan Israel. Mengutip perkataan Ayatullah Khomeini yang mengharuskan agar Israel harus dilenyapkan dari muka bumi, dikatakannya pada berbagai sidang dan forum. Ia juga menolak untuk mengakui peristiwa *Holocaust* yang dianggapnya sebagai alasan Israel agar melegalkan aneksasinya terhadap Palestina. Selain itu Ahmadinejad juga masih menjaga Pulau Abu Musa yang menjadi kedaulatan Iran. Hal tersebut ia tunjukkan dengan melakukan kunjungannya ke pulau tersebut. Meski ditanggapi miring oleh UEA, namun ia menegaskan bahwa Pulau Abu Musa merupakan bagian kedaulatan Iran yang akan terus dipertahankan.

**Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani**

Nama Rouhani tidaklah terdengar asing dalam perpolitikan Iran. Hassan Rouhani telah menjadi bagian dari peristiwa Revolusi Islam Iran. Ia bergabung bersama Ayatullah Khomeini di Paris untuk menyemangati rakyat Iran melawan rezim Shah Reza Pahlevi. Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang kerap melakukan pendekatan moderat. Dalam prinsip luar negerinya ia menekankan pada 2 hal utama yaitu, politik luar negeri yang konstruktif dan non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara.

Terpilihnya Rouhani sebagai presiden banyak diharapkan oleh masyarakat Iran, terutama kaum muda Iran. Di era Ahmadinejad rakyat Iran tidak begitu terbuka dengan dunia internasional. Dengan terpilihnya Rouhani mereka mengharapkan rakyat Iran dapat berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu Rouhani juga diharapkan agar segera mengakhiri sanksi dan buruknya perekonomian akibat sanksi yang diterima.

Sesuai dengan kampanye dan janjinya sebelum terpilih, Rouhani berusaha mewujudkannya dengan jalan merubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih moderat dan konstruktif terutama dengan negara-negara Barat. Bahkan ia sendiri berupaya menormalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat yang telah lama beku. Namun hal tersebut tidak mudah di lakukan mengingat dominasi golongan konservatif di parlemen membuat langkah Rouhani banyak mendapat kritikan. Ia dianggap menjauhkan Iran dari nilai-nilai revolusi yang telah dicita-citakan oleh para Mullah terdahulu. Namun dengan tegas Rouhani menanggapi bahwa perubahan yang ia lakukan lebih kepada rasionalitas. Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Iran pasca revolusi yang berlaku hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan menjadi prioritasnya.

Hassan Rouhani semakin banyak mendapatkan kritikan dari kubu konservatif ketika ia memilih kabinetnya dari alumni universitas di negara-negara Barat. Rouhani menegaskan hal tersebut dilakukan agar Iran dapat lebih terbuka dan mudah dalam bernegosiasi persoalan nuklir. Meski demikian Rouhani tetap mendaptkan dukungan dari pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Tentu saja berdasarkan cita-cita Imam Khomeini dulu bahwa pemimpin harus bisa memenuhi kehendak rakyat. Dalam hal ini masyarakat Iran tentu ingin perubahan internal yang jauh lebih baik dari era Ahmadinejad (Musthafa Abd Rahman, “Figur Multitalenta Menjadi Presiden Iran”, http://internasional.kompas.com/read/2013/06/17/10294514/Figur.Multitalenta.Menjadi.Presiden.Iran).

Pada awal kepemimpinannya Hassan Rouhani lebih banyak memprioritaskan hubungan Iran dengan negara-negara Barat dalam persoalan nuklir. Ia menunjuk Javad Zarif sebagai ketua perundingan dengan negara-negara P5+1. Rouhani juga mencoba untuk kooperatif agar Iran dapat segera mungkin terbebas dari sanksi-sanksi. Langkahnya terbukti mampu menghasilkan kesepakatan interim di Jenewa. Secara garis besar pada kesepakatan tersebut Iran harus mengurangi pengayaan uranium dan mengurangi jumlah sentrifugal. Sebagai balasannya Iran akan dicairkan asetnya sebanyak 7 M US$ setiap bulannya. Selain itu sanksi terhadap ekspor minyak, petrokima dan industri otomotif akan di nonaktifkan (Jejak-jejak Negosiasi Nuklir; Dari Jenewa Hingga Lausanne (Kedua)", http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua).

Dari Jenewa, Lausanne hingga Wina tim perunding Iran berhasil mendapatkan kesepakatan final yang membebaskan Iran dari berbagai sanksi yang telah diterima. Iran bersedia mengurangi jumlah uranium dan sentrifugal yang terdapat pada fasilitas nuklir Iran. Dapat dikatakan bahwa hubungan Iran-Amerika Serikat lebih banyak didominasi oleh perundingan nuklir. Namun selebihnya dalam isu regional seperti konflik Suriah kedua negara masih berbeda pendapat. Secara umum hubungan kedua negara dalam tensi yang stabil dibandingkan pada era Ahmadinejad. Selain itu selama perundingan berlangsung Iran juga meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara besar yang termasuk dalam kelompok P5+1 yaitu, Cina dan Rusia.

Cina dan Rusia merupakan negara yang telah lama berhubungan baik dengan Iran. Bahkan pembangunan fasilitas nulir Iran pada tahun 1991 dibantu oleh Rusia. Sedangkan Cina merupakan pasar ekspor minyak Iran yang sudah lama berjalan. Hubungan Iran dengan kedua negara juga dipengaruhi oleh kerjasama ekonomi, politik dan militer. Kedua negara tersebut juga kerap memveto keputusan DK-PBB yang didominasi negara Barat.

Hubungan Iran dengan negara-negara kawasan teluk beragam di era Rouhani. Misalnya saja Oman yang semakin berhubungan baik dengan Iran karena menjembatani hubungan Iran-Amerika Serikat pada saat perundingan nuklir berlangsung. Sedangkan dengan negara-negara teluk lainnya seperti Arab Saudi justru memanas. Hal itu ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran akibat dari kritikan keras Ali Khamenei terhadap eksekusi mati tokoh Syiah di Arab Saudi, Syeikh Al-Nimr. Arab Saudi juga mengajak negara-negara lainnya seperti UEA, Sudan dan Bahrain. Iran sendiri menanggapi hal tersebut dengan dingin. Bagi Rouhani tindakan Arab Saudi hanya sebagai peralihan isu HAM yang cenderung tertutup di Arab Saudi (Rodger Shanahan, “Iran Foreign Policy Under Rouhani”, Paper on Foreign Policy analysis, The Lowy Institute for International Policy, http://www.lowyinstitute.org/files/iranian-foreign-policy-under-rouhani.pdf).

Hassan Rouhani juga menyiinggung eksistensi Israel di Palestina. Bagi Rouhani kependudukan Israel adalah sebuah bentuk aneksasi dan merupakan hal ilegal dalam sistem internasional. Sehingga ia menegaskan perlu adanya rekonsiliasi agar Palestina segera memperoleh kedaulatannya. Sementara itu, sengketa Pulau Abu Musa juga masih menjadi prioritas Rouhani untuk segera diselesaikan. Bahkan ia menugaskan Javad Zarif untuk bernegosiasi dengan Oman agar dapat menempatkan pasukan militernya dekat dengan pulau tersebut (*Ibid*). Meski begitu Rouhani terus berupaya berdiplomasi dengan UEA terkait hal ini. Bahkan ia melakukan kunjungan kepresidenan ke UEA untuk mencairkan suasana

Secara umum perubahan kebijakan luar negeri di era Rouhani tidak berubah secara frontal. Perubahan sikap, strategi dan pendekatan yang ditekankan dalam kebijakan luar negeri Iran di era Rouhani. Hal tersebut terbukti membawa Iran keluar dari berbagai permasalahan yang telah lama tak kunjung selesai. Prinsip-prinsip kebijkan luar negeri pasca revolusi tetap dipertahankan hingga saat ini.

**Maksimalisasi Potensi Geopolitik Iran di Era Hassan Rouhani**

Geopolitik dalam pengertian luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Geopolitik juga memiliki keterkaitan dengan *“National Power”* yang dianggap sebagai keseluruhan dari kekuatan geopolitik.

*National Power* merupakan kemampuan untuk mengendalikan tindakan dari pihak lain". Suatu negara yang memiliki *power* yang besar akan lebih leluasa dalam bergerak guna mencapai visi dan misinya (Hans. J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, terj. S. Maimoen, 2010 :135-173). Kutipan sederhana dari Morgenthau tersebut memberikan gambaran sekilas yang cukup jelas, bahwa pada dasarnya power diimplementasikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi keadaan atau tindakan negara lain, bahkan aktor-aktor non-negara dalam interaksi internasional, tujuannya tidak lain adalah menyelaraskan dengan kepentingan nasional yang ada.

Dalam *National Power* terdapat sembilan faktor yang mempengaruhinnya yaitu :

*faktor geografi, potensi sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah* (Ibid). Sembilan faktor penting tersebut akan menjelaskan maksimalisasi potensi geopolitik Iran di era Rouhani.

1. **Faktor Geografi**

Iran merupakan negara yang terletak di antara Benua Asia dan Eropa. Letaknya tersebut sanga menjanjikan dalam peta geografis. Iran juga dapat memanfaatkan letaknya untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang baik dengan negara Asia maupun Eropa. Selain itu Selat Hormuz yang memiliki arti penting bagi keamanan distribusi minyak dunia. Di era Ahmadinejad Selat Hormuz sering digunakan sebagai ancaman bagi negara-negara Barat yang mengandalkan energi minyak dari wilayah teluk. Tentu ancaman tersebut akan mempengaruhi harga minyak dunia hingga menyebabkan ketidakstabilan perekonomian internasional. Di masa Rouhani Selat Hormuz dijadikan sebagai selat perdamaian. Rouhani tentu menyadari pentingnya Selat Hormuz baik itu untuk mempermudah akses distribusi minyak dunia maupun untuk jalur perdagangan.

1. **Potensi Sumber Daya Alam**

Iran termasuk ke dalam negara yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi terbesar. Hal itu dibuktikan dengan industri minyak yang merupakan komoditi ekspor penopang ekonomi domestik. Selama puluhan tahun Iran telah mengekspor minyaknya ke negara-negara importir minyak seperti, Korea Selatan, Cina, India, Jepang, dan sejumlah negara-negara Eropa. Namun sanksi yang sangat memukul ekspor minyak Iran telah membuat ekspor minyak menurun. Pasca pencabutan sanksi Iran meningkatkan ekspor minyak sampai 4 Juta Barel perharinya.

1. **Kemampuan Industri**

Iran merupakan negara produktif yang dapat menghasilkan produk untuk diekspor ke luar negeri. Industri seperti makanan, industri baja, industri farmasi, industri otomotif, petrokimia, asuransi, hingga industri militer dimiliki Iran. Produk otomotif dan petrokimia merupakan unggulan Iran. Namun di era Ahmadinejad sanksi yang di jatuhkan terhadap Iran membuat dua bidang tersebut menjadi tidak produktif. Industri otomotif Iran dianggap jauh dari standar keamanan karena perusahaan-perusahaan otomotif Eropa yang biasanya bekerjasama dengan Iran terpaksa keluar dari Iran akibat sanksi. Sementara produk petrokimia diekspor hanya dalam batasan tertentu saja. Muncul harapan baru bagi industri Iran pasca pencabutan sanksi di era Rouhani. Perusahan-perusahaan otomotif Eropa mulai mengadakan negosiasi untuk kembali bekerjasama dengan Iran (Syubhan Akib, "Iran Mulai Dibidik Raksasa Otomotif", http://oto.detik.com/read/2013/11/29/112956/2427235/1207/iran-mulai-dibidik-raksasa-otomotif ).

1. **Kesiagaan Militer**

Militer Iran tidak dapat dianggap remeh oleh negara-negara lain. Baik itu peralatan militer dan pasukan militer yang dimiliki Iran cukup menunjang pertahanan Iran. Di era Ahmadinejad Iran berhasil mengembangkan berbagai rudal canggih hasil dari kerjasama Iran dengan negara-negara kuat lainnya seperti Rusia, Cina dan Korea Utara. Saat peningkatan militer terus di intensivkan Iran justru dikenakan sanksi pada era Ahmadinejad. Sanksi tersebut jelas untuk membatasi Iran melakukan transaksi dan transfer teknologi militer dari negara-negara kuat lainnya. Contohnya saja pengiriman S-300 yang telah ditandatangani bersama dengan Rusia harus dihentikan akibat sanksi.

Di era Rouhani Rusia mulai mencabut sanksi tersebut dan akan segera mengirimkan S-300 ke Iran, karena dianggap telah mencapai kesepakatan nuklir. Tentu saja kerjasama militer dengan negara-negara besar lainnya dapat diintensivkan Iran tanpa ada sanksi yang harus dikhawatirkan lagi ("Putin Cabut Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran", http://indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin\_cabut\_larangan\_penjualan\_sistem\_misil\_s-300\_untuk\_iran\_27451).

1. **Populasi Penduduk**

Populasi penduduk di Iran merupakan hal yang diharapkan oleh pemerintah Iran. Pemerintah Iran memfasilitasi penduduknya dengan berbagai fasilitas penunjang kualitas penduduknya. Maka tak heran jika Iran tetap dapat menghasilkan ilmuan yang terus menghasilkan karya-karya baru yang berguna bagi Iran. Di era Ahmadinejad perkembangan kualitas penduduk Iran khususnya ilmuan dan kaum muda sangat pesat. Hingga era Rouhani kualitas masyarakat Iran semakin tinggi. Hal tersebut ditandai dengan keinginan dari masyarakat Iran terutama kaum muda yang ingin berinteraksi dengan dunia internasional. Setelah pencabutan sanksi Rouhani juga ingin mengekspor karya IPTEK yang dihasilkan oleh Ilmuan Iran ke negara lain.

1. **Karakter Nasional**

Karakter nasional yang dimiliki Iran keseluruhannya merupakan warisan dari Ayatullah Khomeini pasca revolusi 1979. Revolusi tersebut berhasil menciptakan karakter tersendiri bagi Iran. Berkat karakter nasional yang dimiliki oleh segenap masyarakat Iran justru membuat Iran tetap eksis dalam kepungan berbagai sanksi. Hal tersebut yang tetap ada dalam diri masyarakat Iran yang dipertahankan hingga saat ini. Tak ada yang berubah dari karakter nasional Iran pada setiap pergantian kepemimpinan Iran.

1. **Moral Nasional**

Pasca revolusi tahun 1979 negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Israel terus mencoba mempropagandakan keburukan bagi moral nasional Iran. Berbagai propaganda yang dilancarkan terhadap Iran terus diupayakan terhadap Iran. Hal tersebut dilakukan untuk membuat Iran terpukul dan tersudutkan. Tentu saja moral nasional akan mempengaruhi citra sebuah negara. Dalam hal ini Iran sering dipropagandakan agar negara-negara lainnya mengurungkan niat untuk bekerjasama dengan Iran. Namun Hassan Rouhani merubah pandangan buruk tersebut menjadi positif dengan pendekatannya yang moderat dan konstruktif. Ia ingin membuktikan bahwa Iran jauh dari hal-hal yang dipropagandakan dan siap bekerjasama dengan dunia internasional.

1. **Kualitas Diplomasi**

Kualitas diplomasi Iran tak dapat dianggap remeh. Eksistensi nuklir Iran yang sampai dengan saat ini terus berjalan tak lepas dari negosiasi dan diploamsi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat Iran. Berkata para diplomat yang telah berjuang dengan segenap kemampuan mereka, Iran dapat keluar dari sanksi-sanksi. Selain itu Iran tetap dapat mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai.

1. **Kualitas Pemerintah**

Melalui konsep Wilayatul Faqihnya Iran terbukti dapat berjalan dan eksis hingga saat ini. Konsep yang meletakkan pemimpin tertinggi sebagai seorang pembimbing utama telah berhasil membuat pemerintahan Iran berjalan baik. Meskipun pengambil keputusan presiden, namun keputusan final tetap di tangan pemimpin tertinggi. Di era Ahmadinejad pemerintahan Iran mulai sedikit digoyahkan oleh sanksi yang menyebabkan buruknya perekonomian Iran. Hal ini yang kemudian ingin diperbaiki oleh Hassan Rouhani sebagai penerus Ahmadinejad. Dengan pendekatannya terbukti Iran dapat menstabilkan kembali perekonomian domestik dan mencabut berbagai sanksi.

**Sanksi-sanksi Iran Pasca Revolusi hingga Era Ahmadinejad**

Pasca revolusi yang terjadi pada tahun 1979, Iran telah mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat dari yang awalnya bersahabat kemudian berubah menjadi permusuhan. Peristiwa penyanderaan warga dan para diplomat Amerika Serikat di Teheran semakin menambah tensi kedua negara. Akibatnya Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sejak saat itu Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi bagi Iran. Sanksi formal Amerika Serikat dimulai dari presdien Jimmy Carter pada tahun 1980. Pada saat itu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak Iran dan pembekuan aset Bank Sentral Iran di Amerika Serikat. Setelah Ronald Reagan menjadi presiden, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi yaitu berupa larangan ekspor persenjataan dari Amerika Serikat. Kemudian tahun 1987 dilanjutkan dengan sanksi berupa embargo di bidang barang dan jasa (Hooman Estelami, http://www.rubincenter.org/meria/1999/09/estelami.pdf).

Memasuki tahun 1990 Amerika Serikat di era Bush Sr mencoba untuk mengurangi sanksi Iran, namun dengan ketentuan dan batasan tertentu. Hal tersebut ditandai dengan dicairkannya aset Iran sebesar 600 Juta US$. Ekspor minyakpun kembali dibuka, namun dengan jumlah yang terbatas (*Ibid*). Selanjutnya pada tahun 1993 hingga 1996 Amerika Serikat yang berada di bawah presiden Bill Clinton menjatuhkan sanksi yang dinamakan dengan Iran Libya Sanction Act (ILSA). ILSA dimaksukan untuk membatasi dan mengurangi investasi di Iran senilai 40 Juta US$ menjadi 20 Juta US$ pertahun. Kebijakan ILSA juga diberlakukan terhadap perusahaan asing yang bukan milik Amerika Serikat, dimana perusahaan-perusahaan Eropa yang tetap berinvestasi di atas 40 Juta US$ pertahun akan dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat (“Richard Sabatini, Pressuring Iran's Nuclear Program", <http://www.nti.org/analysis/articles/pressuring-irans-nuclear-program/>).

Di era Bush Jr Amerika Serikat justru menjadikan ILSA sebagai bagian dari UU dan memperpanjangnya. Perhatian Amerika Serikat semakin intensiv terhadap Iran saat program nuklir mulai menjadi perhatian dunia. Amerika Serikat berusaha merangkul negara-negara besar di dunia untuk bersama-sama menekan dan menghentikan nuklir Iran. Di saat yang sama Iran justru semakin meningkatkan program nuklirnya. Akibatnya tahun 2005 hingga 2010 Iran telah dikeluarkan 6 resolusi oleh PBB melalui ajakan persetujuan dari negara-negara anggota DK tetap PBB dan anggota tidak tetap. Enam resolusi tersebut yaitu, Resolusi 1696 dan 1737 (2006), Resolusi 1747 (2007), Resolusi 1803 dan 1835 (2008) dan Resolusi 1929 (2010) (“UN Sanctions Against Iran", <https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/iran.html>”). Keseluruhan sanksi berupa larangan ekspor-impor industri Iran, pembekuan aset Bank Sentral Iran, hingga sanksi individual dan entitas perusahaan yang dianggap terlibat dalam program nuklir Iran. Selain itu Iran juga tidak boleh bertransaksi peralatan militer yang masuk dalam resolusi tahun 2010.

Pada tahun yang sama Uni Eropa juga resmi menjatuhkan sanksi berupa sanksi ekspor-impor, sanksi *financial*, dan *smart sanction* yang menyasar individu untuk tidak berpergian melewati Eropa. Hingga tahun 2012 sanksi baik itu secara bilateral yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Inggris maupun organisasi regional Uni Eropa terus dijatuhkan terhadap Iran. Sanksi yang paling memukul perekonomian Iran adalah sanksi embargo minyak. Hal tesebut dikarenakan Iran menopang perekonomiannya sebagian besar dengan ekspor minyak (Ruairi Patterson, “EU Sanctions on Iran: The European Political Context”, <http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/eu-sanctions-iran-european-political-context?print>).

**Upaya Presiden Hassan Rouhani Untuk Menghapus Sanksi-Sanksi Iran**

1. **Perundingan Nuklir Dengan Negara P5+1**

Di awal pemerintahannya Hassan Rouhani mencoba untuk bersikap kooperatif terkait nuklir Iran. Ia menunjuk Javad Zarif sebagai ketua perundingan yang uga merupakan menteri luar negeri Iran. Javad Zarif memang bukan nama baru dalam dunia diplomasi Iran. Ia memiliki latar belakang sebagai seorang diplomat dan pernah menjadi perwakilan Iran di PBB dari tahun 2002 hingga 2007 (“Mohammad Javad Zarif”, <http://wiki.eanswers.com/en/Mohammad_Javad_Zarif?ext=t&cid=5083>). Perundingan nuklir dengan negara-negara P5+1 dimulai dengan tercapainya kesepakatan interim di Jenewa pada bulan November 2013. Kemudian dilanjutkan dalam kesepakatan Lausanne di tahun 2015 hingga tercapainya kesepakatan final di Wina pada bulan Juli 2015 yang tertuang dalam JCPOA (Joint Comprehensive Plan OF Action ). ("Iran nuclear talks: “Framework' deal agreed”, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32166814>)

Dalam kesepakatan tersebut Iran bersedia untuk mengurangi 96% uraniumnya selama 15 tahun, mengurangi mesin sentrifugal pangayaan uranium menjadi 6104 saja, memotong persediaan uranium dari 10 ton menjadi 300 kg selama 10 tahun dan mengizinkan IAEA untuk terus menginspeksi fasilitas nuklir Iran. Seluruh isi kesepakatan dalam JCPOA merupakan hasil final dari kesepakatan interim Lausanne. Sebagai balasannya sanksi terkait nuklir Iran akan segera dicabut dan Iran juga akan diakui negara dunia sebagai negara pemiliki nuklir tujuan damai. (“Iran nuclear deal : world powers reach historic agreement to lift sanctions”, <http://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-programme-world-powers-historic-deal-lift-sanctions>).

1. **Peningkatan Hubungan Bilateral Dan Multilateral Melalui Forum Regional Dan Internasional**

Selama perundingan nuklir dengan negara-negara P5+1, Hassan Rouhani sendiri mengupayakan langkah lainnya seperti peningkatan hubungan bilaterla dengan negara-negara lainnya dalam mempromosikan program nuklir Iran dengan tujuan damai. Pertemuan regional dan berbagai konferensi kerap digunakan Rouhani untuk menjelaskan kepada negara-negara lain bahwa Iran bukanlah sebuah ancaman seperti yang dipropagandakan oleh media-media Barat.

Dalam forum internasional seperti Sidang Umum PBB, hassan Rouhani kerap menjelaskan tentang program nuklir yang sedang dikembangkan Iran bukanlah untuk menciptakan senjata pemusnah masal, akan tetapi untuk tujuan damai sebagai energi terbarukan. Selain itu Iran yang kerap menghadiri forum Shanghai Cooperation Organizations (SCO) juga kerap melakukan hal yang sama. Selain itu Rouhani juga mencoba untuk menjadikan Iran sebagai anggota permanen dari organisasi tersebut ( “Kaleidoskop Iran Tahun 2014 (Bagian 2-habis)”, <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/89797-kaleidoskop-iran-tahun-2014-bagian-2-habis>).

Hassan Rouhani juga meningkatkan hubungan bilateral dengan negara besar yang tergabung dalam P5+1, yaitu Rusia dan Cina. Peran Rusia dan Cina kerap mempengaruhi keputusan yang dihasilkan dalam kesepakatan nuklir Iran. Rusia dan Cina kerap sering memberikan alternatif lain dalam penyelesaian masalah nuklir. Sebagai dua negara anggota tetap DK-PBB, Rusia dengan Cina juga sering memveto suara-suara anggota tetap DK-PBB lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris (*Ibid*). Meski upaya tersebut tidak signifikan sebagaimana negosiasi dengan negara P5+1, namun hal ini memnuculkan persepsi baru mengenai Iran yang lebih mengedapankan pendekatan moderat agar dapat diterima dalam dunia internasional.

**Dampak Penghapusan Sanksi Bagi Iran**

Pencabutan sanksi yang resmi diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2016 terhadap Iran memberi dampak positif. Setelah kesepakatan final di Wina pada tahun 2016 IAEA memverifikasi bahwa Iran telah mematuhi segala isi dari kesepakatan dengan negara P5+1. Adapun dampak positif yang akan diterima Iran adalah keleluasaan Iran untuk kembali bersaing dalam perekonomian internasional. Iran sendiri dapat menggenjot kembali ekspor minyak yang sebelumnya terus dibatasi saat sanksi sedang berlangsung. Dampak lainnya adalah penawaran kerjasama dan investasi di berbagai bidang industri yang dimiliki Iran dari negara-negara dunia. Hal tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian domestik Iran.

Tak semua negara menyambut baik pencabutan sanksi Iran. Negara sekutu Amerika Serikat, Israel justru masih menaruh curiga terhadap Iran. Israel masih menganggap Iran akan menjadi ancaman terbesar di kawasan Timur Tengah. Terlebih pasca pencabutan sanksi Iran dianggap akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan program nuklir untuk menciptakan senjata pemusnah masal (“Pencabutan sanksi internasional terhadap Iran disambut beragam”, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160116_dunia_iran_nuklir_reaksi>).

Selain Israel, sekutu Amerika Serikat lainnya yaitu, Arab Saudi juga menaruh reaksi sinis terhadap pencabutan sanksi Iran. Iran dianggap akan mencoba untuk mendominasi kawasan Timur Tengah dengan segala kekuatannya. Arab Saudi mengkhawatirkan pengaruh Iran di Timur Tengah akan lebih leluasa pasca pencabutan sanksi. Bahkan Arab Saudi menunjukkan sikap kecewa terhadap Amerika Serikat yang mencabut sanksi-sanksi Iran ("Gulf allies 'back Iran nuclear deal' after US security guarantees", http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939)

Terlepas dari berbagai reaksi dari berbagai negara, Hassan Rouhani berhasil membuat Iran keluar dari periode-periode sulit. Dukungan pemimpin tertinggi dan rakyat Iran berhasil membuat Iran lepas dari berbagai belenggu sanksi yang membuat kondisi perekonomian domestik terguncang. Berbagai reaksi sinis dari sekutu Amerika Serikat ditanggapi dingin oleh Iran yang menegaskan bahwa pencabutan sanksi guna memperbaiki kondisi internal Iran bukan untuk memperluas pengaruh, karena Iran bukanlah negara agresor layaknya Amerika Serikat.

**Penutup**

Kebijakan konfrontatif dan radikal yang diterapkan dalam hubungan Iran dengan negara-negara Barat di era Ahmadinejad justru membuat kepentingan Iran yang lebih besar terancam. Di saat Ahmadinejad tetap bersikukuh untuk mempertahankan program nuklir dan tidak menghendaki kerjasama dnegan negara-negara Barat, Iran justru mendapatkan sanksi yang mengubah perekonomian domestik. Akibatnya banyak masyarakat Iran yang harus menerima konsekuensi terrsebut. Inflasi tinggi, PHK, hingga meningkatnya pengangguran merupakan konsekuensi yang harus diterima masyarakat Iran. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik horizontal akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dilantiknya presiden Hassan Rouhani meminculkan harapan baru bagi masyarakat Iran. Hassan Rouhani yang memiliki pendekatan moderat justru menang telak dalam pemilihan presiden. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Iran ingin perubahan yang membawa dampak besar bagi kelangsungan Iran di dunia internasional. Selama sanksi berlangsung, masyarakat Iran harus merasakan dampak tersebut sebagai akibat dari sebuah kebijakan luar negeri yang diterapkan Ahmadinejad.

Hassan Rouhani mencoba untuk segera memperbaiki kondisi internal Iran. Permasalahan ekonomi, HAM, hingga sanksi merupakan prioritasnya untuk diselesaikan. Hal tersebut kemudian ia buktikan dengan melakukan perubahan strategi dan sikap dalam kebijakan luar negerinya, terutama mengubah sikap konfrontatif menjadi moderat terhadap negara-negara Barat. Ia juga ingin menormalisasikan hubungan Iran-Amerika Serikat yang telah lama menjadi buruk. Sikapnya yang moderat berhasil meyakinkan negara-negara Barat untuk mencabut sanksi dan mengakui Iran sebagai negara pemilik nuklir tujuan damai.

Meski begitu perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan bukanlah menyasar hingga prinsip-prinsip pokok yang telah ada dalam konstitusi Iran, namun lebih kepada pendekatan , strategi dan sikap yang dipraktekkan Rouhani. Kritik keras memang tak dapat dihindari terutama dari kalangan konservatif, namun hal tersebut membuktikan bahwa perubahan yang ia lakukan bertujuan baik demi eksistensi Iran di masa yang akan datang. Pasca pencabutan sanksi Iran semakin geliat untuk memperluas ekspansi ekonominya di kancah internasional. Bukan tak mungkin kedepannya Iran akan menjadi negara yang kuat baik itu di bidang politik, ekonomi dan militer.

**Daftar Pustaka**

Abd Rahman, Mustafa*, Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Kompas, Jakarta, 2003.

Alcaff, Muhammad, *Perang Nuklir ?Militer Iran, Zahra Publishing*, Jakarta, 2008.

Harmiyati, *Konflik Palestina-Israel*, Draft Buku Teks, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta, 2003.

Kazhim, Musa & Alfian Hamzah, *Iran Skenario Penghabisan*, Ufuk Press, Jakarta, 2007.

L. Esposito, John & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek*, Mizan, Bandung, 1999.

Muhsin, Labib, dkk, *Ahmadinejad, David di Tengah Angkara Goliath Dunia*, Hikmah, Jakarta, 2006.

Shihab, Umar, *Iran (Zomhuri - Ye Islami - ye Iran), Abdul Aziz Dahlan(ed),* Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2005.

Shoelhi M, *Diambang Keruntuhan Amerika*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007.

Sihbudi, Riza M, *Dinamika Revolusi Iran Sejak Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Khomeini*, Pustaka Hidayat, Jakarta, 1989.

, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Gramedia, Jakarta, 1996.

, *Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004.

, *Menyandera Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 2007.

Council Of The European Union, “Press Release 3029 th Council meeting", Foreign Affairs, 12560/10, Brussels, 26 Juli 2010, hal 10, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\_data/docs/pressdata/EN/foraff/115976.pdf. Diakses tanggal 16-1-2016.

Estelami, Hooman, “A Study of Iran’s Response to U.S. Economic Sanctions”, Middle East Review of International Affairs, Volume 3, No.3, September 1999, hal 2, http://www.rubincenter.org/meria/1999/09/estelami.pdf. Diakses tanggal 14-1-2016.

Katzman, Kenneth and Paul K. Kerr, "Iran Nuclear Agreement", Paper on Federation of American Scientists Congressional Research Service Reports, R43333 December 15, 2015. [https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf. Diakses tanggal 19-1-2016](https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf.%20Diakses%20tanggal%2019-1-2016).

Patterson, Ruairi , “EU Sanctions on Iran: The European Political Context”, Middle East Policy Council, Journal Essay, Vol. XX, No. 1, 2013.http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/eu-sanctions-iran-european-political-context?print Diakses tanggal 17-1-2016.

Putnam, Delaney, Keith and Paul Ingram, “Resolving the Nuclear Dispute With Iran by Negotiation”, British American Security Information Council, Occasional Papers on International Security Policy, 31 Agustus 2006.

Shanahan, Rodger, “Iran Foreign Policy Under Rouhani”, Paper on Foreign Policy analysis, The Lowy Institute for International Policy, 2015 hal 7, http://www.lowyinstitute.org/files/iranian-foreign-policy-under-rouhani.pdf, Diakses tanggal 8-1-2016.

Akib, Syubhan, "Iran Mulai Dibidik Raksasa Otomotif", http://oto.detik.com/read/2013/11/29/112956/2427235/1207/iran-mulai-dibidik-raksasa-otomotif Diakses tanggal 7 November 2015.

"Arab Saudi Putuskan Hubungan Diplomatik, Ini Tanggapan Iran", http://news.detik.com/internasional/3110147/arab-saudi-putuskan-hubungan-diplomatik-ini-tanggapan-iran Diakses tanggal 9 Januari 2016.

"Gulf allies 'back Iran nuclear deal' after US security guarantees", http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939 Diakses tanggal 20 Januari 2016.

"Iran's President: I don't deny Holocaust", http://www.nydailynews.com/news/iran-president-don-deny-holocaust-article-1.243062 Diakses tanggal 7 Januari 2016.

"Putin Cabut Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran", http://indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin\_cabut\_larangan\_penjualan\_sistem\_misil\_s-300\_untuk\_iran\_27451 Diakses tanggal 13 Januari 2016.

"Rouhani's Foreign Policy: How to Work With Iran's Pragmatic New President", http://www.foreignaffairs.com/articles/139531/mohsen-milani/rouhanis-foreign-policy Diakses tanggal 9 Desember 2015.

“Rohani: Iran akan Lebih Moderat”, http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/06/30/mp6gz9-rohani-iran-akan-lebih-moderat Diakses tanggal 9 Januari 2016.

"Rouhani Mendesak Negara Barat Bebaskan Sanksi Iran", http://www.satuharapan.com/read-detail/read/rouhani-mendesak-negara-barat-bebaskan-sanksi-iran Diakses tanggal 8 Januari 2016.

Sabatini, Richard, "Economic Sanctions: Pressuring Iran's Nuclear Program", http://www.nti.org/analysis/articles/pressuring-irans-nuclear-program/ Diakses tanggal 15 Januari 2016.

"Sanctions against Iran lifted after compliance with nuclear deal", http://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/sanctions-against-iran-to-be-lifted-after-compliance-with-nuclear-deal Diakses tanggal 19 Januari 2016.

"Sejumlah Negara Islam Putuskan Hubungan Dengan Iran', http://www.dw.com/id/sejumlah-negara-islam-putuskan-hubungan-dengan-iran/a-18957367 Diakses tanggal 8 Januari 2016.

Sulaeman, Dina Y., "Menanti Rouhani", http://www.theglobal-review.com/content\_detail.php?lang=id&id=13581&type=4#.U1v2p6Kw7IV Diakses tanggal 6 November 2015.

"UN Sanctions Against Iran", <https://www.globalpolicy.org/security->council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/iran.html Diakses tanggal Diakses tanggal 15 Januari 2016.

Zarbakhch, Yalda, "Kemana Janji Muluk Ahmadinejad?", http://www.dw.de/kemana-janji-mulukahmadinejad/a-16844586 Diakses tanggal 8 Desember 2015.

## **DIPLOMASI MESIR MERESPON PEMBANGUNAN *GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM* (GERD) OLEH ETHIOPIA DI SUNGAI NIL TAHUN 2011-2017**

***Superty Semardini dan Harmiyati***

**Pendahuluan**

Ethiopia memiliki kekayaan sistem sungai utama Nil. Sistem sungai di Ethiopia itu adalah Takkaze, Nil Biru, dan Baro (Saheed A. Adejumobi, 2007:2-5). Nil Biru merupakan salah satu anak sungai utama dari Sungai Nil yang terletak di Ethiopia. Nil Biru di hulu Sungai Nil mempunyai potensi hidrologi yang besar. Situs potensi diidentifikasi sekitar tahun 1956-1964. Survei dilakukan oleh *United States Bereau of Reclamation* di Nil Biru. Pemerintah Ethiopia melanjutkan survei lapangan untuk situs pada Oktober 2009 dan Agustus 2010. Keberlanjutan survei lapangan memiliki tujuan untuk rencana pembangunan bendungan di Nil Biru. (“Grand Ethiopian Renaissance Dam fact Sheet”,<http://aigaforum.com/articles/significance-of-the-gerd.pdf>). Pada April tahun 2011, *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) resmi diluncurkan oleh Perdana Menteri Ethiopia Meles Zinawi.

Pengadaan bendungan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. GERD berlokasi di Nil Biru tepatnya di Benishangul-Gumuz, 40 km (25 mil) dari perbatasan dengan Republik Sudan. Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 6.000 megawatt (MW). Ethiopia menjanjikan 83% tenaga listrik kepada penduduk yang tidak memiliki akses energi listrik (*Orsam Water Bulletin,* 2013: 33). Proyek yang akan diperkirakan selesai pada tahun 2017 diharapkan akan memperbaiki kekurangan energi di dalam negeri serta akan memberikan devisa negara melalui ekspor listrik ke negara tetangga.

Bendungan menghasilkan keuntungan yang besar baik dalam negeri maupun ke luar, akan tetapi pembangunannya sangat kontroversial. Ketegangan terjadi antara Mesir dan Ethiopia. Mesir diberitakan membangun kerjasama militer dengan Sudan untuk menghentikan bendungan. Perdana Menteri Meles Zinawi memberikan pernyataan untuk membalas Mesir, bahwa Ethiopia tidak bisa dihentikan dalam pembangunan. Mesir adalah negara yang sumber utama airnya berasal dari Sungai Nil. Curah hujan sangat rendah di Negara Mesir. Sumber air terbaharukan di Sungai Nil 97% berasal dari Ethiopia, dikarenakan curah hujan yang baik di Dataran Tinggi Ethiopia (*Orsam Water Bulletin*, *Ibid:* 24*)*.

Bendungan setinggi 560 kaki dikhawatirkan Mesir akan mengurangi sumber vital air yang tersedia. Ethiopia mempertahankan bahwa proyek itu tidak akan membahayakan negara-negara di hilir sungai. Mesir juga membahas perjanjian historis tahun 1959 tentang terjaminya kuota air dan perjanjian tahun 1902 tentang hak veto pengelolaan air di Nil Biru, hal ini mendorong Mesir melakukan tindakan untuk melindungi kepentingan nasional negara.

**Sejarah Mesir dan Sungai Nil**

Herodotus, sejarawan Yunani mengatakan Mesir “*Gift of the Nile”,* karena perkembangan peradaban Mesir bergantung kepada hasil alam dari Sungai Nil. Sungai Nil juga membuat orang Mesir menciptakan metode pertanian, membangun solidaritas, usaha bersama dan tekun, dan bertindak sebagai prinsip pembagian wilayah (Alexandre Moret, 1972:1-34). Peradaban Mesir telah berkembang sejak 5000 SM sampai 332 SM dan ditaklukan oleh Alexander Agung terbagi menjadi 9 fase (“Ancient of Egypt”,<http://www.history.com/topics/ancient-history/ancient-egypt>,). Pada tahun 1700 sampai akhir tahun 1800an sebelum merdeka, Inggris pernah berkolonialisme di Mesir. Kolonialisme Inggris mewariskan perjanjian-perjanjian atas pengelolaan air di Sungai Nil dibuat untuk melindungi kepentingan penjajah di masa kolonialisme.

Berkaitan dengan Perjanjian 15 Mei 1902 antara Inggris dengan Ethiopia, Mesir memaknai pembangunan sebagai pelanggaran atas perjanjian. Dalam pasal III memuat tentang sumber air yang mengalir dari Ethiopia. Pasal tesebut menjelaskan bahwa raja terdahulu hingga pemerintahan Raja Manelik II tidak membangun atau mengizinkan adanya pembangunan di wilayah seberang sungai Nil Biru ( Nil Biru merupakan salah satu anak utama Sungai Nil), Danau Tsana atau Sobat. Pembangunan yang dilarang berkaitan dengan hal yang akan menahan arus, kecuali dengan izin Kerajaan Inggris dan Pemerintah Sudan.

Pada tahun 1959 Sudan menjadi sebuah negara yang independen dan meminta perubahan kepada Mesir atas perjanjian Mesir-Inggris tahun 1929. Perjanjian yang dirundingkan kembali pada tahun 1929 ditandatangani pada 8 November 1959. Perjanjian bilateral antara Sudan dan Mesir memberikan keuntungan yang sangat besar dalam alokasi air bagi kedua negara. Alokasi air yang didapatkan Mesir meningkat menjadi 55 Miliar m3 pertahun. Begitu pula dengan alokasi air bagi Sudan menjadi 18 Miliar m3 pertahun dan menyisakan 10 Miliar m3 dari arus rata-rata yang tidak bisa dialokasikan lagi (“The Nile Waters Agreements: Imposition and Impacts of a Transboundary Legal System”,[http://www.jurisafrica.org/docs/international/Nile-River-Agreement-by-Valerie Knobelsdorf.pdf](http://www.jurisafrica.org/docs/international/Nile-River-Agreement-by-Valerie%20Knobelsdorf.pdf),). Alokasi air yang besar bagi kedua negara memperlihatkan kontrol penuh atas air di Sungai Nil di miliki oleh Sudan dan Mesir.

**Faktor Pendorong Diplomasi Mesir**

1. Kurangnya Dukungan Negara-Negara *Nile Basin*

Untuk meyakinkan negara-negara *Nile Basin* akan pembangunan GERD, Ethiopia mempromosikan *sub regional power interconnection* untuk merangsang pertumbuhan ekonomi regional (“The significant of Grand Ethiopian Renaissance Dam”,<http://aigaforum.com/articles/significance-of-the-gerd.pdf>). Energi berlebih yang didapatkan akan diekspor ke negara tetangga seperti Kenya, Sudan, Sudan Selatan, Djibouti (“Ethiopia’s Contested Dam Project on The NileRiver”, <https://worldview.stratfor.com/article/ethiopias-contested-dam-project-nile-river>). Ekspor energi listrik yang dijadikan diplomasi oleh Ethiopia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara *Nile Basin* membuat Mesir lemah dalam posisi bernegosiasi dengan negara-negara lain.

Djibouti telah mendapatkan ekspor daya memalui jalur 230 Kilo Volt (KV) yang selesai pada tahun 2011. Konstruksi jalur transmisi 1.045 km yang menyalurkan listrik dari GERD antara Ethiopia dan Kenya akan selesai tahun 2018 (“Development in East Africa”, [https://www.esi-africa.com/regional cooperation-catalyst-hydropower-development-east-africa-2/](https://www.esi-africa.com/regional%20cooperation-catalyst-hydropower-development-east-africa-2/)). Sudan Selatan salah satu negara *Nile Basin* pada 2013 resmi memberikan dukungan kepada Ethiopia untuk membangun bendungan. Selain Pemerintah Sudan Selatan, Pemerintah Uganda dan Republik Somalia juga berada di pihak Ethiopia. Rwanda, dan Tanzania yang menandatangani perjanjian dagang dengan Ethiopia, tidak bisa beralasan untuk mendukung Mesir karena hubungan kepentingan yang baik dengan Ethiopia.

1. Kerjasama *Nile Basin Initiative* (NBI)dan Perjajian Historis Mesir

NBI adalah organisasi kemitraan antar pemerintah 10 negara Sungai Nil. 10 negara yang menjadi anggota NBI yaitu, Burundi, Kongo, Mesir , Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, Sudan, Tanzania and Uganda (“Cooperation Framework Agreement”,http://www.nilebasin.org/index.php/nbi/cooperative-framework agreement). Pada 22 Februari 1999 organisasi NBI didirikan dengan 5 tujuan utama (*ibid*). Visi objektif dari NBI adalah mecapai pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan pengelolaan air dari Sungai Nil yang merata. Prinsip yang adil dan wajar dijadikan pedoman untuk pemanfaatan air dari Sungai Nil.

NBI pada tahun 2010 telah menghasilkan kesepakatan yaitu CFA. CFA akan berlaku jika sudah ada 6 negara yang meratifikasi dan diserahkan ke Uni Afrika. Mesir adalah negara yang tidak meratifikasi CFA, sehingga mesir tidak memiliki keterikatan hukum dengan CFA. Negara yang sudah meratifikasi CFA baru mencapai sudah mencapai 3 negara (*Ibid*). Apabila telah resmi diratifikasi 6 negara dan berlaku, maka CFA akan menjadi perjanjian pertama resmi semua negara *Nile Basin.*

CFA, kesepakatan yang dinegosiasikan oleh 10 negara lembah Nil untuk menggantikan perjanjian-perjanjian pada tahun 1959. Perjanjian 1959 memberikan Mesir hak veto atas pengelolaan air di Sungai Nil. Kesepakatan CFA akan menjadi dasar bagi negara hulu sungai untuk membangun proyek hidrologi di aliran Sungai Nil. NBI juga telah memiliki komisi permanen yang menggantikan Mesir sebagai pemegang hak veto di Sungai Nil. Ethiopia menyampaikan rencana pembangunan GERD melalui Komisi Permanen NBI. Oleh karena itu, Mesir mengambil langkah diplomasi untuk melindungi kepentingan mengenai perjanjian historis.

**Diplomasi Mesir Merespon Pembangunan GERD oleh Ethiopia di Sungai Nil Tahun 2011-2017**

Upaya diplomasi Mesir merespon pembangunan GERD yaitu berupa diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya terkait kuota air dan perjanjian masa lampau melalui metode diplomasi mutilateral dan bilateral.

1. Diplomasi Multilateral Melalui IPoE dan TNC
2. Diplomasi Multilateral Melalui IPoE

Mengatasi kekhawatiran Mesir akan kuota air yang akan berkurang dikarenakan pembangunan GERD oleh Ethiopia di Sungai Nil, Mesir mengambil langkah diplomatik melalui studi mengenai dam. Pada bulan April 2011 melalui Menteri Irigasi Husein Al-Atfy menyatakan bahwa Pemerintah Mesir telah mengajukan permintaan studi tentang lingkungan dan teknik mengenai GERD (“Egypt Requests Great Millenium Dam Studies From Ethiopia”, <http://www.ethiopian-news.com/egypt-requests-great-millennium-dam-studies-from-ethiopia/>).

Studi yang diajukan Mesir bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan pada kuota air Mesir. Konsentrasi Mesir akan tujuan dari studi dam tersebut adalah memastikan Mesir masih mendapatkan 85 persen dari kuota historis Mesir. Melalui studi kelayakan bendungan, Mesir bisa berdiplomasi untuk menaruh pengaruhnya di dalam forum. Studi yang akan menganalisa dampak bendungan bagi negara hilir sungai akan memastikan bahwa bendungan akan berdiri dengan memberikan dampak signifikan atau tidak. Sehingga Mesir bisa ikut terlibat dalam memastikan bahwa kuota air tidak terganggu dengan adanya bendungan di hulu sungai.

Setelah mengajukan permintaan pada bulan April tahun 2011, diadakan kunjungan resmi pada bulan berikutnya. Pada bulan Mei 2011, Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf mengadakan kunjungan resmi ke Ethiopia. Ethiopia merespon dengan baik kunjungan Perdana Menteri Mesir diikuti dengan inisiatif untuk membuat *International Panel of Expert* (IPoE) yang bertujuan untuk mengkaji dokumen GERD. Pengadaan *panel of expert* ini juga merupakan keberhasilan atas permintaan Mesir pada April lalu agar Ethiopia menginisiasi studi bendungan. Pada November 2011, secara resmi Ethiopia mengundang Mesir dan Sudan untuk terlibat dalam negosiasi yang akan membahas isu pembangunan GERD.

Pada 29 November 2011, diadakan pertemuan di Addis Ababa yang dihadiri oleh Perdana Menteri ketiga negara (Mesir, Sudan, Ethiopia). Pertemuan diantara ketiga negara menghasilkan persetujuan mengenai aturan serta objektif dari panel. Panel terdiri dari atas 10 anggota(“Final Report”, *International Panel of Expert on Grand Ethiopian Renaissance dam Project*, 2013:3). Berikut jadwal pertemuan antara ketiga pihak (Mesir, Ethiopia dan Sudan) dalam IPoE (*ibid*: 4-6).

**Tabel 1. Jadwal Pertemuan IPoE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acara** | **Waktu** |
| Peluncuran IPoE dan pertemuan pertama | Addis Ababa, Ethiopia, 15-18 Mei 2012 |
| Pertemuan Kedua | Kairo, Mesir, 19-21 Juni 2012 |
| Pertemuan Ketiga | Addis Ababa, Ethiopia, 9-11 Oktober 2012 |
| Pertemuan Keempat | Addis Ababa, Ethiopia, 26-28 November 2012 |
| Misi Grup ahli Geoteknik | Ethiopia, 3-9 Februari 2013 |
| Pertemuan Kelima | Rosseries, Sudan, 25-28 Maret 2013 |
| Pertemuan Keenam | Addis Ababa, Ethiopia, 26-31 Mei 2013 |

Pada pertemuan pertama, anggota IPoE mengunjungi lokasi GERD dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Pada pertemuan ke-2, ketiga negara mendiskusikan aktifitas pembangunan GERD dan perkembangan yang sedang terjadi. Para anggota juga memiliki kesempatan untuk saling bertukar pandangan mengenai struktur serta kesenjangan yang terjadi berdasarkan dokumen yang telah dikumpulkan.

Pada pertemuan ke-3, Perdana Menteri Ethiopia Males Zinawi meninggal dunia. Rencana pertemuan yang dilaksanakan pada pertengahan September diundur hingga bulan Oktober. Pada pertemuan ke-3, dilakukan kunjungan ke lokasi pembangunan GERD untuk kedua kalinya oleh IPoE. Terdapat kesepakatan yang tercapai pada pertemuan ke-3. Para anggota setuju untuk melaksanakan geoteknikal verifikasi.

Pada pertemuan ke 4, anggota IPoE mendiskusikan studi tambahan yang diajukan untuk GERD. Laporan akhir IPoE mulai dibahas pada pertemuan ke-4. Diskusi juga membahas tambahan waktu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan IPoE. Pada pertemuan ke 5, mendiskusikan desain jalan keluar tumpahan air GERD, laporan misi geoteknik, serta ulasan catatan dari ahli lingkungan, soasial ekonomi, dan sumber air (*ibid*). Pertemuan ke-6 dilaksanakan pada tahun 2013, membahas rancangan laporan akhir IPoE. Kunjungan ke lokasi pembangunan GERD juga dilaksanakan.

Pada 31 Mei 2013, di Addis Ababa, telah ditandatangani hasil laporan akhir dari IPoE (*ibid*). Hasil laporan akhir memuat rekomendasi dalam tiga bidang yaitu keamanan dan teknikal bendungan, sumber air dan hidrologi, lingkungan dan sosial ekonomi. Rekomendasi mengenai teknikal dan keamanan bendungan yaitu harus memperhitungkan studi maupun laporan yang terdahulu, survei lapangan yang terperinci, analisis dampak penggalian dan pengaliran perlu disertakan. Rekomendasi hidrologi yaitu studi lanjutan mengenai dampak pada sistem air di hilir sungai. Sedangkan rekomendasi lingkungan dan sosial yaitu penilaian kembali mengenai dampak yang ditimbulkan GERD (*ibid*:34). Studi dampak tersebut meliputi 2 wilayah studi, yaitu model PLTA dan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tidak hanya menghasilkan sebuah rekomendasi yang tertuang di dalam laporan akhir, namun juga Mesir juga mendapatkan keuntungan lebih. Mesir mendapatkan hal yang dibutuhkan di Sungai Nil. Ethiopia memenuhi kebutuhan Mesir melalui konsesi. Konsesi tersebut berupa peniadaan pertanian modern di lembah Nil Biru. Konsesi yang diberikan oleh Ethiopia ke Mesir dengan mudah oleh Ethiopia tanpa negosiasi. Ketidakpuasan Mesir mendorong Mesir untuk terus maju mendapatkan keuntungan yang lebih.

Langkah Mesir setelah keluarnya laporan akhir dilanjutkan dengan pemeriksaan rekomendasi ahli dan laporan akhir. Melalui pejabat Mesir ketika tidak menemukan kesalahan dari hasil laporan, Mesir mengalihkan isu memaksimalkan kuota air Mesir. Maksimalisasi kuota air Mesir dengan tambahan 20-25 Juta m3, (“Ethiopia, Egypt & the Nile Question: The Chaos Politics & Religion are Creating”,<http://www.zehabesha.com/ethiopia-egypt-the-nile-question-the-chaos-politics-religion-are-creating/>). Namun proposal Mesir akan maksimalisasi kuota air tersebut ditolak oleh Ethiopia. Ethiopia berusaha untuk tidak membawa isu yang tidak berkaitan dengan fokus kajian IPoE, laporan akhir, dan rekomendasi para ahli.

1. Diplomasi Multilateral Melalui TNC

Inisiatif pembentukan *Tripartite National Committee* (TNC) datang dari pihak Mesir. Setelah IPoE merilis laporan akhir yang merupakan rekomendasi dari panel, Mesir mengajukan kritikan mengenai hasil dari laporan tersebut. Reaksi tersebut diikuti kunjungan Mesir ke Addis Ababa pada Juni tahun 2013. Menteri Luar Negeri Mesir menjadi perwakilan yang datang untuk mendiskusikan metode untuk implementasi rekomendasi dari panel. Melalui diskusi antara Mesir dan Ethiopia akhirnya memutuskan untuk membentuk kerangka mewadahi implementasi rekomendasi panel.

TNC merupakan komite yang didirikan pada Pertemuan Tingkat Menteri antara Mesir, Sudan dan Ethiopia. Pertemuan dihadiri oleh Professor Dr. Hossam Moghazi (Menteri Sumber daya Air dan Irigasi Mesir) Alemayehu Tegenu (Menteri Air, Irigasi dan Energi Ethiopia), Mutaz Musa Abdella Salim (Menteri Sumber Air dan Listrik) di Khortum pada 25-26 Agustus 2014 (“Briefing : 1st Meeting of Tripartite National Committee on Renaissance Dam”, [https://hornaffairs.com/2014/09/29/briefing-1st-meeting-of-tripartite-national-committee-on renaissance-dam/](https://hornaffairs.com/2014/09/29/briefing-1st-meeting-of-tripartite-national-committee-on%20renaissance-dam/)). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk pembentukan komite implementasi rekomendasi IPoE dan ahli- ahli yang bisa memberikan saran tentang teknik selama TNC berlangsung.

Kesempatan selama proses pembentukan komite TNC juga dilakukan Mesir dengan mengajukan ide komposisi komite. Ide komposisi tersebut berupa terlibatnya ahli internasional yang netral dalam proses negosiasi (“Interview: Ethiopian Official, Egypt Would Do Anything to Stop Us”, <https://hornaffairs.com/2014/02/06/ethiopian-official-egypt-would-do-anything-to-stop-us/>). Ide yang diajukan oleh Sudan dan Ethiopia adalah untuk menjadikan para ahli dari tiga negara. Namun ide itu ditolak oleh Mesir. Ethiopia memberikan justifikasi ide Mesir yang tidak bisa diterima dikarenakan ahli internasional sudah menyelesaikan perannya di dalam IPoE.

Setelah melalui proses yang panjang dalam diplomasi multilateral antara Mesir Ethiopia dan Sudan. Menyadari nilai pentingnya sumber air bagi tiga negara tersebut untuk mengakhiri sengketa yang telah berlansgung selama 4 tahun lamanya. Mesir, Ethiopia dan Sudan menandatangani *Declaration of Principles* (DoP) pada 25 Maret 2015. Prinsip yang tercantum dalam DoP meliputi 10 prinsip.

Setelah tercapainya prinsip-prinsip dalam pembangunan proyek GERD, Mesir menyampaikan usulan baru mengenai desain bendungan. Usulan yang disampaikan oleh Mesir berupa mendesain ulang bendungan. Pada Januari 2016, Ethiopia merespon usulan Mesir untuk mendesain ulang bendungan. Ethiopia menolak usulan tersebut yang menjurus kepada desain ulang bagian saluran air GERD (“Ethiopia Reject Egypt’s Proposal to Redesign Dam”, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article57682>,). Usulan penambahan saluran keluarnya air untuk mencegah penurunan air dalam jumlah yang signifikan, serta memungkinkan air masuk dalam jumlah yang lebih banyak.

Prinsip yang tertulis pada DoP digunakan sebagai pedoman selama kosntruksi dan proses negosiasi. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak efektif dalam mengikat ketiga negara. Pada pertemuan pembahasan DoP, deklarasi tersebut telah menetapkan bahwa untuk pembentukan komite teknis untuk mengkaji saluran tambahan dalam bendungan. Konsesi ini adalah salah satu ide Mesir yang menjadi ketetapan deklarasi. Akan tetapi, hal ini ditolak oleh Ethiopia pada tahun 2016.

Saran studi dampak dilanjutkan dengan pemilihan perusahaan konsultan. Pada tahun 2016, dalam pemilihan perusahaan konsultan sebelum terpilihnya BRL Ingénierie Group, Mesir menolak perusahaan Perancis tersebut akan menjalankan studi dengan sendiri (“Egypt Latest Consession to Ethiopia Amid Construction of Controversial Dam”, <https://www.madamasr.com/en/2016/07/14/feature/politics/egypts-latest-concession-to-ethiopia-amid-construction-of-controversial-dam/>). Keinginan Mesir mengajukan perusahaan yang lain untuk mengkaji dampak. Hal ini didasari ketakutan bahwa perusahaan Perancis tersebut akan menemukan penemuan yang mendukung pihak Ethiopia. Hasil forum atas ide Mesir tersebut tidak adanya persetujuan atas keterlibatan pihak kedua. Kajian atas dampak ekonomi dan lingkungan dari GERD akan dilaksanakan oleh perusahaan Perancis.

Tercapainya DoP yang ditandatangani oleh ketiga negara bukan merupakan akhir dari TNC. Negosiasi antara ketiga negara tetap berlanjut dan Mesir melanjutkan langkah diplomasinya. Ethiopia dan Sudan berada dipihak yang sama, sedangkan Mesir dipihak oposisi. Ethiopia dan Sudan menolak untuk menyetujui laporan yang berupa pedoman untuk menganalisa dampak bendungan oleh BRL Ingénierie Group. Namun, Mesir berada diposisi sebagai pihak yang menyetujui laporan pedoman tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh Ethiopia dan Sudan mengakibatkan kebuntuan dalam keberlangsungan studi bendungan. Jalan alternatif yang ditempuh oleh Menteri Sumber Air dan Irigasi Mesir Abdel Afty adalah melakukan permintaan Pertemuan Tingkat Menteri untuk mengatasi hambatan dalam hal teknis pada bulan Mei 2017 (“Tripartite Summit On Ethiopian Dam to be Held in January”, <https://www.egypttoday.com/Article/2/40793/Tripartite-summit-on-Ethiopian-Dam-to-be-held-in-January>). Penolakan kembali diterima oleh Mesir dan mengakibatkan terhambatnya studi teknis mengenai bendungan dalam waktu yang lama.

Kesetidakpahaman juga terjadi mengenai dokumen-dokumen yang telah disahkan. Dalam menentukan kemungkinan kerusakan perhitungan mengecualikan adanya bendungan. Ethiopia menginginkan bendungan itu dimasukkan, hal ini melawan apa yang dilakukan dalam studi tentang bendungan tentang studi efek lintas batas dan menetang kontrak. Sedangkan Sudan, ingin memasukkan "Penggunaan masa depan" bendungan ketika mengukur status saat ini dari cekungan. Ethiopia juga menolak proporsi Mesir tergantung pada saham air yang diidentifikasi dalam Perjanjian 1959 (*ibid*).

Pihak Sudan dan Ethiopia memperlihatkan inkonsistensi dalam mematuhi dokumen dokumen yang telah disahkan. Dokumen- dokumen yang telah disahkan menjadi rekomendasi studi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan konsultan yang telah diberikan tanggung jawab. DoP sebagai hasil selama berlangsungnya TNC tidak mempunyai ikatan yang kuat. Hal ini bisa disimpulkan dari keberanian Ethiopia dan Sudan unntuk mengajukan ide-ide yang bertentangan dengan kontrak. Situasi ini mempersempit ruang diplomasi bagi Mesir di TNC.

Pada tahun 2017, pertemuan terakhir dari TNC di Kairo di bulan November diakhiri tanpa mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah saran yang direkomendasikan oleh studi tentang dampak GERD terhadap negara *Nile Basin*. Menteri Luar Negri Ethiopia, Workneh Gebeyehu menyatakan bahwa Mesir telah mengirimkan proposal mengenai bendungan yang tidak akan memberikan dampak signifikan (“Egypt Calls on World Bank to Settle Ethiopia DamImpasse”,<http://www.globalafricanews.online/2017/12/26/egypt-call-on-world-bank-to-settle-ethiopia-dam-impasse/>). Ethiopia merespon proposal tersebut dengan mempertimbangkan terlebih dahulu.

Pada Desember 2017, Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi mengirimkan proposal kepada Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn yang diajukan oleh Sameh Shoukry Proposal yang diajukan yaitu pengajuan pihak netral sebagai media arbitrasi yaitu *World Bank*. Ide Mesir untuk mengajukan *World Bank* dalam Mediasi ditolak oleh Ethiopia.

Seiring pengajuan proposal mengenai keterlibatan pihak netral dalam negosiasi tersiar kabar proposal permintaan dikeluarkannya Sudan dari forum. Permintaan tersebut diberitakan oleh salah satu media massa Ethiopia. Menanggapi kabar tersebut Ahmed Abu Zeid, juru bicara Menteri Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan (“Egypt Denies Requesting Exclusion of Sudan From Ethiopian Dam Negotiation”,<http://www.egyptindependent.com/egypt-denies-requesting-exclusion-of-sudan-from-ethiopian-dam-negotiations/>,). Ahmed Abu Zeid membantah bahwa Mesir telah meminta kepada Ethiopia untuk mengeluarkan Sudan dalam perundingan GERD yang tengah berjalan.

1. Diplomasi Bilateral Mesir ke Italia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan World Bank
2. Diplomasi Bilateral Mesir ke Italia

Sekretaris Kemitraan Jendral Mesir-Eropa, Gamal Bayouni menyampaikan rencana internasionalisasi isu keamanan air oleh Mesir (“Egypt Plans Dam-Busting Diplomatic Offensive Against Ethiopia”, <https://www.upi.com/Egypt-plans-dam-busting-diplomatic-offensive-against-Ethiopia/13631393533111/>). Target negosiasi Mesir ditujukan ke kontraktor personal dan negara-negara yang mendanai GERD. Ketika lobi Mesir ini berhasil, pembangunan GERD akan mengalami hambatan. Keberhasilan lobi akan dimanfaatkan Mesir untuk membuka jalan negosiasi memajukan kepentingan Mesir. Salah satu tujuan diplomasi bilateral Mesir yaitu negara Italia.

Italia memiliki hubungan sejarah dengan Ethiopia sebelum mendapatkan kemerdekaanya pada tahun 1944. Bangsa Italia pernah berkolonialisasi di Ethiopia sekitar tahun 1936. Italia, Mesir, Inggris, dan Ethiopia memiliki keterkaitan historis pada masa kolonialisme. Salini Impregilo juga merupakan perusahaan asal Italia yang bertanggung jawab dalam konstruksi bendungan. Hal-hal inilah yang mendorong Mesir mengambil langkah diplomasi ke Italia.

Diplomasi pernah dilakukan pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Ethiopia dikunjungi oleh Menteri Irigasi Italia. Kunjungan tersebut yang membuat diskusi terbuka antara Mesir dan Ethiopia di Addis Ababa pada tahun 2011 (“Egypt seeks to halt Ethiopian dam” <https://www.almonitor.com/pulse/originals/2014/02/egypt-lobby-renaissance-dam-ethiopia.html>). Namun pada saat itu Ethiopia menolak usulan dari Mesir. Keberhasilan diplomasi ke Italia pada tahun 2011 tersebut menjadi acuan bagi Mesir untuk meminta bantuan kembali terkait kekhawatiran terhadap kosntruksi bangunan yang berdampak bagi arus air di Mesir.

Diplomasi dilanjutkan pada tahun 2014. Pada 6 Februari 2014 Menteri Sumber Daya Air Mesir Mohammed Abdul Muttalib mengunjungi Italia. Nabil Fahmy Menteri Luar Negeri Mesir menemani kunjungan tersebut. Hasil dari kunjungan tersebut berupa kesepahaman Italia akan kekhawatiran Mesir akan keamanan air di Sungai Nil. Langkah nyata hasil dari diplomasi Mesir ke Italia belum berlanjut hingga saat ini.

1. Diplomasi Bilateral Mesir ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

Pada tahun 2013, di *African Summit* Mesir telah menginternasionalisaisi isu keamanan airnya dengan Ethiopia di forum. Pada tahun 2014, Mesir mempersiapkan permintaan mediasi ke pada *Gulf Country* dibawah kepemimpinan Arab Saudi. Sejak 20 Juni 2014 Mesir dan Arab Saudi telah membahas beberapa kali mengenai dukungan Saudi dan Emirat akan keamanan nasional negaranya (“Egypt Asks UAE to Help Solve Ethiopia’s Renaissance Dam Crisis”,<https://www.middleeastmonitor.com/20151210-egypt-asks-uae-to-help-solve-ethiopias-renaissance-dam-crisis/>).

Pada tahun 2015, Pangeran Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan dilaporkan telah bertemu dengan Presiden Sudan Omar Al-Bashir dan Perdana Menteri Ethiopia Haile Mariam Dessalegn untuk membahas solusi untuk krisis (*ibid*). Kunjungan datang setelah beberapa hari Al-Bashir mengatakan Sudan tidak mendukung persoalan Ethiopia dengan Mesir. Bisa disimpulkan UEA memiliki hubungan baik dengan Mesir untuk mendukung dalam konflik air tersebut.

Pada November 2017, Mesir mengambil pendekatan untuk mencari dukungan, yaitu lobi Afrika. Tindakan pembangunan GERD direspon oleh Presiden Dewan Air Arab Mahmoud Abu Zeid sebagai tindakan yang menetang norma internasional hukum laut karena tidak berkonsultasi dengan negara tetangga (“Egypt Creating lobby Group Againts Ethiopia Dam”, <https://www.middleeastmonitor.com/20171129-egypt-creating-african-lobby-group-against-ethiopia-dam/>). Penggunaan Sungai Nil sebagai sumber daya alam yang melewati satu negara dengan negara lain, mengharuskan konsultasi untuk pembangunan proyek.

Dalam mencari dukungan negara-negara Arab, Mesir mengusulkan internasionalisasi serta membangun koalisi. Kesempatan ini digunakan Mesir selama Forum Air Arab pada 26-28 Novermber 2017 di Kairo. Forum Air Arab dilaksanakan dibawah naungan Liga Arab dan koordinasi Menteri Sumber Air dan Irigasi Mesir. Mesir mulai mengumpulkan dukungan negara hilir yang terkena dampak dari pembangunan GERD. Pendekatan yang dilakukan Mesir condong ke arah Arab Saudi.

Pada 26 November 2017, Sekretaris Umum Liga Arab, Aboul Geit, mengirimkan peringatan dari liga ke Ethiopia. Peringatan tersebut disampaikan melalui Forum Air Arab keempat. Aboul Geit menyatakan keamanan air Mesir, merupakan keamanan nasional Arab (“Egypt Started Political Steps to Face Renaissance dam”, <https://www.middleeastobserver.org/2017/12/09/egypt-started-political-steps-to-face-ethiopias-renaissance-dam/>). Seperti yang diketahui Mesir merupakan negara Arab dengan populasi yang besar. Internasionalisasi isu direspon baik oleh pejabat Arab. Pejabat Arab dan Mesir secara resmi berbicara tentang internasionalisasi isu GERD. Mesir dan Saudi memiki tanggapan yang sama mengenai isu terorisme air. Pangeran Saudi, Halid Bin Sultan, sekaligus Presiden Kehormatan Dewan Air berpendapat terorisme air sama berbahaya dengan terorisme yang lainya, sehingga harus mengambi langkah untuk melawannya.

Liga Arab tersirat berada diposisi sepihak dengan Mesir. Respon keprihatinan disampaikan kepada Mesir. Ketertarikan Liga Arab dengan isu air dengan Ethiopia diiringi dengan mengikuti informasi perkembangan negosiasi trilateral antara ketiga negara. Liga Arab Melihat Ethiopia tidak kooperatif dalam penyelesaian kasus dan renacana mengenai penggunaan air di Sungai Nil sangat mengkhawatirkan.

Dalam mencari dukungan Negara Arab, Mesir melakukan mobilisasi dengan gencar. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Mesir melalui pendekatan. Pertama, pada 14 November 2017, Mesir menyampaikan bahwa Kerajaan Arab memahami isu keamanan air Mesir. Dilanjutkan pada 15 November 2017, Mesir telah mengambil langkah langkah untuk mengamankan air yang sebagai pilar keamanan nasionalnya (*ibid*). Arab Saudi merupakan negara yang memegang investasi yang besar di Ethiopia. Hubungan yang kuat antara Mesir dan Arab terjalin dengan baik. Diplomasi Mesir ke Arab bisa digunakan untuk penekanan sektor ekonomi melalui Arab Saudi dan UEA.

1. Diplomasi Bilateral Mesir ke *World Bank*

Ethiopia sedang menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita hanya sebesar 471 USD pada saat membangun GERD (Sartika Tenderung, 2015:650). Dana yang dibutuhkan untuk pembiyayaan konstruksi mencapai 4,8 Miliar USD. Dana yang dikumpulkan dari internal seperti rencana Pemerintah tidak akan memenuhi pembiyayaan keseluruhan. Ethiopia membutuhkan donor internasional untuk menunjang keberlangsungan pembangunan.

Ethiopia membangun komite khusus untuk pendanaan publik. *Ethiopia National Council for the Coordination of Public Participation on the Construction* of GERD (NCCPPCGERD) adalah lembaga khusus untuk pengumpulan dana konstruksi. Perusahaan *Ethiopian Electric Power Corporation* (EEPCO), perusahaan milik pemerintah Ethiopia memiliki peran penting dalam pengumpulan pajak listrik yang akan digunakan untuk donor GERD. EEPCO merupakan perusahaan yang bertugas di bidang transmisi listrik dan ekspor ke negara tetangga. Pemulihan hubungan baik dengan Mesir akan membuka jalan bagi Ethiopia ke donor internasional.

*World Bank* adalah satu potensi donor Internasional bagi GERD. Salah satu project dari NBI berafiliasi dengan *World Bank*. *World Bank* dipercaya oleh Mesir mampu menjadi sebuah pihak yang netral dan menentukan diantara konflik air yang terjadi di Sungai Nil. Inisiatif Mesir meminta bantuan Mesir dalam arbitrasi permasalahan bendungan dengan Ethiopia dikarenakan negosiasi telah mengalami kebuntuan selama 10 bulan. Kebuntuan yang terjadi dikarenakan pembicaraan mengenai studi mengenai dampak lingkungan.

Pada kunjungan oleh Menteri Luar Negeri Mesir Same Shoukry pada kedatanganya di Addis Ababa menyampaikan gagasannya mengenai solusi untuk kebuntuan negosiasi. Tepatnya 26 Desember 2017 Mesir mengajukan *World Bank* agar terlibat dalam negosiasi sebagai pihak yang netral (“Egypt Taps World Bank to Mediate Ethiopian Dam Dispute”,<http://onlineethiopia.net/2018/01/egypt-taps-world-bank-mediate-ethiopian-dam-dispute/>,). Keterlibatan *World* *Bank* dalam TNC akan menciptakan ruang audiensi yang luas. Hal ini juga memungkinkan untuk mengintervensi Ethiopia.

Pada Desember 2017 *World Bank* telah menyampaikan persetujuan awal untuk berpartisipasi di dalam TNC. Proposal yang diajukan oleh Mesir disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Mesir. Dalam permintaanya untuk keterlibatan didalam TNC dalam membahas GERD Mesir mengajukan *World Bank* sebagai pihak mediator teknik. Posisi yang diajukan oleh Mesir kepada *World Bank* memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat sepihak mengenai konstruksi bendungan (“Ethiopia Won’t Accept World Bank Arbitration on GERD: Prime Minister”,<http://www.egyptindependent.com/ethiopia-wont-accept-world-bank-arbitration-on-gerd-prime-minister/>).

Permintaan yang diajukan oleh Mesir kepada Ethiopia mengenai *World Bank* yang akan terlibat dalam negosiasi ditolak oleh Ethiopia. Pada Januari 2018 melalui Perdana Menteri Hailemariam Desalegn. Perdana Menteri Ethiopia menyampaikan bahwa penolakan tersebut berdasarkan upaya ketiga negara yang akan menyelesaikan permasalahan air dengan pihak inti yang terlibat. Penolakan tersebut disampaikan setelah kunjungan perdana Menteri Ethiopia setelah berkunjung dan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi (“Ethiopia Refuses World Bank Arbitration Over Nile River dam”, <http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/ethiopia-refuses-world-bank-arbitration-nile-river-dam-article-1.3769608>).

Di sisi lain, Ethiopia melihat langkah Mesir untuk menggandeng *World Bank* sebagai pihak netral yang terlibat mempunyai kepentingan terselubung. Ethiopia melihat posisi Mesir sedang mecari dukungan professional. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh Ethiopia. penolakan Ethiopia atas inisiasi Mesir dapat disimpulkan sebagai satu langkah kegagalan Mesir.

**Penutup**

Mesir mengambil langkah-langkah diplomasi multilateral untuk melindungi kuota air Mesir berdasarkan perjanjian pada tahun 1959. Hal pertama yang dilakukan mesir berupa ancaman-ancaman pengeboman dan merusak fasilitas bendungan. Ancaman tersebut tidak berhasil untuk menakut-nakuti Ethiopia. Ethiopia tetap melanjutkan pembangunan bendungan.

Langkah berikutnya yaitu, negosiasi kepada pihak Ethiopia untuk membentuk panel ahli mengkaji ulang bendungan. Permintaan tersebut direspon dengan baik dengan dibentuknya *International Panel of Expert.* Selama berlangsung panel, Mesir mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya serta kekhawatiran akan dampak GERD. IPoE akhirnya menemukan titik terang studi lanjutan tentang dampak bagi negara hilir sungai. Studi tersebut tertunda cukup lama dikarenakan kebuntuan selama negosiasi.

Mewadahi implementasi rekomendasi IPoE, ketiga negara membentuk *Tripartite National Technical Committee* . Selama berlangsung TNC Mesir juga mengajukan proposal-proposal yang bisa mendukung kepentingan tersebut seperti mendesain ulang bendungan, pengajuan pihak netral dan lainya. Namun Mesir kembali gagal dalam pencapaian tersebut. Ethiopia menolak proposal yang diajukan oleh Mesir. Keberpihakan Sudan pada Ethiopia juga menyudutkan posisi Mesir di TNC.

Mesir mengambil langkah alternatif diplomasi bilateral untuk mendapatkan dukungan internasional . Mesir berdiplomasi ke Italia, mencari dukungan ke Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan pengajuan arbitrasi ke *World Bank*. Diplomasi tersebut menghasilkan satu langkah maju, namun tidak saat berhadapan dengan pihak Ethiopia. diplomasi bilateral tidak memberi pengaruh banyak untuk menghentikan bendungan. Ethiopia secara berani tetap melanjutkan pengisian air bendungan tanpa takut atas pengaruh Mesir. Sekarang GERD sudah mencapai 70 persen selesai. Langkah yang terus diambil oleh Mesir tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Sehingga langkah diplomasi terkesan sia-sia.

**Daftar Pustaka**

Adejumobi, Saheed A, *the History of Ethiopia,* Greenwood Press, London, 2007

Moret, Alexandre*, The Nile and The Egyptian Civilization*, Graham Press, England, 1972.

[Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiVudemjKPZAhXFLY8KHbFOAaUQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Forsam.org.tr%2F&usg=AOvVaw1F6MWAqMlK2aQkbs3Ezzrt), “Egypt, Ethiopia Water Dispute Threatens Nations”, *Orsam Water Bulletin,* 24 Juni 2013.

International Panel of Expert Members, “Final Report”, *International Panel of Expert on Grand Ethiopian Renaissance dam Project*, Addis Ababa, 2013, hal. 1-48.

Aiga Forum, “The significant of Grand Ethiopian renaissance dam”, <http://aigaforum.com/articles/significance-of-the-gerd.pdf>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

Alyoum, Al Masry, “Ethiopia won’t accept World Bank arbitration on GERD: Prime Minister”, [**http://www.egyptindependent.com/ethiopia-wont-accept-world-bank-arbitration-on-gerd-prime-minister/**](http://www.egyptindependent.com/ethiopia-wont-accept-world-bank-arbitration-on-gerd-prime-minister/), diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Ali, Noura, “Egypt Started Political Steps to Face Renaissance Dam”, <https://www.middleeastobserver.org/2017/12/09/egypt-started-political-steps-to-face-ethiopias-renaissance-dam/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

Aman, Ayah, “Egypt seeks to halt Ethiopian dam”, https://www.al monitor.com/pulse/originals/2014/02/egypt-lobby-renaissance-dam-ethiopia.html, diakses pada tanggal 28 Januari 2018.

Egypt Independent, “Egypt Denies Requesting Exclusion of Sudan From Ethiopian Dam Negotiation”, <http://www.egyptindependent.com/egypt-denies-requesting-exclusion-of-sudan-from-ethiopian-dam-negotiations/>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

“Ethiopia Refuses World Bank Arbitration Over Nile River dam”, <http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/ethiopia-refuses-world-bank-arbitration-nile-river-dam-article-1.3769608>

Egypt Today, “Tripartite Summit On Ethiopian Dam to be held in January”, <https://www.egypttoday.com/Article/2/40793/Tripartite-summit-on-Ethiopian-Dam-to-be-held-in-January>, diakses pada tanggal 9 April 2018.

“Ethiopia Reject Egypt’s Proposal to Redesign Dam”, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article57682>

ESI Africa, “Regional Cooperation Catalyst for Hydropower Development in East Africa”, <https://www.esi-africa.com/regional-cooperation-catalyst-hydropower-development-east-africa-2/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

Ethiopian News, “Egypt Requests Great Millenium Dam Studies From Ethiopia”, <http://www.ethiopian-news.com/egypt-requests-great-millennium-dam-studies-from-ethiopia/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

Global Africa News, “Egypt Calls on World Bank to Settle Ethiopia Dam Impasse”, <http://www.globalafricanews.online/2017/12/26/egypt-call-on-world-bank-to-settle-ethiopia-dam-impasse/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Gebremedhin, Keffyalew “Ethiopia, Egypt & the Nile Question: The Chaos Politics & Religion are Creating”, <http://www.zehabesha.com/ethiopia-egypt-the-nile-question-the-chaos-politics-religion-are-creating/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

History, “Ancient of Egypt”, <http://www.history.com/topics/ancient-history/ancient-egypt>, diakses pada tanggal 2 maret 2018.

Horn Affairs, “Briefing : 1st Meeting of Tripartite National Committee on Renaissance Dam”, <https://hornaffairs.com/2014/09/29/briefing-1st-meeting-of-tripartite-national-committee-on-renaissance-dam/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

Horn Affairs, “Interview: Ethiopian Official, Egypt Would Do Anything to Stop Us , <https://hornaffairs.com/2014/02/06/ethiopian-official-egypt-would-do-anything-to-stop-us/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

International Rivers, “Grand Ethiopian Renaissance Dam fact Sheet”, <https://www.internationalrivers.org/resources/the-grand-ethiopian-renaissance-dam-fact-sheet-8213>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

Knobelsdorf , Valerie, “The Nile Waters Agreements: Imposition and Impacts of a Transboundary Legal System”, <http://www.jurisafrica.org/docs/international/Nile-River-Agreement-by-Valerie-Knobelsdorf.pdf>, diakses pada tanggal 26 September 2017.

Mada, “Egypt Latest Consession to Ethiopia Amid Construction of Controversial Dam”, <https://www.madamasr.com/en/2016/07/14/feature/politics/egypts-latest-concession-to-ethiopia-amid-construction-of-controversial-dam/>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

Middle East Monitor, “Egypt Asks UAE to Help Solve Ethiopia’s Renaissance Dam Crisis”, <https://www.middleeastmonitor.com/20151210-egypt-asks-uae-to-help-solve-ethiopias-renaissance-dam-crisis/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

Middle East Monitor, “Egypt Creating Lobby Group Againts Ethiopia Dam”, <https://www.middleeastmonitor.com/20171129-egypt-creating-african-lobby-group-against-ethiopia-dam/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

Nile Basin Initiative, “Cooperation Framework Agreement”, http://www.nilebasin.org/index.php/nbi/cooperative-framework-agreement, diakses pada tanggal 28 September 2017.

Stratfor, “Ethiopia’s Contested Dam Project on the Nile River”, <https://worldview.stratfor.com/article/ethiopias-contested-dam-project-nile-river>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

Online Ethiopia, “Egypt Taps World Bank to Mediate Ethiopian Dam Dispute ”, <http://onlineethiopia.net/2018/01/egypt-taps-world-bank-mediate-ethiopian-dam-dispute/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Upi, “Egypt Plans Dam-Busting Diplomatic Offensive Against Ethiopia”, <https://www.upi.com/Egypt-plans-dam-busting-diplomatic-offensive-against-Ethiopia/13631393533111/>, diakses pada tanggal 23 maret 2018.

1. Makalah ini pernah dipresentasikan pada webinar “Menyoal Konflik Palestina Israel dalam Historis dan Cyber Propaganda” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) UPN Veteran Yogyakarta oada 26 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pernah didiskusikan dalam Seminar Nasional Laboratorium Diplomasi JUrusan HI FISIP UPN ‘Veteran” Yogyakarta pada 15 November 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pernah dipresentasikan dalam diskusi Himpunan Mahasiswa HI pada 20 April Tahun 2003. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pernah dipresentasikan pada Seminar Nasional Lab Diplomasi UPN Veteran Yogyakarta dengan Tema “Resolusi Konflik di Yaman” pada tanggal 10 April 2019 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pernah dipresentasikan dalam Webinar KSM Lab Diplomasi dengan Tema “Dinamika Konflik dan Diplomasi di Lebanon” pada 16 September 2020 [↑](#footnote-ref-5)